



Republik Indonesia

RANCANGAN AKHIR

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Gempa 28 Maret 2005 Tahun 2007-2009



Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Mei 2007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR BAGAN	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
I.1. Latar Belakang.....	I - 1
I.2. Maksud Dan Tujuan	I - 4
I.3. Rasionalisasi Rencana Aksi	I - 6
I.4. Kerangka Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi.....	I - 7
I.5. Metode Pelaksanaan.....	I - 8
I.6. Sistematika Penyusunan Rencana Aksi	I - 9
BAB II KONDISI UMUM DAERAH BENCANA	II - 1
II.1. Kawasan Yang Terkena Bencana.....	II - 1
II.1.1. Infrastruktur	II - 6
II.1.2. Perumahan dan Permukiman	II - 12
II.1.3. Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan.....	II - 13
II.1.4. Perekonomian.....	II - 17
II.2. Perkembangan Pelaksanaan Upaya Penanganan Pasca Bencana Tahun 2005-2006	II - 21
II.2.1. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).....	II - 24
II.2.2. Pemerintah Daerah.....	II - 36
II.2.3. Donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)	II - 42
II.3. Identifikasi Isu Dan Permasalahan Dalam Proses Pelaksanaan	II - 47
BAB III PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN	III - 1
III.1. Metodologi Penilaian Kerusakan Dan Kerugian.....	III - 1
III.2. Perkiraan Dan Kerusakan Akibat Gempa	III - 2
III.2.1 Sektor Perumahan	III - 2

III.2.2	Sektor Infrastruktur.....	III - 3
III.2.3	Sektor Sosial	III - 4
III.2.4	Sektor Ekonomi	III - 7
III.2.5	Lintas Sektor	III - 8
III.3.	Dampak Kerusakan	III - 9
III.3.1.	Dampak Terhadap Perekonomian	III - 9
III.3.2.	Dampak Terhadap Ketenagakerjaan.....	III - 12
III.3.3.	Dampak Terhadap Lingkungan Hidup	III - 14

BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI

	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	IV - 1
IV.1.	Prinsip-Prinsip Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.....	IV - 1
IV.2.	Kebijakan Umum.....	IV - 3
IV.3.	Strategi Dan Kebijakan Sektoral	IV - 4
IV.3.1.	Pilar Kedua: Infrastruktur yang Efektif	IV - 8
IV.3.2.	Pilar Pertama: Perumahan dan Permukiman.....	IV - 8
IV.3.3.	Pilar Keempat: Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Kokoh	IV - 9
IV.3.4.	Pilar Ketiga: Ekonomi yang Bersaing.....	IV - 13
IV.4.	Penataan Ruang Kepulauan Nias.....	IV - 17
IV.4.1.	Rekomendasi Penataan Ruang Kepulauan Nias berdasarkan Perpres Nomor 30 Tahun 2005	IV - 18
IV.4.2.	Identifikasi Potensi Bencana berdasar Rencana Tata Ruang Kabupaten Nias dan Nias Selatan ...	IV - 22
IV.4.3.	Manajemen Pengurangan Resiko Bencana di Kepulauan Nias.....	IV - 24

BAB V PENDANAAN, KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	V - 1
V.1.	Kebutuhan Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (2007 – 2009)	V - 1
V.2.	Sumber-Sumber Pendanaan	V - 6
V.2.1.	Dana Pemerintah (On-Budget)	V - 7

V.2.2.	Dana Non Pemerintah.....	V - 9
V.3.	Mekanisme Pengelolaan Pendanaan.....	V - 11
V.4.	Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa	V - 16
V.5.	Mekanisme Pelaksana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	V - 18
V.6.	Mekanisme Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.....	V - 18
V.6.1.	Kerangka Pemantauan dan Pengendalian	V - 19
V.6.2.	Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian	V - 20
V.6.3.	Kegiatan Pendukung Pemantauan dan Pengendalian.....	V - 21
V.9	Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.....	V - 25
V.10	Partisipasi Publik Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	V - 26

BAB VI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

	KEPULAUAN NIAS	VI - 1
VI.1.	Rencana <i>Exit Strategy</i> BRR Nad-Nias.....	VI - 1
	VI.1.1. Regionalisasi dan Sekretariat Bersama.....	VI - 2
	VI.1.2. Pentahapan <i>Exit Strategy</i>	VI - 7
VI.2.	Permasalahan Jangka Menengah Kepulauan Nias.....	VI - 13
	VI.2.1. Potensi dan Tantangan.....	VI - 13
	VI.2.2. Permasalahan Strategis	VI - 15
VI.3.	Kebijakan Dan Strategi Prioritas.....	VI - 18
	VI.3.1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kepulauan Nias	VI - 18
	VI.3.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias.....	VI - 20
	VI.3.3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan.....	VI - 23
VI.4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	VI - 24
	VI.4.1. Rencana Pengembangan Wilayah	VI - 24
	VI.4.2. Rencana Pengembangan Potensi Daerah	VI - 32

LAMPIRAN RENCANA RINCI

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Potensi bencana gempa di Kabupaten Nias.....	II - 5
Tabel II. 2	Data Jumlah Penduduk di Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005.....	II - 6
Tabel II. 3	Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten di Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005.....	II - 7
Tabel II. 4	Kondisi Eksisting Jalan Provinsi di Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005.....	II - 7
Tabel II. 5	Kondisi Eksisting Jalan Kabupaten Tahun 2003 dan 2005.....	II - 8
Tabel II. 6	Kondisi Sambungan Telepon Sebelum Bencana Tahun 2003 dan 2005.....	II - 10
Tabel II. 7	Kondisi Air Minum dan Sanitasi Tahun 2003 dan 2005.....	II - 10
Tabel II. 8	Perkembangan Penjualan Energi Listrik (MWH) Tahun 2003 dan 2005.....	II - 11
Tabel II. 9	Data Jumlah Kantor di Kepulauan Nias Tahun 2005.....	II - 13
Tabel II. 10	Jumlah dan Persentase Penduduk yang Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kabupaten dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2005	II - 14
Tabel II. 11	Data Sarana Pendidikan Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005.....	II - 15
Tabel II. 12	Data Sarana Kesehatan Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005.....	II - 15
Tabel II. 13	Data Tenaga Kesehatan/Medis di Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2004	II - 16
Tabel II. 14	Data Sarana Ibadah Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005	II - 16
Tabel II. 15	Data Jumlah Perusahaan/Usaha Perdagangan di Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005	II - 19
Tabel II. 16	Data Muskala Di Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005.....	II - 20

Tabel II. 17	Data Jumlah Hotel dan Restoran di Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005.....	II - 20
Tabel II. 18	Data Jumlah Bangunan Koperasi dan UKM di Kepulauan Nias Tahun 2003 dan 2005.....	II - 21
Tabel II. 19	Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2005 – 2006 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 25 Maret 2005 Kepulauan Nias	II - 24
Tabel II. 20	Realisasi Anggaran BRR di Kepulauan Nias Tahun 2005-2006	II - 25
Tabel II. 21	Realisasi Kegiatan dan Anggaran BRR Sektor Perumahan dan Permukiman Tahun 2005 – 2006	II – 27
Tabel II. 22	Realisasi Kegiatan dan Anggaran BRR Sektor Infrastruktur Tahun 2005 – 2006	II – 29
Tabel II. 23	Realisasi Kegiatan dan Anggaran BRR Sektor Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan Tahun 2005-2006	II – 33
Tabel II. 24	Realisasi Kegiatan dan Anggaran BRR Sektor Ekonomi Tahun 2005-2006	II – 35
Tabel II. 25	Kegiatan Rehabilitasi-Rekonstruksi dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2006	II - 37
Tabel II. 26	Kegiatan Rehabilitasi-Rekonstruksi dalam APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2006	II – 39
Tabel II. 27	Kegiatan Rehabilitasi-Rekonstruksi dalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2006	II - 40
Tabel II. 28	Realisasi Anggaran Donor/NGO Tahun Anggaran 2005-2006	II - 42
Tabel II. 29	Realisasi Kegiatan Donor/NGO Sektor Perumahan dan Permukiman Tahun 2005-2006.....	II - 43
Tabel II. 30	Realisasi Kegiatan dan Anggaran Donor/NGO Sektor Infrastruktur Tahun Anggaran 2005-2006	II - 44
Tabel II. 31	Realisasi Kegiatan Donor/NGO Sektor Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2005-2006	II - 45
Tabel II. 32	Realisasi Kegiatan Donor/NGO Sektor Ekonomi Tahun Anggaran 2005-2006	II - 47

Tabel III. 1	Penilaian pada Sektor Perumahan dan Permukiman	III - 2
Tabel III. 2	Penilaian pada Sektor Infrastruktur	III - 3
Tabel III. 3	Penilaian pada Sub Sektor Sosial.....	III - 5
Tabel III. 4	Penilaian pada Sub Sektor Ekonomi	III - 7
Tabel III. 5	Penilaian pada Lintas Sektor	III - 8
Tabel III. 6	Persentase Kerusakan Dan Kerugian Gempa Kepulauan Nias	III - 9
Tabel III. 7	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nias (Harga Konstan Tahun 2000)	III - 10
Tabel III. 8	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nias Selatan (Harga Konstan Tahun 2000)	III - 11
Tabel III. 9	Estimasi Dampak Kerusakan Terhadap PDRB Kepulauan Nias dan PDB Nasional (Harga Konstan Tahun 2000)	III - 11
Tabel III. 10	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu (Jiwa) Kabupaten Nias Tahun 2005	III - 12
Tabel IV. 1	Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan 4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV - 4
Tabel IV. 2	4 Pilar dan 10 Sasaran Utama Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	IV - 16
Tabel IV. 3	Sistem dan Fungsi Kawasan Perkotaan Pantai Barat Pulau Nias.....	IV - 21
Tabel IV. 4	Rencana Pengembangan Struktur Kawasan Perkotaan di Pantai Barat Pulau Nias	IV - 21
Tabel V. 1	4 Sektor Utama Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias, Sumatera Utara	V - 2
Tabel V. 2	Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun 2007 – 2009	V - 4
Tabel V. 3	Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Sumatera Utara	

	Tahun 2007 – 2009	V - 5
Tabel V. 4	Dana On-Budget berdasarkan Kebutuhan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias tahun 2007-2009	V - 8
Tabel V. 5	Dana Off-Budget berdasarkan Kebutuhan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun 2007	V - 10
Tabel V. 6	Kerangka Pemantauan dan Indikator Evaluasi.....	V - 19
Tabel VI. 1	Konsekuensi Regionalisasi.....	VI - 2
Tabel VI. 2	Kantor Perwakilan BRR	VI - 3
Tabel VI. 3	Pentahapan Kegiatan <i>Exit Strategy</i> BRR.....	VI - 7
Tabel VI. 4	Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Di Kabupaten Nias	VI - 30
Tabel VI. 5	Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Di Kabupaten Nias	VI - 31
Tabel VI. 6	Fungsi Pusat-Pusat Perkembangan Kabupaten Nias Selatan	VI - 32
Tabel VI. 7	Prioritas Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral (Komoditas dan Sentra Unggulan) di Kabupaten Nias.....	VI - 34
Tabel VI. 8	Prioritas Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral (Komoditas dan Sentra Unggulan) di Kabupaten Nias Selatan.....	VI - 35
Tabel VI. 9	Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Nias 2006-2011	VI – 37
Tabel VI.10	Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi - Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias	VI - 40
Tabel VI.11	Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi - Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan	VI - 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Kepulauan Nias	I - 2
Gambar II.1	Kawasan Bencana Kepulauan Nias akibat Tsunami dan Gempa Bumi.....	II - 2
Gambar II.2	Bencana Gempa Kepulauan Nias 28 Maret 2005	II - 3
Gambar II.3	Persentase Realisasi Anggaran BRR Tahun Anggaran 2005-2006	II - 25
Gambar II. 4	Peta Realisasi Pembangunan Rumah BRR di Kepulauan Nias Tahun 2005-2006	II - 28
Gambar II. 5	Peta Realisasi Pembangunan BRR Sub Sektor Transportasi Tahun 2005-2006.....	II - 30
Gambar II. 6	Peta Realisasi Pembangunan BRR Sub Sektor Pelayanan Kesehatan Tahun 2005-2006.....	II - 32
Gambar II. 7	Persentase Realisasi Anggaran Donor/NGO Tahun Anggaran 2005-2006	II - 32
Gambar IV.1	Kerangka Strategik Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dengan pendekatan berbasis kawasan laut dan pulau	IV - 2
Gambar IV.2	Tahapan Pengembangan 4 Pilar dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias (2005-2009)	IV - 6
Gambar IV.3	Grafik Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias Berdasarkan 4 Pilar (2005-2009).....	IV - 7
Gambar IV.4	Wilayah Gempa Indonesia Menurut Percepatan Puncak Batuan Dasar Dengan Perioda Ulang 500 Tahun	IV - 17
Gambar IV.5	Kepulauan Nias Sebagai Daerah Rawan Gempa (Zona 6 Kegempaan)	IV - 18
Gambar IV.6	Sinergitas antara Lingkungan, Pengurangan Resiko Bencana dan Pembangunan.....	IV – 26

Gambar VI.1	Pembagian Wilayah/ Regionalisasi BRR.....	VI - 3
Gambar VI.2	Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama	VI - 4
Gambar VI.3	Struktur Organisasi Sekretariat Bersama.....	VI - 5
Gambar VI.4	Proses Seleksi Kegiatan.....	VI - 7
Gambar VI.5	Proses Transfer Aset BRR.....	VI - 11

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi.....	I - 6
Bagan I.1	Latar Belakang.....	I – 8
Bagan II.1	Tahapan Penanggulangan Dampak Bencana Alam Gempa Bumi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.....	II – 23
Bagan V.1	Dana On-Budget Berdasarkan Kebutuhan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun 2007-2009	V – 9
Bagan V.2	Dana Off-Budget berdasarkan kebutuhan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun 2007	V - 10
Bagan V. 3	Alur Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.....	V - 11
Bagan V.4	Alur Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	V - 12
Bagan V.5	Mekanisme Penyaluran Dana APBD	V - 12
Bagan V.6	Bagan Alir Mekanisme Hibah Luar Negeri.....	V - 13
Bagan V.7	Bagan Alir Mekanisme Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan SKB No. 185/KMK.03/1995	V- 14
Bagan V.8	Kerangka Kerja Logis Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian	V - 20
Bagan V.9	Skema Penyaluran dan Pengembalian Dana BLM.....	V - 22
Bagan V. 10	Diagram Prinsip Pengawasan Pelaksanaan.....	V - 23
Bagan V.11	Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	V - 25



Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi gempa bumi yang berskala sangat kuat dengan kekuatan 8,9 skala Richter dengan pusat gempa di Samudera Hindia di lepas pantai barat laut Pulau Sumatera. Gempa yang kemudian menyebabkan gelombang tsunami ini telah memporakporandakan sebagian besar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan sebagian Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Bencana tersebut telah mengakibatkan luluh lantak berbagai sektor kehidupan baik pada sektor sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya, dan lainnya. Akibatnya 15.000 unit rumah rusak, 12 pelabuhan rakyat rusak, 800 km jalan kabupaten dan desa rusak, 266 km jalan provinsi rusak, 403 jembatan rusak, 1.052 gedung pemerintah rusak, 755 sekolah rusak, 2 unit rumah sakit rusak, 173 puskesmas rusak, para petani dan nelayan kehilangan pekerjaan dan 219 unit pasar juga rusak.

Menyusul kejadian gempa dan tsunami maka sekitar tiga bulan setelah itu terjadi peristiwa di Kepulauan Nias gempa yang luar biasa pada tanggal 28 Maret 2005 dengan berkekuatan 8,7 Skala Richter. Peristiwa gempa ini menimbulkan kerusakan dan kerugian yang luar biasa pada wilayah maupun kehidupan masyarakat Kepulauan Nias. Bencana gempa tersebut menelan jumlah korban jiwa yang meninggal dunia di Kabupaten Nias mencapai angka sekitar 784 jiwa dan 1.496 jiwa mengalami luka-luka (*data Satkorlak, 29 Juli 2005*). Gempa tersebut juga menyebabkan banyaknya pengungsi dengan jumlah sekitar 73,934 jiwa (*data Satkorlak, 29 Juli 2005*). Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan menelan korban meninggal dunia pasca gempa mencapai angka sekitar 182 jiwa dan 3.636 jiwa mengalami luka-luka (*data Satkorlak, 29 Juli 2005*). Akibat peristiwa gempa tersebut juga telah menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup parah di Kepulauan Nias dari segala sektor kehidupan, antara lain: perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya serta lintas sektor lainnya.

Peta di bawah ini merupakan gambaran wilayah secara umum yang menjadi lokasi bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias.

Dari hasil laporan penilaian kerusakan dan kerugian tersebut diketahui nilainya mencapai 41,401 trilyun rupiah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005. Di dalam Perpres itu selanjutnya Bappenas ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Rencana Induk yang sudah dituangkan ke dalam rencana aksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Melalui Keputusan Menteri Negara PPN?Kepala Bappenas No. 338/M.PPN/12/2005 maka dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (P3RIRRWANS).

Pada bulan Juni 2005, pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan khusus yang bernama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dalam rangka melaksanakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan dengan membentuk sebuah kelembagaan yang melaksanakan pemulihan di wilayah bencana pasca bencana melalui program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu dikeluarkan kebijakan Perpu No. 2 Tahun 2005, jo. UU No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Badan ini berkantor pusat di Banda Aceh, dan mempunyai kantor perwakilan yang berkedudukan di Gunung Sitoli dengan masa tugas BRR adalah 4 tahun. Dalam kurun waktu tersebut dilakukan rekonstruksi fisik berbagai kerusakan akan bisa dikerjakan oleh badan ini. Kegiatan rekonstruksi ini diarahkan kepada pembangunan Kepulauan Nias yang berkelanjutan yang didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat karena proses tersebut tidak akan selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Dibutuhkan rencana jangka menengah rekonstruksi di Kepulauan Nias yang melibatkan pemerintah daerah dengan dukungan penuh pemerintah pusat sebagaimana telah ditunjukkan lewat kehadiran BRR di Kepulauan Nias.

Pasca terjadinya peristiwa bencana tersebut, maka dibutuhkan upaya pembangunan kembali Kepulauan Nias yang diarahkan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak. Namun yang lebih mendasar adalah menyiapkan masyarakat dan pemerintah untuk mengawal dan melanjutkan proses rekonstruksi dengan mengambil hikmah dari bencana alam yang terjadi. Masyarakat di Kepulauan Nias harus menyadari bahwa mereka hidup di kawasan rawan gempa bumi sehingga gempa merupakan fenomena alam yang harus diakrabi. Berpikir meninggalkan Kepulauan Nias tidak perlu terjadi jika seluruh komponen masyarakat dan pemerintah membangun kepulauan ini kembali dengan belajar dari pengalaman bencana tsunami dan gempa. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah menuju sebuah institusi yang siap menghadapi bencana alam adalah kunci dari upaya menyeluruh ini.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias yang merupakan daerah bencana pasca gempa 28 Maret 2005, selayaknya diperlukan perencanaan yang matang dan terpadu. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara Bappenas, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dan berbagai stakeholders baik di daerah maupun di pusat.

Sedangkan yang menjadi wilayah perencanaan dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias ini disesuaikan berdasarkan wilayah administratif pemerintahan. Untuk itu wilayah perencanaan ini difokuskan dan

diklasifikasikan kepada Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Pembagian wilayah perencanaan berdasarkan administratif pemerintahan dalam rangka untuk memudahkan dalam melaksanakan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, sejak awal dapat dipersiapkan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan masyarakat dalam menghadapi pada saat berakhirnya masa tugas BRR sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, jo. Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumut.

Terkait dengan kebutuhan pendanaan maka diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan dana yang dilakukan dalam Rencana Aksi berkenaan dengan bencana gempa yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias. Langkah awal yang dilakukan adalah melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh BRR Perwakilan Nias dengan memperhatikan data dan informasi dari Satkorlak, World Bank, IOM, dan Bappeda kabupaten, maka jumlah totalnya yaitu sebesar 6.012 trilyun rupiah. Berdasarkan proyeksi ideal terhadap kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan dana sebesar 10,5 trilyun rupiah. Nilai kebutuhan ini merupakan penilaian yang sudah disesuaikan dengan harga satuan yang berlaku. Kemudian nilai tersebut mencerminkan pada jumlah volume atau unit yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi khusus akibat pasca gempa.

Kebutuhan pendanaan di atas diperuntukkan untuk 4 pilar rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya pemulihan di Kepulauan Nias. Adapun 4 pilar itu yaitu; pertama, perumahan dan permukiman, kedua, infrastruktur yang efektif, ketiga, ekonomi yang bersaing, dan keempat, kelembagaan dan sosial kemasyarakatan yang kokoh. Keempat pilar tersebut merupakan pengelompokan secara umum yang di dalamnya meliputi seluruh aspek kehidupan yang prioritas untuk pemulihan wilayah pasca bencana di Kepulauan Nias.

Melihat kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedemikian besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan BRR (APBN) yang sangat terbatas, maka kebijaksanaannya adalah mendayagunakan semua potensi sumber pendanaan yang tersedia, yang secara garis besar terdiri dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, hibah (*grant*), serta dana yang berasal dari masyarakat. Perkiraan kerusakan dan kerugian dihitung secara menyeluruh, meliputi sarana dan prasarana umum, serta harta benda perseorangan (*private property*). Jumlah kebutuhan pendanaan, belum termasuk kebutuhan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang juga memang diperhitungkan.

I.2 Rasionalisasi Rencana Aksi

Penyusunan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias didasarkan kepada beberapa pertimbangan. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan dan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tidak secara spesifik memberikan kajian maupun strategi penanganan Kepulauan Nias pasca gempa bumi pada 28 Maret 2005. Keadaan ini terjadi karena pada waktu penerbitan Rencana Induk tersebut hanya berselang sekitar dua minggu setelah peristiwa gempa di Kepulauan Nias, sehingga yang diakomodir hanyalah sebagian kecil wilayah Kepulauan Nias yang terkena dampak tsunami. Karenanya, dokumen perencanaan itu belum dapat digunakan sepenuhnya sebagai acuan penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah

Kepulauan Nias. Dalam Rencana Induk hanya menampung sebagian besar akibat bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004.

Tak lama berselang dari peristiwa bencana tsunami terjadi pula peristiwa gempa bumi yang cukup dahsyat di Kepulauan Nias pada tanggal 28 Maret 2005. Akibat bencana telah berdampak yang sangat luas bagi wilayah dan kehidupan masyarakat di Kepulauan Nias. Mengingat spektrum dampaknya yang begitu luas maka dipandang sangat signifikan untuk penyusunan dokumen perencanaan secara khusus. Untuk itu, keberadaan Rencana Aksi ini dapat menjadi arah dan panduan dalam melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Kepulauan Nias.

Sebagaimana ditegaskan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) ke-3 pada tanggal 8 Maret 2007 di Jakarta bahwa Pemerintah telah memberikan perhatian yang khusus, sebagaimana yang tercakup dalam Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 terhadap peristiwa bencana yang terjadi Kepulauan Nias. Namun, dapat dipahami bahwa Rencana Induk belum sepenuhnya mencakup kebutuhan aktual bagi pemulihan Kepulauan Nias. Untuk itu, pemerintah menyambut baik berbagai aspirasi dari masyarakat dan pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk memformulasi sebuah rencana aksi untuk pemulihan Kepulauan Nias. Untuk keperluan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menindaklanjutinya dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias pasca gempa 28 Maret 2005. Rencana aksi yang dikhususkan untuk pemulihan Kepulauan Nias tersebut disusun melalui proses perencanaan yang partisipatif.

Dukungan mengenai perlunya penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias juga berasal dari arahan dan hasil pertemuan dalam Rapat Dewan Pengarah BRR NAD-Nias, Rapat Tripartiet BRR, Rapat Forum Bersama BRR dan berbagai rapat lainnya. Selain itu, harapan perlunya pembuatan rencana aksi Kepulauan Nias ini juga berasal dari aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat Kepulauan Nias baik di pusat maupun daerah.

Untuk mengakomodasi masukan, saran, arahan dan aspirasi yang berkembang maka dipandang signifikan untuk menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Kepulauan Nias. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam rencana aksi ini meliputi berbagai sektor kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, budaya, agama, demografi, kelembagaan dan kewilayahan.

Penyusunan rencana aksi Kepulauan Nias ini juga dilaksanakan melalui analisis yang holistik, komprehensif, dan terpadu. Rencana aksi ini pun memperhatikan karakteristik, adat-istiadat, kultur, dan ciri khas kedaerahan Kepulauan Nias. Rencana aksi ini juga memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Nias, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah kabupaten Nias Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan serta Action Plan BRR Nias, 2007-2008.

Sedangkan masa waktu proses penyusunan Rencana Aksi ini dilaksanakan dalam jangka waktu sekitar bulan sejak akhir Maret hingga akhir Mei 2007. Masa waktu penyusunan itu yang cukup singkat tersebut ditempuh untuk memberikan panduan umum bagi berbagai stakeholders di pusat maupun di daerah dalam rangka mengawal proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Kepulauan Nias Sumatera Utara.

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias ini dihasilkan melalui sebuah proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappenas, BRR, Pemda Sumut, Pemda Kabupaten Nias, Pemda Kabupaten Nias Selatan, Peran Bappenas dalam proses penyusunan rencana aksi ini sebagai sebagai koordinator, fasilitator, dan penyusun. Sementara itu, peran BRR, Pemda Provinsi Sumut, Pemda Kabupaten Nias dan Pemda Kabupaten Nias Selatan sebagai sumber data dan informasi, dan fasilitator. Selanjutnya, dari hasil rencana aksi ini akan dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Alur proses dan mekanisme penyusunan rencana aksi ini dapat dilihat pada Bagan I.1 berikut ini.

Bagan I. 1
Alur Proses Penyusunan Rencana Aksi



Sumber : diolah kembali oleh Tim P3B Bappenas, 2007

I.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama dari rekonstruksi Kepulauan Nias adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengambil hikmah dari dua bencana alam besar yang melanda wilayah ini pada Desember 2004 dan Maret 2005. Pembangunan Kepulauan Nias berkelanjutan adalah pembangunan diberbagai bidang yang digerakkan oleh masyarakat dan pemerintah menuju Kepulauan Nias yang maju, aman, damai dan sejahtera, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

Adapun sasaran dari Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias adalah:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, LSM, lembaga donor serta masyarakat internasional dalam membangun kembali Kepulauan Nias ke depan;
2. Menyusun rencana tindak Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca gempa dan tsunami yang

- langsung dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam bentuk *action plan*;
3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat (*stakeholder*) dalam menetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya;
 4. Melakukan sosialisasi, diseminasi dan penyebaran data serta informasi kepada masyarakat lokal, nasional dan internasional tentang bencana alam, dampak bencana, penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian kebutuhan, serta sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap ancaman bencana;
 5. Menggalang solidaritas, partisipasi, dan keterlibatan berbagai pihak masyarakat (*civil society*) dalam rencana dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias melalui dialog dan konsultasi publik;
 6. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD, masyarakat dan dunia internasional secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip *good governance*.
 7. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana di Kepulauan Nias sehingga dapat dikembangkan potensi-potensi wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat..
 8. Mengawal proses keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka percepatan pemulihan di wilayah bencana Kepulauan Nias

I.4 Kerangka Waktu dan Pelaksana Rencana Aksi

Pelaksanaan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ini mencakup kurun waktu sejak tahun 2007 hingga tahun 2011. Dalam jangka waktu tersebut dibagi ke dalam dua tahapan waktu, yaitu sejak tahun 2007 hingga 2009 merupakan masa tugas dan tanggung jawab BRR dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan sejak tahun 2009 hingga seterusnya (perhitungan hingga 2011 merupakan perhitungan jangka menengah dalam perencanaan pembangunan daerah), maka tugas dan tanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten.

Keberadaan rencana aksi ini pun merupakan penyempurnaan terhadap produk perencanaan dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias yang didasarkan kepada Perpres No. 30 Tahun 2005. Pada rencana induk telah memberikan kerangka besar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias yang disebabkan oleh bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2005. Sedangkan rencana aksi ini memberikan landasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diakibatkan oleh peristiwa gempa yang terjadi pada 28 Maret 2005.

Selain itu, rencana aksi ini pun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memberikan arahan dalam rangka kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana. Dengan demikian proses pemulihan di daerah Kepulauan Nias menjadi tugas dan tanggung jawab bagi semua stakeholders, khususnya kepada Pemerintah Daerah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Selain itu bahwa Pemerintah Daerah penanggung jawab utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

I.5 Metode Pelaksanaan

Sebagai koordinator dalam penyusunan rencana aksi, Bappenas memperoleh masukan-masukan dari BRR, Pemda Provinsi Sumatera Utara, Pemda Kabupaten Nias, Pemda Kabuapten Nias, dan berbagai stakeholders di pusat dan daerah. Selanjutnya, Bappenas bersama-sama dengan BRR Perwakilan Nias, Sekretariat Dewan Pengarah BRR NAD-Nias, Bappeda Provinsi Sumut, Bappeda Kabupaten Nias, dan Bappeda Kabupaten Nias Selatan melakukan konsultasi, koordinasi dan koordinasi untuk menentukan komponen-komponen kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan lebih lanjut.

Setelah penyusunan komponen rencana aksi ini maka proses selanjutnya adalah melakukan penyusunan Buku Rencana Aksi. Berdasarkan kesepakatan disetujui untuk menyusun dua buah buku rencana aksi yang terdiri dari buku utama dan buku lampiran rencana aksi rinci untuk Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Buku utama rencana aksi berisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan yang mencakup antara lain, perkiraan penilaian kerusakan dan kerugian serta dampaknya, kebijakan, prinsip, dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan buku lampiran berisi pedoman penyusunan rencana aksi rinci dan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Bagan I. 2
Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi



Sumber : diolah kembali oleh Tim P3B Bappenas, 2007

I.6 Sistematika Penyusunan Rencana Aksi

Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias secara keseluruhan termuat dalam :

1. **BUKU UTAMA** : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara Pasca Gempa 28 Maret 2005, Tahun 2007-2009
2. **LAMPIRAN RENCANA KEGIATAN RINCI** : Rencana Aksi Rinci Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, Tahun 2007-2009

Secara lebih terperinci dapat digambarkan materi-materi yang terkandung pada masing-masing bab Buku Utama rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias pasca gempa 28 Maret 2005 sebagai berikut;

Bab Pertama (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, makdus dan tujuan, rasionalisasi rencana aksi, kerangka waktu, dan sistematika penyusunan.

Bab Kedua (Kondisi Umum Daerah Bencana Kepulauan Nias): berisi mengenai kawasan yang terkena bencana, perkembangan pelaksanaan upaya penanganan pasca bencana (2005-2006). Data dan informasi perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diperoleh dari instansi BRR, K/L, Pemda dan Donor/NGO. Selanjutnya akan diurai tentang identifikasi isu dan permasalahan dalam proses pelaksanaan.

Bab Ketiga (Perkiraan Kerusakan dan Kerugian serta Dampak Bencana): memberikan gambaran metodologi yang dipergunakan dalam kegiatan ini, melakukan perkiraan kerusakan dan kerugian beserta dampak bencana. Setelah itu diuraikan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bab Keempat (Prinsip, Kebijakan Umum, dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi): memberikan penjelasan visi dan misi serta prinsip-prinsip dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang strategi dan kebijakan per sektor yang didasarkan ke dalam 4 sektor; perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi, serta kelembagaan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya diakhiri dengan pembahasan mengenai penataan ruang kepulauan Nias.

Bab Kelima (Pendanaan, Koordinasi, dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi): memberikan penjelasan tentang kebutuhan pendanaan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilihat berdasarkan sumber-sumber pendanaan serta mekanisme pengelolaan pendanaan. Kemudian dilanjutkan mengenai sistem pengadaan barang dan jasa. Secara berurut akan dibahas tentang pemantauan dan pengendalian kegiatan dan keuangan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan ditutup dengan pembahasan tentang partisipasi publik dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bab Keenam (Pembangunan Jangka Menengah Kepulauan Nias):, merupakan bagian yang terakhir dalam buku rencana aksi ini. Diawali dengan penjelasan mengenai pencapaian exit strategi BR NAD-Nias, permasalahan jangka menengah Kepulauan Nias, kebijakan dan strategi prioritas dan rencana pembangunan jangka menengah.

Sedangkan Lampiran dari Buku Rencana Aksi ini merupakan penjabaran secara rinci yang terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan di Kepulauan Nias (secara spesifik untuk Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan). Beberapa item yang termuat dalam rencana rinci ini yaitu: kegiatan utama/sub kegiatan, pembiayaan, waktu pelaksanaan volume, nilai, dan pelaksana kegiatan.

Rencana aksi ini disusun melalui berbagai forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya diperlukan pelibatan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang aspiratif dan partisipatif. Selanjutnya secara khusus, buku utama rencana aksi ini juga mengemukakan pelaku pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Buku rencana aksi masing-masing bidang memuat inventarisasi kerusakan dan kerugian; upaya yang telah dan sedang dilakukan pada tahap tanggap darurat; sasaran, arah kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan rencana rinci kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masing-masing bidang yang dijabarkan ke dalam wilayah kabupaten/kota, antarwilayah kabupaten/kota, serta kegiatan rinci lainnya yang berlaku umum dan tidak terkait dengan pemanfaatan kawasan.

PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 RASIONALISASI RENCANA AKSI	4
I.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	6
I.4 KERANGKA WAKTU DAN PELAKSANA RENCANA AKSI	7
I.5 METODE PELAKSANAAN.....	8
I.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA AKSI.....	9



Kondisi Umum Daerah Bencana Kepulauan Nias

II.1. Kawasan yang Terkena Bencana

Kepulauan Nias adalah salah satu wilayah yang masih tertinggal di propinsi Sumatra Utara. Terdiri dari ratusan pulau-pulau dengan pulau Nias sebagai pulau utamanya. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia, Kepulauan Nias tidak termasuk kepulauan terluar dan tidak merupakan titik-titik garis pangkal dalam pengukuran perbatasan kepulauan Indonesia.

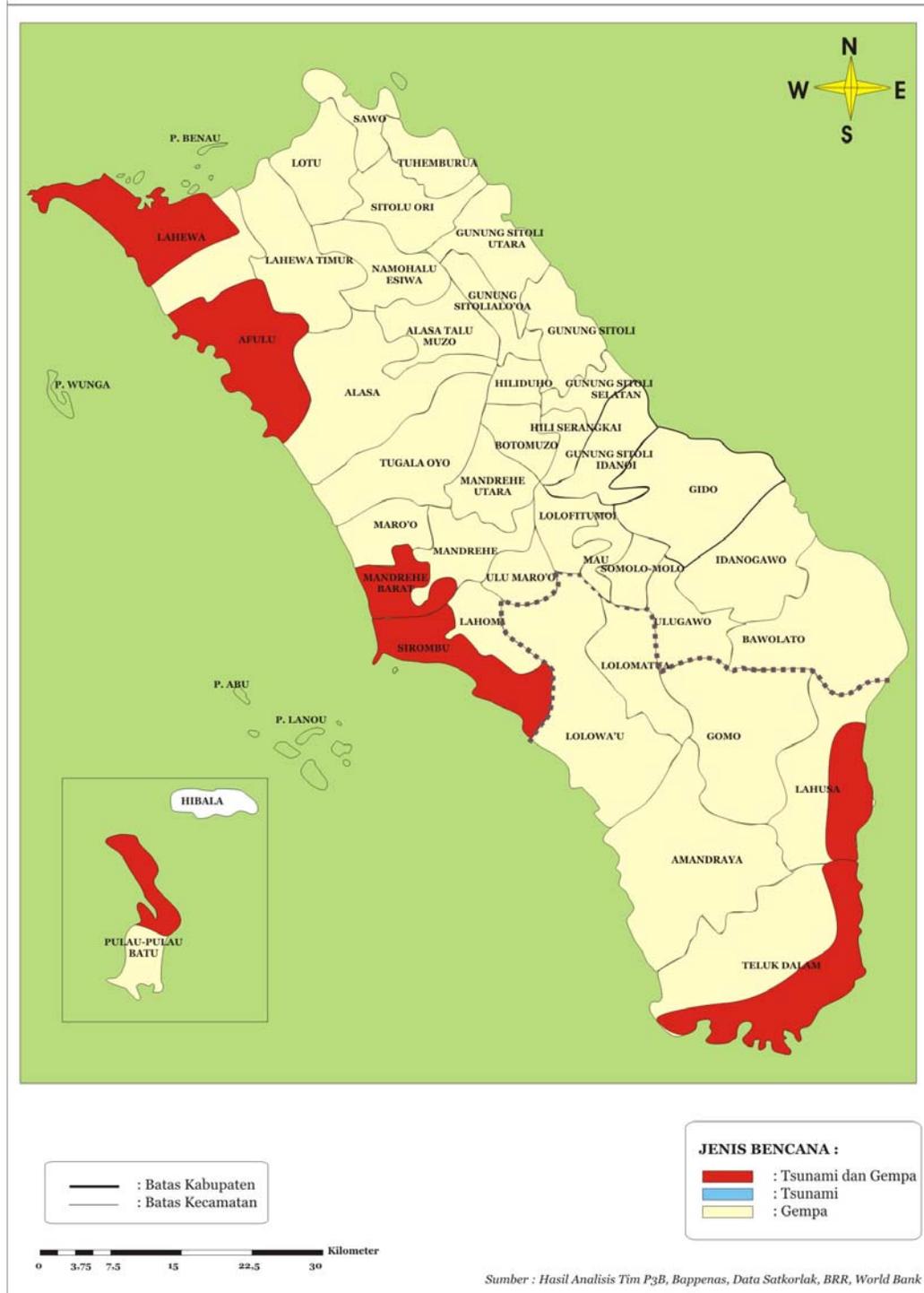
Meskipun demikian, Kepulauan Nias termasuk ke dalam wilayah terpencil dan terisolir, karena terpisah dari Pulau Sumatera tanpa memiliki keunggulan sumber daya alam tertentu, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam bidang-bidang yang terkait erat untuk kemajuan Kepulauan Nias sendiri, yaitu : 1) sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 2) infrastruktur dan perhubungan; 3) pembinaan wilayah; 4) pertahanan dan keamanan; 5) serta ekonomi, sosial, dan budaya.

Kondisi Nias yang memiliki keterbelakangan infrastruktur, akses dan pelayanan dasar, sumber daya manusia serta faktor geografis yang terisolir menyebabkan Nias menghadapi tantangan yang serius dalam kinerja pembangunan ekonominya. Hal tersebut ditambah lagi dengan bencana alam tsunami 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005 dengan kekuatan mencapai 8,7 skala richter (SR) yang membawa dampak hebat pada struktur kehidupan dan ekonomi masyarakat Nias. Kawasan yang terkena bencana tsunami di Kepulauan Nias terjadi di pantai barat dan pantai selatan Pulau Nias, serta sebagian kawasan di Pulau-pulau Batu. Untuk bencana gempa bumi menyebar merata hampir di seluruh wilayah Kepulauan Nias, kecuali kecamatan Hibala yang memiliki tingkat kerusakan yang relatif sedikit. Lokasi yang terkena bencana dapat dilihat pada gambar II.1 dan II.2.

Selain telah menyebabkan kerusakan fisik, juga menyebabkan korban jiwa dan pengungsi yang mencapai sekitar 966 jiwa. Jumlah korban jiwa yang meninggal dunia mencapai angka sekitar 784 jiwa dan 1.496 jiwa mengalami luka-luka (*data Satkorlak, 29 Juli 2005*). Gempa tersebut juga menyebabkan banyaknya pengungsi dengan jumlah sekitar 73,934 jiwa (*data Satkorlak, 29 Juli 2005*). Jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Nias mencapai 433.350 jiwa yang tersebar di 32 kecamatan dan 1 kecamatan persiapan. Dampak paling besar terjadi pada Kecamatan Gunung Sitoli, sedangkan wilayah yang relatif sedikit terkena dampak gempa antara lain Kecamatan Lotu dan Kecamatan Namohalu Esiwa.

Korban meninggal dunia mencapai angka sekitar 182 jiwa dan 3.636 jiwa mengalami luka-luka (*data Satkorlak, 29 Juli 2005*). Korban jiwa lebih banyak terjadi pada Kecamatan Teluk Dalam, Gomo, Lolowau dan Lolomatua. Sedangkan di kecamatan Hibala menyebabkan korban luka ataupun meninggal dunia. Karakteristik demografis Kepulauan Nias pada awal sebelum gempa dan satu tahun setelah gempa berdasarkan pembagian wilayah administrasi dapat dilihat pada tabel II.2.

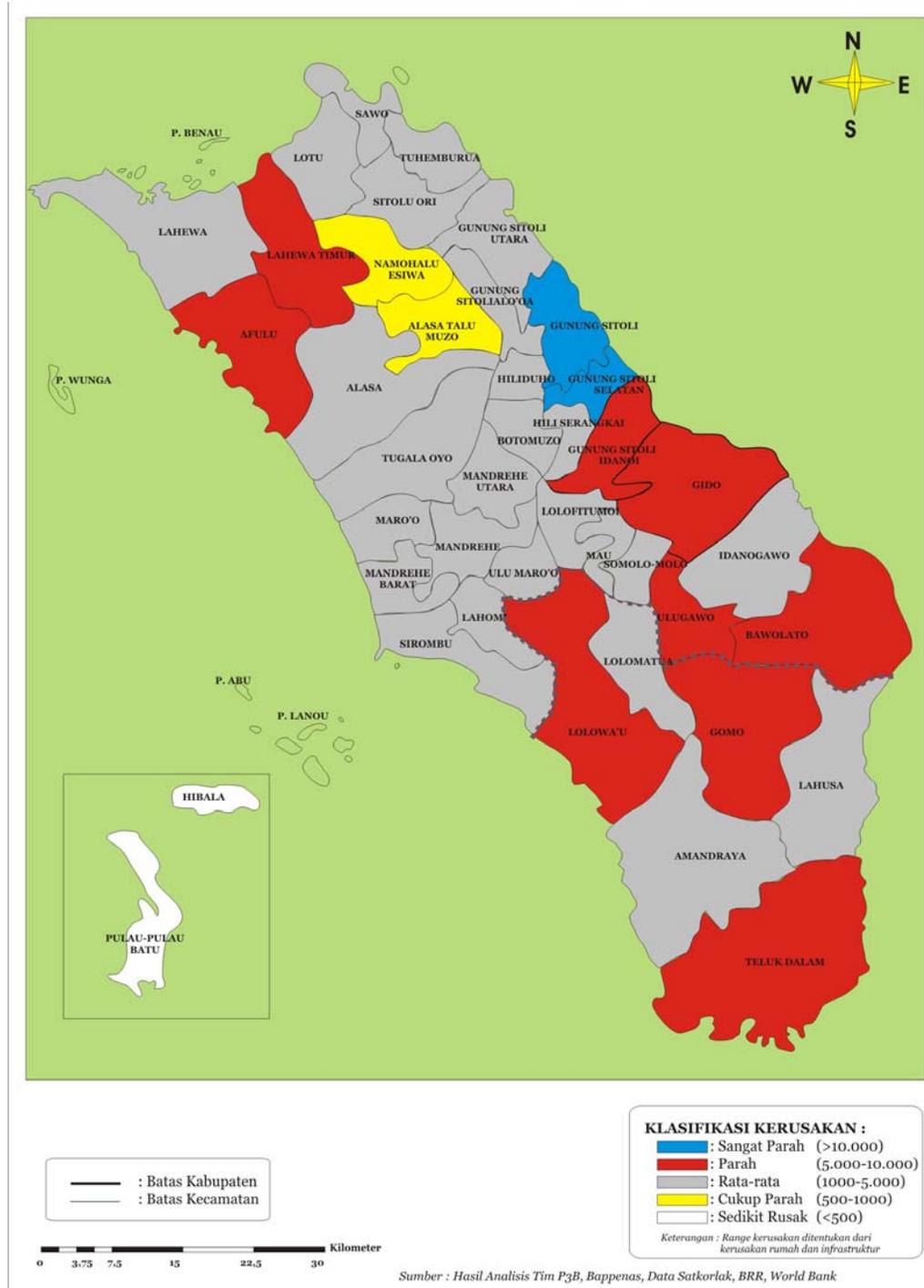
Gambar II. 1
Kawasan Bencana Kepulauan Nias akibat Tsunami dan Gempa Bumi



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Bappenas, Data Satkorlak, BRR, World Bank

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Data Satkorlak (29 Juli 2005), Data BRR (29 November 2005), Data Bappeda Kabupaten Nias (Maret 2007) dan Nias Selatan (April 2007)

Gambar II. 2
Bencana Gempa Kepulauan Nias 28 Maret 2005



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B, Data Satkorlak (29 Juli 2005), Data BRR (29 November 2005), Data Bappeda Kabupaten Nias (Maret 2007) dan Nias Selatan (April 2007)

Wilayah Kabupaten Nias yang terkena bencana gempa bumi secara geografis terletak di sebelah Barat Pulau Sumatera yang jaraknya lebih kurang 85 mil laut dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan letak geografis Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Barat Pulau Sumatera yang jaraknya lebih kurang 92 mil laut dari Kota Sibolga/ Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak kurang lebih 120 km dari Gunung Sitoli.

Secara administratif, di tahun 2006 Kabupaten Nias terdiri dari 32 kecamatan, 4 kelurahan dan 439 desa. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 8 kecamatan (Teluk Dalam, Amandaraya, Lahusa, Gomo, Lolomatua, Lolowa'u, Pulau-pulau batu dan Hibala), 2 kelurahan dan 212 desa. Kabupaten Nias Selatan memiliki 104 gugusan pulau besar dan kecil dengan luas keseluruhan 1825,2 km². Panjang pulau-pulau tersebut ± 60 kilometer dan lebar 40 km. Tidak seluruh pulau berpenghuni, hanya sekitar 21 pulau yang berpenghuni diantaranya empat pulau besar, yaitu Pulau Tanah Bala (seluas 36,97 km²), Pulau Tanah Masa (seluas 21,16 km²), Pulau Tello (seluas 18 km²), dan Pulau Pini (seluas 24,36 km²).

Kepulauan Nias adalah daerah terisolir dan telah lama tertinggal secara sosial ekonomi dan pendidikan. Bahkan sebelum bencana, daerah Kepulauan Nias pada umumnya tidak memiliki infrastruktur fisik yang memadai. Sebagian besar kecamatan tidak dihubungkan oleh jaringan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Demikian juga dengan kapasitas pelabuhan dan bandara untuk menopang mobilisasi barang dan jasa dengan kuantitas besar seperti dalam kegiatan rekonstruksi yang kini tengah berlangsung.

Untuk mencapai Kepulauan Nias sebagai kawasan bencana dapat dilakukan melalui jalur laut dan udara. Aksesibilitas dari jalur laut dapat dilakukan melewati pelabuhan Gunung Sitoli, sedangkan dari jalur udara melewati Bandara Binaka (*reguler*) serta Bandara Lasondre, Pulau Tello.

Keadaan topografi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan dimana tingginya di atas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m dari permukaan air laut. Topografi terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 24 persen dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit, 28,8 persen dari berbukit sampai pegunungan 51,2, persen dari keseluruhan luas daratan. Dengan demikian, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan akan sulit membuat jalan-jalan lurus dan lebar.

Pola tata guna lahan. Pada umumnya populasi penduduk Kepulauan Nias terkonsentrasi di pusat-pusat pemerintahan, yaitu Kecamatan Gunung Sitoli dan Teluk Dalam. Kepadatan penduduk yang rendah terjadi pada daerah-daerah pertanian di sekitarnya wilayah pantai sebelah barat dan sebagian pantai bagian utara. Di sepanjang pantai dan dataran rendah banyak ditumbuhi tanaman kelapa dan tanaman pangan, dan pada bukit bergelombang serta berbukit-bukit ditumbuhi oleh kayu-kayu dan tanaman budidaya rakyat terutama karet, coklat, cengkeh dan tanaman hortikultura. Sebelum bencana gempa, kedua kabupaten belum ditunjang oleh keberadaan RTRW yang menjadi dasar setiap perencanaan pembangunan di Kepulauan Nias.

Kondisi klimatologi, tinggi curah hujan cukup bervariasi, dari 2000 mm/tahun pada daerah pantai sampai 4000 mm/tahun pada area pegunungan. Distribusi curah hujan musiman sangat tergantung pada angin muson. Musim hujan terjadi selama bulan November-Maret sedangkan musim kering terjadi pada bulan April-Oktober.

Secara umum, bencana alam yang sering terjadi di Kepulauan Nias adalah bencana tanah longsor dan banjir. Berdasarkan **kondisi geologi**, lingkungan tektonik kawasan

Kabupaten Nias memiliki potensi gempa (utama) dan tsunami (pantai utara, timur dan barat). Tingkat kerusakan terutama dikontrol oleh jenis/sifat fisik batuan dan karakter bangunan. Dari informasi tersebut, dapat diketahui kawasan di Kabupaten Nias yang merupakan kawasan potensi gempa. Penentuan *grade* kawasan potensi gempa setiap kecamatan didasarkan atas jenis litologi dan jumlah bangunan.

Tabel II. 1
Potensi Bencana Gempa di Kabupaten Nias

No	Kecamatan	Data Bangunan *				Litologi bersifat lepas**		Grade Per Kecamatan
		Jumlah	Kerusakan	%	Grade	%	Grade	
1	Idanogawo	6,109	4,097	67.1	6	78.6	4	Lahewa
2	Bawalato	4,043	1,606	39.7	14	57.1	7	Gunung Sitoli
3	Ulugawo	*	*	*	*	*	*	*
4	Sirombu	3,718	2,899	78.0	3	85.7	3	Sirombu
5	Lahomi	*	*	*	*	*	*	*
6	Mandrehe	7,644	4,748	62.1	9	42.9	9	Idano Gawo
7	Mandrehe Barat	*	*	*	*	*	*	*
8	Moro'o	*	*	*	*	*	*	*
9	Mandrehe Utara	*	*	*	*	*	*	*
10	Ulu Moro'o	*	*	*	*	*	*	*
11	Gido	8,58	5,517	64.3	8	42.9	6	Afulu
12	Gunung Sitoli Idanoi	*	*	*	*	*	*	*
13	Lolofitu Moi	5,954	4,488	75.4	4	14.3	13	Gido
14	Ma'u	*	*	*	*	*	*	*
15	Somolo-molo	*	*	*	*	*	*	*
16	Gunungsitoli	15,002	10,646	71.0	5	92.9	2	Bawalato
17	Gunungsitoli Selatan	*	*	*	*	*	*	*
18	Hiliduho	5,671	2,917	51.4	12	7.1	14	Alasa
19	Hili Serangka	*	*	*	*	*	*	*
20	Motomuzoi	*	*	*	*	*	*	*
21	Gunungsitoli Alo'oa	*	*	*	*	*	*	*
22	Alasa	5,731	2,948	51.4	11	50	8	Mandrehe
23	Namohalu Esiwa	2,553	1,046	41.0	13	21.4	12	Lotu
24	Alasa Talu Muzoi	*	*	*	*	*	*	*
25	Lahewa	5,54	4,555	82.2	2	100	1	Tuhemberua
26	Afulu	1,809	1,809	100	1	71.4	5	Namohalu Esiwa
27	Lahewa Timur	*	*	*	*	*	*	*
28	Tuhemberua	7,369	3,961	53.8	10	28.6	11	Lolofitu Moi
29	Lotu	1,957	1,299	66.4	7	35.7	10	Hiliduho
30	Sitolu Ori	*	*	*	*	*	*	*
31	Gunungsitoli Utara	*	*	*	*	*	*	*
32	Sawo	*	*	*	*	*	*	*

Keterangan : *) Belum tersedia data

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Geological Map of Nias Sheet, Sumatra

Informasi mengenai kawasan potensi gempa bumi Kabupaten Nias Selatan belum tersedia. Hasil penelitian dan Pengembangan Geologi, gempa bumi telah mengakibatkan Nias bergerak horizontal dengan kecepatan 2 –3 cm tiap tahun dan bergerak vertikal atau naik 8 – 10 cm tiap tahun. Kecepatan pergerakan Nias ke Pulau Sumatera adalah sebesar 4 cm per tahun. Selain itu, diketahui juga bahwa kecamatan Gunung Sitoli dan Sirombu merupakan daerah yang paling berpotensi terjadinya bencana longsor maupun gempa.

Penduduk. Data laju pertumbuhan penduduk tahun 2004 untuk Kabupaten Nias Selatan belum diterbitkan oleh BPS. Sedangkan pemekaran 14 kecamatan menjadi 32 kecamatan pada Kabupaten Nias belum dilakukan pada tahun 2004.

Pada tahun 2005, Kabupaten Nias Selatan memiliki jumlah penduduk sebesar 270.243 jiwa, atau sama dengan 65 persen dari jumlah penduduk Pulau Nias (sebesar 422.170 jiwa). Sementara itu, kepadatan penduduk Kabupaten Nias Selatan sebesar 148 jiwa/km², lebih tinggi dari angka kepadatan penduduk Pulau Nias yang sebesar 118 jiwa/km² namun masih lebih rendah dari angka kepadatan provinsi yang sebesar 166 jiwa/km². Angka jumlah dan kepadatan penduduk ini merupakan indikator kependudukan sesudah bencana tsunami dan gempa bumi.

Angka-angka dalam tabel II.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang rendah. Faktor migrasi keluar (*out-migration*) cukup besar dalam mempengaruhi laju dan pola pertumbuhan penduduk Kabupaten Nias Selatan. Adanya bencana gempa menjadi suatu momentum yang mendorong migrasi keluar semakin besar, meskipun disinyalir bahwa sebagian penduduk kembali ke tempat asalnya.

Tabel II. 2
Data Jumlah Penduduk di Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

Kabupaten/Kecamatan	2003			2005			
	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (per km ²)	
I Kabupaten Nias							
1	Idanogawo	33,517	334.38	100	23,278	239.38	97
2	Bawolato	20,421	190.42	107	22,728	190.42	119
3	Ulugawo	*	*	*	10,749	104.80	103
4	Sirombu	17,394	205.87	84	8,784	110.62	79
5	Lahomi	*	*	*	7,836	95.25	82
6	Mandrehe	46,787	269.71	173	17,951	73.51	244
7	Mandrehe Barat	*	*	*	6,908	66.50	104
8	Moro'o	*	*	*	8,727	56.20	155
9	Mandrehe Utara	*	*	*	6,933	43.00	161
10	Ulu Moro'o	*	*	*	5,293	30.50	174
11	Gido	47,285	311.46	152	30,482	157.30	194
12	Gunung Sitoli Idanoi	*	*	*	21,678	177.36	122
13	Lolofitu Moi	32,812	217.57	151	13,226	71.38	185
14	Ma'u	*	*	*	9,889	75.24	131
15	Somolo-molo	*	*	*	5,627	37.95	148
16	Gunungsitoli	76,616	212.31	361	59,409	127.31	467
17	Gunungsitoli Selatan	*	*	*	13,367	66.00	203
18	Hiliduhu	29,529	203.89	145	9,503	55.62	171
19	Hili Serangkai	*	*	*	7,158	43.00	166
20	Motomuzoi	*	*	*	7,494	59.27	126
21	Gunungsitoli Alo'oa	*	*	*	6,173	63.73	97
22	Alasa	28,445	422.60	67	24,451	323.20	76
23	Namohalu Esiwa	13,499	161.90	83	12,530	145.90	86
24	Alasa Talu Muzoi	*	*	*	6,125	99.40	62
25	Lahewa	24,618	410.32	60	21,763	209.07	104
26	Afulu	9,134	146.77	62	9,471	146.77	65
27	Lahewa Timur	*	*	*	9,552	217.25	44
28	Tuhemberua	41,032	291.83	141	9,325	54.70	170
29	Lotu	12,261	116.37	105	10,257	107.37	96
30	Sitolu Ori	*	*	*	10,527	78.46	134
31	Gunungsitoli Utara	*	*	*	15,731	79.70	197
32	Sawo	*	*	*	8,808	89.24	99
Jumlah		433,350	3,495.40	124	441,733	3,495.40	126
II Kabupaten Nias Selatan							
1	Pulau-pulau Batu	17,465	121.05	144	18,671	121.05	154
2	Hibala	9,374	54.25	173	8,771	54.25	162
3	Teluk Dalam	76,750	490.00	157	79,284	490.00	162
4	Amandraya	25,270	183.00	138	36,182	183.00	198
5	Lahusa	29,276	334.00	88	32,204	334.00	96
6	Gomo	50,203	158.60	317	52,686	158.60	332
7	Lolowau	28,603	295.60	97	33,736	295.60	114
8	Lolomatua	34,655	188.60	184	26,699	188.60	142
Jumlah		271,596	1,825.10	149	288,233	1,825.10	158

Keterangan : *) Gabung di kecamatan induk

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006, Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS), Bappeda Kabupaten Nias Selatan (2007)

II.1.1. Infrastruktur

Sebelum bencana, Kepulauan Nias sudah mengalami hambatan pembangunan ekonomi yang tercermin oleh kurangnya penyediaan energi listrik dan air bersih serta infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Terbatasnya kemampuan pembiayaan untuk

membangun dan mengelola sarana dan prasarana publik menyebabkan minimnya kondisi infrastruktur di Kepulauan Nias. Bencana alam di bulan Maret 2005 yang lalu menambah buruk kondisi infrastruktur yang sudah tertinggal di sana, dikarenakan gempa telah merusak jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan sarana pendukung lainnya.

Sub sektor transportasi, terdiri atas transportasi jalan, transportasi laut dan ASDP serta transportasi udara. Untuk transportasi darat, infrastruktur jalan yang ada pada Kepulauan Nias terbagi menjadi jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Jalan provinsi, berada dalam tanggung jawab Pemerintah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara, memiliki panjang total mencapai 558,49 km pada tahun 2005, sedangkan jalan kabupaten dan jalan desa/lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Tingkat II atau Kabupaten mencapai 2.529,07 km.

Tabel II. 3
Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten di Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

No	Kabupaten	Jalan Provinsi (km)			Jalan Kabupaten (km)		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	Kabupaten Nias	410.00	410.00	426.99	1,970.23	1,970.23	2,000.26
2	Kabupaten Nias Selatan	138.00	155.00	131.50	204.00	214.00	528.81

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS)

Tabel II. 4
Kondisi Eksisting Jalan Provinsi di Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

Keadaan Jalan		Kondisi Jalan (km)		
		2003	2004	2005
I Kabupaten Nias				
I JENIS PERMUKAAN				
1	Hotmix	135.70	135.70	161.29
2	Aspal	207.70	207.70	182.20
3	Kerikil	-	-	17.00
4	Tanah	66.60	66.60	66.50
5	Tidak diperinci	0.00	0.00	0.00
II KONDISI JALAN				
1	Baik	130.15	130.15	149.30
2	Sedang	82.50	82.50	-
3	Rusak Ringan	63.70	63.70	135.84
4	Rusak Berat	61.40	61.40	-
5	Rusak Sama Sekali	72.25	72.25	-
Panjang Jalan Provinsi		410.00	410.00	426.99
II Kabupaten Nias Selatan				
I JENIS PERMUKAAN				
1	Hotmix	138.00	144.00	129.50
2	Aspal	-	5.00	2.00
3	Kerikil	-	6.00	-
4	Tanah	-	-	-
5	Tidak diperinci	-	-	-
II KONDISI JALAN				
1	Baik	132.13	133.00	129.50
2	Sedang	-	-	-
3	Rusak Ringan	57.00	58.00	-
4	Rusak Berat	-	-	2.00
5	Rusak Sama Sekali	57.00	58.00	-
Panjang Jalan Provinsi		138.00	155.00	131.50

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS)

Jaringan jalan di Kepulauan Nias tidak mencukupi bagi masyarakat untuk terlibat secara luas dalam kegiatan produksi regional. Hal ini terlihat pada sebagian besar jalan di sana termasuk ke dalam kondisi rusak berat maupun rusak sama sekali.

Beberapa akses daerah di Kabupaten Nias Selatan belum tersedia dan tertata dengan baik. Pada tahun 2004, kondisi jalan eksisting sebelum gempa di sebagian besar Kepulauan Nias hampir 80 persen mengalami rusak berat. Panjang jalan di seluruh Kabupaten Nias pada tahun 2004 mencapai 2.397,23 km yang terbagi atas jalan provinsi 424,3 km dan jalan kabupaten sekitar 1.970,23 km. Hingga pasca gempa tahun 2005, panjang jalan provinsi yang melalui Kabupaten Nias menjadi 2000,26 km. Jalan mengalami rusak ringan bertambah menjadi 135.84 km dari 63.70 km (data tahun 2004).

Struktur jembatan yang ada di jalur jalan provinsi terdiri dari jembatan kayu, beton dan baja. Sebagian besar lebar jembatan hanya digunakan dua jalur kendaraan kecil sehingga mempersulit kendaraan besar melewati jembatan tersebut. Berdasarkan data PODES 2005, kondisi jembatan yang menghubungkan antar wilayah di Kepulauan Nias sebelum bencana adalah 656 km dan menjadi rusak berat 54,42 persen, rusak sedang 30,34 persen dan tidak mengalami kerusakan sebesar 13,57 persen setelah bencana.

Tabel II. 5
Kondisi Eksisting Jalan Kabupaten
Tahun 2003 dan 2005

Keadaan Jalan		Kondisi Jalan (km)		
		2003	2004	2005
I Kabupaten Nias				
I JENIS PERMUKAAN				
1	Aspal	424.47	424.47	424.47
2	Kerikil	266.45	266.45	289.83
3	Tanah	1,279.31	1,279.31	1,285.96
4	Tidak diperinci	-	-	-
II KONDISI JALAN				
1	Baik	218.25	233.50	116.36
2	Sedang	194.45	190.28	100.11
3	Rusak Berat	148.82	145.72	173.27
4	Rusak Ringan	1,408.71	1,400.73	1,610.52
Total		1,970.23	1,970.23	2,000.26
II Kabupaten Nias Selatan				
I JENIS PERMUKAAN				
1	Aspal	138.00	338.44	117.06
2	Kerikil	6.00	21.33	-
3	Tanah	-	67.22	334.25
4	Tidak diperinci	-	-	77.50
II KONDISI JALAN				
1	Baik	120.00	132.13	46.82
2	Sedang	-	99.42	-
3	Rusak Ringan	56.00	57.78	70.23
4	Rusak Berat	28.00	54.98	411.76
Total		204.00	426.99	528.81

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS), Dinas KIMPRASWIL Kabupaten Nias Selatan (2003)

Tingkat kerusakan jalan kabupaten di Kabupaten Nias mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi prasarana jalan kabupaten sebelum bencana 11,85 persen dalam keadaan baik, 9,7 persen rusak ringan, dan 78,5 persen rusak berat dan sedang. Setelah bencana, kondisi tersebut memburuk menjadi hanya sekitar 5,8 persen dalam keadaan baik, sedangkan sisanya sebesar 94,2 persen dalam keadaan rusak.

Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Nias Selatan 528,81 km. Sepanjang 481,99 km mengalami rusak ringan dan rusak berat setelah terkena gempa bumi. Pada tahun sebelumnya, kerusakan jalan yang terjadi hanya berkisar 86 km dari total panjang jalan 214 km. Kenaikan tingkat kerusakan prasarana jalan tersebut digambarkan pada Tabel II.5.

Di Kabupaten Nias telah memiliki terminal bus yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Gunung Sitoli. Angkutan umum yang digunakan berupa becak motor dan mobil bus. Angkutan bus yang beroperasi di Kabupaten Nias sejumlah 165 unit (data BPS 2005). Di beberapa tempat terdapat sejumlah sub terminal dan pangkalan angkutan umum. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan belum terdapat terminal bus atau terminal induk.

Transportasi udara. Sektor perhubungan udara juga menunjukkan jelasnya keterbatasan yang dimiliki Nias. Kabupaten Nias sendiri saat ini hanya memiliki satu lapangan udara yaitu Bandar Udara Binaka yang terletak di Kecamatan Gido. Terdapat tiga perusahaan yang melayani rute penerbangan yaitu PT. Merpati Nusantara, PT. SMAC dan SusiAir. Ketiga perusahaan melayani rute penerbangan Medan – Gunungsitoli dan Gunungsitoli – Pulau-Pulau Batu. Sementara itu, Kabupaten Nias Selatan saat ini baru memiliki satu lapangan udara perintis yaitu Bandar Udara Lasondre yang terletak di Pulau Tanah Masa, kecamatan Pulau-Pulau Batu dimana pesawat yang tersedia rute penerbangannya dilayani oleh perusahaan SMAC.

Akses keluar masuk Kepulauan Nias dengan transportasi udara hanya dapat dilakukan melalui Bandara Binaka. Lalu lintas penerbangan tercatat 592 kunjungan pesawat, tahun 2004. Jumlah penumpang yang datang berjumlah 11.374 penumpang dan yang berangkat berjumlah 12.221 penumpang. Sementara barang yang diangkut tercatat 149.275 kg dan yang dimuat sebesar 108.217 kg. Kondisi *runway* dan beberapa bangunan pendukung pasca gempa mengalami beberapa kerusakan atau retakan yang tidak signifikan. Kondisi ini tidak mengganggu kegiatan operasi penerbangan.

Transportasi laut. Di wilayah Kabupaten Nias terdapat tiga pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Laut Gunungsitoli, Pelabuhan Laut Lahewa, dan Pelabuhan Laut Sirombu. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan terdapat dua pelabuhan laut, yaitu pelabuhan laut Teluk Dalam dan pelabuhan laut Pulau Tello. Pada tahun 2004 jumlah pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Nias ada tiga pelabuhan yang terletak di Kecamatan Gunung Sitoli, Kecamatan Sirombu, dan Kecamatan Lahewa. Dari ketiga pelabuhan tersebut tercatat 1.476 kunjungan kapal pada tahun 2005. Jumlah penumpang melalui pelabuhan laut mengalami penurunan pada tahun 2004 dibanding tahun sebelumnya. Dimana jumlah penumpang pada tahun 2004 tercatat sebanyak 230.361 penumpang lebih sedikit dibanding pada tahun 2003 sebesar 265.656 penumpang. Sebaliknya, untuk jumlah barang yang dibongkar dan dimuat meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 186.851 ton menjadi 189.806 ton pada tahun 2004. Dampak bencana gempa bumi telah menyebabkan ketiga pelabuhan mengalami kerusakan yang signifikan yaitu adanya retakan pada dermaga, *trestle* dan kantor penunjang. Kerusakan struktur paling parah terjadi pada Pelabuhan Gunung Sitoli.

Pos dan telekomunikasi. Pelayanan pos Kepulauan Nias dikelola oleh PT. Pos Indonesia sedangkan untuk sambungan telekomunikasi selain oleh PT. Telkom juga diselenggarakan oleh pihak swasta. Pengiriman surat dari Kabupaten Nias pada tahun 2004 tercatat 81.059 buah, sementara jumlah surat yang masuk pada periode waktu yang sama tercatat 114.422 surat. Sedangkan pengiriman surat dari Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2004 tercatat 6.233 buah dan jumlah surat yang masuk pada periode waktu yang sama tercatat 11.383 buah. Di sub sektor telekomunikasi kebutuhan masyarakat akan jasa telepon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah sambungan telepon pada tahun 2003 sebanyak 2.854 sambungan yang meningkat sebanyak 98 sambungan telepon dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah sambungan telepon di tahun 2004 belum tersedia datanya. Setelah bencana gempa bumi, terjadi penurunan jumlah yang mencapai 1.959 sambungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 895 sambungan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.

Tabel II. 6
Kondisi Sambungan Telepon Sebelum Bencana
Tahun 2003 dan 2005

Tahun	Sambungan Telepon (unit)		
	Induk	Cabang	Jumlah
I. Kabupaten Nias			
2000	2,095	377	2,472
2001	2,236	367	2,603
2002	2,387	369	2,756
2003	2,468	386	2,854
2004	2,468	386	2,854
2005	1,766	193	1,959
Jumlah	13,420	2,078	15,498
II. Kabupaten Nias Selatan			
2000	-	-	-
2001	-	-	-
2002	-	-	-
2003	-	360	360
2004	-	450	450
2005	-	*	*
Jumlah	0	810	810

Keterangan : *) Belum tersedia data

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS)

Air minum. Pengadaan air minum untuk Kabupaten Nias ditangani oleh 2 perusahaan air minum daerah yaitu PDAM Tirta Umbu dan PDAM Tirta Nadi cabang Gunung Sitoli. Pada tahun 2004, air bersih yang disalurkan PDAM Tirta Nadi tercatat sebanyak 1.170.446 meter kubik untuk 3.660 pelanggan senilai kurang lebih 1.170.9 juta rupiah. Sementara yang disalurkan oleh PDAM Tirta Umbu sebanyak 192.830 meter kubik untuk 895 pelanggan senilai 119,6 juta rupiah. Pengadaan air bersih untuk Kabupaten Nias Selatan ditangani oleh PDAM Tirta Nadi cabang Teluk Dalam. Pada tahun 2005, air bersih yang disalurkan oleh PDAM Tirta Nadi tercatat sebanyak 202.061 meter kubik untuk 789 pelanggan senilai kurang lebih 136.799.000 rupiah. Jangkauan kedua PDAM masih sangat terbatas sehingga sebagian besar rumah tangga di pedesaan mengandalkan upaya sendiri melalui pengambilan air bawah tanah dangkal, tadah hujan, atau penggunaan air permukaan dari sungai dan mata air.

Tabel II. 7
Kondisi Air Minum dan Sanitasi
Tahun 2003 dan 2005

Kategori	2003				2005			
	PDAM Tirta Umbu		PDAM Tirta Nadi		PDAM Tirta Umbu		PDAM Tirta Nadi	
	Pelanggan (unit)	Produksi (m ³)						
I Kabupaten Nias								
1 Rumah Tempat Tinggal	827	176,277	3,437	931,413	827	44,070	2,749	505,065
2 Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah	6	1,369	49	76,792	13	1,055	79	33,138
3 Perusahaan/Pertokoan, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara dan Sungai, Hotel/Objek Wisata	7	1,421	224	75,563	47	2,657	205	43,706
4 Instansi Pemerintah	47	10,626	94	85,616	8	785	86	35,881
5 Lain-lain/Industri	8	3,137	4	182	0	0	4	988
Jumlah Kabupaten Nias	895	192,830	3,808	1,169,566	895	48,567	3,123	618,778
II Kabupaten Nias Selatan								
1 Rumah Tempat Tinggal	2,825	831,319	705	191,671	609	82,555	609	82,555
2 Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah	83	75,320	-	-	18	4,591	18	4,591
3 Perusahaan/Pertokoan, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara dan Sungai, Hotel/Objek Wisata	176	48,867	-	-	150	17,528	150	17,528
4 Instansi Pemerintah	86	67,687	-	-	12	4,820	12	4,820
5 Lain-lain/Industri	3	460	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kabupaten Nias Selatan	3,173	1,023,653	705	191,671	789	109,494	789	109,494

Keterangan : *) Belum tersedia data

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS), Bappeda Kabupaten Nias Selatan

Gempa bumi telah mengakibatkan sebagian besar infrastruktur air bersih rusak berat termasuk peralatan mekanikal elektrik. Pompa rusak, panel-panel lepas dan kabel putus. Sistem jaringan air bersih di Gunung Sitoli dan Teluk Dalam sama sekali tidak berfungsi, diperkirakan kondisi air bersih di Lahewa juga rusak berat. Tingkat kerusakan bervariasi antara 10 persen hingga 90 persen.

Di **sub sektor energi** khususnya kelistrikan, kondisi memprihatinkan terjadi di Nias dimana suplai energi listrik masih belum memadai. Sebagian besar pembangkit listrik di Nias masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Daerah yang terkena dampak biasanya memperoleh aliran listrik melalui jaringan 500KV dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian kecil lainnya dipenuhi oleh listrik non PLN. PLN Kabupaten Nias mengelola jaringan transmisi 500KV dan jaringan transmisi 150KV daerah seluruh Kabupaten Nias dan sebagian area di Kabupaten Nias Selatan. Jumlah kebutuhan pemakaian energi listrik oleh rumah tangga mencapai 13,01 MWH (80,06 persen), komersil (bisnis) mencapai 1,57 MWH, umum sebesar 1,33 MWH, industri sebesar 0,34 MWH. Penjualan listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut mencapai 16,25 MWH.

Kebutuhan listrik untuk seluruh komponen di Kabupaten Nias Selatan sebesar 18,38 MWH pada tahun 2005. Kemampuan suplai PLN dalam produksi listrik hanya dapat menghasilkan 1,63 MWH pada tahun 2005. Produksi listrik mengalami penurunan sebesar 16,75 MWH akibat kerusakan instalasi dan jaringan distribusi dari PLN Kabupaten Nias.

Unit usaha distribusi Kepulauan Nias mengelola jaringan distribusi dan penjualan listrik ke pelanggan listrik tegangan menengah dan tinggi di semua daerah yang terkena dampak. Dampak tersebut adalah mengalami penurunan tingkat operasi akibat kerusakan pada jaringan utama, gardu distribusi, serta sambungan listrik ke rumah. Untuk mencegah terjadinya arus pendek, maka dilakukan pemadaman listrik secara bergiliran dan membuat peralatan elektronik dan rumah tangga banyak mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat dan roda perekonomian setempat, terutama pada pelanggan komersil dan rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel II. 8
Perkembangan Penjualan Energi Listrik (MWH)
Tahun 2003 dan 2005

Pelanggan	Perkembangan Penjualan Energi Listrik (MWH)			
	2002	2003	2004	2005
I Kabupaten Nias				
1 Rumah Tangga	11,90	12,36	13,80	13,01
2 Komersil	1,99	2,25	3,61	1,57
3 Industri	0,04	0,03	0,05	0,34
4 Umum	0,96	0,88	0,92	1,33
Jumlah	14,89	15,52	18,38	16,25
II Kabupaten Nias Selatan				
1 Rumah Tangga	-	12,36	13,8	1,38
2 Komersil	-	2,25	3,61	0,03
3 Industri	-	0,03	0,05	0,03
4 Umum	-	0,88	0,92	0,19
Jumlah	0	15,52	18,38	1,63

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS)

Pada **sub sektor sumber daya air dan pengendalian banjir**, sungai-sungai yang mengalami kerusakan hampir sebagian besar masih belum memiliki tanggul permanen. Lebar sungai pengendali banjir bervariasi antara 3 sampai 180 meter. Tingkat sedimentasi relatif tinggi akibat struktur tanah Kepulauan Nias yang lebih banyak mengandung pasir (*sand*). Kondisi pesisir pantai sepanjang Kepulauan Nias hampir sebagian besar memiliki karang. Kerusakan terjadi pada bangunan-bangunan pengendali banjir termasuk sistem pemecah gelombang di beberapa lokasi Pelabuhan Gunung Sitoli.

Hampir keseluruhan daerah irigasi di Kepulauan Nias masih tradisional. Terdapat 75 daerah irigasi seluas 9.300 ha yang terdiri atas 1.260 ha irigasi teknis, 2.700 ha irigasi semi teknis, 5.340 ha irigasi sederhana dan irigasi desa. Dari total luasan potensi lahan beririgasi di Pulau Nias tersebut sekitar 90 persen masih dapat berfungsi. Kerusakan akibat tsunami dan gempa lebih terkonsentrasi di daerah pantai barat dan pantai selatan Pulau Nias. Daerah irigasi yang tidak berfungsi disebabkan terputusnya pasokan air dan kerusakan tanah.

II.1.2. Perumahan dan Permukiman

Pada sub **sektor perumahan**, belum ada informasi kondisi rumah eksisting di Kepulauan Nias. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik tahun 2003 dan 2005, Perkiraan jumlah rumah ini ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga dalam survey BPS. Jumlah rumah di Kabupaten Nias sebelum bencana gempa berjumlah 79.078 unit dan menurun menjadi 81.242 rumah setelah pasca gempa bumi. Pada kabupaten Nias Selatan informasi yang tersedia hanya kondisi tahun 2005 yang berjumlah 52.349 unit.

Satkorlak telah melakukan inventarisasi jumlah rumah rusak masing-masing kecamatan pada tanggal 29 Juli 2005. Rumah rusak di Kabupaten Nias yang paling parah terkena dampak terletak pada Kecamatan Gunung Sitoli (10.397 unit), Kecamatan Gido (5.251 unit) dan Kecamatan Lahewa (4.403 unit). Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan jumlah rumah yang mengalami kerusakan terbesar adalah kecamatan Teluk Dalam (8.942 unit).

Dalam sub sektor **air dan sanitasi** untuk perumahan, data pelayanan air limbah dan akses terhadap jamban dan *septic tank* belum tersedia dengan baik. Pada umumnya, kesulitan yang dirasakan masyarakat pasca gempa bumi adalah hilangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sanitasi akibat hancurnya rumah termasuk rusaknya fasilitas jamban dan septic tank. Sebagian kelompok penduduk mempunyai fasilitas sanitasi berupa jamban pribadi. Setelah bencana, pada umumnya instalasinya tidak dapat lagi dioperasikan.

Pengelolaan persampahan di Kepulauan Nias, pada umumnya dikelola oleh Dinas Kebersihan. Masing-masing kabupaten belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem pengolahan *control landfill*. Gempa bumi telah mengakibatkan kerusakan pada prasarana dan sarana persampahan terutama pada lokasi-lokasi tempat penampungan sementara (TPS) dan TPA sampah, dimana struktur bangunan fasilitas tersebut mengalami kerusakan.

Secara umum, permasalahan drainase pasca bencana adalah bertambahnya luasan wilayah yang masih tergenang air khususnya di dataran rendah dan pesisir pantai utara, sebagian saluran-saluran drainase kota sebagian tidak berfungsi akibat sampah, lumpur, dan puing-puing bangunan yang menumpuk. Selain itu, struktur jaringan juga drainase kurang dapat difungsikan kembali secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan kurang lebih 60 persen drainase di Gunung Sitoli dan Teluk Dalam tidak dapat berfungsi dengan baik.

II.1.3. Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan

Sektor kelembagaan dan sosial kemasyarakatan mencakup pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Selain korban jiwa, dampak bencana terkonsentrasi pada bangunan dan aset pendidikan, bangunan dan peralatan kesehatan, serta aset-aset pemerintahan.

Bangunan fisik pada **sub sektor pemerintahan**, terdiri dari kantor pemerintah (kantor desa/lurah, kantor camat, kantor bupati, lembaga teknis daerah, sekretariat daerah) serta kantor instansi vertikal dan BUMN/BUMD. Dalam sub sektor pemerintahan ini kerusakan mencakup gedung dan peralatan pendukung pemerintahan dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Bangunan sarana dan prasarana gedung perkantoran yang mengalami kerusakan relatif tinggi berada di Kabupaten Nias. Kerusakan juga terjadi pada gedung DPRD, gedung instansi vertikal, serta rumah dinas. Kerusakan-kerusakan kantor pemerintah ini diupayakan dengan pembangunan ruang kerja darurat agar kegiatan pemerintahan di Kabupaten Nias maupun Kabupaten Nias Selatan tetap dapat berjalan seperti biasa.

Tabel II. 9
Data Jumlah Kantor di Kepulauan Nias Tahun 2006

Kantor	Kabupaten Nias	Kabupaten Nias Selatan
1 Kantor Desa/Lurah	443	214
2 Kantor Camat	32	8
3 Kantor Bupati	1	1
4 Kantor Dinas Daerah	13	9
5 Kantor Lembaga Teknis Daerah	7	7
6 Kantor Sekretariat Daerah	1	8
7 Kantor Instansi Vertikal	10	7
8 Kantor UPT Provinsi	5	0
9 Kantor BUMN/BUMD	10	6
Total	522	260

Sumber : Bappeda Kabupaten Nias dan Nias Selatan, 2007

Selain rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintahan, juga diperlukan pembenahan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di Kepulauan Nias ini, karena selain akan berdampak untuk jangka panjang juga akan sangat membantu dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias.

Pada **sub sektor keuangan dan perbankan**, sebelum bencana gempa bumi, perekonomian di Kabupaten Nias banyak didukung oleh adanya fasilitas penting seperti 4 Bank, 3 Asuransi dan 1 Kantor Pegadaian. Belum tersedianya informasi memadai tentang kondisi sarana-prasarana tersebut sehingga belum dapat diketahui tingkat kerusakan pada sub sektor ini. Bencana ini menyebabkan terganggunya aktivitas transaksi keuangan Kepulauan Nias tapi tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan sektor perbankan di tingkat nasional.

Pada **sub sektor keamanan dan ketertiban**, pelayanan keamanan dan ketertiban di Kepulauan Nias masih ditangani oleh Polri dan TNI. Beberapa bangunan pendukung untuk memperlancar kegiatan adalah gedung Komando Distrik (Kodim), gedung polisi, pos polisi, asrama polisi dan lain-lain. Jumlah fasilitas bangunan tersebut di masing-masing kabupaten Nias dan Nias Selatan belum tersedia oleh BPS. Kerusakan pada

bangunan ini tidak mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengamanan di wilayah bencana tersebut.

Sub sektor pendidikan. Sebelum bencana gempa bumi Kepulauan Nias adalah daerah tertinggal dalam pendidikan. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan yang rendah yang tidak didukung dengan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan yang memadai. Kondisi sarana pendidikan di Nias meliputi prasarana pendidikan seperti SD, SMP, SMU dan sebagainya serta prasarana untuk kegiatan pendidikan ketrampilan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan.

Hasil Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 menunjukkan bahwa hampir 60 persen masyarakat Kepulauan Nias tidak pernah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar, dan hanya 8 persen penduduk yang menamatkan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Nias dilihat dari pendidikan yang ditamatkan sangat memprihatinkan. Gambaran ini sedikit lebih baik di Kabupaten Nias dimana persentase tersebut sebesar 53 persen, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan persentase sebesar 65 persen.

Tabel II. 10
Jumlah dan Persentase Penduduk yang Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kabupaten dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2005

Pendidikan	Kabupaten Nias		Kabupaten Nias Selatan		Kepulauan Nias	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak/Belum Pernah Sekolah	73,293	19.02	64,941	27.59	138,234	22.27
Tidak/Belum Tamat SD	131,552	34.14	89,038	37.82	220,590	35.54
Tamat SD	96,996	25.17	47,892	20.34	144,888	23.34
Tamat SLTP	46,892	12.17	21,404	9.09	68,296	11.00
Tamat SLTA	31,278	8.12	10,468	4.45	41,746	6.73
Tamat Universitas	5,300	1.38	1,664	0.71	6,964	1.12
Tak Terjawab	1	0.00	3	0.00	4	0.00
Total	385,312	100.00	235,410	100.00	620,722	100.00

Sumber: SPAN 2005, Studi Studi Pengembangan Ekonomi Nias LD FEUI – BRR (2006)

Angka partisipasi sekolah dari kelompok umur 7-12 tahun mencapai 93,47 persen, kelompok umur 13-15 tahun mencapai 82,05 persen, kelompok umur 16-18 tahun sebesar 41,16 persen, dan kelompok umur 19-24 mencapai 10,34 persen di Kepulauan Nias pada tahun 2004.

Di sisi lain masih terdapat 12,41 persen penduduk 10 tahun ke atas yang buta huruf di Kepulauan Nias, angka ini merupakan yang tertinggi di bandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menandakan kualitas SDM yang ada di Kepulauan Nias benar-benar memprihatinkan dan tertinggal. Masih adanya penduduk 10 tahun ke atas yang buta huruf maupun angka partisipasi yang rendah lebih banyak disebabkan oleh pola dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih sulit, karena keterbatasan akses fisik dan penyebaran sarana pendidikan yang belum merata di semua kecamatan.

Lembaga pendidikan formal yang terkena dampak bencana gempa antara lain bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta ruang kantor. Pada umumnya bangunan-bangunan tersebut mengalami kerusakan berat/hancur total dan rusak ringan yang berupa keretakan-keretakan pada bangunan.

Tabel II. 11
Data Sarana Pendidikan Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

No	Sarana Pendidikan	Kabupaten Nias		Kabupaten Nias Selatan	
		2003	2005	2003	2005
1	TK	25	25	8	9
2	SD	419	419	187	299
3	SLTP	63	78	34	69
4	SLTA	24	27	13	28
5	SMK	0	8	4	14
6	Perguruan Tinggi	4	4	0	0
Jumlah		535	561	246	419

Keterangan : *) Belum tersedia data

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam Angka Tahun 2006 (BPS), Bappeda Kabupaten Nias Selatan (2007)

Untuk **sub sektor kesehatan**, tingkat penderita malaria di Kepulauan Nias mencapai 86 per 1000 penduduk. Angka ini sangat tinggi dibanding angka rata-rata nasional yang hanya 22 per 1000 penduduk. Persentase balita gizi buruk mencapai 19 persen, jauh diatas angka nasional yang 11,72 persen. Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Permasalahannya adalah penyebaran sarana kesehatan terutama BKIA, apotik, klinik bersalin dan balai pengobatan swasta belum merata. Selain itu tenaga medis yang ada masih belum memadai jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel II. 12
Data Sarana Kesehatan Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

Sarana Kesehatan	Kabupaten Nias		Kabupaten Nias Selatan	
	2003	2005	2003	2005
I Pemerintah				
1. RSU	1	1	1	1
2. Puskesmas	18	18	28	10
3. Puskesmas Pembantu	100	101	38	44
4. Kllinik	0	0	0	0
5. BKIA	2	2	0	0
II Swasta				
1. Apotik	5	5	5	0
2. Klinik Bersalin	2	2	3	0
3. Balai Pengobatan Swasta	16	16	3	8
4. Toko Obat	20	20	28	14
Total	164	165	106	77

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam Angka Tahun 2006 (BPS), Bappeda Kabupaten Nias Selatan (2007)

Ketersediaan tenaga medis di Kepulauan Nias masih sangat terbatas. Dokter spesialis hanya tersedia dua orang sampai dengan awal tahun ini. Penambahan dan distribusi tenaga medis yang merata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan angka kesehatan masyarakat. Salah satunya untuk mengobati masyarakat yang masih trauma terhadap bencana yang terus terjadi.

Tabel II. 13
Data Tenaga Kesehatan/Medis di Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2004

Tenaga Kesehatan/Medis	2003	2004
Dokter Umum	36	38
Dokter Gigi	6	7
Dokter Spesialis	2	2
Bidan	102	329
Perawat	293	375
Total	439	751

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2004 dan 2005 (BPS), Studi Pengembangan Ekonomi Nias LD FEUI – BRR (2006)

Di Kepulauan Nias diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2002 adalah urutan terakhir di Provinsi Sumatera Utara yaitu 61,8, namun dua tahun terakhir IPM mengalami peningkatan menjadi 65,5 untuk Kabupaten Nias, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan sebesar 63,1. Status kesehatan di Kepulauan Nias mencerminkan angka-angka IPM tersebut. Pada tahun 2004, angka kematian bayi di Kepulauan Nias adalah 41 per seribu kelahiran hidup, dan rata-rata di Provinsi Sumatera Utara sebesar 36 per seribu kelahiran hidup. *Malnutrisi* masih menjadi masalah yang berkelanjutan. Pada tahun 2004, 15,5 persen anak di bawah usia lima tahun di Kepulauan Nias mengalami gizi buruk, dan 20,16 persen mengalami kekurangan gizi. Persentase ini jauh di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,76 persen untuk gizi buruk dan 18,67 persen untuk kekurangan gizi.

Selain kerugian non fisik, seperti korban bencana gempa dan ancaman terjangkitnya wabah penyakit, kerusakan fisik di sektor kesehatan mencakup kerusakan pada fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes beserta peralatannya dan tenaga medis.

Sub sektor agama. Mayoritas penduduk Kepulauan Nias beragama Kristen (Kristen Protestan dan Kristen Katolik), diikuti sejumlah relatif kecil penganut Islam, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu serta lainnya. Mayoritas tempat ibadah adalah gereja, kemudian mesjid, surau, dan vihara. Tingkat kerukunan agama di Kepulauan Nias sangat baik, dimana toleransi antara pemeluk agama saling menghormati dan menghargai. Pada umumnya, sarana-sarana ibadah di Kepulauan Nias mengalami rusak berat/hancur total dan rusak ringan berupa keretakan pada dinding bangunan.

Tabel II. 14
Data Sarana Ibadah Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

No	Sarana Ibadah	Kabupaten Nias		Kabupaten Nias Selatan	
		2003	2005	2003	2005
1	Mesjid	77	78	18	18
2	Surau	35	39	24	24
3	Gereja Protestan	1,287	1,460	603	875
4	Gereja Katolik	314	309	220	243
5	Pura	0	0	0	0
6	Vihara	1	1	1	1
	Jumlah	1,714	1,887	866	1,161

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS), Bappeda Kabupaten Nias Selatan (2007)

II.1.4. Kondisi Perekonomian

Gempa mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Beberapa sektor perekonomian yang terkena dampak gempa bumi antara lain adalah **Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata dan Perdagangan.**

Kepulauan Nias adalah wilayah paling miskin di Provinsi Sumatera. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Selatan sebesar 32,42 persen, disusul Kabupaten Nias sebesar 32,17 persen. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mengakibatkan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Sensus penduduk miskin oleh BPS pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 80 persen rumah tangga di Nias (109.000 rumah tangga) masuk kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin dan berhak menerima bantuan langsung tunai¹. Sebelum bencana, terdapat kurang lebih 60 persen rumah tangga masuk kategori prasejahtera dan sejahtera I (BPS, 2003). Jika diasumsikan bahwa kriteria keluarga penerima BLT sama dengan keluarga prasejahtera dan sejahtera I, maka bencana yang terjadi pada Desember 2004 dan Maret 2005 telah meningkatkan tingkat kemiskinan masyarakat sebesar 20 persen. Pada kurun waktu yang sama, terjadi kontraksi perekonomian Nias sebesar 20 persen (*World Bank*, 2006).

Kemiskinan Nias terjadi karena masyarakat mempunyai akses yang sangat rendah ke berbagai kesempatan ekonomi dan sosial (*socio-economic opportunities*). Akses masyarakat ke pasar yang *fair* hampir tidak ada, yang diindikasikan oleh biaya bertransaksi (*transaction cost*) yang sangat tinggi. Karet mentah yang diperjualbelikan di pasar Sumatera seharga Rp. 13.000 per kg, misalnya, hanya dibeli dengan harga Rp. 4.000 pada tingkat petani di Nias. Biaya transaksi yang tinggi ini disebabkan oleh panjangnya rantai tengkulak, transportasi yang mahal, maupun rendahnya mutu produksi dan pengolahan, adalah penyebab dari semua ini. Hal ini diperburuk lagi dengan rendahnya mutu pendidikan dan layanan kesehatan di Kepulauan Nias. Sumber daya manusia Nias memiliki daya saing yang rendah untuk berkompetisi memperebutkan berbagai *opportunity* yang ada.

Kerusakan pada infrastruktur sarana prasarana keuangan dan perbankan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan merupakan dua kabupaten yang memiliki jumlah dan persentase penduduk termiskin terbesar di antara kabupaten/kota di Sumatera Utara. Di Kabupaten Nias, terdapat sekitar lebih dari 135 ribu penduduk (atau sekitar 15 persen dari total penduduk) yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan rata-rata Rp 108,53 per kapita/bulan. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan, terdapat sekitar 90 ribu penduduk (atau lebih dari 32 persen dari total penduduk) yang hidup di bawah garis kemiskinan RP 213,29 per kapita/bulan. Sebagian pendapatan masyarakat Kepulauan Nias sebagian berasal dari pertanian dan perkebunan.

Perekonomian Nias kedepan masih akan sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Pariwisata Nias menyimpan potensi besar, namun pengembangannya masih membutuhkan waktu cukup panjang, bergantung pada berbagai sarana dan prasarana dasar yang saat ini sedang dikembangkan. Pengembangan pertanian dan perikanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi pertanian dan perikanan, pengembangan organisasi petani/nelayan, pemberian kredit usaha kepada kelompok tani/nelayan, pengembangan industri kecil/menengah termasuk industri pengolahan pertanian, hingga penyaluran hasil produksi ke pasar termasuk penciptaan pasar yang sehat bagi petani dan nelayan Nias. Pertanian dan perikanan yang selama ini bersifat

¹ Besaran 80persen rumah tangga penerima BLT adalah sangat besar, jauh diatas angka rata-rata Indonesia yang 34persen

subsiten secara bertahap harus dikembangkan kepada usaha yang berorientasi pada pasar (*market-oriented*).

Pengembangan perekonomian juga membutuhkan infrastruktur yang handal. Infrastruktur transportasi Nias yang parah membuat biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat tinggi bagi setiap hasil bumi Nias yang akan dijual ke berbagai pasar. Penanganan infrastruktur transportasi strategis sangat mendesak untuk membantu menciptakan iklim pasar yang sehat dan berimbang bagi perekonomian Nias.

Untuk **ketenagakerjaan**, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nias pada tahun 2003 sebesar 85,96 persen dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 86,56 persen. Angkatan kerja sebagian besar masih berpendidikan SD ke bawah. Jika dilihat dari lapangan usahanya, 90,06 persen diserap oleh sektor pertanian, 3,97 persen di sektor perdagangan, 2,78 persen di sektor jasa (termasuk PNS), dan 0,62 persen di sektor industri. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Nias Selatan yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2005 sebesar 80,2 persen, dan sebagian besar berpendidikan SD ke bawah. Jika dilihat dari jenis lapangan usaha untuk tahun 2004, penduduk di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 90,06 persen bekerja di sektor pertanian, 3,97 persen di sektor perdagangan, 2,78 persen di sektor jasa (termasuk PNS), dan 0,67 persen di sektor industri.

Untuk **sub sektor pertanian**, pada tahun 2004 Kabupaten Nias memiliki 379.987 hektar luas lahan yang digunakan untuk bercocok tanam di Kabupaten Nias sebelum bencana sekitar 46.614 hektar digunakan untuk lahan sawah, sedangkan sisanya sebanyak 333.373 hektar untuk lahan kering. Sebanyak 87 persen pekerja bekerja pada sektor pertanian, 4,6 persen di sektor perdagangan dan 2,9 persen di sektor jasa. Kabupaten Nias merupakan penghasil padi, jagung, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 12.000 hektar sawah dan 28.136,5 hektar lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan. Ketersediaan bahan makanan pokok Kepulauan Nias masih belum mencukupi kebutuhan yang ada. Kekurangan tersebut dipenuhi dengan adanya makanan pokok dari Sumatera Utara. Rusaknya lahan produktif serta peralatan pertanian telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi serta penurunan pendapatan masyarakat.

Pada **sub sektor perikanan**, produksi ikan Kabupaten Nias pada tahun 2005 tercatat 5.070,34 ton yang terdiri dari 99,63 persen ikan laut dan produksi ikan air tawar (ikan sungai, ikan rawa, dan ikan kolam) sebesar 18,95 persen. Sedangkan produksi ikan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2004 tercatat 17.336 ton yang terdiri dari 99,79 persen ikan laut dan produksi ikan air tawar (ikan sungai, ikan rawa, dan ikan kolam) sebesar 0,2 persen. Kerusakan sarana penangkapan ikan seperti perahu, alat dan tempat penangkapan ikan, serta tambak menyebabkan penurunan hasil penangkapan ikan oleh masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan penurunan penghasilan para nelayan sekitar kawasan yang terkena bencana.

Sub sektor industri, jumlah industri besar dan sedang di Kabupaten Nias pada tahun 2004 tercatat sebanyak 475 perusahaan yang berarti mengalami penurunan sampai 19 perusahaan pada tahun 2005. Penurunan ini disebabkan adanya pengalihan kepemilikan ke Kabupaten Nias Selatan sebanyak 407 TDP dan 440 berkas SIUP di tahun 2005. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan jumlah perusahaan/usaha perdagangan tahun 2005 mengalami peningkatan sebanyak 47 perusahaan dari 2.319 perusahaan menjadi 2.366 perusahaan pada tahun 2005.

Tabel II. 15
Data Jumlah Perusahaan/Usaha Perdagangan di Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

Jenis Industri	Kabupaten Nias			Kabupaten Nias Selatan		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
I Menurut Golongan usaha						
1. Perusahaan Besar	1	8	5	1	1	1
2. Perusahaan Menengah	475	475	19	449	449	479
3. Perusahaan Kecil	1,687	1,826	208	1,869	1,869	1,886
Jumlah	2,163	2,309	232	2,319	2,319	2,366
II Menurut Bentuk Badan Hukum						
1. PT	42	40	44	38	38	38
2. Koperasi	154	109	114	142	142	142
3. CV	563	487	600	361	361	361
4. Firma	2	2	20	2	2	2
5. Perorangan	1,873	1,575	2,156	1,680	1,680	1,680
6. Badan Usaha Lain	16	14	16	16	16	16
Jumlah	2,650	2,227	2,950	2,239	2,239	2,239

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam Angka Tahun 2006 (BPS)

Perkonomian Nias juga didukung oleh salah satu sub sektor yang dapat diunggulkan atau dikembangkan untuk dipasarkan kepada orang-orang luar daerah Kepulauan Nias yaitu **sub sektor pariwisata**. Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan asli dan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor yang berkaitan lainnya, seperti hotel, restoran dan perdagangan yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat di Kepulauan Nias sendiri, dan juga untuk melestarikan budaya dan keindahan alam Nias jika dikelola dengan baik.

Secara umum, potensi wisata di Kabupaten Nias Selatan terdiri dari wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata gua, wisata bakau. Di pariwisata alam, Kabupaten Nias memiliki banyak potensi objek wisata seperti Air Terjun Lahandoi di Kecamatan Alasa yang merupakan obyek wisata yang masih alami. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan, pantai Lagundri dan Sorake di kecamatan Teluk Dalam yang memiliki ombak yang tinggi sehingga cocok untuk olah raga selancar, merupakan salah satu objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Lebih lanjut, tidak ketinggalan panorama bukit Hilidauru di kecamatan Lolowa'u, serta objek wisata taman laut (wisata bahari) di kecamatan P.P. Batu. Hal tersebut diatas merupakan objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Dari sisi pariwisata budaya, di Kabupaten Nias, wisata budaya dan peninggalan sejarah seperti Batu Megalit di desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi dan rumah-rumah adat tradisional serta kesenian tradisional seperti atraksi tari perang dan tarian maena juga merupakan kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang dapat di tawarkan untuk wisata budaya. Serupa dengan itu, di Kabupaten Nias selatan, wisata budaya dan peninggalan sejarah seperti Batu Megalit di desa Tundrumbaho-Kecamatan Gomo dan desa Olayama di Kecamatan Lolowa'u, rumah adat tradisional di desa Bawomataluo dan desa Hiliamaetaniha di Kecamatan Teluk Dalam, serta kesenian tradisional seperti atraksi lompat batu (hombu batu), dan atraksi tari perang dan tari maena juga beberapa contoh yang menggambarkan kekayaan budaya dan peninggalan sejarah di Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan data tahun 2003 tercatat kurang lebih 117 muskala yang ada di Kabupaten Nias, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 830 muskala yang terdiri dari tempat rekreasi, rumah adat dan lainnya. Kerusakan yang terjadi pasca gempa yaitu pada bangunan rumah adat dan sarana wisata lainnya. Sebagai contoh pada tahun 2005, tempat rekreasi di Kabupaten Nias mengalami penurunan sebanyak 26 lokasi sejak tahun

2003. Pada tahun 2004 tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Nias sebanyak 3.453 wisatawan yang terdiri dari 323 wisatawan asing dan 3.132 wisatawan domestik. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2005 tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 17.288 wisatawan yang terdiri dari 5.948 wisatawan asing dan 11.280 wisatawan domestik.

Tabel II. 16
Data Muskala di Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

Muskala	Kabupaten Nias		Kabupaten Nias Selatan	
	2003	2005	2003	2005
1 Batu Megalit (Buah)	5	34	37	37
2 Tempat Rekreasi (Lokasi)	37	11	22	22
3 Rumah Adat (Buah)	74	326	766	766
4 Lokasi Situs	1	32	5	5
Jumlah	117	403	830	830

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam Angka Tahun 2006 (BPS), Bappeda Kabupaten Nias Selatan (2007).

Perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Nias memberikan kontribusi 21,78 persen ke PDRB Kabupaten Nias pada tahun 2004, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan memberikan kontribusi 22,25 persen. Pada umumnya dampak yang terjadi pasca bencana gempa yaitu banyaknya hotel dan restoran yang mengalami kerusakan berat/hancur total, maupun rusak ringan berupa keretakan-keretakan pada dinding bangunan.

Tabel II. 17
Data Jumlah Hotel dan Restoran di Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

Hotel dan Restoran	Kabupaten Nias			Kabupaten Nias Selatan		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1 Hotel	14	14	3	26	25	31
2 Restoran	37	41	36	25	25	31
Jumlah	51	55	39	51	50	62

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS), Bappeda Kabupaten Nias (2007)

Pada **sub sektor koperasi dan UKM**, baik di Kepulauan Nias didominasi oleh Koperasi Non KUD, yaitu pada koperasi serba usaha dan koperasi pertanian pangan. Pada Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari usaha perdagangan, aneka usaha industri pertanian dan industri non pertanian. Perdagangan mendominasi di kedua kabupaten tersebut, terutama di Kabupaten Nias. Aktivitas perdagangan yang dilakukan biasanya berupa pertokoan/warung kecil, pedagang kaki lima, dan pedagang-pedagang kecil, sedangkan aktivitas jasa yang dilakukan umumnya berupa restoran/rumah makan dan tukang becak. Kerugian pasca gempa berdampak pada aktivitas perdagangan masyarakat serta kelancaran kegiatan perekonomian.

Tabel II. 18
Data Jumlah Bangunan Koperasi dan UKM di Kepulauan Nias
Tahun 2003 dan 2005

Koperasi dan UKM	Kabupaten Nias		Kabupaten Nias Selatan	
	2003	2005	2003	2005
I Koperasi				
1. KUD	15	15	24	9
2. Koperasi Non KUD	205	213	189	58
3. Koperasi Sekolah	0	0	0	0
4. Koperasi Non KUD Lainnya	37	36	26	7
Jumlah	257	264	239	74
II UKM				
1. Perdagangan	1,051	1,051	*	5
2. Aneka Usaha	274	274	104	4
3. Industri Pertanian	167	167	53	12
4. Industri Non Pertanian	168	168	51	0
Jumlah	1,660	1,660	208	21

Keterangan : *) Belum tersedia data

Sumber : Kabupaten Nias dalam Angka Tahun 2004 dan 2006 (BPS), Kabupaten Nias Selatan dalam angka Tahun 2006 (BPS), Bappeda Kabupaten Nias Selatan (2007)

II.2. Perkembangan Pelaksanaan Upaya Penanganan Pasca Bencana Tahun 2005-2006

Secara umum dan rinci, kegiatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah dituangkan dalam rencana induk. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari tahun 2005 hingga 2009 dilakukan dalam berbagai tahapan. Pada tahap pertama di tahun 2005, yang merupakan periode pemulihan kondisi darurat (*rescue recovery program*) dan penyembuhan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Program utamanya adalah mempersiapkan infrastruktur yang mendukung akses logistik dan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi, pembangunan tenda, hunian sementara (*temporary shelter*) dan rumah bagi pengungsi, serta pemberian pekerjaan sementara *work for cash program* (padat karya).

Pada tahun 2006 yang merupakan periode pemulihan (*recovery program*), prioritasnya adalah pembangunan perumahan dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran logistik dan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi. Program lainnya adalah pembangunan *temporary shelter*, sistem transportasi dan komunikasi, distribusi energi dan kelistrikan, serta infrastruktur sosial dan fisik yang mendukung pengembangan ekonomi dalam jangka panjang, serta terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan BRR serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan Nias sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap ini, ditargetkan koordinasi berjalan secara efektif di antara pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya BRR, dengan pemerintah daerah. Pada paruh kedua tahun 2006 dimulai upaya-upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*), baik pada kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) pengoperasian dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana serta sistem yang telah dibangun.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.30 tahun 2005 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, upaya penanggulangan dan pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan terpadu melalui tiga tahapan,

yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus berjalan secara bersamaan dalam pelaksanaan penanggulangan dampak bencana, yaitu:

1. Tahap Tanggap Darurat

Bertujuan menyelamatkan masyarakat yang masih hidup, mampu bertahan dan segera terpenuhinya kebutuhan dasar yang paling minimal. Sasaran utama dari tahap ini adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana yang masih hidup. Saat bencana baru saja terjadi, Tahap Tanggap Darurat ditetapkan selama 6 bulan setelah bencana.

Upaya penanggulangan dampak bencana tersebut melalui pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan kondisi masyarakat dilakukan secara sistematis, menyeluruh, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan efektif dalam memberikan bantuan kepada kelompok korban. Secara operasional, kegiatan tanggap darurat diarahkan pada kegiatan:

- a) evakuasi dan pemakaman jenazah korban
- b) penanganan pengungsi
- c) pemberian bantuan darurat
- d) pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih
- e) pembersihan kota
- f) penyiapan hunian sementara

Dukungan internasional sangat membantu percepatan upaya-upaya tanggap darurat, yang antara lain melalui tim penyelamatan (*rescue team*), tim medis, dan dukungan sarana transportasi berupa kapal laut dan helikopter.

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tahap rehabilitasi bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi mesjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

Tahap rekonstruksi bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian rencana tata ruang baik di tingkat provinsi dan terutama di tingkat kabupaten dan kota yang mengalami kerusakan, terutama di daerah pesisir. Khusus Kepulauan Nias, kedua kabupaten belum memiliki rencana tata ruang yang dapat digunakan untuk acuan pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi dan penyusunan RTRW dilaksanakan secara paralel dan terintegrasi. Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan masyarakat di wilayah yang terkena bencana baik langsung maupun tidak langsung.

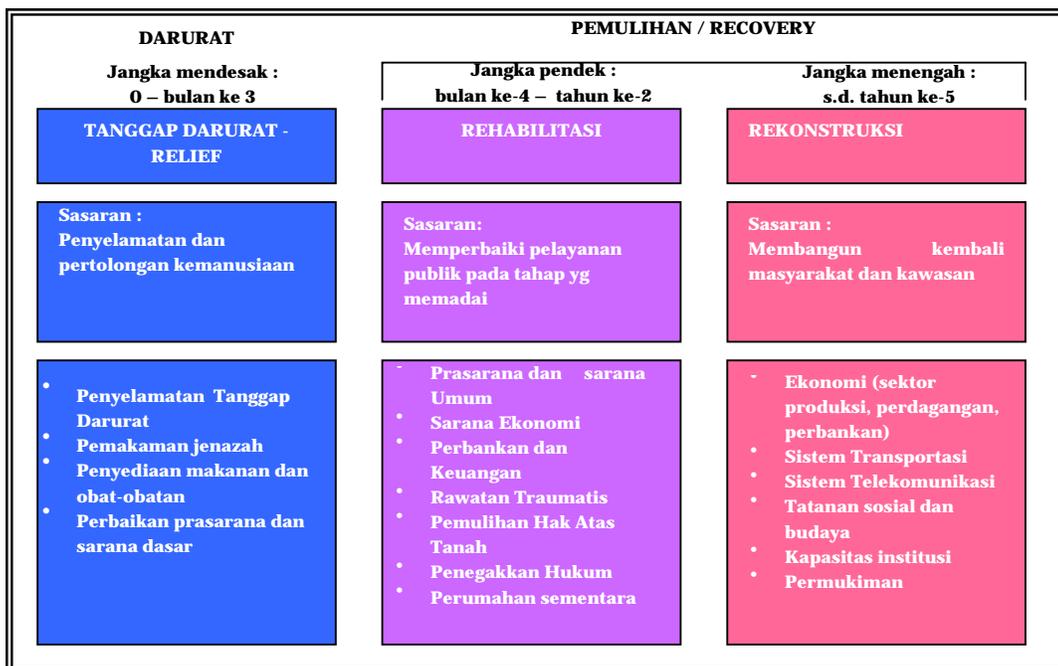
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahap lanjutan dari tahapan tanggap darurat yang bertujuan untuk memperbaiki kembali pelayanan publik pada tahap yang memadai dan membangun kembali masyarakat Kepulauan Nias serta wilayahnya dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ini didahului dengan penyusunan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Untuk tujuan tersebut Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat, Perencanaan dan Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

Melalui Inpres 1 Tahun 2005 tersebut, diinstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang dijabarkan dalam arahan kebijakan, strategi, kegiatan pokok dan kerangka waktu pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Inpres tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas telah melakukan berbagai koordinasi secara lintas sektoral di tingkat Pusat dan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara serta berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, seperti kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lembaga/negara donor.

Bagan II. 1 **Tahapan Penanggulangan Dampak Bencana Alam Gempa Bumi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara**



Sumber: Perpres 30/2005 Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Perkembangan pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari anggaran BRR (On Budget), Donor/NGO (Off Budget), serta pemerintah daerah melalui APBD Provinsi tahun anggaran 2006 dan APBD kabupaten tahun anggaran 2006. Untuk APBD provinsi maupun APBD kabupaten tahun anggaran 2005 belum mencantumkan alokasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rincian rekapitulasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. 19
Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2005 – 2006
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 25 Maret 2005 Kepulauan Nias

No	Sektor/Sub Sektor	On Budget 2005 2006 (Ribu Rp)	Off Budget 2005-2006 (Ribu Rp)	APBD Provinsi 2006 (Ribu Rp)	APBD Kabupaten 2006 (Ribu Rp)	Jumlah (Ribu Rp)
Kabupaten Nias						
1	Infrastruktur	440.053,162	87.139,791	21.677,200	30.161,538	579.031,691
	Transportasi *	298.520,201	84.013,785	18.690,000	25.882,846	427.106,832
	Energi dan Telekomunikasi	27.309,020	390,006	0	0	27.699,026
	Infrastruktur Sumber Daya Air *	114.223,941	2.736,000	2.987,200	4.278,692	124.225,833
2	Perumahan dan Permukiman	279.788,842	248.722,254	290,590	3.062,381	531.864,066
	Perumahan	254.904,560	113.358,015	0	0	368.262,575
	Air Minum dan Sanitasi	24.884,282	135,364,239	290,590	3,062,381	163,601,491
3	Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan	135.057,264	154,267,063	1,004,800	24,984,702	315,313,830
	Kepemerintahan	25,791,359	1,521,567	50,000	1,833,210	29,196,136
	Pendidikan	55,541,227	86,808,569	954,800	19,482,492	162,787,088
	Kesehatan	31,653,726	42,705,209	0	3,669,000	78,027,935
	Kebudayaan	22,070,953	23,231,718	0	0	45,302,671
4	Ekonomi	41,426,528	55,877,472	640,690	3,063,241	101,007,930
Total Kabupaten Nias		896,325,797	546,006,580	23,613,280	61,271,861	1,587,086,046
Kabupaten Nias Selatan						
1	Infrastruktur	85,274,927	22,576,833	2,508,537	2,508,537	112,868,834
	Transportasi *	51,644,344	22,576,833	3,500,000	5,530,250	83,251,427
	Energi dan Telekomunikasi	5,817,029	0	0	0	5,817,029
	Infrastruktur Sumber Daya Air	27,813,553	0	519,830	1,738,000	30,071,383
2	Perumahan dan Permukiman	157,140,295	94,098,276	10,455,364	10,455,364	272,149,299
	Perumahan	151,375,026	66,801,006	0	0	218,176,032
	Air Minum dan Sanitasi	5,765,269	27,297,270	0	1,837,000	34,899,539
3	Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan	57,930,973	49,720,369	153,705	12,301,000	120,106,047
	Kepemerintahan	4,923,398	3,817,278	0	4,400,000	13,140,676
	Pendidikan	23,469,682	25,352,587	0	0	48,822,269
	Kesehatan	12,526,995	8,202,873	0	7,901,000	28,630,868
	Kebudayaan	17,010,898	12,347,631	153,705	0	29,512,234
4	Ekonomi	823,979	18,484,515		2,053,835	21,362,329
Total Kabupaten Nias Selatan		301,170,174	184,879,993	13,117,606	27,318,736	526,486,509
Biaya Manajemen **		59,868,529				59,868,529
Total Nias dan Nias Selatan		1,257,364,500	730,886,573	36,730,886	88,590,597	2,113,572,555

Keterangan :

*) Beberapa kegiatan dan anggaran dalam BRR (On Budget) masih ada yang tergabung untuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan

**) Biaya yang digunakan untuk manajemen BRR

Kurs Dolar : 1 USD = Rp. 9000,- (khusus untuk off budget)

II.2.1. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR)

Pembangunan Nias dilaksanakan intensif oleh BRR Perwakilan Nias yang berkedudukan di kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. Pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Nias tidak hanya dilakukan pada pembangunan fisik saja, tapi juga pembangunan non-fisik sebagai usaha rehabilitasi sektor sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dari sebelumnya.

Total realisasi anggaran BRR tahun anggaran 2005-2006 mencapai Rp. 1.26 Triliun. Realisasi terbesar terdapat pada sektor infrastruktur yaitu mencapai 42 persen dari total realisasi anggaran, kemudian diikuti sebesar 35 persen di sektor perumahan, 15 persen di sektor kelembagaan dan sosial kemasyarakatan, 3 persen di sektor ekonomi, dan 5 persen untuk biaya manajemen BRR. Realisasi yang besar pada sektor infrastruktur dan perumahan menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut adalah sektor prioritas yang harus segera ditangani oleh BRR dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias. Kemajuan realisasi pembangunan BRR di Kepulauan Nias ini diperoleh dari pelaporan pihak BRR.

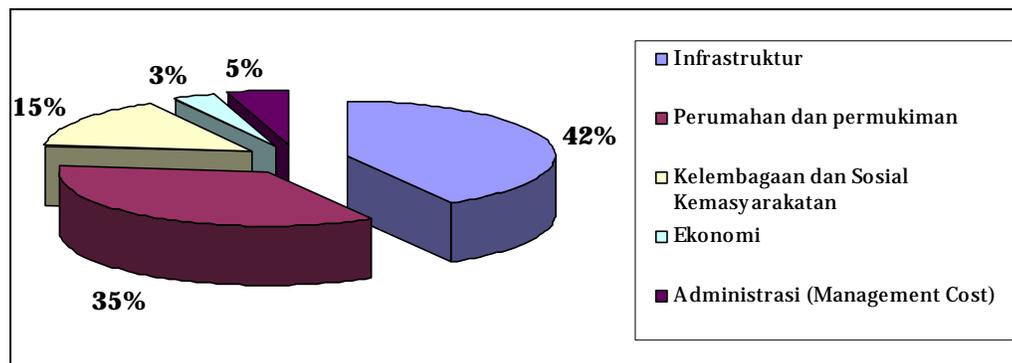
Tabel II. 20
Realisasi Anggaran BRR di Kepulauan Nias
Tahun 2005-2006

No	Sektor/Sub Sektor	Realisasi On Budget (Ribu Rp)		
		Nias	Nias Selatan	Total
1	Infrastruktur	440,053,162	85,274,927	525,328,089
	Transportasi *	298,520,201	51,644,344	350,164,545
	Energi dan Telekomunikasi	27,309,020	5,817,029	33,126,049
	Infrastruktur Sumber Daya Air *	114,223,941	27,813,553	142,037,494
2	Perumahan dan Permukiman	279,788,842	157,140,295	436,929,137
	Perumahan	254,904,560	151,375,026	406,279,586
	Air Minum dan Sanitasi	24,884,282	5,765,269	30,649,551
3	Kelembagaan dan Sosial	135,057,264	57,930,973	192,988,238
	Kepemerintahan	25,791,359	4,923,398	30,714,757
	Pendidikan	55,541,227	23,469,682	79,010,909
	Kesehatan	31,653,726	12,526,995	44,180,721
	Kebudayaan	22,070,953	17,010,898	39,081,851
4	Ekonomi	41,426,528	823,979	42,250,507
5	Biaya Manajemen**	59,868,529		59,868,529
Total On Budget		956,194,325	301,170,174	1,257,364,500

Keterangan: *) Realisasi beberapa kegiatan dan anggaran BRR di Kabupaten Nias Selatan tergabung dengan Kabupaten Nias

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Gambar II. 3
Persentase Realisasi Anggaran BRR
Tahun Anggaran 2005-2006



Sumber : Hasil Analisis, 2007

Kemajuan pembangunan infrastruktur sangat menentukan kecepatan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Kepulauan Nias. Kegiatan yang terlalu tertumpu pada rekonstruksi dan rehabilitasi perumahan mengakibatkan sulitnya untuk menghidupkan aktifitas ekonomi para korban. Hal ini juga yang menyebabkan kendala suplai material bangunan ke lokasi proyek-proyek rekonstruksi dan rehabilitasi. Jauhnya lokasi menuju Kepulauan Nias menyebabkan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup dengan harga terjangkau untuk masyarakat setempat sulit di dapatkan. Kondisi ini tidak diikuti pengembangan dan pembangunan industri material, terutama di lokasi tersebut.

Strategi yang digunakan dalam pengembangan **transportasi darat** adalah dengan memprioritaskan jalan keliling dan lintas pedalaman, selain itu akses penghubung seperti jembatan juga diprioritaskan untuk memperlancar transportasi. Jembatan provinsi yang telah direhabilitasi sepanjang 258 m untuk menghubungkan jalan yang rusak. Panjang jalan provinsi yang telah diselesaikan selama 2 tahun adalah 58 km, sedangkan untuk jalan kabupaten di Kabupaten Nias mencapai 63 km, dan di Kabupaten Nias Selatan mencapai 26 km. Terminal bus yang telah dibangun dan direhabilitasi di Kabupaten Nias

sebanyak 4 unit di Gunung Sitoli, Luaha, Lahewa dan Sirombu, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 1 unit yang berlokasi di Teluk Dalam. Distribusi realisasi dari pembangunan jalan provinsi, jembatan, bandara, dan pelabuhan hingga Desember 2006 ditunjukkan pada gambar berikut.

Di **transportasi laut**, 3 unit pelabuhan di Kabupaten Nias dan 2 unit di Kabupaten Nias Selatan yang mengalami kerusakan akibat gempa sedang dalam masa rehabilitasi. Sampai saat ini, kegiatan tersebut masih terus berjalan dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2009. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Teluk Dalam, Pelabuhan Gunung Sitoli, Pelabuhan Lahewa, Pelabuhan Laut Pulau Tello, dan Pelabuhan Sirombu. Untuk transportasi udara, sejumlah kerusakan prasarana pelabuhan udara sudah mulai diperbaiki seperti *runway* Bandara Binaka Kabupaten Nias dan Bandara Lasondre Kabupaten Nias Selatan.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada **sub sektor energi dan kelistrikan** yang dilaksanakan oleh BRR lebih berorientasi terhadap kelistrikan, sedangkan untuk energi seperti pengadaan BBM secara khusus tidak sepenuhnya dimasukkan dalam rencana BRR. Penanganan kebutuhan sarana-prasarana tersebut ditangani langsung oleh BUMN yang terkait langsung yaitu Pertamina. Sarana-prasarana kelistrikan yang dapat diselesaikan rehabilitasinya baik di Kabupaten Nias maupun Kabupaten Nias Selatan antara lain jaringan urama (*main feeder*), pengadaan atau penggantian tiang listrik, kawat, kabel listrik, transformer (*travo*), genset, dan sebagainya.

Untuk memperlancar komunikasi, BRR telah melakukan rehabilitasi pada **pos dan telekomunikasi**. Sebanyak 5 unit kantor pos di Lahewa, Sirombu, Hiliweto, Tetehosi, dan Tuhemberua Kabupaten Nias, dan 1 unit di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan telah terbangun. Selain itu BR juga telah membangun Gedung Badan Meteorologi – Geofisika di Kabupaten Nias. Sedangkan sarana komunikasi lain yang rusak juga sudah diperbaiki oleh PT Telkom dan pihak swasta yang berwenang.

Pada **sub sektor sumber daya air**, rehabilitasi 32 daerah irigasi seluas 4.907 hektar di Kabupaten Nias dan 2.865 hektar di Kabupaten Nias Selatan. Jaringan irigasi yang tersebar di Kabupaten Nias dan Nias Selatan sudah dalam penyelesaian di lapangan. Beberapa sungai pengendali banjir mulai normal kembali setelah mendapatkan penanganan dari BRR. Bangunan tebing pengaman pantai juga mulai dibangun sepanjang 1.721 meter di Kabupaten Nias dan 728 meter di Kabupaten Nias Selatan, dimana pesisirnya telah mengalami abrasi dan kerusakan pasca gempa. Lokasi yang telah terbangun prasarana tersebut banyak dijumpai di sisi timur Kepulauan Nias.

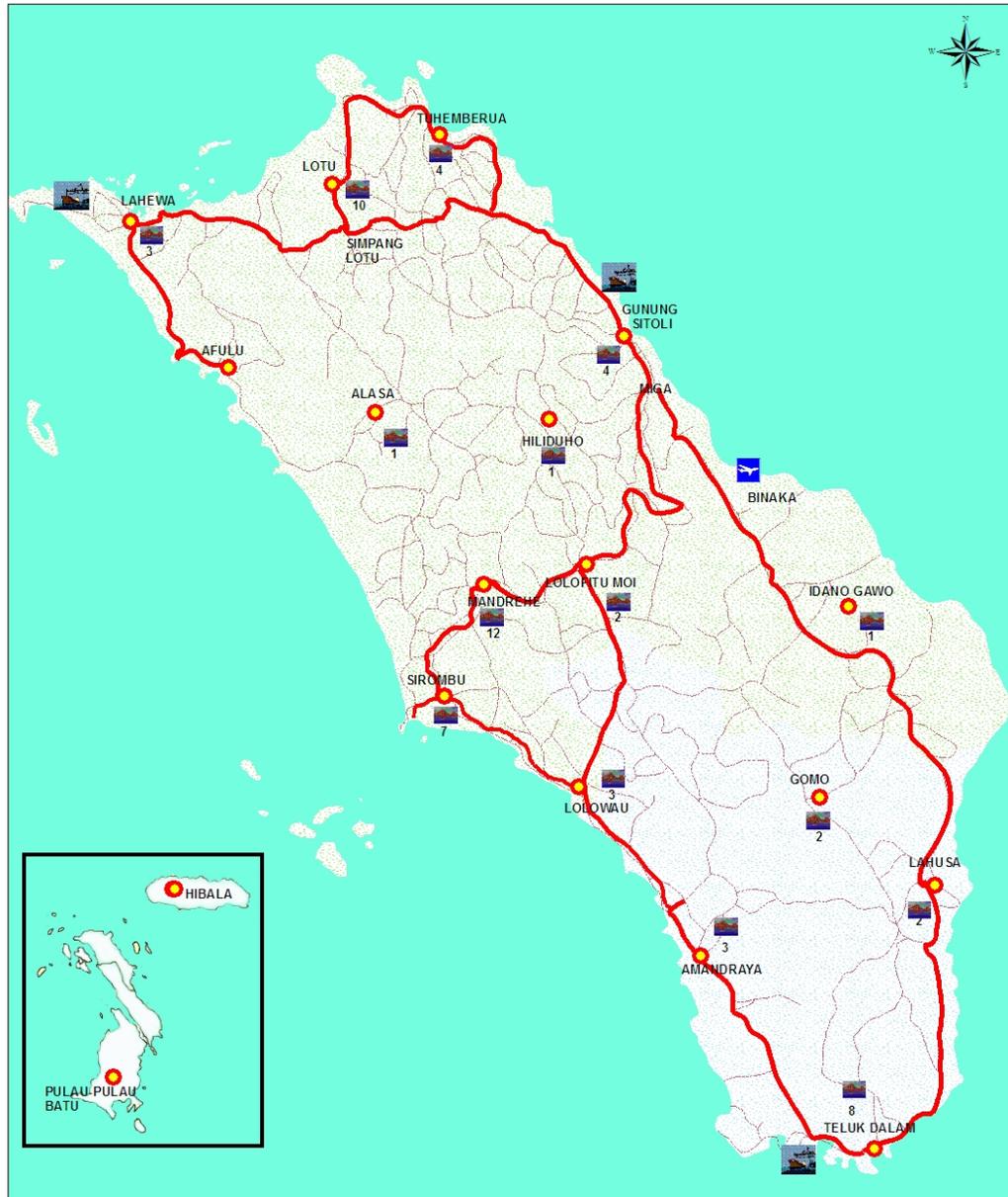
Tabel II. 21
Realisasi Kegiatan dan Anggaran BRR Sektor Infrastruktur
Tahun 2005 – 2006

SUB BIDANG/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (Juta Rp)	Volume		Nilai (Juta Rp)	Volume	
TRANSPORTASI	298,520			51,644		
A. Transportasi Laut (Pelabuhan)	15,509	3	unit	6,701	2	unit
B. Transportasi Udara (Bandar Udara)	17,042	1	unit	5,988	1	unit
C. Transportasi Darat, Jalan dan Kereta Api						
1 Jalan Nasional dan Propinsi						
a. Jalan	155,736	58	km	*	*	*
b. Jembatan	13,725	258	m	*	*	*
c. Alat dan rangka jembatan	50,238	2	pkt	*	*	*
2 Jalan Kabupaten	40,867	63	km	38,785	26	km
3 Terminal Bus	5,404	4	unit	170	1	unit
ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI	27,309			5,817		
A. Kelistrikan						
1 Jaringan Main Feeder	2,413	46	km	-	-	-
2 Genset	-	-	-	4,991	1	unit
3 KWH Meter	609	2	pkt	-	-	-
4 Tic dan Accessories	726	120	km	-	-	-
5 Pemberatan Penyulang	1,265	8	km	-	-	-
6 Recloser dan Pemasangan Auto SSO	1,023	2	unit	-	-	-
7 Pemberatan Kawat HUTM dan Penggantian Tiang Besi	12,542	72	km	-	-	-
8 Perluasan jaringan distribusi HUTM, Trafo dan HUTR	573	10	Set	-	-	-
	947	1	pkt	-	-	-
9 Penggeseran tiang	951	262	Btg	-	-	-
10 Rencana penggantian LPJU	49	2	Set	-	-	-
11 Pemasangan Trafo Sisip/Distribusi	169	2	pkt	728	12	Bh
	-	-	-	98	1	kms
12 Pemasangan VBOS dan Sectionalizer	616	1	pkt	-	-	-
13 Pengadaan MDU	1,667	1	pkt	-	-	-
B. Pos dan Telekomunikasi						
1 Pembangunan Kantor Pos	1,203	6	unit	-	-	-
2 Pembangunan Gedung Meteorologi dan Geofisika	2,556	1	unit	-	-	-
SUMBERDAYA AIR	114,224			27,814		
1 Irigasi						
a Daerah irigasi	23,346	4,907	Ha	13,631	2,865	Ha
b Jaringan Irigasi	3,531	1	pkt	*	*	*
2 Sungai dan Pengendalian Banjir						
a Rehabilitasi Pengendalian Banjir	47,044	5	pkt	-	-	-
b Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing	24,467	19	pkt	6,439	5	pkt
3. Pengamanan Pantai	15,835	1,721	m	7,744	728	m
TOTAL	440,053			85,275		

Keterangan : *) Tergabung dengan Kabupaten Nias

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Gambar II. 4
Peta Realisasi Pembangunan BRR Sub Sektor Transportasi
Tahun 2005-2006



Legend :

- Province Road
- Bridge
- Port
- Airport
- Sub District

SPATIAL DISTRIBUTION OF TRANSPORTATION PROGRAM

Scale Map 1:364,112 in A3 Size

Date Produced : 26 Februari, 2007

Data Source : BRR

Projection WGS_1984

Datum WGS_1984



Sumber : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Pada **sektor perumahan dan permukiman**, realisasi pembangunan rumah yang sudah dilaksanakan selama tahun 2005 sampai 2006 mencapai 8.055 unit rumah (permanen dan non-permanen). Lokasi rumah yang telah direhabilitasi tersebar di Kabupaten Nias dan Nias Selatan yang dapat diakses oleh alat dan material antara lain kecamatan Gunung Sitoli, Sirombu, Gido, Idanogawo, Bawolato, Hiliduhu, Lolofitu Moi, Lotu, Mandrehe, Lahewa, Namohalu, Alasa, Tuhemberua, Gunung Sitoli Idanoi, Lahomi, Botomuzoi, Teluk Dalam. Berdasarkan perhitungan awal BRR, kebutuhan jumlah rumah yang perlu dibangun adalah 13.500 unit rumah. Sisa kebutuhan rumah yang belum terbangun akan diselesaikan dalam tahun ini.

Distribusi lokasi pembangunan perumahan oleh BRR tahun 2005 – 2006 ditunjukkan pada Gambar II.4. Secara umum dapat terlihat bahwa untuk pembangunan perumahan di tahun 2005 – 2006 oleh BRR, jumlah dan distribusi untuk Kabupaten Nias lebih besar dibandingkan Kabupaten Nias Selatan. Hal ini dimungkinkan adanya sejumlah persoalan pada infrastruktur di daerah pedalaman Kepulauan Nias seperti buruknya kondisi jalan, sangat terbatasnya akses menuju pedalaman, minimnya jumlah pompa bensin, dan kapasitas pengangkutan armada yang kecil dan terbatas. Distribusi material untuk kebutuhan rekonstruksi membutuhkan penambahan jumlah truk, perbaikan jalan, dan penambahan pompa bensin, sebagai konsekuensinya. Salah satu tantangan terbesar di tahun 2006 yakni bagaimana menyediakan suplai kayu ke Kepulauan Nias untuk pembangunan rumah permanen dan semi permanen. Fasilitas pelabuhan di Gunung Sitoli terlalu kecil untuk menampung volume material bahan bangunan yang telah dikirim, di mana pada akhirnya menyebabkan padatnya pelabuhan tersebut.

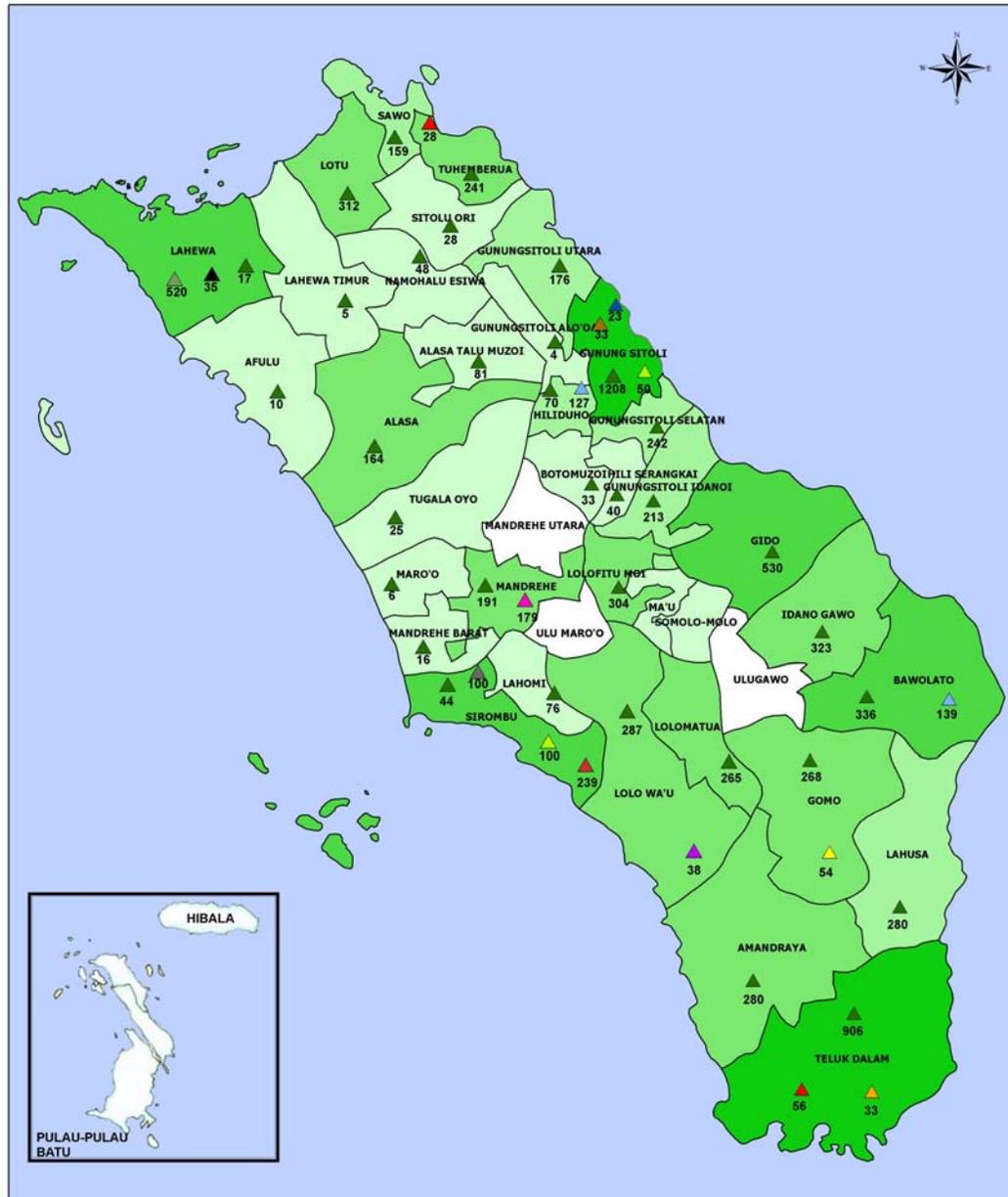
Tabel II. 22
Realisasi Kegiatan dan Anggaran BRR Sektor Perumahan dan Permukiman
Tahun 2005 – 2006

SUB BIDANG/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (Juta Rp)	Volume		Nilai (Juta Rp)	Volume	
PERUMAHAN	254,905			151,375		
A Perumahan dan Permukiman						
1 Rekonstruksi	249,408	5,075	Unit	146,631	2,980	Unit
2 Penyewa/Pengungsi	0	223	KK	0	49	KK
3 PSD	5,497	16	Unit	4,144	2	pkt
B Penataan Ruang (RTBL Kawasan Pusat Kota)	-	-	-	600	1	pkt
AIR MINUM DAN SANITASI	24,884			5,765		
A Air Minum						
1 Prasarana dan Sarana Air Minum/Limbah	10,415	7	pkt	-	-	-
2 Jaringan Pipa Air Bersih	6,272	47,858	m	2,430	12,470	m
3 Sarana dan Prasarana Air Bersih	2,539	15,971	m	-	-	-
4 Jembatan Pipa Steel	184	105.6	m	-	-	-
5 Pompa, Rumah Pompa dan Genset	208	1	unit	-	-	-
6 Jembatan Pipa	1,750	1	pkt	-	-	-
B Drainase						
1 Normalisasi/Rehab Saluran Drainase	2,362	1	pkt	2,265	1	pkt
2 Sistem Jaringan Drainase	1,154	1	pkt	1,071	1	pkt
TOTAL	279,789			157,140		

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Sebagian besar kerusakan terjadi pada fasilitas persediaan air, jaringan pipa dan sumur galian. Sejak pasca gempa terjadi, telah ada perbaikan dan pembangunan jaringan pipa air bersih sampai dengan 76.299 meter untuk seluruh Kepulauan Nias. Hampir semua rumah yang telah terbangun sudah dilengkapi dengan drainase lingkungan, tapi beberapa rumah tersebut masih belum tersedia sarana persampahan dan sanitasi untuk fasilitas pendukung perumahan yang telah dibangun. Kegiatan tersebut dilakukan oleh BRR dan komitmen NGO baru mulai akan dilaksanakan pada tahun 2007.

Gambar II. 5
Peta Realisasi Pembangunan Rumah BRR di Kepulauan Nias
Tahun 2005-2006



Legend :

4 - 81	▲ BRR	▲ UNHCR
82 - 242	▲ Kerkinactie-Holland	▲ CWS
243 - 370	▲ UN-Habitat/UNDP	▲ University Diversity Forum
371 - 682	▲ NI. Red Cross	▲ ZTOF
683 - 1314	▲ THD	▲ Caritas Sibolga
	▲ ACTED/ECHO	▲ HELP e.v
	▲ YEU/ACT	▲ Holiana'a

SPATIAL DISTRIBUTION OF HOUSING PROGRAM

Scale Map 1:364,112 in A3 Size

Date Produced : 26 Februari, 2007
 Data Source : BRR

Projection WGS_1984
 Datum WGS_1984



Sumber: Nias Islands Stakeholder Meeting 3, 26 Februari 2007

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi **sub sektor pemerintahan** difokuskan pada pembangunan yang mendukung kelancaran pemerintahan. Salah satunya dengan melakukan rehabilitasi kantor pemerintahan yang lumpuh, progress kegiatan pada akhir Desember 2006 di Kabupaten Nias telah terbangun 4 unit kantor dinas dan kecamatan, 1 unit kantor Bupati dalam tahap pembangunan, serta 1 unit gedung DPRD. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan telah direhabilitasi 1 unit kantor dinas/kecamatan dan Kantor Bupati masih dalam tahap pembangunan. Bangunan pendukung seperti pasar, sekretariat bersama di Kabupaten Nias Selatan, dan pengadaan meubelair dasar yang diperlukan turut diprioritaskan dalam pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada akhir Desember 2006, untuk **sub sektor pendidikan**, BRR telah melakukan rehabilitasi sejumlah fasilitas pendidikan. Di Kabupaten Nias telah terbangun dan direhabilitasi 99 unit SD, 14 unit SMP, 12 unit SMU, dan 1 Universitas, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan yaitu 1 unit TK, 30 unit SD, 10 unit SMP, 2 unit SMU, dan 18 unit laboratorium. Prasarana dasar meubelair untuk sekolah yang mengalami kerusakan juga telah disediakan termasuk sarana laboratorium dan buku-buku referensi yang diperlukan. Untuk memaksimalkan pendidikan di kawasan bencana, BRR juga telah memberikan beasiswa dan sejumlah pelatihan kepada 600 anak sekolah di Kabupaten Nias Selatan. Disamping peningkatan sarana-prasarana pendidikan juga diimbangi dengan peningkatan kualitas pengajar.

Di **sub sektor kesehatan**, rendahnya kualitas penduduk dan keterbatasan alokasi pendanaan kesehatan di Kepulauan Nias telah menyebabkan sub sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan sarana kesehatan yang dibangun dan direhabilitasi oleh BRR di Kabupaten Nias adalah 1 unit Rumah Sakit, 4 unit Puskesmas, 7 unit Puskesmas Pembantu, serta 5 unit rumah dinas dokter dan tenaga medis, sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan adalah 4 unit Puskemas, 5 unit Polindes, dan 1 unit rumah dinas dokter dan tenaga medis. Disamping kegiatan rehabilitasi sarana kesehatan, BRR selaku pelaksana pembangunan juga menyediakan beasiswa, pelatihan untuk penguatan kualitas tenaga medis, penyediaan obat dan perbekalan serta dukungan pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh Kepulauan Nias. Untuk selengkapnya lokasi pembangunan sarana kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Untuk mendukung kehidupan beragama di Kepulauan Nias, BRR telah merehabilitasi beberapa sarana ibadah di Kabupaten Nias antara lain 209 unit gereja, 11 unit mesjid dan 1 unit vihara, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 127 unit gereja dan 4 unit mesjid. Diharapkan dengan adanya rehabilitasi sarana ibadah ini akan meningkatkan pemanfaatan rumah ibadah sebagai sarana pelayanan kehidupan beragama bagi masing-masing umat pemeluk agama.

Di **sub sektor sosial**, BRR melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pemberdayaan perempuan dan rehabilitasi sosial. Untuk pemberdayaan wanita, BRR lebih memfokuskan pada penguatan kelembagaan melalui pembangunan gedung kursus wanita masing-masing 2 unit di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, pembinaan keluarga bencana, serta pemberdayaan sosial paska bencana gempa. Untuk rehabilitasi sosial, BRR memberikan bantuan kepada anak korban bencana untuk 2 lokasi di Kabupaten Nias dan 1 lokasi di Kabupaten Nias Selatan. Bantuan berupa biaya makan, pendidikan, serta perlengkapan sudah didistribusikan untuk 173.0000 anak panti asuhan. Selain itu juga diadakan pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial serta pembangunan panti asuhan.

Gambar II. 6
Peta Realisasi Pembangunan BRR Sub Sektor Pelayanan Kesehatan
Tahun 2005-2006



Legend :

- Hospital
- Sub District Health Centre
- Village Health Centre
- Village Polyclinic
- Clinic

SPATIAL DISTRIBUTION OF HEALTH PROGRAM
 Scale Map 1:364,112 in A3 Size
 Date Produced : 26 Februari, 2006
 Data Source : BRR
 Projection WGS_1984
 Datum WGS_1984



Sumber : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Pengembangan potensi keanekaragaman budaya Kepulauan Nias adalah sebuah kekayaan yang menjadi daya tarik wilayah tersebut. Rehabilitasi situs budaya di Kabupaten Nias Selatan telah dilaksanakan di 6 lokasi, selain itu 17 lokasi rumah adat di Kabupaten Nias dan 2 lokasi di Kabupaten Nias Selatan yang telah selesai diperbaiki BRR. Serangkaian kegiatan pengelolaan kekayaan budaya, misalnya pengadaan alat kesenian tradisional, penyelenggaraan musyawarah adat, pengrajin tradisional, festival serta pusat studi seni, budaya dan bahasa Nias telah dilakukan dalam bentuk bantuan melalui penataan lokasi pariwisata di Kepulauan Nias.

Tabel II. 23
Realisasi Kegiatan dan Anggaran BRR Sektor Kelembagaan dan Sosial
Kemasyarakatan Tahun 2005-2006

SUB BIDANG/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (Juta Rp)	Volume		Nilai (Juta Rp)	Volume	
KEPEMERINTAHAN	25,791			4,923		
A. Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan						
1. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah						
1 Kantor Dinas & Kecamatan	1,938	4	Unit	872	1	Unit
2 Kantor Bupati	4,723	1	Unit	1,687	1	Unit
3 Kantor DPRD	1,343	1	Unit	-	-	-
2. Pembangunan Gedung Negara						
1 Kantor Kodim/Koramil, gudang, rumah dinas & prasarana lainnya	6,583	3	Unit	-	-	-
2 Pengadilan negeri dan pengadilan agama (kontrak)	1,225	1	Unit	-	-	-
3 Gedung KPPN	1,319	588	M ²	-	-	-
4 Stasiun RRI, rumah dinas & prasarana lainnya	2,566	1	Unit	-	-	-
5 Kantor BPS	499	1	Unit	-	-	-
3. Rehabilitasi Bangunan / Gedung Khusus						
1 Lembaga Masyarakat (LP)	3,670	1	Unit	-	-	-
2 Sarana/Kendaraan Operasional LAPAS	923	200	M ²	30	2	Unit
3 Tembok Pagar Keliling Rutan	-	-	-	533	122	M
4 Pengadaan Meubeler Rutan	-	-	-	50	1	Paket
5 Kantor Perwakilan BRR/Sekber	1,003	1	Unit	382	1	Unit
6 Pasar	-	-	-	1,371	1	Unit
PENDIDIKAN	55,541			23,470		
A. Pembangunan Fasilitas Pendidikan						
1. Pembangunan dan Rehabilitasi						
1 TK	-	-	-	342	1	Sekolah
2 SD	37,204	99	Sekolah	12,237	30	Sekolah
3 SMP	6,766	14	Sekolah	3,834	10	Sekolah
4 SMU	3,480	12	Sekolah	-	-	-
5 Perguruan Tinggi	1,014	1	Univ.	2,184	2	Sekolah
6 Laboratorium	-	-	-	1,815	18	Sekolah
2. Penyediaan Meubelair	5,868	253	Pkt.	2,087	90	Pkt
3. Pengadaan Peralatan Laboratorium	323	25	Pkt.	-	-	-
4. Pengadaan Buku Referensi Sekolah	488	25,051	Buku	335	17,209	Buku
B. Pembangunan Kapasitas Pendidikan						
1. Beasiswa anak sekolah	-	-	-	635	600	orang
2. Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidikan	398	1	pkt	-	-	-
KESEHATAN	31,654			12,527		
A. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan						
1. Pembangunan Rumah Sakit Umum	2,515	1	unit	-	-	-
2. Pembangunan Puskesmas dan Pustu						
1 Puskesmas Rawat Inap/Rawat Jalan	2,574	4	unit	2,762	4	unit
2 Puskesmas Pembantu	1,924	7	unit	-	-	-
3 Polindes	-	-	-	403	5	unit
4 Rumah Dinas Dokter dan Paramedis	2,348	5	unit	59	1	unit
3. Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan						
1 Bantuan Operasional Puskesmas dan RS	677	4	Pkt	441	2	Pkt
2 Pengadaan Peralatan Medis / Kedokteran	5,256	10	pkt	1,577	3	Pkt
3 Revitalisasi Posyandu	883	4	keg	662	3	Pkt
4 Perbaikan Gizi Ibu, Anak dan KB	391	2	pkt	196	1	Pkt
5 Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi	337	4	keg	337	4	keg
B. Obat dan Perbekalan Kesehatan						
1. Pengadaan Obat dan Vaksin	762	1	pkt	762	1	pkt
2. Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan	3,294	1	kab	3,294	1	kab
3. Asuransi Kesejahteraan Sosial	25	1	RS	-	-	-
C. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan						
1. Program Beasiswa Dokter dan Tenaga Kesehatan	8,684	33	orang	1,316	5	orang
2. Capacity Building dan manajemen pelayanan	717	1	pkt	717	1	pkt
3. Manajemen Kesehatan (Sistem Informasi	1,265	3	pkt	-	-	-

SUB BIDANG/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (Juta Rp)	Volume		Nilai (Juta Rp)	Volume	
KEBUDAYAAN	22,071			17,011		
A Agama						
1 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama						
1 Subsidi Rehabilitasi Gereja	9,389	209	Unit	5,705	127	Unit
2 Subsidi Rehabilitasi Mesjid	415	11	Unit	151	4	Unit
3 Subsidi Rehabilitasi Vihara	19	1	Unit	-	-	-
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	409	2	Unit	-	-	-
B Sosial						
1 Pemberdayaan Perempuan						
1 Penguatan Kelembagaan (Gedung Kursus Wanita)	842	2	Unit	773	2	Unit
2 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak	613	9,926	bh	613	9,926	bh
3 Pembinaan Keluarga Berencana	67	18	keg	67	18	keg
4 Pemberdayaan Sosial Pasca Bencana	225	1	Pkt	-	-	-
2 Rehabilitasi Sosial						
1 Rehabilitasi Sosial						
a. Bantuan Anak Korban Bencana	49	2	lokasi	24	1	lokasi
b. Biaya Makan/Pendidikan Anak Panti Asuhan	1,545	86,500	orang	1,545	86,500	orang
c. Biaya Perlengkapan Anak Panti Asuhan	395	1	Pkt	395	1	Pkt
2 Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial						
a. Pemetaan Permasalahan Sosial Budaya Pasca Benca	143	1	keg	-	-	-
b. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	414	207	KK	-	-	-
c. Panti Sosial	1,304	4	Unit	652	2	Unit
d. Pelatihan	145	3	Angk	97	2	Angk
3 Panti Asuhan	1,186	1	Unit	1,173	1	Unit
C Budaya						
1 Pengelolaan Keragaman Budaya (Rehabilitasi)						
1 Situs Budaya	-	-	-	1,365	6	lokasi
2 Rumah Adat	968	17	lokasi	840	2	lokasi
2 Pengelolaan Kekayaan Budaya						
1 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	820	1	Unit	820	1	Unit
2 Penyelenggaraan Musyawarah Adat	300	1	kab	300	1	kab
3 Pemberdayaan Pengrajin Tradisional	1,362	1	kab	1,362	1	kab
4 Penyelenggaraan Festival dan Pameran Seni Budaya	1,035	1	kab	1,035	1	kab
5 Pembentukan Pusat Studi Seni, Budaya dan Bahasa	150	1	unit	-	-	-
3 Pengembangan Pariwisata (Penataan lokasi pariwisata)	278	3	lokasi	93	1	lokasi
TOTAL	135,057			57,931		

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi **sektor ekonomi** yang telah diselesaikan BRR sejak tahun 2005 sampai 2006 lebih terfokus di Kabupaten Nias dibandingkan Kabupaten Nias Selatan, karena fokus untuk Kabupaten Nias Selatan akan dilaksanakan mulai pada tahun 2007. Untuk sub sektor perdagangan yaitu pembangunan pasar tradisional dan penunjang sebanyak 8 unit di Kabupaten Nias Selatan, dan 4 unit di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu untuk menghidupkan kembali perdagangan di Kepulauan Nias ini, BRR telah memberikan bantuan usaha ekonomi produktif, serta bantuan modal bergilir untuk para pedagang.

Di **sub sektor pertanian**, hingga Desember 2006 BRR memberikan bantuan di Kabupaten Nias terutama pada peralatan pertanian (*power thresher*, alat pertanian kecil, traktor, pompa air) serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan usaha tani. Untuk meningkatkan hasil perkebunan, BRR memberikan bantuan intensifikasi tanaman karet seluas 440 hektar dan kakao seluas 400 hektar, sehingga diharapkan pendapatan dari perkebunan untuk Kabupaten Nias bertambah.

Pada pelatihan dan tenaga kerja, BRR telah melaksanakan 60 kegiatan pelatihan tenaga kerja dan bantuan modal kerja atau peralatan penunjang usaha keterampilan sebanyak 55 unit di Kabupaten Nias. Di sub sektor Koperasi dan UKM, BRR telah memberikan pemberdayaan industri kecil dan menengah, pengembangan dan penyeleenggaraan bimbingan koperasi dan pengusaha kecil, serta bantuan modal kerja industri rumah tangga di Kabupaten Nias, sedangkan bantuan peralatan kerja diberikan untuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Tabel II. 24
Realisasi Kegiatan dan Anggaran BRR Sektor Ekonomi
Tahun 2005-2006

SUB BIDANG/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS		KABUPATEN NIAS SELATAN	
	Nilai (Juta Rp)	Volume	Nilai (Juta Rp)	Volume
EKONOMI	41,427		824	
A. Perdagangan				
1 Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	765	1 pkt	-	-
2 Perencanaan / DED Pasar	135	1 unit	-	-
3 Pembangunan Pasar Tradisional	804	3 unit	261	1 unit
4 Pembangunan Pasar Penunjang	622	5 unit	262	3 unit
5 Bantuan Modal Bergilir Pedagang	600	30 unit	-	-
B. Pertanian				
1 Pengadaan Power Thresher	780	60 unit	-	-
2 Pengadaan Alat Pertanian Kecil	216	960 unit	-	-
3 Pengadaan Hand Tractor Type Bajak Singkal	143	8 unit	-	-
4 Pengadaan Pompa Air 6" dan Kelengkapannya	103	4 unit	-	-
5 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	1,246	250 ha	-	-
6 Pengembangan Usaha Tani	1,509	500 ha	-	-
C. Perkebunan				
1 Intensifikasi Tananam Karet	1,122	440 ha	-	-
2 Intensifikasi Tananam Kakao	1,005	400 ha	-	-
D. Pelatihan dan Tenaga Kerja				
1 Pelatihan Tenaga Kerja	1,118	60 keg	-	-
2 Bantuan Modal Kerja / Peralatan Penunjang Usaha Ketrampilan	485	55 unit	-	-
E. Koperasi dan UKM				
1 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	61	22 unit	-	-
2 Bantuan Peralatan Kerja	3	1 kab	3	1 kab
3 Pengembangan Koperasi Dan Pengusaha Kecil	3,960	612 unit	-	-
4 Bantuan Modal Kerja Industri Rumah Tangga	400	200 RT	-	-
5 Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil	8,052	18 pkt	-	-
F. Perikanan				
1 Bantuan Pengadaan Peralatan Kepada UKM	24	8 unit	-	-
2 Bantuan Modal Usaha Pengolahan Ikan	350	100 orang	-	-
3 Pengadaan Peralatan Tangkap Ikan	2,320	104 unit	-	-
4 Pengadaan Kapal Bermotor Skala Kecil 3 - 5 GT	5,765	104 unit	-	-
5 Pelatihan Penanganan Ikan dan Pengenalan terhadap Bahan Pengawet	39	20 orang	-	-
6 Pengembangan Sarana Perikanan	2,687	544 unit	-	-
7 Pembangunan Komplek Dermaga PPI, Pembangunan Rumah Dinas Type 36 (2 unit), Kantor Adm, Pos Satpam (3 Unit), Gudang, Toilet Umum, Rumah Genset dan Jaringan listrik, Balai pertemuan	5,752	6 unit	-	-
G. Peternakan				
1 Pemberantasan Penyakit Menular Hewan dan Unggas	50	2 Pkt	-	-
2 Pengadaan Obat-obatan / Vaksin	50	4 kelompok	-	-
3 Rehabilitasi Rumah Pemotongan Hewan / RPH	324	2 unit	-	-
4 Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Ter	600	10 kelompok	-	-
H. Lahan dan Kawasan Pantai				
1 Transplantasi Terumbu Karang	298	1 lokasi	298	1 lokasi
2 Pendidikan & Pelatihan Amdal	41	7 org	-	-
TOTAL	41,427		824	

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Sebagai salah satu sektor unggulan Kepulauan Nias, BRR memberikan bantuan pada **sub sektor perikanan** antara lain melalui pengadaan 8 unit peralatan kepada UKM, pemberian modal usaha pengolahan ikan untuk 100 orang, pengadaan 104 unit kapal bermotor 104 unit peralatan tangkap ikan, pengembangan sarana perikanan sebanyak 544 unit, dan 6 unit pembangunan kompleks dermaga PPI. Selain bantuan fisik, BRR juga memberikan pelatihan penangkapan ikan dan pengenalan terhadap bahan pengawet kepada 20 orang.

Bantuan BRR hingga akhir Desember 2006 di **sub sektor peternakan** telah diadakan pemberantasan penyakit menular hewan dan unggas, pengadaan obat-obatan dan vaksin dan rehabilitasi rumah pemotongan hewan. Di samping itu BRR juga memberikan bantuan pinjaman langsung masyarakat untuk pengembangan produksi ternak. Sub

sektor terakhir dari perekonomian adalah sub sektor hutan, lahan dan kawasan pantai. Khusus untuk kawasan pantai, BRR telah melakukan transplantasi terumbu karang serta pendidikan dan pelatihan Amdal untuk Kepulauan Nias.

Pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005-2006 yang sudah dilaksanakan BRR, total anggaran yang ditetapkan tidak sepenuhnya terserap dalam tahun tersebut. Sisa dana BRR yang tidak terserap tersebut dimasukkan ke dalam rekening *Trust Fund* dengan jumlah sebesar Rp. 61 miliar. Dana yang terdapat di rekening *trust fund* akan digunakan untuk pembangunan lanjutan tahun 2006 dan berjalan paralel dengan proyek tahun 2007. Mekanisme tentang rekening keuangan tersebut akan disebarluaskan/disampaikan BRR kepada Pemerintah Daerah setempat agar serapan dapat menjadi 100 persen.

II.2.2. Pemerintah Daerah

Pihak pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan telah melakukan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi secara paralel dengan BRR melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Realisasi kemajuan kegiatan tersebut dapat dilihat pada APBD tahun 2006. Pada APBD tahun anggaran 2005 tidak terdapat jenis kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi karena APBD ini disusun sebelum bencana gempa terjadi. Penyisiran yang telah dilakukan pada masing-masing APBD, kecuali APBD Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2006, menghasilkan rincian yang ditunjukkan pada tabel II.24.

Jenis kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditunjukkan dalam tabel diatas merupakan rekapitulasi kegiatan yang ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jumlah anggaran APBD yang dialokasikan untuk pembangunan adalah sebesar Rp.23.998.279.500,00. sedangkan rekonstruksi sarana-prasarana di Kabupaten Nias Selatan hanya mencapai sekitar Rp.4.380.334.200,00.

Tabel II. 25
Kegiatan Rehabilitasi-Rekonstruksi dalam APBD Provinsi
Tahun Anggaran 2006

PILAR	SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME TA. 2006	APBD Provinsi 2006 (Ribu Rp)		
			Nias	Nias Selatan	
INFRASTRUKTUR			21.677.200	4.019.830	
	A Transportasi		18.690.000	3.500.000	
	a Jalan Nasional dan Propinsi				
	1 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di kabupaten Nias/Nias Selatan	1 pkt	780.000	*	
	b Jalan Kabupaten				
	- Jalan				
	1 Lanjutan pembangunan jalan ruas Helefanikha-Hilizarito	1 pkt	900.000	-	
	2 Lanjutan pembangunan jalan ruas Hilina'a-Mazingo	1 pkt	900.000	-	
	3 Peningkatan jalan ruas Lahewa-Marafala menuju Dusun III Desa Ombolata	1 pkt	600.000	-	
	4 Lanjutan pembangunan jalan ruas Mazingo Simandraoloh-Lolowonu Nitootano	1 pkt	650.000	-	
	5 Peningkatan Jalan Gunung Sitoli Tuhemberua KM.55	1 pkt	2.997.700	-	
	6 Peningkatan Jalan Tuhemberua KM.55 Lahewa	1 pkt	2.988.300	-	
	- Jembatan				
	1 Penggantian Jembatan Idano Matuho	1 pkt	1.440.000	-	
	2 Penggantian Jembatan Idano Tugala	1 pkt	1.440.000	-	
	3 Penggantian Jembatan Idano Sorake (Tahap I)	1 pkt	-	1.500.000	
	4 Lanjutan Penggantian Jembatan Idano Camo	1 pkt	1.997.000	-	
	5 Lanjutan Penggantian Jembatan Idano Bouso	1 pkt	1.997.000	-	
	6 Lanjutan Penggantian Jembatan Idano Afa	1 pkt	2.000.000	-	
	7 Lanjutan Penggantian Jembatan Idano Boe	1 pkt	0	2.000.000	
	8 Pembongkaran dan Pengangkutan Jembatan Eks Bencana Alam Gempa di Jembatan Idano Gao (120 meter), Idano Muzoi (60 meter), Idano Lafao (80 meter)	1 pkt			
	D Sumber Daya Air			2.987.200	519.830
	1 Irigasi				
	1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Areal 1000-3000 hektar dan irigasi lintas kabupaten/kota pada UPT/Balai PSDA di kabupaten Nias Selatan dengan luas irigasi 1.258 hektar	1 pkt		0	169.830
	2 Pengendalian, Perencanaan, Koordinasi dan Operasional Pengelolaan SDA Sungai pada UPT/Balai PSDA Nias	1 pkt		30.500	-
	2 Sungai dan Pengendalian Banjir				
	1 Pengendalian sungai Nou di Desa Tumoari Bolohili dan Desa Dahana Sogawu-gawu	1 pkt		800.000	-
	2 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sungai serta Pembinaan dan Koordinasi Pengamanan Badan Sempadan Sungai UPT/Balai PSDA Nias	1 pkt		150.000	-
	3 Operasional bimbingan pelaksanaan penyusunan SID dan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bencana alam Nias dan Nias Selatan serta Kabupaten Lainnya	1 pkt		100.000	*
	3 Pengamanan Pantai				
	1 Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengamanan Sungai dan Pantai pada BPSDA Nias (Sungai Oloro) Pekerjaan Lanjutan TA 2005 Pembangunan Tembok Beronjong Kawat sepanjang 250 meter Desa Oloro Kecamatan Gunung Sitoli	1 pkt		357.000	-
	2 Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengamanan Sungai dan Pantai pada BPSDA Nias (Sungai Gambu) Pekerjaan Lanjutan TA 2005 Pembangunan Krip Beronjong Kawat sepanjang 40 meter di beberapa tempat Desa Lolomoyo Twi	1 pkt		990.000	-
	3 Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengamanan Sungai dan Pantai pada BPSDA Nias (Sungai Batoto) Pekerjaan Lanjutan TA 2005 Pembangunan Tembok Beronjong Kawat sepanjang 150 meter Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Kabu	1 pkt		550.000	-
4 Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengamanan Sungai dan Pantai pada BPSDA Nias (Sungai Saua) Pekerjaan Lanjutan TA 2005 Pembangunan Tembok Beronjong Kawat sepanjang 100 meter Desa Bawo Dobora Kecamatan Teluk Dalam	1 pkt		-	350.000	
5 Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengamanan Sungai dan Pantai pada BPSDA Nias (Sungai Sinoto) Pekerjaan Lanjutan TA 2005 Pembangunan Tembok Beronjong Kawat sepanjang 75 meter Kecamatan Hiliduo Kabupaten Nias	1 pkt		9.700	-	
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			290.590	0	
A Perumahan					
B Air Minum dan Sanitasi			290.590	0	
1 Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Pedesaan Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias	1 pkt		290.590	-	

Kondisi Umum Daerah Bencana Kepulauan Nias

PILAR	SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME TA. 2006	APBD Provinsi 2006 (Ribu Rp)	
			Nias	Nias Selatan
KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA			1.004.800	153.705
	A Pemerintahan		50.000	0
	I Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah/Negara			
	1 Pembuatan Pagar Rumah Dinas UPT Balai Pembinaan Wilayah VI Gunung Sitoli	1 pkt	50.000	-
	B Pendidikan		954.800	0
	1 Pengembangan Universitas Nias di Gunung Sitoli	1 pkt	389.800	-
	2 Perbaikan dan renovasi sarana dan prasarana fasilitas pendidikan jasmani/olahraga akibat kerusakan bencana gempa (Miga Beach)	1 pkt	565.000	-
	C Kesehatan			
	D Budaya		0	153.705
	1 Budaya			
a Pengelolaan Keragaman Budaya				
1 Konservasi Pelestarian Omohada Hilinawali Majingo di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan	1 pkt	-	53.705	
b Pengembangan Pariwisata				
1 Pembuatan Film Produksi The Amazing, Marina And Paradise in North Sumatera di Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan	1 pkt	-	100.000	
PENGEMBANGAN EKONOMI			640.690	25.576.404
	A Perdagangan			
	B. Pertanian			
	1 Pemeliharaan jeruk di Nias Selatan	1 pkt	-	25.493
	C. Perkebunan			
	1 Intensifikasi Tananam Karet			
	1 Optimalisasi Pertanaman Kopi di Kawasan Nias Selatan melalui pola diversifikasi dengan tanaman pangan seluas 15 hektar	1 pkt	-	25.395.000
	2 Pemeliharaan Tanaman di Kebun Induk Sirombu seluas 4 hektar	1 pkt	7.200	-
	3 Bantuan bibit kelapa dalam mendukung pelestarian tanaman di Kabupaten Nias sejumlah 2.000 batang	1 pkt	500	-
	2 Pelatihan			
	1 Tindak Lanjut Pelatihan Peningkatan SDM Petani Kakao sebanyak 40 orang melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) dan Agribisnis Kakao di Kabupaten Nias	1 pkt	17.080	-
	2 Pelatihan Peningkatan SDM Petani Kakao sebanyak 40 orang melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) dan Agribisnis Kakao di Kabupaten Nias	1 pkt	73.260	-
	3 Pengadaan Bibit dan Pupuk			
	1 Bantuan bibit kelapa dalam mendukung pelestarian tanaman di Kabupaten Nias sejumlah 2.000 batang	1 pkt	38.066	-
	2 Bantuan Bibit Kakao dalam rangka mendukung perluasan dan peremajaan di Kabupaten Nias Selatan sejumlah 18.360 batang	1 pkt	58.080	-
	3 Tindak Lanjut Pelatihan Peningkatan SDM Petani Kakao sebanyak 40 orang melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) dan Agribisnis Kakao di Kabupaten Nias	1 pkt	4.875	-
	4 Pelatihan Peningkatan SDM Petani Kakao sebanyak 40 orang melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) dan Agribisnis Kakao di Kabupaten Nias	1 pkt	11.800	-
	5 Pemeliharaan Tanaman di Kebun Induk Sirombu seluas 4 hektar	1 pkt	3.250	-
	D. Pelatihan dan Tenaga Kerja			
	E. Koperasi dan UKM			
	F. Perikanan			
	1 Pelatihan Penangkapan Ikan di Kapal Tuna Long Line 2 angkatan di Kabupaten Nias Selatan	1 pkt	-	103.911
	2 Pembinaan / Pengolahan (Optihandis) di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan	1 pkt	-	25.725
	G. Peternakan			
	H. Hutan, Lahan dan Kawasan Pantai			
	1 Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Lintas Kabupaten / Kota (7 Kabupaten / Kota) Pelabuhan Sibolga, Natal, Gunung Sitoli dan Nias Selatan di UPTD Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BPPHH IV)	1 pkt	5.420	*
	2 UPR-PJJ Gunung Sitoli	1 pkt	238.509	-
3 Pembinaan / Pengolahan (Optihandis) di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan	1 pkt	-	26.275	
4 UPT / Balai PSDA Nias	1 pkt	182.650	-	
TOTAL			23.613.280	29.749.939

Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006

Selain APBD provinsi, masing-masing kabupaten juga mengalokasikan anggaran pembangunan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana yang telah ada atau telah dibangun oleh BRR dan Donor/NGO. Total alokasi yang diperoleh dari hasil penyesiran dalam APBD Kabupaten Nias tahun anggaran 2006 adalah sekitar Rp. 61.271.861.068,00. Anggaran yang terdapat dalam APBD 2006 Kabupaten Nias ini adalah diluar alokasi dana dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan BRR.

Tabel II. 26
Kegiatan Rehabilitasi-Rekonstruksi dalam APBD Kabupaten Nias
Tahun Anggaran 2006

PILAR	SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME		Nilai
		Volume	Satuan	(Ribu Rp)
INFRASTRUKTUR				30,161,538
	A Transportasi			25,882,846
	a Jalan Nasional dan Propinsi			
	b Jalan Kabupaten			
	- Jalan	61	paket	24,700,053
	- Jembatan	3	paket	1,182,793
	D Sumber Daya Air			4,278,692
	1 Irigasi			
	1 Rehabilitasi Daerah irigasi	2	paket	139,619
	2 Sungai dan Pengendalian Banjir			
	1 Rehabilitasi sungai	5	paket	1,903,012
	2 Pemasangan Bronjong	3	paket	1,450,000
	3 Pemasangan Tembok penahan sungai	5	paket	786,061
3 Pengamanan Pantai				
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				3,062,381
	A Perumahan			
	B Air Minum dan Sanitasi			3,062,381
	1 Pembangunan sarana air bersih	6	paket	1,652,300
	2 Rehabilitasi fasilitas sanitasi	5	paket	411,000
3 Rehabilitasi fasilitas drainase	6	paket	999,081	
KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA				24,984,702
	A Kepemerintahan			1,833,210
	1 Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah/Negara	7	unit	649,800
	2 Pembangunan gedung olahraga	3	paket	774,410
	3 Rehabilitasi Rumah Dinas	1	paket	209,000
	4 Pemugaran makam	1	paket	200,000
	B Pendidikan			19,482,492
	1 Kantor Dinas	3	paket	440,000
	2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi TK	-		-
	3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi SD	57	paket	11,250,000
	4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi SMP	19	paket	2,884,394
	5 Rehabilitasi dan Rekonstruksi SMU	14	paket	2,412,100
	6 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas	1	paket	1,722,788
	7 Pembuatan Sertifikat	1	paket	20,000
	8 Pengadaan Mebeulair	4	paket	692,000
	9 Rehabilitasi Pagar	1	paket	61,210
	C Kesehatan			3,669,000
	1 Rehabilitasi Rumah Dinas untuk Puskesmas	1	paket	201,250
	2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Puskesmas	3	paket	580,501
	3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pustu	14	paket	2,356,249
	4 Rehabilitasi Polindes	1	paket	50,000
	5 Pembangunan Ruang Belajar Darurat SPK	1	paket	81,000
	6 Rehabilitasi Rumah Dinas untuk Rumah Sakit	1	paket	200,000
	7 Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit	1	paket	200,000
	D Budaya			
				3,063,241
	PENGEMBANGAN EKONOMI	A Perdagangan		
B. Pertanian				
C. Perkebunan				
1 Intensifikasi Lahan Tanaman Karet.		1	paket	40,205
2 Pembangunan kebun baru		3	paket	143,430
3 Pengadaan Bibit dan Pupuk		2	paket	88,400
D. Pelatihan dan Tenaga Kerja				
E. Koperasi dan UKM				
1 Pembangunan Lood Terbuka		2	paket	178,200
F. Perikanan				
1 Pembangunan TPI		1	paket	1,144,001
2 Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)		2	paket	1,469,005
G. Peternakan				
H. Hutan, Lahan dan Kawasan Pantai				
TOTAL			61,271,861	

Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2006

Besarnya anggaran dalam APBD Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2006 yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah Rp. 26,344,890,000,00. Kegiatan yang dilakukan dalam tabel berikut ini merupakan hasil penyisiran dalam laporan APBD kabupaten Nias Selatan dan tidak tercantum dalam anggaran realisasi BRR tahun 2005-2006.

Tabel II. 27
Kegiatan Rehabilitasi-Rekonstruksi dalam APBD Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2006

PILAR	SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME		Nilai
		Volume	Satuan	(Ribu Rp)
INFRASTRUKTUR				7,268,250
	A Transportasi (jalan Kabupaten)			5,530,250
	1 Rehabilitasi jalan dari jalan kota kec. Gomo menuju Boronadu kec. Gomo	1	paket	825,000
	2 Rehabilitasi jalan baru dari jalan propinsi menuju terminal+ 3 buah duiker plat	1	paket	550,000
	3 Rehabilitasi jalan dari desa Togizila dan Lorong Buluko Hiladulo Ewo	1	paket	990,000
	4 Rehabilitasi jalan dari Orahili Bawoluo menuju Nitankara Fondrako raya	1	paket	1,100,000
	5 Rehabilitasi berat jalan longsor menuju kecamatan Lolomatua	1	paket	305,250
	6 Rehabilitasi Jalan dari Tuhemberua menuju sungai Oyo kec. Lolomatua	1	paket	990,000
	7 Rehabilitasi jalan dari desa Lalimanawa menuju desa Sifalago kec. Lolomatua	1	paket	770,000
	D Sumber Daya Air (irigasi)			1,738,000
	1 Pembangunan jaringan irigasi di desa Hilisimaetano Fawoto kec. Teluk Dalam	1	paket	577,500
	2 Pembangunan jaringan irigasi di desa Sifaoroasi kec. Lolowau	1	paket	583,000
	3 Pembangunan jaringan irigasi di Saraina desa Tetezuo kec. Lahusa	1	paket	577,500
	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
A Perumahan				
B Air Minum dan Sanitasi				1,837,000
1 Rehabilitasi/pengadaan air bersih di desa Hilizalo'otano kec. Teluk dalam		1	paket	286,000
2 Pengadaan sarana air bersih di desa Botohilitano kec. Teluk dalam		1	paket	275,000
3 Pengadaan sarana air bersih di desa Koendrafo kec. Lolomatua		1	paket	110,000
4 Pengadaan sarana air bersih di Mude/Hiliadulo desa Togizita kec. Lolowau		1	paket	286,000
5 Pengadaan sarana air bersih di desa Sisarahili Oyo kec. Lolowau		1	paket	275,000
6 Pengadaan sarana air bersih di desa Tetegawa'ai kec. Gomo		1	paket	110,000
7 Pengadaan sarana air bersih di desa Helezalulu kec. Lahusa		1	paket	275,000
8 Pengadaan sarana air bersih di Hililuo salawa desa Hiligehe kec. Teluk dalam	1	paket	220,000	
KELEMBAGAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN				12,301,000
	A Pemerintahan			4,400,000
	Pembangunan kantor Bupati Nias Selatan	1	paket	4,400,000
	B Pendidikan			
	C Kesehatan			7,901,000
	1 Rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas kec. Amandaraya	1	paket	184,800
	2 Pembangunan baru polindes Onohondro kec. Teluk dalam	1	paket	165,000
	3 Rehabilitasi Puskesmas Hilisimaetano kec. Teluk Dalam	1	paket	660,000
	4 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Soliga kec. Lolowa'u	1	paket	220,000
	5 Rehabilitasi Puskesmas Tebolo kec. Hibala	1	paket	220,000
6 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Lawa-lawa dan Idano Tae kec. Gomo	1	paket	220,000	
7 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sifaoroasi kec. Lolomatua	1	paket	220,000	

PILAR	SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME		Nilai	
		Volume	Satuan	(Ribu Rp)	
KELEMBAGAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	8 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Hilidohona kec. Lahusa	1	paket	220,000	
	9 Peningkatan Puskesmas Lolowa'u kec. Lolowa'u	1	paket	200,000	
	10 Peningkatan Puskesmas Pembantu Hilisataro kec. Teluk dalam	1	paket	200,000	
	11 Peningkatan Puskesmas Tuhemberua kec. Lolomatua	1	paket	346,500	
	12 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Bale-bale kec. PP Batu	1	paket	100,000	
	13 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Labuhan Hiu kec. PP Batu	1	paket	100,000	
	14 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Hiliamozula kec. Amandaraya	1	paket	100,000	
	15 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Fondrakaraya kec. Amandaraya	1	paket	100,000	
	16 Rehabilitasi Puskesmas pembantu Umbunasi kec. Gomo	1	paket	100,000	
	17 Rehabilitasi Puskesmas pembantu Hilimbowo Kec. Gomo	1	paket	100,000	
	18 Rehabilitasi Puskesmas pembantu Hiliambasela Kec. Hibala	1	paket	100,000	
	19 Rehabilitasi Puskesmas pembantu Baluta Kec. Hibala	1	paket	100,000	
	20 Rehabilitasi Puskesmas pembantu Orahili Kec. Lahusa	1	paket	100,000	
	21 Rehabilitasi Puskesmas pembantu Bawonaunu Kec. Lahusa	1	paket	100,000	
	22 Rehabilitasi Puskesmas pembantu Hilifalago Kec. Teluk dalam	1	paket	126,500	
	23 Pengadaan dental set, peralatan bedah, peralatan laboratorium set, bidan kit dan puskesmas kit	1	paket	3,918,200	
	D Budaya				4,938,640
	PENGEMBANGAN EKONOMI	A Perdagangan			
		B. Pertanian			1,924,640
		1 Pembuatan kebun entris dan pemeliharannya di Kec. Teluk Dalam	1	paket	220,770
		2 Penumbuhan sentra peternakan babi di 6 kecamatan, pengadaan ternak kambing 100 ekor dan bantuan konsentrat	1	paket	747,640
		3 Pembuatan bibit karet batang bawah di kec. Gomo	1	paket	109,808
		4 Pembuatan bibit karet batang bawah di kec. Lolomatua	1	paket	109,808
5 Pembuatan bibit karet batang bawah di kec. Lolowa'u		1	paket	109,808	
6 Pembuatan bibit karet batang bawah di kec. Teluk dalam		1	paket	109,808	
7 Penumbuhan sentra penangkar benih padi di 3 kecamatan, pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan		1	paket	517,000	
C. Perkebunan					
D. Pelatihan dan Tenaga Kerja					
E. Koperasi dan UKM					
F. Perikanan				3,014,000	
1 Pembangunan tambatan perahu di Bawozihono kec. Lahusa		1	paket	297,000	
2 Pembangunan tambatan perahu di Bologia kec. PP batu		1	paket	297,000	
3 Pengadaan 15 unit kapal penangkap ikan 3 GT.23 PK dan alat tangkap		1	paket	1,650,000	
4 Pengadaan 20 unit Perahu bermotor 0,5 GT.5,5 PK dan alat tangkap		1	paket	220,000	
5 Pengadaan 1 unit sarana transportasi antar pulau		1	paket	550,000	
G. Peternakan					
H. Hutan, Lahan dan Kawasan Pantai					
TOTAL				26,344,890	

Sumber : Hasil Pengolahan Data APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2006

II.2.3. Donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)

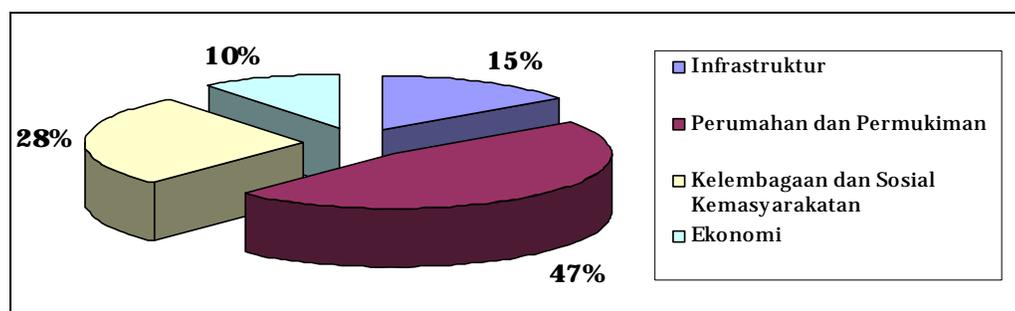
Dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut tidak lepas dari peran serta dari beberapa Donor/NGO baik dari tingkat nasional maupun international. Total realisasi anggaran Donor/NGO tahun anggaran 2005-2006 mencapai Rp. 730 Miliar. Realisasi terbesar terdapat pada sektor perumahan dan permukiman yaitu mencapai 47 persen dari total realisasi, kemudian 28 persen di sektor kelembagaan dan sosial kemasyarakatan, 15 persen di sektor infrastruktur, dan 10 persen di sektor ekonomi. Realisasi terbesar pada sektor perumahan dan permukiman serta kelembagaan dan sosial kemasyarakatan menandakan bahwa kedua sektor tersebut adalah sektor prioritas menurut Donor/NGO.

Tabel II. 28
Realisasi Anggaran Donor/NGO
Tahun Anggaran 2005-2006

No	Sektor/Sub Sektor	Realisasi Off Budget (Ribu Rp)		
		Nias	Nias Selatan	Total
1	Infrastruktur	87,139,791	22,576,833	109,716,624
	Transportasi *	84,013,785	22,576,833	106,590,618
	Energi dan Telekomunikasi	390,006	0	390,006
	Infrastruktur Sumber Daya Air *	2,736,000	0	2,736,000
2	Perumahan dan Permukiman	248,722,254	94,098,276	342,820,530
	Perumahan	113,358,015	66,801,006	180,159,021
	Air Minum dan Sanitasi	135,364,239	27,297,270	162,661,509
3	Kelembagaan dan Sosial	154,267,063	49,720,369	203,987,432
	Kepemerintahan	1,521,567	3,817,278	5,338,845
	Pendidikan	86,808,569	25,352,587	112,161,155
	Kesehatan	42,705,209	8,202,873	50,908,082
	Kebudayaan	23,231,718	12,347,631	35,579,349
4	Ekonomi	55,877,472	18,484,515	74,361,987
	Total Off Budget	546,006,580	184,879,993	730,886,573

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Gambar II. 7
Persentase Realisasi Anggaran Donor/NGO
Tahun Anggaran 2005-2006



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B, 2007

Di **sektor infrastruktur** Kepulauan Nias, peran Donor/NGO terutama di sub sektor transportasi (jalan), energi dan kelistrikan, pos dan telekomunikasi serta sumber daya air. Pada sub sektor transportasi di Kabupaten Nias, Donor/NGO telah menyelesaikan desain Pelabuhan Gunung Sitoli, serta pengadaan 1 unit kapal ferry. Selain itu juga telah diselesaikannya rehabilitasi jalan kabupaten sepanjang 32 km, rehabilitasi/pembangunan jembatan sebanyak 24 unit, serta pengadaan angkutan logistik sebanyak 150 unit. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan, Donor/NGO telah menyelesaikan rehabilitasi jalan kabupaten sepanjang 23 km, dan rehabilitasi/pembangunan jembatan sebanyak 4 unit, serta pengadaan angkutan logistik sebanyak 150 unit.

Di **sub sektor kelistrikan**, akhir Desember 2006 Donor/NGO telah menyelesaikan rehabilitasi 2 paket jaringan distribusi listrik, sedangkan pada sub sektor telekomunikasi telah diselesaikannya rehabilitasi 1 unit jaringan distribusi di Kabupaten Nias. Sedangkan untuk sub sektor sumber daya air, telah diselesaikan rehabilitasi daerah irigasi seluas 1.248 hektar yang tersebar di Kabupaten Nias.

Tabel II. 29
Realisasi Kegiatan dan Anggaran Donor/NGO Sektor Infrastruktur
Tahun Anggaran 2005-2006

SUB SEKTOR/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (USD)	Volume		Nilai (USD)	Volume	
A Transportasi	9,334,865			2,508,537		
1 Transportasi Laut dan ASDP						
a Laut (Pelabuhan)	567,981	1	unit	-	-	-
b ASDP (pengadaan Kapal Ferry)	4,501,984	1	unit	-	-	-
2 Transportasi Darat, Jalan dan Kereta Api						
a Jalan Kabupaten						
- Jalan	768,092	32	km	1,574,766	23	km
- Jembatan	2,278,476	24	m	477,573	4	m
b Transportasi darat (angkutan logistik)	1,218,332	150	unit	456,198	150	unit
B Energi dan Telekomunikasi	43,334			0		
1 Listrik						
a Jaringan Distribusi	21,667	2	pkt	-	-	-
2 Telekomunikasi						
a Jaringan Distribusi	21,667	1	unit	-	-	-
C Infrastruktur Sumber Daya Air	304,000			0		
1 Irigasi	304,000	1,248	Ha	-	-	-
TOTAL	9,682,199			2,508,537		

Sumber : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Pada **sektor perumahan dan permukiman**, Donor/NGO telah merehabilitasi dan merekonstruksi rumah di Kabupaten Nias sebanyak 2.457 unit dan 275 unit di Kabupaten Nias Selatan. Pembangunan rumah sementara sebanyak 32 unit di Kabupaten Nias Selatan serta perumahan untuk penyewa/pengungsi sebanyak 66 unit di Kabupaten Nias. Selain itu Donor/NGO juga menyediakan bahan material kayu untuk pembangunan maupun rehabilitasi perumahan penduduk sebanyak 200 m³.

Pada sektor permukiman, Donor/NGO lebih memprioritaskan pada penyediaan fasilitas air bersih, pembangunan tempat penampungan air, normalisasi air bersih, serta rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (MCK) yang tersebar baik di Kabupaten Nias maupun Nias Selatan. Perlunya pembangunan sanitasi dikarenakan banyak pemukiman di Kepulauan Nias tidak memiliki sanitasi serta akses mendapatkan air bersih.

Tabel II. 30
Realisasi Kegiatan Donor/NGO Sektor Perumahan dan Permukiman
Tahun 2005-2006

SUB SEKTOR/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (USD)	Volume		Nilai (USD)	Volume	
A Perumahan	12,595,335			7,422,334		
1 Perumahan						
a Rekonstruksi Rumah	5,353,560	2,457	Unit	1,676,334	275	Unit
b Rehabilitasi Rumah	891,969	720	Unit	-	-	-
c Rumah Sementara	-	-	-	196,000	32	Unit
d Penyewa/Pengungsi	799,806	66	Unit	-	-	-
e Penyediaan Bahan Material (kayu)	5,550,000	10,000	m3	5,550,000	10,000	m3
B Air Minum dan Sanitasi	15,040,471			3,033,030		
1 Air Minum						
a Penyediaan fasilitas air bersih(utk rumah)	491,817	10,651	unit	34,605	178	unit
b Pembangunan tempat penampungan air	631,250	28	unit	-	-	-
c Normalisasi air bersih	25,000	4	m	-	-	-
d Rehab sarana dan prasarana air bersih	4,388,925	21	pkt	46,283	5	unit
2 Sanitasi						
a Penyediaan fasilitas air bersih(utk rumah)	4,045,265	33	kec	2,952,142	6	kec
b Pembangunan tempat penampungan air	5,458,214	2,136	unit	-	-	-
TOTAL	27,635,806			10,455,364		

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Di **sektor kelembagaan dan sosial kemasyarakatan**, kegiatan yang telah dilakukan oleh Donor/NGO pada sub sektor pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan adalah pembangunan gedung pemerintahan sebanyak 2 unit, rehabilitasi gedung publik 2 unit, serta pembangunan kapasitas pemerintahan melalui pelatihan kepada 52 orang di Kabupaten Nias dan 118 orang di Kabupaten Nias Selatan, serta penguatan pemerintahan kecamatan di 2 kecamatan Kabupaten Nias Selatan.

Pada **sub sektor pendidikan** di Kabupaten Nias, Donor/NGO telah membangun 2 unit TK, 38 unit SD, 7 unit SMP, 2 unit SMU, 1 unit Sekolah Sementara, dan rehabilitasi sanitasi di 4 sekolah. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan, telah dibangun 3 unit TK, 6 unit SD, 2 unit SMU, 1 unit universitas, 1 unit Sekolah Sementara, dan rehabilitasi sanitasi di 1 sekolah. Selain pembangunan fasilitas pendidikan, Donor/NGO juga telah melaksanakan pengadaan meubelair, pengadaan buku referensi dan perlengkapan sekolah baik di Kabupaten Nias maupun Nias Selatan. Untuk meningkatkan kualitas pelajar, Donor/NGO juga membangun kapasitas pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada 494 orang di Kabupaten Nias. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar telah dilaksanakan pelatihan pelatihan guru, kejuruan, peningkatan kapasitas kepada 1.130 orang di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Pada **sub sektor kesehatan**, telah diselesaikannya pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Nias antara lain 1 unit Rumah Sakit Gunung Sitoli 4 unit Puskesmas, 5 unit klinik, 5 unit Pustu dan 80 unit Polindes. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan berupa pembangunan 1 unit Rumah Sakit Map Internasional Pulau-Pulau Batu Selain itu untuk mendukung lancarnya pelayanan kesehatan, Donor/NGO telah memberikan dukungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berupa pengadaan alat kedokteran dan perbaikan gizi, ibu, anak dan KB, dan serta pengadaan obat dan vaksin di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Selain itu kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan juga ditingkatkan melalui program peningkatan kebersihan dan program pelatihan kesehatan di masing-masing kabupaten di Kepulauan Nias.

Di **sub sektor kebudayaan** khususnya pada bidang agama, Donor/NGO telah meningkatkan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Kepulauan Nias melalui rehabilitasi rumah ibadah di Kabupaten Nias antara lain 2 unit gereja, 1 unit mrsjid, dan 1

unit vihara, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan hanya 1 unit gereja. Di bidang sosial, hingga akhir Desember 2006 Donor/NGO telah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebanyak 797 orang di Kabupaten Nias dan 9.764 orang di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu juga telah dilaksanakannya rehabilitasi sosial melalui bantuan perlengkapan pasca bencana, pelatihan pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial serta pembangunan panti asuhan di masing-masing kabupaten di Kepulauan Nias.

Tabel II. 31
Realisasi Kegiatan Donor/NGO Sektor Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan
Tahun Anggaran 2005-2006

SUB SEKTOR/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (USD)	Volume		Nilai (USD)	Volume	
A Pemerintahan	169,063			424,142		
1 Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan (Gedung Pemerintahan)	-	-	-	339,644	2	Unit
2 Pembinaan Sarana dan Prasarana (Gedung Publik)	49,445	2	Unit	-	-	-
3 Pembangunan Kapasitas Pemerintahan						
a Pelatihan	119,618	52	org	76,120	118	org
b Penguatan Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	8,378	2	kecamatan
B Pendidikan	9,645,397			2,816,954		
1 Pembangunan Fasilitas Pendidikan						
a Pembangunan dan Rehabilitasi						
- TK	77,838	2	sekolah	116,756	3	sekolah
- SD	5,443,017	38	sekolah	859,425	6	sekolah
- SMP	1,583,563	7	sekolah	0	0	sekolah
- SMU	662,337	2	sekolah	662,337	2	sekolah
- Perguruan Tinggi	0	0	universitas	132,632	1	universitas
- Sekolah Sementara	175,099	1	sekolah	175,099	1	sekolah
- Sanitasi Sekolah	824,499	4	sekolah	206,125	1	sekolah
b Pengadaan Meubalair	9,043	1	kab	9,043	1	kab
c Pengadaan Buku	15,323	1	kab	15,323	1	kab
c Pengadaan Perlengkapan Sekolah	215,485	1	kab	215,485	1	kab
2 Pembangunan Kapasitas Pendidikan						
1 Beasiswa	136,496	494	orang	-	-	-
2 Pelatihan						
- Pelatihan Guru	71,953	270	orang	6,662	25	orang
- Pelatihan Kejuruan	38,414	500	orang	25,737	335	orang
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas	392,331	1	kab	392,331	1	kab
C Kesehatan	4,745,023			911,430		
1 Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan						
a Rumah Sakit	1,550,000	1	unit	203,000	1	unit
b Puskesmas dan Pustu						
- Puskesmas	240,000	4	unit	-	-	-
- Klinik	193,723	5	unit	-	-	-
- Pustu	150,000	5	unit	-	-	-
- Polindes	100,000	80	unit	-	-	-
c Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan						
- Pengadaan Alat Kedokteran	146,808	1	kab	146,808	1	kab
- Perbaikan Gizi Ibu, Anak dan KB	81,984	1	kab	81,984	1	kab
2 Obat dan Perbekalan Kesehatan						
a Obat dan Vaksin	194,246	1	kab	194,246	1	kab
3 Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan						
a Pelatihan						
- Program Peningkatan Kebersihan	269,600	1	kab	269,600	1	kab
- Program Pelatihan Kesehatan	1,818,663	29,940	orang	15,793	260	orang

SUB SEKTOR/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (USD)	Volume		Nilai (USD)	Volume	
D Kebudayaan	2,581,302			1,371,959		
1 Agama						
a Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama						
- Gereja	25,000	2	Unit	25,000	1	Unit
- Mesjid	30,000	1	Unit	-	-	-
- Vihara	5,000	1	Unit	-	-	-
2 Sosial						
a Pemberdayaan Perempuan						
- Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	232,634	797	org	215,435	9,764	org
b Rehabilitasi Sosial						
- Rehabilitasi Sosial						
# Bantuan Perengkapan Pasca Bencana	900,000	1	kab	900,000	1	kab
# Bantuan Hibah Pasca Bencana	-	-	-	6,000	600	pakaian
- Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial (Pelatihan)	205,950	34,307	org	65,099	8,000	org
- Pembangunan Panti Asuhan	1,182,718	11	Unit	160,425	1	Unit
3 Budaya						
TOTAL	17,140,785			5,524,485		

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

Bantuan Donor/NGO di **sektor ekonomi** yaitu untuk sub sektor perdagangan berupa pembangunan pasar tradisional sebanyak 8 unit di Kabupaten Nias dan 51 unit di Kabupaten Nias Selatan. Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Nias maupun Nias Selatan, Donor/NGO telah memberikan bantuan di sub sektor pertanian antara lain pengadaan 206.000 kg bibit dan pupuk, pengadaan alat pertanian sebanyak 838 unit, dan optimalisasi pemanfaatan lahan seluas 52 hektar. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan bantuan tersebut antara lain pengadaan 59.511kg bibit dan pupuk, dan pengadaan alat pertanian sebanyak 40 unit.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kepulauan Nias, Donor/NGO memberikan pelatihan tenaga kerja sebanyak 10.967 orang di Kabupaten Nias dan 94.115 orang di Kabupaten Nias Selatan. Pada sub sektor Koperasi dan UKM, Donor/NGO telah memberikan bantuan modal usaha untuk masyarakat Nias di masing-masing kabupaten.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Nias di bidang perikanan, Donor/NGO hingga akhir tahun 2006 telah memberikan bantuan berupa pengadaan 176 unit peralatan perikanan, pembangunan 1 unit tempat pelelangan ikan, serta pembentukan 8 grup kelompok nelayan. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan, bantuan Donor/NGO berupa pengadaan 140 unit peralatan perikanan, serta pembentukan 53 grup kelompok nelayan. Untuk sub sektor peternakan, Donor/NGO telah mengadakan peternakan sebanyak 30 unit di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel II. 32
Realisasi Kegiatan Donor/NGO Sektor Ekonomi
Tahun Anggaran 2005-2006

SUB SEKTOR/KEGIATAN	KABUPATEN NIAS			KABUPATEN NIAS SELATAN		
	Nilai (USD)	Volume		Nilai (USD)	Volume	
A. Perdagangan						
1 Pasar tradisional	674,992	8	unit	394,538	51	unit
B. Pertanian						
1 Pengadaan Bibit dan Pupuk	25,719	206,000	kg	7,440	59,511	kg
2 Pengadaan Alat Pertanian	28,295	838	unit	7,440	40	unit
3 Optimalisasi pemanfaatan lahan	23,560	52	ha	-	-	-
C. Perkebunan						
D. Pelatihan dan Tenaga Kerja						
1 Pelatihan Tenaga Kerja	4,315,514	10,967	org	1,232,007	94,115	org
2 Penyuluhan	-	-	-	23,800	1	paket
E. Koperasi dan UKM						
1 Bantuan Modal Usaha	201,044	1	kab	192,717	1	kab
F. Perikanan						
1 Pengadaan Peralatan Perikanan	816,670	176	unit	163,877	140	unit
2 Pembentukan kelompok nelayan	6,026	8	group	24,576	53	group
3 Pembangunan Tempat Pelelangan ikan	116,788	1	unit	-	-	-
G. Peternakan						
1 Pengadaan peternakan	-	-	-	7,440	30	unit
TOTAL	6,208,608			2,053,835		

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008 BRR, 2007

II.3. Identifikasi Isu dan Permasalahan dalam Proses Pelaksanaan

Secara umum, terdapat beberapa isu dan kendala umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias, yaitu:

1. Kepulauan Nias menghadapi masalah kemiskinan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sarana-prasarana transportasi darat, laut dan udara sehingga banyak investor enggan masuk ke wilayah tersebut;
2. Sebagai wilayah kepulauan dan maritim, potensi wisata bahari di Kepulauan Nias belum berkembang. Keterbatasan prasarana perikanan menyebabkan usaha perikanan tangkap dan budidaya ikan belum berkembang. Di sisi lain, pencurian ikan oleh kapal-kapal nelayan asing justru marak terjadi. Beberapa isu terkait kawasan pantai Kepulauan Nias adalah : ancaman abrasi pantai dan intrusi air laut, kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, ikan-ikan hias terumbu karang yang terancam punah karena *illegal fishing*, dan kerusakan hutan mangrove;
3. Permasalahan kepemilikan lahan pasca bencana;
4. Keterbatasan akses pasar dari dan keluar Kepulauan Nias, menyebabkan hasil produksi Nias kurang memiliki nilai jual yang layak;
5. Rendahnya kualitas dan kelangkaan bahan bangunan rekonstruksi menyebabkan kegiatan rekonstruksi menjadi cukup mahal. Partisipasi masyarakat kegiatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi juga sangat minim;
6. Koordinasi yang kurang optimal dalam kegiatan pemulihan oleh pemangku-pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait menyebabkan duplikasi dan kesenjangan;
7. Keterbatasan kemampuan pasca produksi (pemasaran, pengolahan, dll) menyebabkan harga-harga barang pertanian Kepulauan Nias menjadi rendah

Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk tiap sektor, yaitu : perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi serta kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

1. Infrastruktur

a. Aksesibilitas

Saat ini wilayah Kepulauan Nias masih mengalami masalah aksesibilitas terutama dengan kendaraan roda empat. Kesulitan tersebut sangat dirasakan, akibat belum tersalurkannya material dan alat berat yang dibutuhkan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan yang ada memiliki kondisi berikut:

- Jalan masih terdiri dari jalan tanah dan sebagian jalan dilapisi dengan batuan (*onderlaag*);
- Lebar jalan rata – rata kurang dari 5 meter, sehingga kurang memenuhi standar, terlebih pula untuk kendaraan berat;
- Kondisi alinyemen jalan masih terdapat yang tidak memenuhi standar sehingga menyulitkan bagi kendaraan dan pemakai jalan yang melintasinya;
- Sebagian jembatan mengalami kerusakan dan masih ada jalan yang melintasi sungai tanpa difasilitasi jembatan.

b. Permasalahan logistik

Terbatasnya jumlah kendaraan menuju kecamatan, desa, dan prasarana dasar di daerah pedesaan. Kebutuhan akan bahan material untuk membangun jalan dan jembatan juga menemui banyak hambatan, dikarenakan banyak kegiatan rekonstruksi lainnya yang membutuhkan banyak bahan material.

c. Biaya operasional dan pemeliharaan

Modal dalam jumlah besar telah dikeluarkan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi baru untuk jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Semua fasilitas yang telah dibangun ini tentunya membutuhkan pemeliharaan rutin, untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dan fungsi dasar yang dijalankan.

d. Koordinasi

Pengembangan dan tindak lanjut dari rencana aksi bersama dengan lembaga terkait seperti Departemen PU dan lainnya untuk konstruksi jalan dan jembatan, PLN dan perusahaan telekomunikasi, sangat dibutuhkan. Hal ini akan memecahkan persoalan dalam hal penentuan volume kebutuhan, menemukan kontraktor dan perusahaan pengadaan barang dan jasa lainnya yang kompeten, seperti yang dihadapi oleh beberapa NGO. Sehingga dapat mendorong terhadap peningkatan kualitas struktur bangunan yang dibangun.

e. Drainase yang kurang baik

Pada umumnya kota–kota di Kepulauan Nias belum memiliki sistem drainase yang terintegrasi dan baik. Sehingga menyebabkan genangan air yang dapat menyebabkan kerusakan jalan yang telah diperbaiki pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kondisi drainase yang ada dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kemiringan dan dimensi parit terlalu kecil sehingga menurunkan kapasitas saluran. Akibatnya aliran air menjadi tidak lancar dan naik ke badan jalan;
- Parit drainase masih terputus–putus, sehingga pengaliran air tidak bisa berjalan dengan baik.

f. Pembangunan Kapasitas

Untuk mendukung hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan kapasitas dan pelatihan manajemen untuk aparat Pemerintah Daerah adalah salah satu kegiatan untuk mendukung kelancaran peralihan asset sarana-prasarana yang sudah dibangun oleh BRR dan NGO kepada Pemerintah Daerah.

2. Perumahan

Gempa bumi telah mengakibatkan kerusakan sarana-prasarana perumahan yang sangat berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan menunjukkan sebagian kondisi rumah dengan kualitas yang berada di bawah standar. Sedangkan lokasi perumahan rusak banyak yang belum dapat ditangani karena berada di lokasi yang tidak terjangkau.

Permasalahan tersebut diatas muncul dari adanya beberapa isu dan kendala antara lain :

- a. Rumah-rumah yang telah direkonstruksi tidak dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman. Sehingga sebagian masyarakat masih enggan menempati rumah yang telah di rehabilitasi atau rekonstruksi.
- b. Kualitas dari rumah hasil rekonstruksi jauh lebih baik dari rumah lain yang tidak terkena dampak gempa, tetapi dengan kondisi yang jauh dari standar. Hal ini memberi pengaruh sosial dan psikososial pada masyarakat sekitarnya.
- c. Ketiadaan akses pada beberapa lokasi tertentu mengakibatkan tidak adanya bantuan program untuk sektor perumahan dan menghambat produksi pertanian dalam hal distribusi hasil produksi ke pasar-pasar lokal.

3. Kelembagaan dan Pengembangan Manusia

- a. Pemerintahan
 - Keterbatasan kualitas sumber daya manusia pemerintahan
 - Produk hukum yang masih terintegrasi secara sempurna
- b. Pendidikan
 - Keterbatasan kapasitas lembaga dalam perencanaan strategis, implementasi program beserta monitoring dan evaluasinya akibat keterbatasan dana serta kualifikasi tenaga pengajar yang masih rendah;
 - Manajemen administrasi, penyediaan buku dan peralatan sekolah yang masih terbatas;
 - Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pendidikan.
- c. Kesehatan
 - Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi membawa persoalan tersendiri dalam pembangunan sistem dan manajemen kesehatan;
 - Kualitas sumber daya manusia (tenaga medis) masih sangat terbatas;
 - Ketersediaan sarana-prasarana kesehatan sangat terbatas.
- d. Sosial Budaya
 - Akses menuju permukiman tradisional di daerah terpencil masih sulit;
 - Belum ada payung hukum yang melindungi upaya pelestarian cagar budaya;
 - Peran pemerintah daerah dalam pelestarian nilai budaya masih rendah;
 - Terbatasnya pelaksanaan konservasi dan pembangunan cagar budaya dan cagar alam.

4. Ekonomi

- a. Kurangnya akses menuju pasar di luar Kepulauan Nias;
- b. Kurangnya koordinasi dengan *stakeholders* yang mengakibatkan kesenjangan dan duplikasi kegiatan;
- c. Minimnya infrastruktur (irigasi, pasar, pelabuhan, fasilitas pendukung pasca produksi yang berdampak pada harga rendah bagi petani, dan lain-lain);
- d. Minimnya kapasitas sumber daya manusia (fasilitas, keterampilan dan pengetahuan teknologi);
- e. Kurangnya pendanaan dan akses kredit;
- f. Keterbatasan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait dengan keterbatasan dana;

- g. Minimnya partisipasi masyarakat dalam ;
- h. Kurangnya keterampilan dalam hal pengoperasian peralatan;
- i. Isu spesifik di sub sektor pertanian :
 - Nias masih perlu suplai makanan pokok (beras) dari luar;
 - Pengembangan irigasi masih bersifat tradisional;
 - Petani masih belum menggunakan varietas-varietas modern;
 - Perlu perbaikan teknik produksi bibit di Nias.
- j. Isu spesifik di sub sektor perkebunan:
 - Penggunaan standar harga yang belum optimal;
 - Kurangnya koordinasi antar para petani;
 - Kondisi tanah perkebunan yang ada kurang baik;
 - Diversifikasi tanaman perkebunan yang masih rendah dan panen tanaman organik yang menyebabkan tingginya harga produk perkebunan untuk para petani.
- k. Isu spesifik di sub sektor pariwisata:
 - Eksploitasi potensi wisata dan budaya masih belum maksimal;
 - Masih terbatasnya pengembangan potensi Nias untuk pariwisata budaya;
 - Akses menuju lokasi-lokasi pusat budaya masih kurang baik dan lancar;
 - Keterbatasan upaya pemasaran keluar daerah akan budaya dan pariwisata Nias;
 - Keterbatasan pengetahuan pariwisata dan dukungan dari masyarakat;
 - Masih rendahnya minat investor untuk mengembangkan potensi pariwisata Nias.
- l. Isu spesifik di sub sektor perikanan:
 - Keterbatasan sarana-prasarana perikanan seperti pasar, pelabuhan, peralatan pengering ikan dan pabrik es;
 - Kerusakan karang dan mangrove akibat tindakan ilegal masyarakat;
 - Keterbatasan penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan (fasilitas dan sumber daya manusia);
 - Belum berkembangnya perikanan darat.



Perkiraan Kerusakan dan Kerugian, serta Dampak Bencana

III.1. Metodologi penilaian kerusakan dan kerugian

Untuk mengukur kerusakan dan kerugian, tim Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) Bappenas menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dari Karibia (ECLAC). Metodologi ECLAC pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1970-an dan telah dimodifikasi dan ditingkatkan melalui aplikasi selama lebih dari tiga dekade dalam konteks pasca bencana di seluruh dunia.

Metodologi ini menghasilkan perkiraan pendahuluan terhadap dampak atas aset fisik yang harus diperbaiki, diganti serta terhadap aliran-aliran yang tidak akan diproduksi sampai aset diperbaiki dan dibangun. Perkiraan itu menganalisis tidak aspek utama yaitu:

- **Kerusakan** (dampak langsung), merupakan dampak aset, properti yang dinilai dengan harga unit penggantian (bukan rekonstruksi) yang disepakati. Perkiraan itu harus memperhitungkan tingkat kerusakan (apakah aset masih bisa dipulihkan/diperbaiki, atau sudah sama sekali hancur).
- **Kerugian** (dampak tidak langsung), merupakan aliran-aliran yang akan terkena dampak, seperti pendapatan yang berkurang pengeluaran yang bertambah dan lain-lain selama periode waktu hingga aset dipulihkan. Semua itu akan dijumlahkan berdasarkan nilai sekarang. Penentuan periode waktu sangat penting. Jika pemulihan berlangsung lebih dari yang diharapkan, seperti dalam kasus Aceh, kerugian bisa meningkat secara signifikan.
- **Efek ekonomi** (kadang disebut dampak sekunder) mencakup dampak fiskal, dampak pertumbuhan PDB, dan lain-lain. Analisis ini juga bisa diterapkan pada tingkat sub-nasional.

Dalam penentuan perkiraan kerusakan akibat gempa bumi di Nias dan Nias Selatan ini, analisis yang digunakan hanya menggunakan dampak kerusakan dan tidak menggunakan dampak kerugian karena kerugian yang dialami pasca gempa sudah di tangani melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR dan lembaga donor/NGO dan stakeholders lainnya sejak tahun 2005 – 2006 dan tahun 2007 yang sedang dalam proses rehabilitasi.

Disamping itu juga dipaparkan perkiraan kerusakan versi BRR akibat gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias, provinsi Sumatera Utara sebagai hasil survey yang dilaksanakan pada bulan November 2005.

III.2. Perkiraan dan Kerusakan Akibat Gempa

Total perkiraan kerusakan akibat gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias berdasarkan data BRR perwakilan Nias Per May 2007 diperkirakan sebesar Rp.6,012 triliun. Kerusakan ini merupakan hasil dari satuan harga yang telah disesuaikan dengan harga saat ini dan jumlah volume unit yang dibangun dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias pasca gempa 28 Maret 2005. Kerusakan terbesar terdapat pada sektor infrastruktur yakni sebesar Rp.2,58 triliun, disusul oleh sektor perumahan sebesar Rp.1,99 triliun, kemudian sektor sosial sebesar Rp.809 miliar, selanjutnya pada sektor perekonomian sebesar Rp.296 miliar dan pada sektor lainnya sebesar Rp.334 miliar.

III.2.1. Sektor Perumahan

Rincian kerusakan yang terdapat dalam sektor perumahan pasca gempa bumi 28 Maret 2005 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 1
Penilaian Kerusakan Pada Sektor Perumahan Dan Permukiman

Sektor/Sub Sektor	Data Kerusakan		
	Jumlah Kerusakan	Satuan	Perkiraan Kerusakan
			(Juta Rp)
PERUMAHAN			
Rusak Berat/R.Total	20,000	Unit	1,100,000
Rusak Ringan	28,000	Unit	350,000
PRASARANA LINGKUNGAN			
1. Sistem Draenase			
Rusak Berat/R.Total	4	kota	80,000
Rusak Ringan	18	kec	90,000
2. Jalan Lingkungan			
Rusak Berat/R.Total	27,677	M	60,889
Rusak Ringan	25,023	M	25,023
3. Air Minum PDAM			
Rusak Berat/R.Total	3	kota	90,000
Rusak Ringan	19	kec	95,000
4.MCK			
Rusak Berat/R.Total	2,500	Unit	100,000
Sub Total			1,990,912

Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Berdasarkan data BRR Perwakilan Nias dapat diinformasikan total nilai kerusakan pada sektor perumahan sebesar Rp.1,99 triliun, dengan rincian rumah yang mengalami kerusakan berat sebanyak 20.000 unit dengan nilai kerusakan sebesar Rp.1,1 triliun; sedangkan jumlah rumah yang mengalami rusak ringan sebanyak 28.000 unit dengan nilai kerusakan sebesar Rp.350 Miliar. Untuk prasarana lingkungan terdapat kerusakan pada Sistem Drainase pada 4 kota dan 18 kecamatan dengan nilai kerugian sebesar Rp.170 miliar; kerusakan pada Jalan Lingkungan sepanjang 27.677 m rusak berat dan sepanjang 25.023 m rusak ringan dengan nilai kerusakan masing-masing sebesar Rp.60,8 miliar dan Rp.25,03 miliar. Kerusakan berat pada Prasarana PDAM terdapat di 3 kota dengan nilai kerusakan sebesar Rp.90 miliar dan kerusakan ringan terdapat 19 kecamatan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.95 miliar. Kerusakan MCK tercatat sebanyak 2500 unit dengan nilai kerusakan sebesar 100 miliar.

III.2.2. Sektor Infrastruktur

Berdasarkan data BRR Perwakilan Nias dapat diinformasikan total nilai kerusakan pada sektor Infrastruktur sebesar Rp.2,58 triliun, dengan rincian jalan yang mengalami rusak berat sepanjang 266 km dengan nilai kerusakan sebesar Rp.585 miliar dan rusak ringan sepanjang 800 km dengan perkiraan kerusakan sebesar 800 miliar. 403 unit jembatan rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp.241,8 miliar; dan 10 Jembatan gantung mengalami kerusakan berat dengan nilai kerusakan Rp.3 miliar. Adapun secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 2
Penilaian Kerusakan pada Sektor Infrastruktur

Sektor/Sub Sektor	Data Kerusakan		
	Jumlah Kerusakan	Satuan	Perkiraan Kerusakan (Juta Rp)
TRANSPORTASI DARAT			
A. Jalan			
Rusak Berat/R.Total	266	Km	585,200
Rusak Ringan	800	Km	800,000
B. Jembatan			
Rusak Berat/R.Total	403	Unit	241,800
C. Jembatan gantung			
Rusak Berat/R.Total	10	unit	3,000
ENERGI			
A. SPBU			
Rusak Berat	2	unit	10,000
Rusak Ringan			
B. Listrik			
Rusak Berat	32	%	164,730
Jaringan Utama			
Rusak Berat	50	Km	50,000
Rusak Ringan			
Gardu Distribusi			
Rusak Berat	2	Unit	3,336
Rusak Ringan			
Sambungan Rumah			
Rusak Berat	200	Km	30,000
POS DAN TELEKOMUNIKASI			
A. Jaringan Utama	NA	NA	
B. Sambungan Telepon			
Rusak Berat	52.11	%	213,651
AIR DAN SANITASI			
A. Instalasi Air Bersih			
Rusak Berat	28.42	%	31,262

Sektor/Sub Sektor	Data Kerusakan		
	Jumlah Kerusakan	Satuan	Perkiraan Kerusakan (Juta Rp)
B. Pompa			
Rusak Berat	90.62	%	280,922
INFRASTRUKTUR PERTANIAN			
A. Irigasi Teknis	15.000	Ha	52,500
Rusak Berat			
B. Irigasi Non Teknis			
C. Irigasi Sederhana			
PINTU AIR	NA		
TRANSPORTASI UDARA			
A. Bandara			
Rusak Berat	2	Unit	34,000
TRANSPORTASI LAUT			
A. Pelabuhan			
Rusak Berat	3	Unit	60,000
B. Dermaga			
Rusak Berat	2	Unit	20,000
Sub Total			2,580,401

Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Untuk bidang infrastruktur Energi, 2 unit SPBU rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp.10 Miliar; 32 persen bidang kelistrikan terganggu dengan nilai kerusakan sebesar Rp.164,73 miliar; Jaringan Utama rusak sepanjang 50 km dengan nilai kerusakan sebesar Rp.50 miliar. 2 unit gardu distribusi rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.3,33 miliar serta 200 km sambungan rumah dengan nilai kerusakan sebesar Rp.30 miliar. Untuk sub bidang pos dan telekomunikasi 52,11 persen sambungan telepon rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar 213,65 miliar. 28,42 persen instalasi air bersih mengalami rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.31,26 miliar dan 90,62 persen pompa rusak dengan nilai kerusakan sebesar Rp.280,92 miliar. 15.000 ha irigasi teknis rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar 52,5 miliar. 2 bandara mengalami rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp.34 miliar, sedangkan untuk sub bidang pelabuhan laut, 3 unit pelabuhan rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.60 miliar dan 2 dermaga rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.20 miliar.

III.2.3. Sektor Sosial

Berdasarkan data BRR Perwakilan Nias dapat diinformasikan total nilai kerusakan pada sektor sosial sebesar Rp.809,7 miliar, dengan rincian 4 unit bangunan TK dan sederajat rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp.400 juta sedangkan 22 unit bangunan lainnya mengalami rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.1,1 miliar. Sebanyak 1.299 unit buku hilang dengan nilai kerusakan sebesar Rp.10 juta dan 851 unit peralatan lainnya rusak dengan nilai kerusakan sebesar Rp.115 juta.

Untuk tingkat SD/Sederajat 416 unit bangunan mengalami rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp. 332 miliar sedangkan 176 unit bangunan mengalami rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.52,8 miliar. Adapun sebanyak 91.580 unit buku hilang dengan nilai kerusakan sebesar Rp.687 juta dan sebanyak 62.822 unit peralatan rusak dengan nilai kerusakan sebesar 8,48 miliar.

Untuk tingkat SLTP dan sederajat 34 unit bangunan rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar 34 miliar sedangkan 63 unit bangunan mengalami rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.31,5 miliar. Sebanyak 13.434 unit buku hilang dengan nilai sebesar Rp.101 juta dan sebanyak 9.102 unit peralatan mengalami kerusakan dengan nilai kerusakan sebesar Rp. 1,22 miliar.

Untuk tingkat SMA dan Sederajat, 21 unit bangunan rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp.25,2 miliar sedangkan 28 unit bangunan mengalami kerusakan ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.19,6 miliar. Sebanyak 4.747 unit buku hilang dengan nilai kerusakan sebesar Rp.36 juta dan sebanyak 2.477 unit peralatan rusak dengan nilai kerusakan sebesar Rp.334 juta.

Untuk tingkat Universitas dan sederajat, tercatat 4 unit bangunan mengalami rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp.7,6 miliar.

Tabel III. 3
Penilaian Kerusakan pada Sektor Sosial

Sektor/Sub Sektor	Data Kerusakan		
	Jumlah Kerusakan	Satuan	Perkiraan Kerusakan
			(Juta Rp)
PENDIDIKAN			
1	TK DAN SEDERAJAT		
	Bangunan		
	Rusak Berat	4	Unit
	Rusak Ringan	22	Unit
	Peralatan		
	Hilang	1,299	Buku
	Rusak	851	Unit
2	SD DAN SEDERAJAT		
	Bangunan		
	Rusak Berat	416	Unit
	Rusak Ringan	176	Unit
	Peralatan		
	Hilang	91,580	Buku
	Rusak	62,822	Unit
3	SLTP DAN SEDERAJAT		
	Bangunan		
	Rusak Berat	34	Unit
	Rusak Ringan	63	Unit
	Peralatan		
	Hilang	13,434	Buku
	Rusak	9,102	Unit
4	SMA DAN SEDERAJAT		
	Bangunan		

Sektor/Sub Sektor	Data Kerusakan			
	Jumlah Kerusakan	Satuan	Perkiraan Kerusakan	
			(Juta Rp)	
	Rusak Berat	21	Unit	25,200
	Rusak Ringan	28	Unit	19,600
	Peralatan			
	Hilang	4,747	Buku	36
	Rusak	2,477	Unit	334
5	UNIVERSITAS DAN SEDERAJAT			
	Bangunan			
	Rusak Berat	4	Unit	7,600
KESEHATAN				
1	PUSKESMAS			
	Bangunan			
	Rusak Berat	8	Unit	12,000
	Rusak Ringan	14	Unit	7,000
2	RUMAH SAKIT UMUM			
	Bangunan			
	Rusak Berat	1	Unit	60,000
	Rusak Ringan	1	Unit	10,000
	Peralatan			
	Hilang	1	paket	50,000
	Rusak			
3	PUSKESMAS PEMBANTU			
	Bangunan			
	Rusak Berat	44	Unit	22,000
	Rusak Ringan	106	Unit	26,500
4	POLINDES			
	Rusak Berat	54	Unit	16,200
	Rusak Ringan	116	Unit	17,400
AGAMA				
1	MESJID			
	Bangunan			
	Rusak Berat	85	Unit	3,188
	Rusak Ringan	54	Unit	2,025
2	GEREJA			
	Bangunan			
	Rusak Berat	1,334		50,025
	Rusak Ringan	465		17,438
TOTAL				809,767

Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Untuk bidang Kesehatan, 8 unit puskesmas rusak berat dan 14 unit rusak ringan dengan nilai kerusakan masing-masing Rp.12 miliar dan Rp.7 miliar. 1 unit bangunan rumah sakit rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.60 miliar dan 1 unit bangunan rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.10 miliar, tercatat pula 1 paket peralatan rumah sakit hilang dengan nilai kerusakan sebesar Rp.50 miliar. Tercatat 44 unit Puskesmas pembantu rusak berat dan 106 unit rusak ringan dengan nilai kerusakan masing-masing Rp.22 miliar dan Rp.26,5 miliar. 54 unit bangunan Polindes rusak berat dengan nilai

kerusakan sebesar Rp.16,2 miliar dan 116 unit bangunan rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp. 17,4 miliar.

Untuk bidang Agama, 85 unit bangunan mesjid rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp.3,18 miliar sedangkan 54 unit rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.17,4 miliar. Tercatat sebanyak 1.334 unit bangunan gereja mengalami rusak berat dan 465 unit mengalami rusak ringan dengan nilai kerusakan masing-masing sebesar Rp.50,02 miliar dan Rp.17,43 miliar.

III.2.4. Sektor Ekonomi

Berdasarkan data BRR Perwakilan Nias dapat diinformasikan total nilai kerusakan pada sektor ekonomi sebesar Rp.296,92 miliar, dengan rincian kerusakan berat pada lahan pertanian produktif sebesar 415.030 ha dengan nilai kerusakan sebesar Rp.45,65 miliar dan rusak ringan sebesar 127,889 ha dengan nilai kerusakan sebesar Rp.6,3 miliar. Sebanyak 3.477 unit Mesin, alat dan perlengkapan pertanian mengalami kerusakan berat sedangkan sebanyak 218 unit mengalami rusak ringan dengan nilai kerusakan masing-masing sebesar Rp.69,54 miliar dan Rp.2,18 miliar. Pada sub bidang perikanan, tercatat 3858 perahu rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.77,16 miliar sedangkan 1.621 unit perahu rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar 16,21 miliar. 3 unit TPI rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.60 miliar sedangkan 8 unit mengalami rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.3,2 miliar. Tercatat 885 ha tambak rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.89 juta dan 122 ha mengalami rusak ringan dengan nilai kerusakan Rp.6 juta.

Tabel III. 4
Penilaian Kerusakan pada Sektor Ekonomi

Sektor/Sub Sektor	Data Kerusakan		
	Jumlah Kerusakan	Satuan	Perkiraan Kerusakan (Juta Rp)
PERTANIAN			
A. Lahan Produktif (Pertanian)			
Rusak Berat	415,030	Ha	45,653
Rusak Ringan	127,889	Ha	6,394
B. Mesin, Alat, dan Perlengkapan Pertanian			
Rusak Berat	3,477	Unit	69,540
Rusak Ringan	218	Unit	2,180
C. Perikanan			
Perahu			
Rusak Berat	3,858	Unit	77,160
Rusak Ringan	1,621	Unit	16,210
TPI			
Rusak Berat	3	Unit	60,000
Rusak Ringan	8	Unit	3,200
Tambak			
Rusak Berat	885	Ha	89
Rusak Ringan	122	Ha	6

Sektor/Sub Sektor	Data Kerusakan		
	Jumlah Kerusakan	Satuan	Perkiraan Kerusakan (Juta Rp)
JENIS PERDAGANGAN			
Pasar Tradisional			
Rusak Berat	137	Unit	13,700
Rusak Ringan	82	Unit	2,788
Sub Total			296,920

Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Tercatat pula, 137 unit pasar tradisional rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.13,7 miliar dan 82 unit rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.2,78 miliar.

III.2.5. Lintas Sektor

Berdasarkan data BRR Perwakilan Nias dapat diinformasikan total nilai kerusakan pada lintas sektor sebesar Rp.334 miliar, dengan rincian kerusakan berat pada kantor pemerintahan tercatat 414 unit dengan nilai kerusakan Rp.207 miliar sedangkan 347 unit mengalami rusak ringan dengan nilai kerusakan sebesar 69,4 miliar. Tercatat pula, 2 unit asrama TNI/Polri mengalami kerusakan dengan nilai kerusakan sebesar Rp.8 miliar dan 10 kantor rusak berat dengan nilai kerusakan Rp.50 miliar. Adapun secara lebih detail dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel III. 5
Penilaian Kerusakan pada Bidang Lintas Sektor

Sektor/Sub Sektor	Data Kerusakan		
	Jumlah Kerusakan	Satuan	Perkiraan Kerusakan (Juta Rp)
PEMERINTAHAN			
Kantor Pemerintahan			
Rusak Berat	414	Unit	207,000
Rusak Ringan	347	Unit	69,400
KETERTIBAN DAN KEAMANAN			
TNI & POLRI			
Asrama	2	unit	8,000
Kantor			
Rusak Berat	10	unit	50,000
Rusak Ringan	NA		
Sub Total			334,400

Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Secara keseluruhan penilaian dampak kerusakan di Kepulauan Nias dapat disederhanakan sebagai berikut

Tabel III. 6
PERSENTASE KERUSAKAN DAN KERUGIAN GEMPA KEPULAUAN NIAS

NO	SEKTOR DAN SUB SEKTOR	DAMPAK BENCANA (JUTA RP)		KEPEMILIKAN			
		KERUSAKAN	%	PEMERINTAH	%	SWASTA	%
I	Perumahan	1,990,912	33.11%	0	0.00%	1,990,912	84.34%
	1. Perumahan	1,450,000		0		1,450,000	
	2. Prasarana Lingkungan	540,912		0		540,912	
II	Infrastruktur	2,580,401	42.92%	2,580,401	70.66%	0	0.00%
	1 Transportasi Darat	1,630,000		1,630,000		0	
	2. Energi	258,066		258,066		0	
	3. Pos dan Telekomunikasi	213,651		213,651		0	
	4. Air dan Sanitasi	312,184		312,184		0	
	5. Infrastruktur Pertanian	52,500		52,500		0	
	6. Pintu Air	0		0		0	
	7. Transportasi Udara	34,000		34,000		0	
	8. Transportasi Laut	80,000		80,000		0	
III	Sosial	809,767	13.47%	737,092	20.18%	72,675	3.08%
	1. Pendidikan	515,992		515,992		0	
	2. Kesehatan	221,100		221,100		0	
	3. Agama	72,675		0		72,675	
IV	Ekonomi	296,920	4.94%	0	0.00%	296,920	12.58%
	1. Pertanian	280,432		0		280,432	
	2. Perdagangan	16,488		0		16,488	
V	Lintas Sektor	334,400	5.56%	334,400	9.16%	0	0.00%
	1.Tata Pemerintahan	276,400		276,400		0	
	2.Ketertiban dan Keamanan	58,000		58,000		0	
	TOTAL	6,012,401	100%	3,651,893	60.74%	2,360,508	39.26%

Sumber : Analisis P3B-Bappenas (rekapitulasi)

III.3. Dampak Kerusakan

III.3.1. Dampak Terhadap Perekonomian

Sub bab ini mencoba mendeskriptifkan perekonomian Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan melalui pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk masing-masing kabupaten dengan data yang bersumber dari BPS.

A. Kabupaten Nias

Kab. Nias ditopang oleh 3 sektor utama yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Jasa. Selama tahun 2000 sampai 2005, peranan sektor-sektor tersebut tidak berubah dan tetap dominan. Adapun terhadap PDRB tahun 2005, Sektor Pertanian berkontribusi 40,59%; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berkontribusi 25,86%; dan Sektor Jasa berkontribusi 13,19%. Untuk sektor-sektor lainnya dapat dilihat lebih detail pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 7
Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nias
(Harga Konstan Tahun 2000)

LAPANGAN USAHA	PDRB (Miliar Rupiah)		Peranan Sektor (%) *	Real Growth (%) **	Proyeksi PDRB 2006	Proyeksi PDRB 2007
	2004	2005			(Juta Rp) ***	(Juta Rp) ***
Pertanian	654,1	630,2	40.59	-3,65%	607,2	585,0
Pertambangan & Penggalian	36,5	36,5	2.35	0,00%	36,5	36,5
Industri Pengolahan	30,2	30,2	1.94	0,00%	30,2	30,2
Listrik, Gas dan Air Minum	4,3	3,8	0.24	-11,63%	3,4	3,0
Bangunan	118,9	94,1	6.06	-20,86%	74,5	58,9
Perdagangan, Hotel dan Restoran	391,9	401,5	25.86	2,45%	411,3	421,4
Pengangkutan dan Komunikasi	100,5	95,5	6.15	-4,98%	90,7	86,2
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	68,9	56,1	3.61	-18,58%	45,7	37,2
Jasa-jasa	190,2	204,8	13.19	7,68%	220,5	237,4
PDRB	1.610,8	1.552,6	100.00	-3,61%	1.496,5	1.442,4

Sumber : PDRB Kab. Nias 2005, BPS

* Kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB Kab.Nias tahun 2005

** Pertumbuhan riil tiap sektor tahun 2004 s/d 2005

*** Pertumbuhan pada setiap lap.usaha dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan real pada masing-masing lap.usaha

Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Kab. Nias pada tahun 2004 adalah sebesar Rp.1.610,8 miliar sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 1.552,6 miliar atau turun 3,61%. Menggunakan tingkat pertumbuhan riil -3,61%, PDRB Kab. Nias pada tahun 2006 diproyeksikan turun menjadi Rp.1.496,5 miliar dan tahun 2007 diproyeksikan juga akan turun menjadi Rp.1.442,4 miliar. Adapun untuk proyeksi tiap-tiap sektor dapat dilihat lebih detail pada tabel diatas.

B. Kabupaten Nias Selatan

Perekonomian Kab. Nias Selatan ditopang oleh 3 sektor utama yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Bangunan. Sejak tahun 2003 (sampai 2005, peranan sektor-sektor tersebut tidak berubah dan tetap dominan. Adapun terhadap PDRB tahun 2005, sektor pertanian berkontribusi 45,31%; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berkontribusi 24,58%; dan Sektor Bangunan berkontribusi 9,55%. Untuk sektor-sektor lainnya dapat dilihat lebih detail pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 8
Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nias Selatan
(Harga Konstan Tahun 2000)

LAPANGAN USAHA	PDRB (Miliar Rupiah)		Peranan Sektor (%) *	Real Growth (%) **	Proyeksi PDRB 2006*** (Juta Rp)	Proyeksi PDRB 2007*** (Juta Rp)
	2004	2005				
Pertanian	480,6	453,3	45.31	-5,68%	427,6	403,3
Pertambangan & Penggalian	12,4	13,7	1.37	10,48%	15,1	16,7
Industri Pengolahan	13,7	13,7	1.37	0,00%	13,7	13,7
Listrik, Gas dan Air Minum	2,1	1,9	0.19	-9,52%	1,7	1,6
Bangunan	87,3	95,6	9.55	9,51%	104,7	114,6
Perdagangan, Hotel dan Restoran	253,5	245,9	24.58	-3,00%	238,5	231,4
Pengangkutan dan Komunikasi	56,8	58,3	5.83	2,64%	59,8	61,4
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	35,3	37,9	3.78	7,37%	40,7	43,7
Jasa-jasa	77,5	80,2	8.02	3,48%	83,0	85,9
PDRB	1.021,7	1.000,5	100.00	-2,07%	979,7	959,4

Sumber : PDRB Kab. Nias Selatan 2005, BPS

* Kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB Kab.Nias Selatan tahun 2005

** Pertumbuhan riil tiap sektor tahun 2004 s/d 2005

*** Pertumbuhan pada setiap lap.usaha dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan real pada masing-masing lap.usaha

Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Kab. Nias Selatan pada tahun 2004 adalah sebesar Rp.1.021,7 miliar sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 1.000,5 miliar. Menggunakan tingkat pertumbuhan riil -2,07%, PDRB Kab. Nias pada tahun 2006 diproyeksikan turun menjadi Rp.979,7 miliar dan tahun 2007 diproyeksikan juga akan turun menjadi Rp.959,4 miliar. Adapun untuk proyeksi tiap-tiap sektor dapat dilihat lebih detail pada tabel diatas.

C. Dampak Kerusakan terhadap PDRB Kep. Nias dan PDB Nasional

Berdasarkan nilai kerusakan akibat bencana gempa dan tsunami, berikut perkiraan besar nilai kerusakan terhadap PDRB Kepulauan Nias dan PDB Nasional.

Tabel III. 9
Estimasi Dampak Kerusakan Terhadap PDRB Kepulauan Nias dan PDB Nasional
(Harga Konstan Tahun 2000)

Sektor/Kabupaten/ Nasional	2005	2006	2007			
	PDRB/PDB* (Miliar Rp)	PDRB/PDB* (Miliar Rp)	PDRB/PDB* (Miliar Rp)	Rasio PDRB terhadap PDB Nasional (%)	Besar Kerusakan** (Miliar Rp)	Dampak terhadap PDRB/ PDB Nasional (%)
Pertanian	1,083.5	1,034.8	988.3	0.051%	280.4	7.51%
Perdagangan,Hotel dan Restoran	655.0	649.8	652.8	0.033%	16.5	0.44%
Kepulauan. Nias	2,553.1	2,476.2	2,401.8	0.123%	6,012.4	160.93%
Indonesia	1,739,940.0	1,845,700.0	1,951,460.0			0.198%

* Asumsi tingkat riil pertumbuhan ekonomi Kab Nias diasumsikan -3,61% pa sedangkan Kab Nias Selatan -2,07% pa

** Angka kerusakan dideflasikan dan dibandingkan dengan PDRB harga konstan tahun 2000

Kerusakan di Kepulauan Nias diperkirakan sebesar 0,198% terhadap PDB nasional dan berpotensi mengganggu rencana pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan oleh pemerintah sebesar 6.3% di tahun 2007 sedangkan terhadap perekonomian kepulauan Nias besar kerusakan diperkirakan sebesar 160,93% terhadap PDRB. Dampak kerusakan terhadap sektor pertanian diperkirakan sebesar 7,51% PDRB sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan 0,44% terhadap PDRB.

III.3.2. Dampak Terhadap Ketenagakerjaan

A. Kabupaten Nias

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Aceh-Nias (SPAN) tahun 2005 yang dilaksanakan pasca bencana alam gempa tektonik tanggal 28 maret 2005, jumlah penduduk Kabupaten Nias adalah 441.733 jiwa. Dari angka tersebut, penduduk yang tergolong dalam usia kerja (15 tahun atau lebih) adalah sebanyak 270.696 jiwa dimana sebanyak 196.523 jiwa bekerja sedangkan lainnya adalah mencari pekerjaan sebanyak 13.335 jiwa, bersedia bekerja sebanyak 6.401 jiwa, dan bersekolah/mengurus rumah tangga/lainnya sebanyak 54.437 jiwa.

Tabel III. 10
Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan kegiatan seminggu yang lalu (jiwa) Kabupaten Nias Tahun 2005

Kegiatan Seminggu yang lalu	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah Total	%
I. Angkatan Kerja	104.798	38,71	105.060	38,81	209.858	77,50
Bekerja	97.216	35,91	99.307	36,69	196.523	72,60
Mencari Pekerjaan	7.282	2,69	5.753	2,13	13.035	4,82
II. Bukan Angkatan Kerja	23.682	8,75	37.156	13,73	60.838	22,47
(sekolah, mengurus rumah, lainnya)						
Total I+II	128.480		142.216		270.696	100,00

Sumber : Kab. Nias dalam Angka 2006, BPS

Penduduk yang bekerja sebagian besar berlatar pendidikan SD ke bawah yaitu 148.101 jiwa (75,36%) terdiri dari penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 41.611 jiwa, tidak/belum tamat SD sebanyak 47.318 jiwa, tamat SD sebanyak 59.172 jiwa, sedangkan yang berlatar pendidikan SLTP ke atas sebanyak 48.242 jiwa (24,63%) terdiri dari berpendidikan SLTP 24.462 jiwa, tamat SLTA 19.710 jiwa, dan tamat universitas 4.050 jiwa.

Menurut lapangan usaha, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 dapat dilihat bahwa, di Kabupaten Nias, dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, sebanyak 89,97 persen diantaranya terserap di sektor pertanian, 2,30 persen di sektor industri, dan 7,73 persen di sektor jasa-jasa.

B. Kabupaten Nias Selatan

Sedangkan berdasarkan hasil proyeksi BPS, penduduk Kab. Nias Selatan pada pertengahan tahun 2005 diperkirakan sebesar 288.233 jiwa. Dari angka tersebut, penduduk yang tergolong dalam usia kerja (15 tahun atau lebih) adalah sebanyak 166.811 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 80,2 persen (133.782 jiwa) sedangkan lainnya (33.029 jiwa) sedang mencari kerja, bersekolah atau mengurus rumah tangga.

Angkatan kerja di Kabupaten Nias Selatan sebagian besar masih berpendidikan SD ke bawah. Pada tahun 2005 persentase angkatan kerja golongan ini mencapai 41,96 persen (56.135 jiwa), angkatan kerja yang berpendidikan SLTP sebesar 26,42 persen (35.345 jiwa), berpendidikan SLTA sebesar 26,42 persen (35.439 jiwa), sedangkan sisanya 5,14 persen berpendidikan diatas SLTA (6.876 jiwa).

Jika dilihat dari jenis lapangan usaha untuk tahun 2004, pada urutan pertama sebesar 90,06 persen penduduk Kabupaten Nias selatan diserap Sektor Pertanian. Disusul sektor perdagangan sebesar 3,97 persen dan sektor Jasa (termasuk pegawai negeri sipil) sebesar 2,78 persen.

III.3.2. 3. Dampak Ketenagakerjaan di Kepulauan Nias

Struktur ketenagakerjaan di Kepulauan Nias (Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan) adalah tenaga kerja dengan mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar dan terserap pada sektor pertanian. Bencana gempa dan tsunami telah mengganggu sumber pencaharian sebagian besar masyarakat dan mengakibatkan pengangguran. Berdasarkan data kerusakan, diperkirakan besar kerusakan terhadap sektor pertanian sebesar 7,51 persen terhadap PDRB Kepulauan Nias.

Produk unggulan pada sektor pertanian seperti karet, kakao, kelapa, padi dan termasuk perikanan laut belum dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan yang optimal bagi masyarakat. Masyarakat di Kepulauan Nias belum dapat memanfaatkan potensi ekonomi di sektor pertanian dikarenakan rendahnya produktivitas dan rendahnya nilai tambah yang dapat diberikan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, terbatasnya sarana infrastruktur dan akses ke desa-desa, terbatasnya lembaga permodalan mikro, serta tidak adanya industri pengolahan di pulau Nias. Semua hasil produksi di kirim ke Pulau Sumatera, dengan biaya transportasi yang besar, untuk diolah lebih lanjut. Dengan demikian petani di Kepulauan Nias mendapat penghasilan yang relatif kecil dan tetap termarginalkan.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan guna membangun kembali kehidupan Masyarakat ke arah yang lebih baik telah memberikan harapan baru bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Besarnya Kebutuhan akan tenaga dan aliran dana masuk diharapkan berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias. Namun demikian, Program rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah program sementara yang suatu saat akan berakhir.

Pasca Program rehabilitasi dan Rekonstruksi diperkirakan tidak semua pekerja langsung mendapatkan pekerjaan baru. Kebijakan dan program antisipatif perlu dilakukan guna meminimalkan dampak dimaksud.

III.3.3. Dampak Terhadap Lingkungan Hidup

Bencana gempa bumi dan tsunami telah menimbulkan kerusakan yang parah pada lingkungan pantai termasuk hutan pantai, karang, dan tanah rawa lainnya. Gempa telah menaikkan permukaan pantai sehingga terumbu karang menjadi terangkat dan rusak. Beberapa Pelabuhan Pemberhentian Ikan (PPI) tidak dapat digunakan dikarenakan terjadi pendangkalan. Mata air dan sumur tidak dapat digunakan, Daerah aliran sungai (DAS) menyempit, dan rusaknya Pantai Sorake sebagai tempat kunjungan wisata dunia. Sejak bencana kunjungan wisata telah menurun drastis dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan turunnya PDRB di Kepulauan Nias.

Masalah lingkungan perlu diprioritaskan selama proses rekonstruksi yang sedang berlangsung dan harus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja para pemangku kepentingan yang terlibat dalam rekonstruksi. Sebelum proses rekonstruksi dilaksanakan perlu dilakukan analisis dan pengkajian dampak lingkungan di semua daerah.

Masalah lingkungan utama yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Membangun kembali wilayah yang memiliki permukaan air tinggi. Air minum di kawasan ini tercemar dan sistem sanitasi yang kurang memadai.
2. Perlunya untuk merehabilitasi dan melindungi ekosistem daerah pesisir yang telah rusak karena tsunami dan/atau praktek-praktek sumber daya yang tidak berkesinambungan.
3. Kapasitas dalam bidang pengelolaan lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan perencanaan tata ruang harus ditingkatkan.
4. Sistem analisis dampak lingkungan perlu mendapatkan penyederhanaan lebih lanjut dan dukungan teknis agar dapat dengan mulus diimplementasikan.
5. Pemantauan atas dampak lingkungan dan kualitas dari proses rekonstruksi perlu ditingkatkan.
6. Penanaman hutan bakau guna mitigasi bencana tsunami.

Dalam rangka meminimalkan dampak bencana gempa dan tsunami diperlukan konsep tata ruang yang jelas dan tegas. Konsep tata ruang harus dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi guna pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Rancangan Umum Tata Ruang dan Wilayah (RUTRW / dokumen kebijakan), penting untuk diatur tujuan yang jelas dari pengaturan tata ruang, termasuk di dalamnya pengurangan resiko bencana. Harus jelas pula aturan pemakaian ruang kosong agar tidak disalah artikan.



Prinsip, Kebijakan Umum dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah dan kehidupan masyarakat di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bencana yang selama ini dilaksanakan oleh BRR Perwakilan Kepulauan Nias berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 masih belum mencerminkan kebutuhan daerah pasca bencana alam, mengingat terbitnya Perpres dimaksud tidak lama berselang setelah bencana alam gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 sehingga kebutuhan serta program yang termuat di dalamnya tidak secara keseluruhan mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kepulauan Nias (mencakup Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan).

Pokok-pokok uraian pada bab ini adalah tentang prinsip-prinsip, kebijakan umum, strategi kebijakan per sektor berdasarkan 4 pilar (terdiri dari : (1) infrastruktur yang efektif; (2) perumahan dan permukiman; (3) kelembagaan dan sosial kemasyarakatan yang kokoh; dan (4) ekonomi yang bersaing) serta penataan ruang Kepulauan Nias yang akan ditempuh dalam pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bencana alam gempa bumi tanggal 28 Maret 2005.

IV.1. Prinsip-prinsip Rehabilitasi dan Rekonstruksi

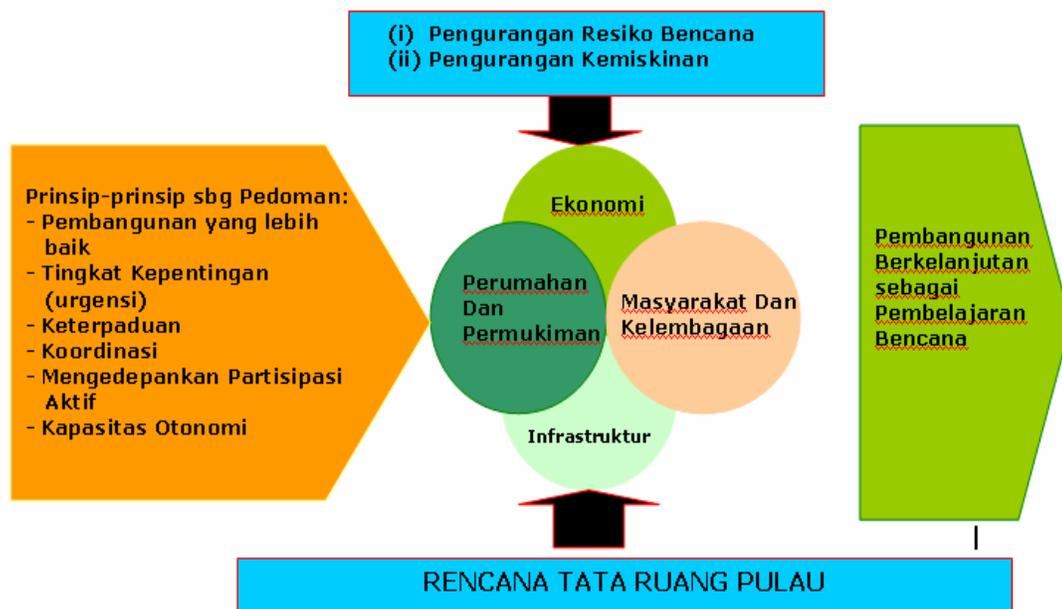
Rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah dan kehidupan masyarakat di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Gempa 28 Maret 2005 akan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Berorientasi pada **Community-driven**, prinsip untuk mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
2. **Holistik**, pembangunan kembali Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan) harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan berdasarkan pada strategi yang bersifat komprehensif.
3. **Build back better**, prinsip untuk membangun kembali menjadi lebih baik dari kondisi semula.
4. **Urgensi**, prinsip untuk mengedepankan kegiatan dan tindakan rekonstruksi yang bersifat urgen.
5. **Integrasi**, prinsip untuk menterpadukan kegiatan antar dan lintas sektor untuk memperoleh manfaat kegiatan yang optimal.
6. **Koordinasi**, prinsip untuk senantiasa mengkoordinasikan kegiatan, pelaksana dan pelaksanaannya sehingga tercapai tingkat sinergi yang optimal.
7. **Promoting local autonomy**, prinsip untuk memupuk kapasitas otonomi lokal dalam pengambilan keputusan dalam proses rehabilitasi-rekonstruksi.
8. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik**, prinsip untuk mendorong dan memfasilitasi tercapainya tata pemerintahan yang baik dalam setiap aspek dan tataran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.

9. **Terpadu**, koordinasi dan strategi yang efektif untuk menjamin konsistensi dan keefektifan antara program sektoral dan regional di tingkat nasional maupun daerah.
10. **Gender**, prinsip untuk sadar dan peduli akan pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
11. **Quality, efisien, transparan, dan akuntabel**, prinsip untuk mengutamakan kualitas sebagai salah satu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan dan hasil kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
12. **Pembangunan Berkelanjutan**, prinsip untuk mengutamakan keseimbangan aspek kelayakan ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*), sehingga pemilihan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi yang dapat berlanjut dengan dayanya sendiri tanpa atau dengan seminimal mungkin intervensi dari luar.
13. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara memberikan **prioritas** pada daerah-daerah yang terkena bencana.

Selain prinsip-prinsip dasar yang tertera diatas, adapun yang menjadi orientasi dari Rencana Aksi ini akan didasarkan atas proses rekonstruksi pembangunan yang terintegrasi pada :¹ (1) *Pengurangan resiko bencana* (2) *Pengurangan tingkat kemiskinan*, dan (3) *Rencana tata ruang wilayah pulau yang berbasis kawasan laut dan pulau*, yang akan menjadi referensi utama dari seluruh program rekonstruksi Kepulauan Nias dengan sasaran Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan . Sebagaimana tergambar pada diagram berikut:

Gambar IV. 1
Kerangka Stratergik Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dengan pendekatan berbasis kawasan laut dan pulau



Sumber : Pokok-pokok Pikiran dan Usulan Strategis dalam Rangka Penyusunan Master Plan Rekonstruksi Nias, BRR Perwakilan Nias, 200. (Diterjemahkan oleh Tim P3B, Bappenas).

¹ Telah dibahas pada Nias Islands Stakeholder Meeting yang ke -3 (NISM 3).

IV.2. Kebijakan Umum

Penilaian perkiraan kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assesment/DLA*) yang telah diuraikan pada Bab III ke dalam beberapa sektor pemulihan yang telah dikelompokkan dalam 4 sektor rehabilitasi dan rekonstruksi: (1) sektor perumahan dan permukiman; (2) sektor infrastruktur; (3) sektor ekonomi; dan (4) sektor kelembagaan dan sosial kemasyarakatan) didasarkan kepada kebijakan umum pemulihan pasca bencana gempa bumi di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan Umum Rencana Aksi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perpres Nomor 30 Tahun 2005 terbagi dalam 4 (empat) kebijakan utama:

1. **Pembangunan kembali masyarakat** dengan cara memulihkan aspek-aspek kehidupan keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, hukum dan kelembagaan agama serta adat.
2. **Pembangunan kembali ekonomi** dengan cara penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan keuangan dan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, membangun kembali sektor-sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai pembangunan kembali sarana ekonomi (pasar, tempat pelelangan ikan, gudang).
3. **Pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan** dengan mendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan udara dan laut, prasarana dan sarana telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersih dan perumahan.
4. **Pembangunan kembali pemerintahan** dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, merancang kembali (*redesign*) kota-kota dan pusat kegiatan baru.

Membangun kembali Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menuju yang lebih baik dalam pembangunan fisik, secara sederhana dapat dimaknai sebagai rekonstruksi dan rehabilitasi bangun bangunan yang lebih tahan terhadap gempa. Sedangkan dalam konteks pembangunan non fisik dapat dimaknai secara garis besar sebagai usaha rehabilitasi sektor sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Artinya, peluang membangun Kepulauan Nias yang mencakup kepada Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan secara konprehensif ini tidak boleh diwujudkan sebagai pembangunan yang sekedar mengembalikan keadaan seperti semula, namun harus ditangkap sebagai peluang pembangunan wilayah yang mengembangkan pembangunan wilayah yang mengembangkan Kepulauan Nias sebagai suatu wilayah yang maju.

Pada sisi lain *build back better* di Kepulauan Nias juga berarti membangun budaya keselamatan (*safety culture*) karena pada hakekatnya masyarakat yang berada di Kepulauan Nias harus membiasakan diri hidup bersama gempa (*living with the earthquake*). Dengan adanya kesadaran bahwa kehidupan di Kepulauan Nias tidak akan terlepas dari gempa, maka usaha-usaha untuk menjaga dan meningkatkan keselamatan diri dan orang lain akan menjadi gaya hidup masyarakat di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Dalam proses rekonstruksi yang sedang berlangsung saat ini, keterkaitan antara kebijakan umum dengan 4 pilar yang menjadi dasar pembangunan kembali Kepulauan Nias menjadi lebih baik dapat terlihat sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel IV. 1
Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan 4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Komponen Penilaian Kebijakan Umum	4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
	Infrastruktur yang efektif	Perumahan dan permukiman	Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Kokoh	Ekonomi yang bersaing
Pembangunan kembali masyarakat			☑	
Pembangunan kembali ekonomi	☑		☑	☑
Pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan	☑	☑	☑	☑
Pembangunan kembali pemerintahan	☑		☑	☑

Sumber : Tim P3B Bappenas, April 2007.

Tabel diatas memperlihatkan keterkaitan antara komponen penilaian berdasarkan 4 pilar rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan pada Perpres Nomor 30 Tahun 2005:

- Pada kebijakan pembangunan kembali masyarakat di Kepulauan Nias akan mengarahkan kepada pilar ke empat dalam rangka penguatan kelembagaan dan sosial kemasyarakatan
- Terbangunnya infrastruktur yang baik, meningkatnya taraf perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias dan Nias Selatan dengan dukungan kelembagaan dan sosial kemasyarakatan yang kokoh akan sangat mendukung kebijakan terhadap pembangunan kembali ekonomi.
- Kebijakan pembangunan terhadap infrastruktur dan perumahan akan mengarahkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada penyelesaian perumahan dan permukiman, efektifitas infrastruktur publik dan pemerintah, berkembangnya ekonomi berbasis masyarakat serta penataan kelembagaan dan sistem sosial kemasyarakatan.
- Sedangkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menata infrastruktur, meningkatkan laju gerak perekonomian masyarakat serta stabilitas kelembagaan dan sosial kemasyarakatan di Kepulauan Nias, ini akan dapat tercapai dengan pembangunan kembali tata pemerintahan yang baik (*clean government and good government*)

IV.3. Strategi dan Kebijakan Sektoral

Kebijakan dan strategi yang akan dituangkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, didasarkan pada permasalahan yang ada.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, pertama-tama dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok: 1) masalah yang timbul pada manusia sebagai individu; 2) manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya; dan 3) masalah yang timbul sebagai pendukung kehidupan manusia.

Secara kolektif, manusia sebagai makhluk sosial, permasalahannya lebih kompleks karena banyak keterkaitan bidang-bidang yang perlu penanganan terpadu untuk mengatasinya. Beberapa pertanyaan yang perlu jalan keluar dari permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan kolektif manusia ini adalah:

1. Hubungan antar manusia, bagaimana memulihkan hubungan adat, sosial dan budaya antar anggota masyarakat Kepulauan Nias;
2. Bagaimana memulihkan pelayanan masyarakat di Kepulauan Nias seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, pemerintahan dan lainnya, dimana kebanyakan tenaga pelayanan tersebut menjadi korban meninggal maupun yang masih mengalami trauma;
3. Bagaimana mengembalikan kehidupan ekonomi yang lebih baik di Kepulauan Nias, apakah dengan memberikan bantuan keuangan atau melakukan penggantian tanah, perumahan, maupun bantuan pemulihan terhadap sarana ekonomi produktif masyarakat;
4. Bagaimana memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada masyarakat pasca bencana.

Permasalahan individu dan kolektif manusia tersebut tidak akan tertuntaskan secara menyeluruh kalau permasalahan faktor-faktor pendukung, yaitu menyangkut permasalahan infrastruktur fisik dan infrastruktur kelembagaan, juga tidak terselesaikan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian disusun dalam tahapan-tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Membangun Kabupaten Nias dan Nias Selatan menjadi lebih baik (*build back better*) sejak tahun 2005 pasca bencana gempa bumi dibagi dalam beberapa tahapan pembangunan, yaitu:

1. Tahap **recovery**, merupakan respon tanggap darurat yang dilakukan sesaat setelah terjadinya bencana dengan pemberian bantuan stimulan dan bersifat segera, khususnya dalam penanganan dan pemberian bantuan bagi para korban pasca bencana.
2. Tahap **rehabilitasi** bersifat jangka pendek sebagai respon atas berbagai isu yang bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan yang segera dan bertujuan untuk memulihkan standar pelayanan minimum pada sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, sektor ekonomi, sektor kelembagaan dan sosial kemasyarakatan yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana.
3. Sedangkan Tahap **rekonstruksi** lebih bersifat jangka panjang untuk memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Aksi (2007-2009) untuk Kepulauan Nias ini akan diarahkan dalam rangka pengembangan dan penguatan pilar-pilar rehabilitasi dan rekonstruksi melalui tahapan-tahapan yang direncanakan akan berakhir hingga tahun 2009. Pelaksanaan proses rekonstruksi (yang dimulai tahun 2007) difokuskan kepada tahapan-tahapan sebagaimana diterangkan pada gambar berikut:

Gambar IV. 2
Tahapan Pengembangan 4 Pilar dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
di Kepulauan Nias (2005-2009)

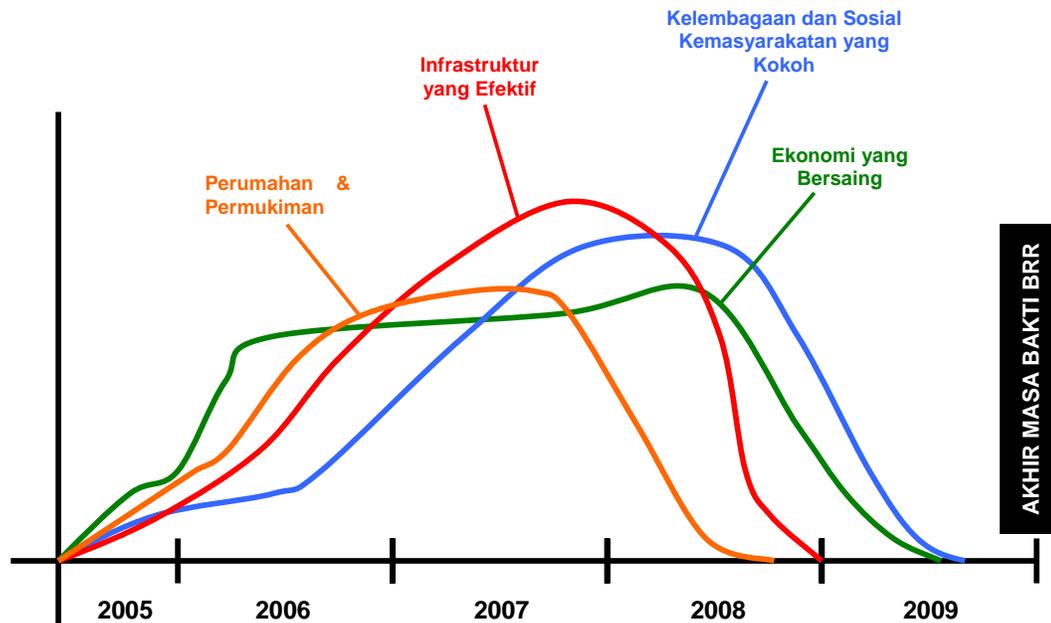


Sumber: Analisis Tim P3B Bappenas, Mei 2007 (Berdasarkan skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2005-2009).

Berdasarkan gambar di atas terlihat dengan jelas tahapan-tahapan recovery, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kepulauan Nias, yang telah dimulai sejak tahun 2005 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2009. Mulai tahun 2007, tahapan pembangunan di Kepulauan Nias yang telah memasuki tahap rekonstruksi akan tetap difokuskan pada pengembangan infrastruktur, perumahan, permukiman, kelembagaan dan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Nias dan Nias Selatan yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Sedangkan tahapan pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi sesuai dengan mandat yang telah ditugaskan kepada BRR Perwakilan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, akan fokus terhadap 4 pilar, yaitu : infrastruktur yang efektif; perumahan dan permukiman; kelembagaan dan sosial kemasyarakatan yang kokoh; serta peningkatan terhadap sistem ekonomi yang bersaing. Grafik tentang intensitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 untuk kepulauan Nias sebagaimana yang dijabarkan dalam gambar grafik berikut:

Gambar IV. 3
Grafik Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias
Berdasarkan 4 Pilar (2005-2009)



Sumber: Analisis Tim P3B Bappenas, Mei 2007, (Berdasarkan Pola Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh BRR 2005-2009).

Berdasarkan gambar grafik diatas, dapat diketahui bahwa arah dan jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kepulauan Nias yang direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2009 dengan harapan bahwa pada akhir tahun 2008 semua program yang telah direncanakan akan terselesaikan dan sampai berakhirnya masa bakti BRR khususnya untuk perwakilan Kepulauan Nias pada tahun 2009 serta dilanjutkan dengan pelaksanaan exit strategi dengan penyerahan seluruh asset dan manajemen kepada pemerintah daerah. Grafik diatas juga menjelaskan secara jelas tentang rentang waktu pelaksanaan setiap pilar yang difokuskan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Pada pilar perumahan dan permukiman, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pilar ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2008. Pilar infrastruktur yang efektif termasuk menjadi prioritas yang penting (sebagaimana terlihat pada grafik) karena pilar ini sangat terkait dengan terselenggaranya dengan baik hingga akhir tahun 2009 karena merupakan penyokong terhadap pilar-pilar yang lain. Pada pilar kelembagaan dan sosial masyarakat yang kokoh, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras dengan pilar-pilar yang lain, dengan harapan sebelum berakhirnya masa bakti BRR di Kepulauan Nias, keseluruhan pilar telah terlaksana dengan baik karena akan mendukung terlaksananya exit strategi. Sedangkan untuk pilar ekonomi yang bersaing, ini juga berjalan selaras bersama pilar-pilar yang lain dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di kabupaten Nias dan Nias Selatan.

IV.3.1. Pilar Pertama: Infrastruktur yang Efektif

Membangun infrastruktur yang lebih baik, handal dan efektif merupakan bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan infrastruktur harus dapat meningkatkan nilai-nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang memperhatikan keberlanjutannya (*structure economic program*).

Strategi dan kebijakan yang menjadi fokus pada pilar ini adalah :

1. Memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar serta prasarana untuk memperlancar logistik.
2. Membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah kecamatan, kecamatan dan desa serta menuju sentra-sentra produksi.
 - a. Membuka *entry point* dan jalur utama, dilanjutkan dengan pembukaan jalur transportasi yang terintegrasi untuk memperlancar distribusi logistik yang efisien dan pengembangan wilayah.
 - b. Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan merekonstruksi fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nirkabel untuk memberikan kemudahan akses telekomunikasi baik secara lokal, SLJJ, maupun SLI.
3. Merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian.
 - a. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan.
 - b. Mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik.

IV.3.2. Pilar Kedua: Perumahan dan Permukiman

Rekonstruksi, pada tahapan paling awal adalah membangun dengan lebih baik perumahan dan permukiman masyarakat Nias yang bersih, sehat, ramah lingkungan dan akrab dengan gempa, sehingga perlu menerapkan prinsip-prinsip tahan gempa dalam pembangunan ini. Upaya ini harus mendapatkan perhatian serius mengingat pembangunan rumah dan bangunan selama ini di Nias belum memperhitungkan hal-hal tersebut. Kebudayaan Nias sebagaimana tercermin dalam struktur rumah adatnya, sangat memperhitungkan terhadap berbagai resiko bencana. Masyarakat Nias modern kurang belajar dari kebudayaan mereka dan terbiasa membangun rumahnya dengan tidak mengindahkan prinsip bangunan tahan gempa, tanpa pondasi, struktur kolom dan balok, maupun konstruksi atap yang tahan gempa. Belum lagi, kondisi permukiman pada hampir seluruh kawasan tidak mencerminkan lingkungan yang sehat. Misalnya, sebagian besar permukiman tidak dilengkapi dengan fasilitas air bersih, sanitasi maupun kebersihan lingkungan yang memadai.

Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan ramah lingkungan memerlukan dukungan infrastruktur wilayah yang handal. Dimana membangun sebuah kawasan permukiman dengan prasarana jalan yang memadai menghubungkan kawasan tersebut dengan sentra permukiman utama maupun kawasan-kawasan produktif lainnya.

Strategi dan kebijakan pada sektor perumahan dan permukiman adalah :

1. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi para korban bencana dengan

- membantu penyediaan perumahan dan prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana.
2. Pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat, terutama perumahan dan permukiman milik masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya serta pada kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.
 3. Pemulihan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman antara lain pelayanan air bersih, sanitasi dan drainase.
 4. Mekanisme pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat, termasuk mekanisme distribusi material bahan bangunan serta sistem informasi pembangunan perumahan dan permukiman.
 5. Melaksanakan strategi pengendalian dengan : Penentuan sistem benefeseries yang tepat sasaran; meningkatkan mutu (*quality*) rumah yang dibangun dan kualitas bahan material yang digunakan; serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.
 6. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan serangkaian kegiatan lain yang dapat mendukung proses rehabilitasi rumah berbasis kebutuhan serta prakarsa masyarakat
 7. Meningkatkan kapasitas masyarakat terutama informasi untuk meningkatkan keterampilan serta informasi untuk mengetahui hak dan tanggung jawab.
 8. Sistem pengawasan dan pemantauan terhadap bantuan perumahan, termasuk pengawasan berbasis komunitas.

IV.3.3. Pilar Ketiga: Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Kokoh

Menjadikan sebuah kelembagaan dan sistem sosial kemasyarakatan yang kokoh dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan tugas yang tidak mudah, karena pada kenyataannya masyarakat Kepulauan Nias adalah masyarakat dalam kategori masyarakat yang tertinggal meskipun sebelum bencana gempa bumi telah terindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan yang ada di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan sangat rendah dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu peningkatan mutu pada sektor pendidikan adalah sesuatu hal yang mutlak, dimulai dari tingkat dasar hingga pada tingkat perguruan tinggi. Anak-anak di Kepulauan Nias harus dididik menjadi tenaga terampil yang siap pakai dipasaran kerja. Disamping itu mutu pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan. Rumah Sakit dan puskesmas harus memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat. Sejalan dengan itu penambahan tenaga medis yang bermutu diperlukan untuk melayani seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu). Posyandu harus difungsikan dengan baik. Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan prioritas.

Strategi dan kebijakan pada pilar kelembagaan dan sosial kemasyarakatan khususnya yang terkait dengan sektor: kelembagaan; pendidikan; kesehatan; sosial dan budaya dijabarkan sebagai berikut :

Sektor Kelembagaan

1. Memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan.
2. Membangun dan memulihkan kembali infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik.

3. Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi.

Seluruh kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan terkini pasca bencana alam sebagai berikut:

1. Memulihkan pemerintahan daerah dalam jangka pendek untuk pelayanan umum darurat melalui :
 - a. Melakukan prioritas rekrutmen, pelatihan dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal.
 - b. Melakukan penanganan masalah administrasi kepegawaian.
 - c. Melakukan pembersihan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan.
 - d. Mendukung ketersediaan kantor-kantor darurat di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.
 - e. Melakukan penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan.
 - f. Melakukan penggalangan bantuan kerjasama dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya.
 - g. Memulihkan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/ kelurahan/ desa)
2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan di daerah dalam jangka menengah, melalui :
 - a. Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah.
 - b. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini.
 - d. Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan).
 - e. Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab, untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
 - f. Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.
3. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan permanen melalui strategi:
 - a. Merehabilitasi prasarana pemerintahan daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (*Detail Engineering Design*).
 - b. Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.

Penguatan kelembagaan pemerintah dilakukan lewat upaya meningkatkan kinerja aparat maupun tata pemerintahan. Mempromosikan tata pemerintahan yang baik dilakukan secara terus menerus. Pendidikan dan latihan kepada pegawai pemerintah dilakukan pada berbagai tingkatan. Manajemen birokrasi pemerintah daerah perlu terus diperbaiki. Salah satunya adalah menerapkan sistem berbasis kinerja dalam proses rekrutmen, mutasi dan promosi kepegawaian.

Sektor Pendidikan

Memperkuat posisi sumber daya manusia (SDM) dengan memanfaatkan potensi dan prasarana yang dimiliki sebagai modal dasar penyediaan sarana pendidikan ke depan

melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk itu diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap alokasi sektor pendidikan. Strategi dan kebijakan secara spesifik dalam sektor ini adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan darurat bagi peserta didik yang terkena bencana dengan:
 - a. Menyediakan fasilitas pendidikan darurat termasuk tenda dan sekolah darurat.
 - b. Membersihkan fasilitas pendidikan untuk dapat difungsikan kembali.
 - c. Menyediakan buku dan peralatan pendidikan lainnya.
2. Memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah melalui:
 - a. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota masyarakat.
 - b. Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
 - c. Penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui:
 - a. Peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya termasuk pengembangan pendidikan unggulan
 - b. Pengembangan kurikulum yang relevan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
 - c. Peningkatan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik.
4. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui:
 - a. Pengembangan sistem pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
 - c. Penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan.
 - d. Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset kepada seluruh kelompok masyarakat.
 - e. Penataan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan termasuk penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi pendidikan.

Sektor Kesehatan

1. Penyelamatan korban bencana yang masih hidup, melalui :
 - a. Pelayanan kesehatan darurat
 - b. Pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma pasca bencana.
2. Pemulihan sistem kesehatan, melalui :
 - a. Mobilisasi tenaga kesehatan dan merekrut tenaga kesehatan
 - b. Melatih dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan
 - c. Merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan
 - d. Memulihkan fungsi dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
3. Pencegahan terjadinya wabah penyakit, melalui :
 - a. Melakukan penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*)
 - b. Melakukan imunisasi, *vector control*, disinfeksi dan penyediaan air minum.
 - c. Memperkuat *surveilans epidemiologi*.
4. Pencegahan kekurangan gizi, melalui :
 - a. Program pemberian bantuan makanan bagi bayi, balita dan ibu hamil.
 - b. Memberikan paket pertolongan gizi seperti vitamin A, tablet besi, syrup besi.
 - c. Memberikan penyuluhan gizi dan memperkuat *surveilans gizi*

Tingkat pendidikan dan kesehatan rakyat yang baik akan menjamin peningkatan kelembagaan masyarakat maupun pemerintah. Untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, revitalisasi kebudayaan di Kepulauan Nias akan dilakukan revitalisasi kebudayaan Nias melalui perkawinan antara nilai-nilai positif tradisional masyarakat yang berada di Kabupaten Nias dan Nias Selatan dengan berbagai nilai positif akibat kemajuan teknologi yang datang dari luar. Kebudayaan berkembang secara dinamis dipengaruhi oleh sejarah dan interaksi dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan yang berkembang baik akan menjadi dasar ataupun etika yang baik bagi pembangunan masyarakat Kepulauan Nias kedepan.

Sektor Sosial dan Budaya

Kebudayaan yang berkembang dengan baik akan menempatkan posisi perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan. Perhatian khusus diberikan kepada kaum lemah (*vulnerable groups*) seperti masyarakat lanjut usia, anak-anak, orang cacat dan keluarga sangat miskin.

Human Capital adalah bagian yang penting untuk memberikan nilai *social capital* yang saling ketergantungan dalam membangun Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, perlu tatanan budaya masyarakat Kepulauan Nias yang harus dikembangkan lagi melalui segenap perhatian stakeholder baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta lembaga lainnya. Pelibatan masyarakat perlu ditingkatkan lagi terutama dalam pemberdayaan *social capital*, baik tokoh agama, budaya maupun tokoh masyarakat.

Strategi dan kebijakan dalam sektor ini dijabarkan pada :

1. Merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana peribadatan.
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan:
 - a. Melakukan pendataan kebutuhan khusus perempuan dan anak;
 - b. Mengembangkan dan menfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), dan memfasilitasi *women crisis center*;
 - c. Memfasilitasi *children center* dan reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak;
 - d. Memberdayakan perempuan khususnya kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi;
3. Peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan dengan:
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kerusakan warisan budaya;
 - b. Memperkuat nilai-nilai budaya dan melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat;
 - c. Membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana budaya, serta memugar warisan budaya yang rusak;
4. Pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan dengan:
 - a. Memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat korban bencana;
 - b. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang cacat korban bencana;
 - c. Membangun dan memfungsikan *trauma center*;
 - d. Memberdayakan keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil;

5. Peningkatan peran pemuda dan budaya olahraga dengan:
 - a. Menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi kelembagaannya;
 - b. Mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan dan keolahragaan.

IV.3.4. Pilar Keempat: Ekonomi yang Bersaing

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya sangat terkait dengan pembangunan manusia, karena proses pembangunan merupakan usaha oleh dan untuk masyarakat. Penduduk dan masyarakat di Kepulauan Nias tidak boleh hanya sekedar menjadi penonton berbagai aktifitas pembangunan kembali pasca gempa. Pembangunan ekonomi di Kepulauan Nias tidak akan mungkin dilaksanakan jika hanya mengandalkan pasar domestik.

Mengembangkan perekonomian wilayah kepulauan Nias yang mempunyai daya saing akan sangat bergantung pada sektor *pertanian* dan *perikanan*. Selain itu sektor *pariwisata* juga menyimpan potensi besar, namun pengembangannya masih sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang, bergantung pada berbagai sarana dan prasarana dasar yang saat ini sudah mulai dikembangkan dalam mendukung sektor tersebut. Pengembangan pada sektor pertanian dan perikanan yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi pertanian dan perikanan, pengembangan organisasi petani/nelayan, pemberian kredit usaha kepada kelompok tani/nelayan, pengembangan industri kecil/menengah termasuk industri pengolahan pertanian, hingga penyaluran hasil produksi ke pasar termasuk penciptaan pasar yang sehat bagi petani dan nelayan di Kepulauan Nias. Pertanian dan perikanan yang selama ini bersifat subsisten secara bertahap harus dikembangkan kepada usaha yang berorientasi pada pasar (*market-oriented*).

Strategi dan kebijakan di bidang ekonomi bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di masa depan sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan strategi dan kebijakan yang secara khusus membahas tentang :

- **Pengorganisasian masyarakat;**
Perorganisasian ini bertujuan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya sebuah kohesi sosial dalam kegiatan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan intervensi-intervensi baik itu dari pemerintah ataupun pihak luar yang berkeinginan untuk membangun atau menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kelompok-kelompok aktifitas ekonomi, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin dan kelompok-kelompok lainnya yang serupa.
- **Pemberian keterampilan dan pengetahuan;**
Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini diarahkan untuk memberikan alternatif-alternatif kemampuan (*skills*) baru atau lebih baik dalam hal kegiatan berproduksi masyarakat secara luas.
- **Bantuan modal kerja;**
Bantuan ini berupa bantuan modal fisik (alat-alat produksi) dan bantuan modal uang. Dimana pengelolaan dan pengaturannya diserahkan kepada kelompok-kelompok kerja yang telah dibentuk sebelumnya. Penyediaan modal-modal tersebut tidak harus seluruhnya diserahkan kepada BRR ataupun pemda, tapi BRR dan pemda bisa mengajak kerjasama lembaga-lembaga keuangan formal lainnya, dimana BRR dan pemda berfungsi sebagai fasilitator dan penjamin dari bantuan permodalan tersebut

▪ **Pembentukan sebuah lembaga keuangan mikro.**

Pembentukan lembaga ini di Kabupaten Nias dan Nias Selatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hal-hal: 1) Penciptaan lapangan kerja; 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) Pengentasan kemiskinan.

Lembaga keuangan mikro akan menjadi sebuah tempat akses terhadap jasa keuangan bagi kalangan keluarga miskin dalam rangka mengurangi tekanan hidup dengan membuka peluang peningkatan penghasilan mereka. Keberadaan lembaga keuangan mikro ini dirasa sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Nias dan Nias Selatan, karena tanpa akses yang tetap pada lembaga keuangan mikro maka hampir semua keluarga miskin akan sangat tergantung hanya pada kemampuan pembiayaan sendiri (*self financing*) yang sangat terbatas. Mereka juga akan mengakses lembaga keuangan informal seperti rentenir, tengkulak, pelepas uang atau *penggalas*, yang malah menyebabkan keluarga miskin semakin terjebak dalam kemiskinannya. Tanpa akses tersebut mereka akan menghadapi keterbatasan dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan.

Pengembangan perekonomian juga membutuhkan infrastruktur yang handal. Infrastruktur transportasi di Kepulauan Nias yang parah membuat biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat tinggi bagi setiap hasil bumi yang akan dijual keberbagai pasar. Penanganan infrastruktur transportasi strategis sangat mendesak untuk membantu menciptakan iklim pasar yang sehat dan berimbang bagi perekonomian di Kepulauan Nias.

Strategi dan kebijakan yang diarahkan pada sektor pertanian dan perkebunan, akan difokuskan pada :

1. Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan pelatihan bagi berbagai pekerjaan yang hilang.
2. Pengembangan usaha tani dan optimalisasi pemanfaatan lahan.
3. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan.
4. Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya. Bantuan kepada masyarakat ini akan diberikan melalui bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat (*community-based approach*).
5. Memberikan dukungan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh akses pada sumber daya produktif.
6. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian dengan intensifikasi pertanian, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agrobisnis dan peningkatan kesejahteraan petani, terutama bagi para petani yang masih bertani dengan sistem tradisional.
7. Khususnya terhadap tanaman pangan : padi dan palawija, perlu dilakukan perubahan pola kegiatan dengan sentuhan teknologi dan metode pertanian yang lebih maju yang berbasis pada paradigma pemberdayaan usaha pertanian masyarakat pedesaan.
8. Sedangkan pada *sektor perkebunan*, seperti: kelapa, karet dan kakao, diperlukan kebijakan dan strategi secara khusus dalam:
 - a. Peningkatan kualitas jenis varitas dari jenis tanaman pohon karet (latek) yang ditanam, termasuk penerapan kontrol dan manajemen penggunaan pestisida.
 - b. Mempertahankan pembudidayaan tanaman kelapa, karet dan kakao sebagai komoditi unggulan di Kepulauan Nias.
 - c. Menciptakan sistem manajemen perkebunan, seperti pembersihan dari tanaman rumput, gurma dan tanaman pengganggu lainnya sehingga tidak menimbulkan persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari dan unsur hara (nutrisi)

- d. Adanya pengaturan penyesuaian jarak tanam, peningkatan perawatan terhadap kualitas bibit tanaman.

Dalam pengelolaan terhadap sektor kelautan, perikanan dan peternakan, strategi dan kebijakan yang dilakukan pada sektor ini :

1. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Pemulihan diutamakan pada sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, memulihkan sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya.
2. Memulihkan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan, khususnya membuka kembali akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah yang terkena dampak bencana.
3. Memulihkan kegiatan dan meningkatkan perikanan dengan pengembalian kegiatan perikanan tangkap dan rehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan budidaya.
4. Strategi revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat lebih bersifat jangka panjang, dimana akan diupayakan penyediaan kembali lapangan kerja bagi masyarakat korban bencana, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah, pencapaian target PDRB.
5. Khusus untuk bidang peternakan melalui pengembangan peternakan: babi, ayam buras dan itik menjadi sektor unggulan yang produksinya dapat dipasarkan ke luar pulau Nias.

Strategi dan kebijakan pada sektor koperasi, usaha kecil menengah (UKM), perdagangan dan pariwisata meliputi:

1. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam program-program pengembangan usaha ekonomi produksi.
2. Pengembangan koperasi dan pengusaha kecil serta pembangunan pasar/ waserda.
3. Pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan perusakan lingkungan hidup dalam pembangunan kembali wilayah.
4. Khusus dibidang *pariwisata*, kebijakan dan strategi yang dilakukan berdasarkan potensinya yaitu melalui:
 - a. Peningkatan pengelolaan dan penataan sistem manajemen *pariwisata alam*, seperti : potensi objek wisata seperti Air Terjun Lahandoi di Kecamatan Alasa yang merupakan obyek wisata yang masih alami. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan, pantai Lagundri dan Sorake di kecamatan Teluk Dalam yang memiliki ombak yang tinggi sehingga cocok untuk olah raga selancar merupakan salah satu objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Demikian juga dengan keindahan panorama bukit Hilidauru di kecamatan Lolowa'u, serta objek wisata taman laut (*wisata bahari*) di kecamatan P.P. Batu.
 - b. Peningkatan pengelolaan dan penataan sistem manajemen *pariwisata budaya atau peninggalan sejarah*, seperti: **di Kabupaten Nias**, keberadaan *Batu Megalit* di desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi dan rumah-rumah adat tradisional serta kesenian tradisional seperti atraksi tari perang dan tarian *maena* juga merupakan kekayaan budaya dan peninggalan sejarah. Demikian juga yang berada di **Kabupaten Nias Selatan**, seperti *Batu Megalit* di desa Tundrumbaho kecamatan Gomo dan desa Olayama di kecamatan Lolowa'u, rumah adat tradisional di desa Bawomataluo dan desa Hiliamaetaniha di kecamatan Teluk Dalam, serta kesenian tradisional seperti atraksi lompat batu (*hombo batu*), dan atraksi tari perang dan *tari maena*.
5. Pengembangan pembangunan dikawasan wisata di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Dibentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias (BRR NAD-Nias) dalam rangka melaksanakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Undang-Undang No.10 tahun 2005), tanggung jawab secara penuh rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias adalah pada kantor perwakilan BRR di Kepulauan Nias yang berkedudukan di Kota Gunung Sitoli Kabupaten Nias, dengan pembagian wilayah Distrik Nias dan Distrik Nias Selatan, dengan masa tugas 4 tahun. Namun mengarahkan rekonstruksi ini kepada pembangunan Kepulauan Nias yang mencakup Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang berkelanjutan yang didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat tidak akan selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Dibutuhkan rencana jangka panjang rekonstruksi Kepulauan Nias yang melibatkan pemerintah daerah dengan dukungan penuh pemerintah pusat sebagaimana telah ditunjukkan lewat kehadiran BRR di Nias. Pelaksanaan rekonstruksi yang telah difokuskan pada 4 pilar rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang telah disebutkan diatas akan diwujudkan melalui 10 sasaran utama sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel IV. 2
4 Pilar dan 10 Sasaran Utama Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias

4 Pilar	10 Sasaran Utama
Infrastruktur yang Efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur ekonomi khususnya transportasi: jalan, jembatan, pelabuhan, bandara maupun terminal angkutan 2. Rehabilitasi dan pengembangan kelistrikan dan telekomunikasi 3. Rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur irigasi, pengamanan pantai/sungai
Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan kembali dan rehabilitasi kawasan perumahan dan permukiman dengan prinsip “<i>build back better</i>” 5. Rehabilitasi dan pengembangan sistem air bersih, sanitasi, persampahan, drainase yang sehat dan ramah lingkungan
Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Kokoh	<ol style="list-style-type: none"> 6. Revitalisasi rumah sakit umum dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan berjenjang 7. Revitalisasi pendidikan Nias 8. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana pemerintahan 9. Revitalisasi kebudayaan Nias
Ekonomi yang Bersaing	<ol style="list-style-type: none"> 10. Pengembangan ekonomi dan usaha melalui penciptaan iklim investasi, sistem lembaga keuangan dan pasar yang sehat, dengan fokus pada perikanan dan pertanian (perikanan, coklat dan karet)

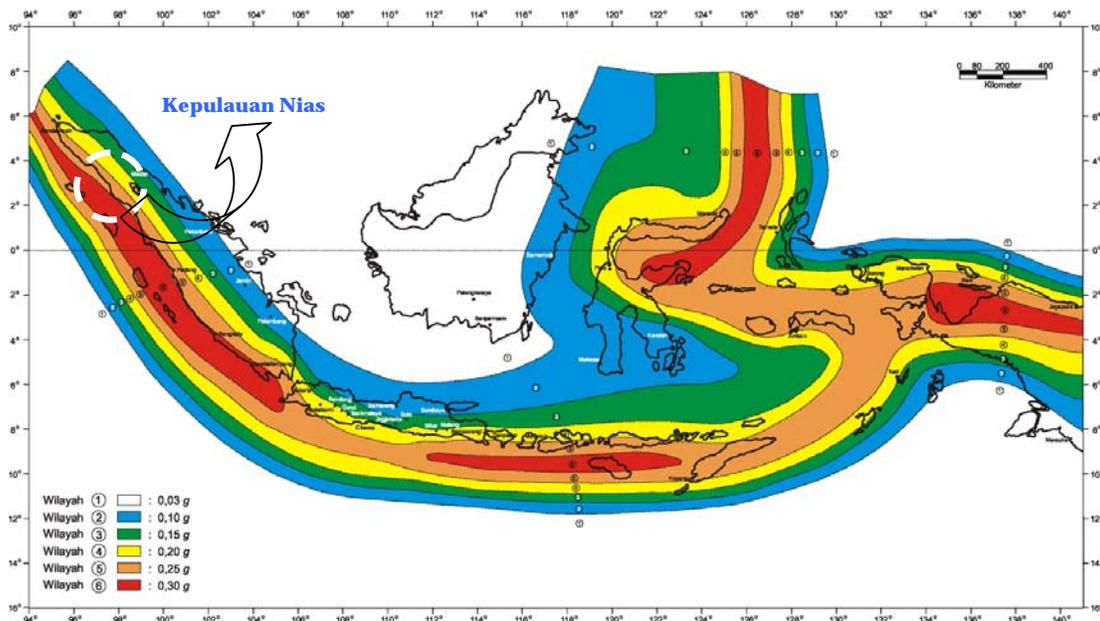
Sumber : Laporan BRR Perwakilan Nias 2005-2006

IV.4. Penataan Ruang Kepulauan Nias

Penyusunan Penataan Ruang untuk Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus dengan sadar mengakomodasi situasi geografis wilayah Nias yang terletak pada zona rawan kegempaan paling tinggi.

Indonesia, menurut *Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung* yang dikeluarkan oleh Balitbang Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Pekerjaan Umum (2002), ditetapkan terbagi dalam 6 Wilayah Gempa seperti ditunjukkan dalam **Gambar IV.4**. Wilayah Gempa 1 adalah wilayah dengan kegempaan paling rendah dan Wilayah Gempa 6 dengan kegempaan paling tinggi. Pembagian Wilayah Gempa ini, didasarkan atas percepatan puncak batuan dasar akibat pengaruh Gempa Rencana dengan perioda ulang 500 tahun.

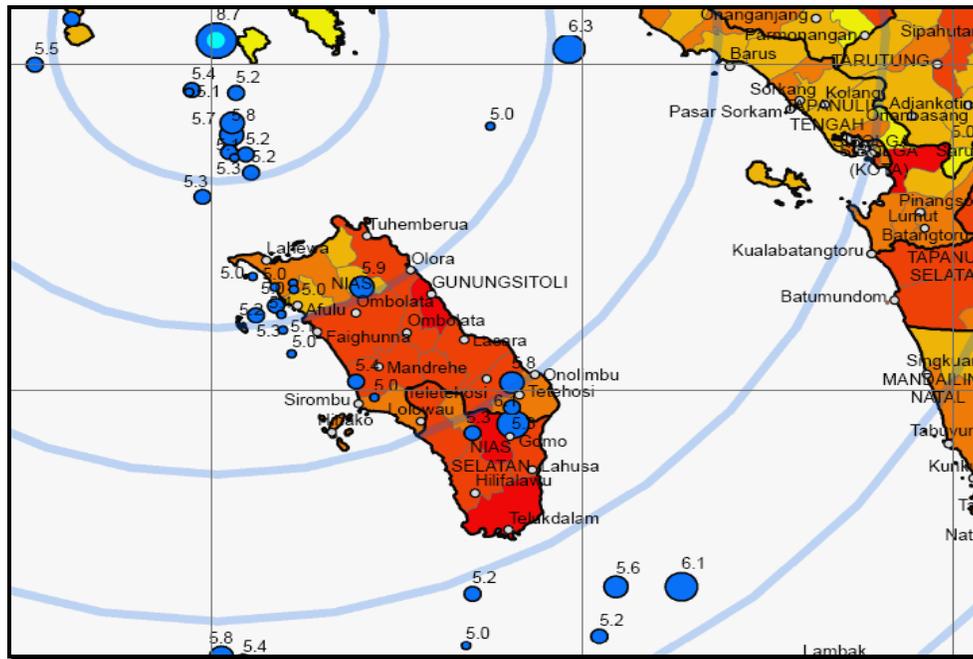
Gambar IV. 4
Wilayah Gempa Indonesia Menurut Percepatan Puncak Batuan Dasar
Dengan Perioda Ulang 500 Tahun



Sumber : *Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung*, Balitbang Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen PU, 2002

Wilayah Nias berupa kumpulan pulau dengan wilayah kelautan yang luas serta berada pada Zona 6 Kegempaan. Bentang laut harus dimanfaatkan sebagai sumberdaya pembangunan wilayah dan diperlakukan sebagai pengikat transportasi-komunikasi wilayah antar daratan kepulauan. Zona kegempaan yang ekstrim membutuhkan perlakuan mitigasi yang khas tidak hanya dari sisi fisik namun juga kesiapan manusianya dalam mengurangi resiko bencana. Pada sisi lain, aspek keberlanjutan lingkungan juga harus dipertimbangkan terutama dalam konteks menjawab kebutuhan pengurangan resiko bencana dan eksploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan fisik akibat percepatan rekonstruksi. Kombinasi ketiga variabel perencanaan ini serta variabel konvensional pengembangan wilayah dan kota lainnya akan membutuhkan pendekatan dan pengambilan keputusan perencanaan yang inkonvensional.

Gambar IV. 5
Kepulauan Nias Sebagai Daerah Rawan Gempa (Zona 6 Kegempaan)



Sumber : Pokok-pokok Pikiran dan Usulan Strategis dalam Rangka Penyusunan Master Plan Rekonstruksi Nias, BRR Perwakilan Nias, 2007

Pertimbangan dalam penyusunan penataan ruang untuk Kepulauan Nias adalah keberadaan produk penataan ruang wilayah dan kota pra dan pasca bencana alam 28 Maret 2005. Secara umum, aspek mitigasi bencana alam (terutama gempa dan tsunami) telah dimuat dalam produk-produk penataan ruang pasca bencana, termasuk yang telah disusun dengan koordinasi BRR perwakilan Nias.

Bencana tsunami 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005 menunjukkan bahwa kawasan Kepulauan Nias amat rentan terhadap bencana alam. Oleh sebab itu, beberapa rekomendasi penataan ruang dari Perpres 30/2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu dikombinasikan dengan skema manajemen penanganan bencana yang umum. Pergeseran paradigma dari tanggap-darurat terhadap bencana menjadi manajemen penanganan bencana yang utuh meliputi: pemetaan, pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan, pemulihan dan rehabilitasi bencana amat mendesak dilakukan.

IV.4.1. Rekomendasi Penataan Ruang Kepulauan Nias berdasarkan Perpres Nomor 30 Tahun 2005

Berdasar rekomendasi *Blue Print* (Perpres 30/2005) diketahui bahwa kawasan pesisir bagian barat Pulau Nias sekitar 30% yang berada di bawah ketinggian 25 m mengalami kerusakan akibat bencana gempa dan tsunami.

Dilihat dari tingkat kerusakan yang dialami, wilayah pesisir bagian Barat Pulau Nias dan sekitarnya dibagi menjadi 3 zona kerusakan yaitu:

1. Zona kerusakan 1 (kawasan yang mengalami kerusakan total/rusak berat),
2. Zona kerusakan 2 (kawasan yang mengalami rusak struktur bangunan/rusak sedang),
3. Zona kerusakan 3 (kawasan yang mengalami kerusakan ringan).

Rekomendasi pengembangan tiap zona ke depannya adalah:

1. Zona kerusakan 1 tidak cocok untuk permukiman, namun jika masyarakat ingin tinggal di wilayah ini maka harus dibangun infrastruktur perlindungan dan penyelamatan yang memadai. Sebaiknya pada zona ini dikembangkan kawasan perikanan dan pertanian lahan basah.
2. Zona kerusakan 2 dapat digunakan sebagai kawasan permukiman dengan memperhatikan penerapan ketentuan teknologi bangunan tahan gempa. Zona ini dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian basah maupun kering dengan kawasan permukiman sangat terbatas.
3. Zona kerusakan 3 baik untuk lokasi bangunan perumahan, CBD, perkantoran, dan aktivitas sosial lainnya dengan tetap memperhatikan teknologi tahan gempa. Zona ini dapat dikembangkan sebagai kawasan kota atau permukiman baru beserta fasilitas pendukungnya.

A. Konsep Penataan Ruang

Kabupaten Nias awalnya memiliki 14 kecamatan dengan 13 wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai Ibukota kecamatan dan 1 wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten (Gunung Sitoli). Gunung Sitoli adalah pusat pemerintahan, permukiman, pariwisata dan perdagangan di Kabupaten Nias. Sesuai dengan RTRWN, Gunung Sitoli berperan sebagai pusat wilayah dan Teluk Dalam sebagai pusat lokal.

Seiring dengan pemekaran wilayah, maka Kepulauan Nias terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Nias Selatan memiliki 8 Kecamatan (Teluk Dalam; Gomo; Lahusa; Lolowa'u; Amandraya; Lolomatua; Pulau-pulau Batu; dan Hibala) dengan ibukota kabupaten berada di Teluk Dalam. Teluk Dalam selain sebagai pusat pemerintahan, permukiman, pariwisata dan perdagangan di Kabupaten Nias Selatan. Sesuai dengan RTRWN, Teluk Dalam berperan sebagai pusat wilayah.

Untuk penataan kembali wilayah kabupaten dan kecamatan yang terkena bencana harus memperhatikan faktor keamanan dan faktor efisiensi pemanfaatan ruang dan infrastruktur untuk mewadahi seluruh kehidupan kota. Selain itu perlu pula diperhatikan potensi dan prospek perkembangan kota dengan melaksanakan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses perkembangan kota.

Hasil diskusi dan analisis fisik serta kebutuhan, maka secara umum telah disepakati berbagai hal penting untuk penataan kembali kawasan pantai barat Pulau Nias sebagai berikut:

1. Perlu ada fasilitas perlindungan dan penyelamatan;
2. Bangunan harus tahan gempa dan tsunami;
3. Pengaturan kembali fungsi-fungsi kawasan kota dan perdesaan dalam wujud zoning pemanfaatan ruang;
4. Penyediaan lokasi permukiman bagi yang ingin pindah; dan
5. Pemandangan fungsi-fungsi penting CBD dan kawasan permukiman ke daerah aman dalam jangka panjang.

B. Skenario Penataan Ruang

Skenario penataan ruang Kepulauan Nias dan kawasan yang terkena bencana tsunami adalah sebagai berikut:

1. Potensi pantai harus dilindungi pengembangannya;
2. Kawasan permukiman yang mengalami kerusakan total dibangun kembali, dengan menambahkan fasilitas perlindungan dan penyelamatan;
3. Kawasan perkotaan yang dipertahankan perlu diarahkan pengembangannya dengan mempertimbangkan kondisi fisik yang berkaitan dengan bencana gempa dan tsunami;
4. Kawasan fungsi pemerintahan, fungsi sosial, fungsi ekonomi, serta permukiman yang berada pada zona berpotensi kerusakan tinggi dipindahkan ke tempat aman dalam jangka panjang, menjadi kota atau pusat permukiman baru. Pemindahan pusat kota dan pusat permukiman baru dilakukan secara bertahap;
5. Kawasan permukiman desa (permukiman nelayan dan pertanian) yang berada di pantai dipertahankan dengan mengembangkan buffer zone dan zona penyelamatan serta menata kembali kawasan berfungsi lindung di sepanjang pantai;
6. Pada kawasan yang tidak layak huni, diarahkan menjadi kawasan penyangga.

C. Arahan Pola Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan skenario penataan ruang di atas, maka arahan penataan ruang Kepulauan Nias dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun *buffer zone* di sepanjang pantai barat Nias;
2. Mengendalikan dan menghindari perkembangan kota di pesisir barat Nias sebagai pusat pengembangan wilayah;
3. Mengembangkan pusat permukiman baru baik permukiman kota dan desa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan;
4. Relokasi permukiman yang terkena tsunami pada lokasi yang masih cukup dekat dengan lahan usaha dan diberikan dukungan akses jalan yang memadai terutama bagi permukiman baru pada wilayah perdesaan;
5. Membangun tempat permukiman sementara;
6. Menata kawasan lama bekas kawasan permukiman sesuai peruntukannya sebagai penyangga, ruang terbuka hijau, pariwisata, pertanian, perkebunan, atau fungsi kegiatan lain dengan aktivitas rendah;
7. Menata kembali kawasan lama dengan kegiatan utama sebagai kawasan pelabuhan, perdagangan, dan jasa distribusi dengan membangun fasilitas pendukungnya yaitu rumah susun sewa secara terbatas untuk para pekerja dan pengunjung kota lama;
8. Memberi perlindungan bagi permukiman desa, nelayan, dan pertanian/perkebunan yang dipertahankan di wilayah perdesaan dengan mengembangkan buffer zone dan zona penyelamatan yang mudah dijangkau;
9. Diperlukan dukungan pembangunan dan penataan kembali infrastruktur, penataan kembali jaringan jalan, irigasi, air ersih, drainase, dan lainnya bagi permukiman kota dan desa yang dipertahankan;
10. Menata kembali zona sepanjang pantai (*buffer zone*) dengan mengatur zona lindung, zona penyangga, dan zona pemanfaatan bebas.

D. Struktur Ruang

Sesuai dengan arahan pengembangan sistem kota-kota pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta dalam rangka mengantisipasi secara preventif maupun kuratif terhadap gempa dan tsunami yang kemungkinan terjadi, maka secara spasial struktur kota dan sistem pusat-pusat permukiman di Kawasan Pantai Barat Kepulauan Nias yang terdiri dari 5 wilayah perkotaan, bergeser ke arah dalam (daratan) dari lokasi kota-kota semula. Adapun fungsi kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 3
Sistem dan Fungsi Kawasan Perkotaan Pantai Barat Pulau Nias

NO	KECAMATAN	STATUS KOTA	FUNGSI KOTA
1	Sirombu	Kota Perdesaan	Ibu kota kecamatan Pemerintahan kecamatan, permukiman desa dan sosial Pariwisata Perkebunan
2	Mandrehe	Kota Perdesaan	Ibu kota kecamatan Pemerintahan kecamatan, permukiman desa dan sosial Perkebunan
3	Teluk Dalam	Pusat Kegiatan Lokal	Ibu kota kecamatan Pemerintahan kecamatan, permukiman desa dan sosial Kawasan pariwisata pantai Kawasan pelabuhan Kawasan perkebunan
4	Lahewa	Kota Perdesaan	Ibu kota kecamatan Pemerintahan kecamatan, permukiman desa dan sosial Kawasan pelabuhan Kawasan perkebunan
5	Afulu	Kota Perdesaan	Ibu kota kecamatan Pemerintahan kecamatan, permukiman desa dan sosial Kawasan pelabuhan Kawasan perkebunan

Sumber : Lampiran I Perpres No. 30 Tahun 2005

Sesuai dengan tantangan yang dihadapi, maka beberapa kawasan perkotaan di pantai barat Pulau Nias dikembangkan dengan pusat kota baru (Sirombu) dan sebagian tetap dipertahankan di lokasi semula.

Tabel IV. 4
Rencana Pengembangan Struktur Kawasan Perkotaan di Pantai Barat Pulau Nias

No	Kecamatan	Arah Pengembangan Struktur Kota
1	Sirombu	Kota yang terkena bencana gempa dan tsunami secara spasial digeser ke arah dalam (daratan) sejauh 3-4 km, di atas ketinggian 20 m dpl Kawasan pantai diarahkan sebagai kawasan pariwisata pantai, pertanian lahan basah, dan perkebunan yang di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas (yang dipersyaratkan disertai ketentuan-ketentuan teknis, misalnya: bangunan tahan gempa atau rumah panggung disertai escape road dan escape hill). Dan apabila masih bisa dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata maka perlu dilakukan suatu tindakan khusus dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan early warning system

No	Kecamatan	Arah Pengembangan Struktur Kota
2	Mandrehe	Kota perdesaan di Kec Mandrehe seperti Lasarabagawu, Hilisoromi, Onozaluchu, Sitolubanua yang terkena bencana gempa dan tsunami dipertahankan di lokasi semula namun dikembangkan ke arah dalam pada ketinggian di atas 20 m dpl. Kawasan pantai diarahkan sebagai kawasan pertanian lahan basah, perkebunan dan nelayan dengan permukiman desa terbatas Kawasan yang berpotensi wisata dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan early warning system Pola jaringan jalan dikembangkan secara menyirip terhadap garis pantai sehingga bisa berfungsi sebagai escape road
3	Teluk Dalam	Kota di Teluk Dalam dipertahankan di lokasi semula, namun pengembangan kota diarahkan ke arah utara pada ketinggian di atas 20 m dpl. Fungsi kota di Teluk Dalam: pemerintahan kecamatan, permukiman, perdagangan, sosial ekonomi, kawasan pelabuhan Sebagai daerah pusat kegiatan lokal (PKL) yang melayani daerah belakangnya seperti Pulau-pulau Batu dsk. Kawasan pantai diarahkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas
4	Lahewa	Kota di Lahewa dipertahankan di lokasi semula, namun pengembangan kota diarahkan ke arah tenggara pada ketinggian di atas 20 m dpl. Fungsi kota di Lahewa: pemerintahan kecamatan, permukiman, perdagangan, sosial ekonomi, pengembangan kawasan pelabuhan. Kawasan pantai diarahkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas
5	Afulu	Kota di Afulu dipertahankan di lokasi semula, namun pengembangan kota diarahkan ke arah utara dan timur laut pada ketinggian di atas 20 m dpl. Fungsi kota Afulu: pemerintahan kecamatan, permukiman, perdagangan, sosial ekonomi. Kawasan pantai selatan diarahkan sebagai kawasan pariwisata pantai dan kawasan pariwisata alam Kawasan perkebunan dan permukiman desa nelayan terbatas

Sumber : Lampiran I Perpres No. 30 Tahun 2005

Dukungan infrastruktur diperlukan untuk melayani setiap bagian wilayah perkotaan dan antar kota secara regional yang berorientasi ke Gunung Sitoli untuk kota perdesaan di bagian utara, bagian timur, dan bagian barat. Sementara itu pusat orientasi di bagian selatan diarahkan ke Kota Teluk Dalam. Untuk mendukung terbentuknya sistem kota yang memadai dan mendorong terbentuknya kembali linkage antar sentra-sentra perekonomian wilayah di Pulau Nias, maka dihubungkan dengan hirarki jaringan antar pusat permukiman tersebut.

IV.4.2. Identifikasi Potensi Bencana berdasar Rencana Tata Ruang Kabupaten Nias dan Nias Selatan

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Daerah yang didefinisikan sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam adalah seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor. Identifikasi potensi bencana dilakukan dengan menggunakan dokumen penataan ruang yang telah ada, yaitu draft RTRW Kabupaten Nias 2006-2016 dan draft RTRW Kabupaten Nias Selatan [Kanise] 2004-2014. Informasi yang tertuang dalam dokumen tata ruang tersebut

kemudian disesuaikan dengan rekomendasi penataan ruang berdasar Rencana Induk Rehabilitasi-Rekonstruksi NAD-Nias di sub-bab sebelumnya.

Berdasarkan penelitian geologi, kawasan rawan bencana di Kabupaten Nias (draft RTRW Kabupaten Nias 2006-2016) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Gempa Bumi.** Seluruh wilayah Kabupaten Nias merupakan daerah rawan gempa bumi, yang termasuk dalam wilayah zona 6, yang artinya paling rawan terhadap gempa bumi dan tidak mungkin dicegah. Yang dapat dilakukan adalah meminimalisasi jatuhnya korban;
2. **Gelombang Tsunami.** Akibat sering terjadinya gempa bumi maka wilayah Kabupaten Nias juga sangat potensial terjadinya gelombang tsunami karena dikelilingi oleh lautan bebas. Kawasan-kawasan yang potensial terkena gelombang tsunami adalah kawasan disepanjang pantai disekeliling Pulau Nias;
3. **Kawasan Rawan Longsor.** Kawasan rawan longsor yang terdapat di Kabupaten Nias pada umumnya terdapat pada daerah dengan kemiringan diatas 40% yang terdapat di bagian tengah Pulau Nias, seperti Kecamatan Hiliduho, Lolofitu Moi, Mandrehe dan Alasa.

Rencana struktur ruang Kabupaten Nias dalam *Draft* Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW] Kabupaten Nias 2006-2016 membagi Kabupaten Nias menjadi beberapa Satuan Wilayah Pengembangan [SWP].

Penyesuaian harus dilakukan terhadap berbagai masukan dan usulan terhadap Rencana Tata Ruang Kepulauan Nias untuk menjadi perhatian sesuai dengan masukan Rencana Induk : (1) Pengembangan beberapa SWP diarahkan ke sebelah dalam pada ketinggian di atas 20 m dpl. Berdasar rekomendasi Rencana Induk, SKPP yang terletak di pantai barat Kepulauan Nias dikembangkan ke arah utara maupun timur pada ketinggian 20 m dpl ditambah dengan pertimbangan aspek mitigasi bencana dan *early warning system* dalam pengembangan kawasan wisata. Kawasan pantai dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas; (2) Kawasan pantai diarahkan sebagai kawasan pariwisata pantai, pertanian lahan basah, dan perkebunan yang di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas (yang dipersyaratkan disertai ketentuan-ketentuan teknis, misalnya: bangunan tahan gempa atau rumah panggung disertai escape road dan escape hill). Dan apabila masih bisa dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata maka perlu dilakukan suatu tindakan khusus dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan *early warning system*.

Sementara itu, secara umum bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Nias Selatan (sebagaimana yang tertera dalam draft RTRW Kabupaten Nias Selatan [Kanise] 2004-2014) adalah bencana tanah longsor, banjir, gempa dan tsunami. Banjir yang sering terjadi diakibatkan meluapnya sungai-sungai besar dan berpotensi terjadi di seluruh kecamatan. Oleh karena itu, pembangunan permukiman ditegaskan harus memperhatikan kriteria sempadan sungai (100 meter untuk sungai besar), sedangkan untuk tanah longsor pembangunan permukiman dihindari di atas tanah yang memiliki kemiringan lereng 40%. Beberapa wilayah yang cukup parah terkena badai tsunami adalah Pantai Lahusa di sebelah timur, Kawasan Pasir Putih (Teluk Dalam), Kawasan Wisata Pasir Putih Sorake, Kawasan Wisata Surviving Lagundri, Pantai Hiliamaeta dan Kec. P.P. Batu serta Kec. Hibala. Rencana struktur tata ruang Kabupaten Nias Selatan dalam draft RTRW Kanise 2004-2014 direncanakan dibagi menjadi 4 (empat) Sudut Kawasan Pengembangan Pembangunan, dengan *Pusat Pengembangan Wilayah adalah Kota Teluk Dalam*.

Pembuatan rencana tata ruang pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias Selatan, perlu merujuk kepada peta dasar yang akurat. Draft RTRW Kanise yang disusun pada tahun 2004 dan belum mengakomodasikan perubahan-perubahan pasca gempa bumi.

Sementara itu, draft RTRW Kabupaten Nias yang disusun pada tahun 2006 dengan bantuan BRR dan telah mengakomodasikan perubahan-perubahan setelah terjadinya gempa bumi. Informasi peta dasar yang akurat ini dapat diperoleh melalui peta rupa bumi yang dihasilkan dari pembuatan peta digital foto udara.

Dengan adanya peta digital foto udara ini dapat disusun Perencanaan Umum Tata Ruang Daerah, Batas Wilayah, Pertanahan, Tata Guna Lahan, Kependudukan maupun Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

IV.4.3. Manajemen Pengurangan Resiko Bencana di Kepulauan Nias

Penyelenggaraan penanggulangan bencana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek yang meliputi:

1. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
2. Kelestarian lingkungan hidup;
3. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
4. Lingkup luas wilayah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Tahap pra-bencana terbagi atas dua situasi : situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

1. Perencanaan penanggulangan bencana; dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Substansi yang diatur meliputi:
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia
2. Pengurangan risiko bencana; dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. meliputi :
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
3. Pencegahan, meliputi :
 - a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah;
5. Persyaratan analisis risiko bencana, disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Penegakkan rencana tata ruang; dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan;
7. Pendidikan dan pelatihan, dilakukan oleh pemerintah pusat;
8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, dilakukan oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

1. **Kesiapsiagaan**; dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Meliputi :
 - a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
2. **Peringatan dini**; dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Melalui:
 - a. Pengamatan gejala bencana;
 - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
3. **Mitigasi bencana**; dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Melalui :
 - a. Pelaksanaan penataan tata ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
 - d. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - e. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - f. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. Pelindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - h. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Tujuan dari manajemen risiko bencana adalah untuk memperoleh kebijakan, prosedur dan tindakan yang sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengevaluasi berbagai risiko yang mungkin timbul dari terjadinya bencana. Dalam situasi dimana Kepulauan Nias merupakan wilayah yang rawan bencana, maka segenap pihak terutama masyarakat perlu berperanserta secara aktif dalam usaha pengurangan

resiko bencana agar kegiatan pembangunan tetap dapat terjamin untuk tetap sinambung tanpa gangguan yang berarti. Untuk itu usaha pengurangan resiko bencana yang berbasis pada komunitas merupakan opsi yang paling efektif.

Dengan demikian manajemen resiko bencana yang berbasis komunitas akan memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi bencana dan mengambil tindakan untuk penyelamatan diri dan aset, dalam rangka menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

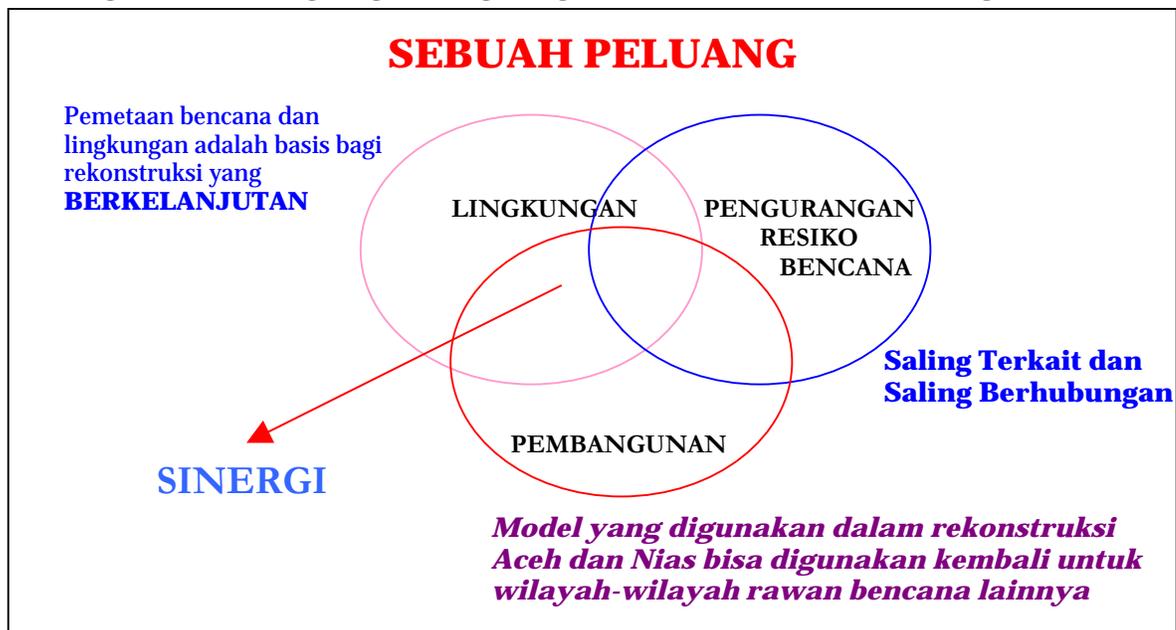
Pengurangan resiko bencana juga perlu diintegrasikan kedalam seluruh aspek perencanaan, baik dari Rencana Tata Ruang Desa (*Village planning*) sampai Tata Ruang tingkat propinsi sehingga dapat dipetakan daerah-daerah berbahaya dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu koordinasi di tingkat propinsi menjadi penting. Sistem pengurangan resiko bencana juga perlu memperhitungkan bencana banjir, tanah longsor dan bencana-bencana lainnya.

Kesiapan menghadapi bencana juga perlu dipersiapkan di tingkat masyarakat. Selain itu, Kepala desa atau tokoh masyarakat perlu diberikan pelatihan menghadapi bencana dan pelatihan evakuasi melalui simulasi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Di tingkat pemerintah daerah, pengurangan resiko bencana perlu didukung dengan pembuatan peraturan-peraturan, penegakan hukum yang tegas, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang (*Spatial Planning*) yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengurangan resiko bencana juga perlu mengakomodasi aspek lingkungan secara serius. Sementara itu, dewasa ini, alokasi dana pembangunan untuk aspek lingkungan dan pengurangan resiko bencana masih sangat rendah. Investasi ini diperlukan mengingat aspek lingkungan dan pengurangan resiko bencana adalah basis untuk perencanaan dan pembangunan.

Gambar IV. 6
Sinergitas antara Lingkungan, Pengurangan Resiko Bencana dan Pembangunan



Sumber : CFAN 3 Technical Meeting, Aceh, April 2007

Program rekonstruksi yang berkelanjutan perlu : Memetakan sumber daya lingkungan (*Environmental Mapping*) yang ada di Aceh dan Nias; dan perlu Memetakan daerah berbahaya '*Hazard Zoning*' yang berpotensi terkena bencana. Pemetaan ini harus dijadikan dasar pada keseluruhan Perencanaan dan Pembangunan sebagai bukti komitmen terhadap rekonstruksi yang berkelanjutan. Keseriusan ini mencakup sektor : Perumahan dan Permukiman; Infrastruktur; dan Pengembangan Ekonomi.



Pendanaan, Koordinasi dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

V.1. Kebutuhan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (2007 – 2009)

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepulauan Nias, Sumatera Utara telah berlangsung selama dua tahun (2007-2009). Badan Pelaksana BRR sebagai lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias telah melaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor di wilayah Kepulauan Nias, namun masih banyak yang belum terselesaikan dalam rangka pemulihan di wilayah bencana khususnya di Kepulauan Nias.

Berkenaan dengan terjadinya bencana gempa yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 yang menimpa Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, telah dilakukan penyesuaian terhadap besarnya kebutuhan dana. Jumlah kebutuhan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara setelah dilakukan penyesuaian akibat gempa tanggal 28 Maret 2005 untuk tahun 2007 – 2009 sejumlah Rp. 8,571 trilyun atau sebesar 81,63 % yang bersumber dari dana on dan off-budget merujuk pada acuan build back better. Total kebutuhan dana sesuai hasil perkiraan kerusakan dan kerugian akibat gempa sebesar Rp. 6,012 trilyun. Nilai kebutuhan ini merupakan penilaian yang sudah disesuaikan dengan harga satuan yang berlaku. Kemudian nilai tersebut mencerminkan pada jumlah volume atau unit yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi khusus akibat pasca gempa.

Sedangkan kebutuhan dana untuk membangun Kepulauan Nias menjadi lebih baik yaitu sebesar **Rp. 10,5 triliun** yang diperlukan untuk 4 pilar rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias. Penetapan nilai kebutuhan yang dianggap ideal dalam membangun wilayah pasca bencana yang lebih baik lagi dibandingkan sebelum terjadi bencana. Jumlah volume dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mempertimbangkan bangunan-bangunan yang perlu dibiayai walaupun bukan merupakan akibat gempa.

Secara umum dapat dijelaskan beberapa program utama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007 – 2009 dalam rangka percepatan pemulihan pasca gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang berdasarkan pada 4 sektor utama yaitu Perumahan dan Permukiman; Infrastruktur; Ekonomi; serta Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan. Secara rinci dapat diurai pada tabel dibawah ini.

Tabel V.1
4 Sektor Utama Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kepulauan Nias, Sumatera Utara

No	Sektor	Program Utama
1.	Infrastruktur Yang Efektif	Beberapa program utama yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan dan Transportasi, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Transportasi Laut dan ASDP b. Transportasi Darat, Jalan dan Kereta Api, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) Jalan Nasional dan Propinsi b) Jalan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan c) Terminal Bus d) Transportasi Darat 2. Energi dan Telekomunikasi 3. Infrastruktur Sumber Daya Air, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Irigasi b. Sungai dan pengendalian Banjir c. Pengamanan Pantai
2.	Perumahan dan Pemukiman	Pada sektor perumahan dan pemukiman ini terdapat beberapa program utama yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan dan Pemukiman, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias b. Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Selatan c. Pembuatan Sertifikat Tanah d. Penataan Ruang 2. Air Minum dan Sanitasi, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Air Minum b. Persampahan c. Drainase d. Sanitasi
3.	Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan	Beberapa program utama meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah b. Rehabilitasi Gedung Negara c. Rehabilitasi Bangunan/Gedung Khusus 2. Pendidikan, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan Rehabilitasi b. Pengadaan Meublair c. Pengadaan Peralatan Laboratorium d. Pengadaan Buku Referensi Sekolah e. Pembangunan Kapasitas Pendidikan 3. Kesehatan, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan Rumah Sakit b) Pembangunan Puskesmas dan Pustu c) Dukungan Penyelenggaraan Kesehatan b. Obat dan Perbekalan Kesehatan c. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 4. Kebudayaan, terdiri dari sektor : <ol style="list-style-type: none"> a. Agama, yang meliputi :

Pendanaan, Koordinasi dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Sektor	Program Utama
		<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara b. Sosial, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a) Pemberdayaan Perempuan b) Rehabilitasi Sosial c. Pemuda dan Olahraga d. Budaya, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan Keragaman Budaya b) Pengelolaan Kekayaan Budaya c) Pengembangan Pariwisata
4.	Ekonomi Yang Bersaing	Pengembangan ekonomi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan 2. Pertanian 3. Perkebunan 4. Pelatihan dan Tenaga Kerja 5. Perikanan 6. Peternakan 7. Hutan, Lahan dan Kawasan Pantai

Sumber: BRR Perwakilan Nias, Membangun Nias yang Lebih Baik 2005 - 2006

Juga beberapa program lainnya yaitu pembuatan Peta Digital Pasca Gempa Kepulauan Nias untuk melengkapi dokumen pasca gempa tanggal 25 Maret 2005 di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diperlukan untuk pembuatan foto satelit dan usulan tambahan Kegiatan Tahun 2008 Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias selatan.

Berdasarkan hasil analisis BRR Perwakilan Nias, untuk membangun Kepulauan Nias menjadi lebih baik membutuhkan dana sebesar Rp 10,5 triliun. Pada tahun 2005 dan 2006, BRR telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan dengan total dana sebesar Rp 1,928 triliun atau sebesar 18,37 % dari dana 10,5 triliun yang disebutkan sebelumnya, yang bersumber dari dana on budget dan off budget.

Untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007 – 2009, masih membutuhkan dana sebesar Rp 8,571 triliun. Sedangkan ketersediaan dana BRR yang bersumber dari on budget dan off budget sebesar Rp 5,188 triliun. Sumber dana dari off budget diharapkan bisa memenuhi dan menutupi kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias dan juga dana dari APBN dan APBD Kab/Kota. Untuk tahun 2008 total sumber dana dari APBN dan APBD Kab/Kota baru tersedia 135 miliar dan hal ini belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Kegiatan kebutuhan rinci dapat dilihat pada (Lampiran kegiatan rinci Kepulauan Nias tahun 2007-2009). Sedangkan rincian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias tahun 2007 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pendanaan, Koordinasi dan Pengendalian
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tabel V.2
Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias
Tahun 2007 – 2009

PILAR	Program Utama	Tahun 2007		Tahun 2008/2009 (BRR)		Needs
		BRR		BRR		to Build
		On Budget	Off Budget	On Budget	Off Budget	Back Better
		(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)
Infrastruktur		567,351,683	63,021,024	1,859,076,211	1,650,377,344	5,000,000,000
	Jalan dan Infrastruktur	461,779,241		1,719,046,500		
	Energi & Telekomunikasi	29,734,314		32,309,894		
	Infrastruktur & SDA	75,818,128		107,719,817		
Perumahan dan Pemukiman		243,168,050	327,038,589	198,766,650	54,100,768	1,700,000,000
	Perumahan	218,174,650		146,266,650		
	Air dan Sanitasi	24,993,400		52,500,000		
Kelembagaan dan Sosial		336,347,444	665,997,561	579,441,800	1,193,111,233	2,900,000,000
	Pemerintahan	58,103,560		87,255,000		
Kemasyarakatan						
	Pendidikan	200,860,772		218,847,000		
	Kesehatan	66,602,585		122,661,800		
	Kebudayaan	10,780,527		150,678,000		
Pengembangan Ekonomi		63,853,997	150,255,909	133,852,450	481,812,600	900,000,000
TOTAL		1,210,721,174	1,206,313,083	2, 771, 137,111	3,379,401,944.40	10,500,000,000
Total Kebutuhan 2007 - 2009				8,571,617,462		

Sumber : Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 28 Maret 2005 Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Pendanaan, Koordinasi dan Pengendalian
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tabel V.3
Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias
Sumatera Utara Tahun 2007 – 2009

PILAR	Program Utama	ON Budget			OFF Budget				Keterangan	
		Tahun 2005/2006 (Realisasi)	Tahun 2007 (Sedang Berjalan)	Kumulatif Total 2007	Tahun 2008/2009 (Perencanaan)	Tahun 2005/2006 (Realisasi)	Tahun 2007 (Sedang Berjalan)	Kumulatif Total s.d 2007		Tahun 2008/2009 (rencana)
		(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)	(ribu Rp)	
KABUPATEN NIAS										
Infrastruktur		460,122,851	415,658,643	875,781,494	1,520,031,332	109,716,624	63,021,024	172,737,648		* Sumber APBD Provinsi
	Jalan dan Infrastrukt	298,520,201	336,609,439		1,441,711,500					Tahun 2008 = 83,726.000.000
	Energi & Telekomunik	27,309,020	28,299,766		32,309,894					
	Infrastruktur & SDA	134,293,630	50,689,438		46,009,938					Sumber APBD Kab Kota
Perumahan dan Pemukiman		279,788,842	103,103,925	382,892,767	101,250,000	342,820,530	327,038,589	669,859,119		* Tahun 2007
	Perumahan	254,904,560	92,722,325		73,000,000					1. Nias : Rp 186.368.611
	Air dan Sanitasi	24,884,282	10,381,600		28,250,000					
Kelembagaan Dan Sosial Kemasyarakatan		150,009,253	153,825,418	303,834,670	258,077,800	203,987,426	665,997,561	869,984,987		* Tahun 2008
	Pemerintahan	25,791,359	47,978,194		50,085,000					1. Nias : Rp 1.531.770.7
	Pendidikan	55,541,227	61,097,229		126,905,000					2. Nias Selatan: Rp. 363.796.50
	Kesehatan	40,515,094	37,101,000		58,577,800					
	Kebudayaan	28,161,573	7,648,995		22,510,000					Total Rp.2.165.661.887.802
Pengembangan Ekonomi		41,429,028	37,723,587	79,152,585	55,195,125	74,361,987	150,255,909	224,617,896		*
TOTAL NIAS		931,349,974	710,311,542	1,641,661,516	1,934,554,287					
KABUPATEN NIAS SELATAN										
Infrastruktur		65,205,237	151,693,040	216,898,278	339,044,879					
	Jalan dan Infrastrukt	51,644,344	125,129,802		277,335,000					
	Energi & Telekomunik	5,817,029	1,434,548		0					
	Infrastruktur & SDA	7,743,864	25,128,690		61,709,879					
Perumahan dan Pemukiman		157,140,295	140,064,125	297,204,420	97,516,650					
	Perumahan	151,375,026	125,452,325		73,266,650					
	Air dan Sanitasi	5,765,269	14,611,800		24,250,000					
Kelembagaan Dan Sosial Kemasyarakatan		42,978,985	182,522,026	225,501,011	321,364,000					
	Pemerintahan	4,923,398	10,125,366		37,170,000					
	Pendidikan	23,469,682	139,703,543		91,942,000					
	Kesehatan	3,665,626	29,501,585		64,084,000					
	Kebudayaan	10,920,278	3,131,532		128,168,000					
Pengembangan Ekonomi		821,479	26,130,440	26,951,919	78,657,325					
TOTAL NIAS SELATAN		266,145,997	500,409,631	766,555,628	836,582,854					
TOTAL NIAS + NIAS SELATAN		1,197,495,971	1,210,721,174	2,408,217,144	2,771,137,141	730,886,567	1,206,313,083	1,937,199,650		*

Sumber : Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 28 Maret 2005 Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan BAPPENAS bahwa pada tahun 2008 BRR NAD-Nias memperoleh pagu indikatif sebesar Rp. 7,077 triliun yang terdiri dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 2,49 triliun dan Rupiah Murni sebesar Rp. 4,59 triliun. Rupiah murni tersebut diatas selain untuk membiayai kegiatan Kesekretariatan sebesar Rp. 350 milyar juga terutama diarahkan untuk memenuhi kewajiban sebagai Rupiah Pendamping bagi dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Program-program yang menjadi prioritas adalah program penyelesaian (*rounding-up*), yaitu penyelesaian pembangunan infrastruktur fisik, perumahan dan proyek-proyek fisik yang tidak mungkin diselesaikan pada tahun anggaran 2007; Program Infrastruktur Strategis berbasis PHLN yaitu kewajiban mengalokasikan Rupiah Pendamping; dan Program Dukungan Peralihan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Pemda (*Exit Strategy*). Terkait dengan penyediaan Rupiah Murni (RM) untuk melanjutkan paket-paket kegiatan infrastruktur fisik dan bangunan gedung yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2007, agar Kedeputian Sektor dan Kepala Perwakilan segera memetakan paket-paket pekerjaan yang diperkirakan tidak selesai tersebut dan memperkirakan kebutuhan dana untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud pada 2008.

Tahap paling awal yang sangat penting dan menentukan adalah memperkirakan tingkat kerusakan dan besar kerugian sehingga dapat dihitung kebutuhan pendanaan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut (hal ini sudah dibahas pada Bab.III). Perkiraan kebutuhan pendanaan (*need assessment*) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dikumpulkan dengan dua cara. *Pertama*, perkiraan kebutuhan pendanaan yang berasal dari data yang dikumpulkan oleh K/L, yang dikumpulkan dengan melibatkan instansi terkait di daerah-daerah bencana. *Kedua*, perkiraan kebutuhan yang berasal dari Bappenas yang memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan kembali berdasarkan pada perencanaan tata ruang yang baru, kualitas layanan baru yang akan diwujudkan, serta pembangunan sarana dan prasarana baru untuk mendukungnya. Dengan membandingkan 2 (dua) pendekatan perhitungan tersebut, diharapkan terjadi pemeriksaan silang (*cross check*), dalam penentuan prioritas kegiatan, penentuan urutan (*sequence*) dari pelaksanaan kegiatan, serta integrasi kegiatan antar sektor.

Evaluasi kemudian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Pemerintah hanya akan melakukan pembangunan kembali prasarana dan sarana pelayanan umum, seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit pemerintah, puskesmas, air bersih, listrik dan sebagainya;
2. Pemerintah akan membantu pembangunan kembali rumah yang mengalami kerusakan;
3. Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan umum yang rusak hanya dilakukan di daerah yang terkena bencana;
4. Prosedur dan mekanisme pendanaan harus mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektivitas yang tinggi, dan akuntabel.

V.2. Sumber-sumber Pendanaan

Melihat kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedemikian besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan negara yang sangat terbatas, maka kebijaksanaannya adalah mendayagunakan semua potensi sumber pendanaan yang tersedia, yang secara garis besar terdiri dari dana APBN, APBD, hibah (*grant*), serta dana yang berasal dari masyarakat.

Potensi sumber pendanaan dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi berdasarkan jenis pendanaannya yaitu dana *on-budget* dan *off-budget*.

Pendanaan *on-budget* adalah pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang alokasi penggunaan dananya tercatat dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Dana *on-budget* ini kita kenal dengan dana APBN. Sumber dana yang berada dalam APBN untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari Dana Rupiah Murni; Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) bilateral maupun multilateral, baik yang baru maupun yang bersifat realokasi.

Sedangkan pendanaan *off-budget* adalah sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu di Kepulauan Nias tanpa melalui APBN.

V.2.1. Dana Pemerintah (*On-Budget*)

Pendanaan *on-budget* adalah pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang alokasi penggunaan dananya tercatat dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Dana *on-budget* ini kita kenal dengan dana APBN. Melihat kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang besar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang terbatas, maka kebijaksanaannya adalah mendayagunakan semua potensi sumber pendanaan yang tersedia, baik yang berasal dari APBN, maupun APBD.

Potensi sumber dana yang berada dalam APBN terdiri dari:

- (1) Dana Rupiah Murni;
- (2) Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) bilateral maupun multilateral, baik yang baru maupun yang bersifat realokasi.

Dana rupiah murni.

Dana yang bisa digunakan dari APBN dapat berupa dana departemen/lembaga yang berada di Provinsi Sumatera Utara baik berupa dana dekonsentrasi, tugas perbantuan maupun dana instansi pusat yang kewenangannya tidak didesentralisasikan.

Hibah luar negeri.

Dana hibah luar negeri terdiri dari hibah yang berasal dari negara-negara (secara bilateral) dan lembaga donor multilateral. Kedua sumber tersebut, baik bilateral maupun multilateral, biasanya diberikan kepada Indonesia dalam dua jenis hibah, yaitu:

1. **Bantuan Proyek (*Project Aid*)**, yaitu semua bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara/lembaga pemberi bantuan dalam bentuk fasilitas pembiayaan berupa valuta asing atau valuta yang dirupiahkan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek pembangunan, baik dalam rangka rehabilitasi maupun rekonstruksi, pengadaan barang/peralatan dan jasa, perluasan ataupun pengembangan proyek baru. Bantuan ini dapat berupa pinjaman maupun hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali.
2. **Bantuan Teknis (*Technical Assistance*)**, adalah semua bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara/lembaga pemberi bantuan dalam bentuk jasa keahlian, pendidikan dan pelatihan, barang dan peralatan atau kegiatan pendukung lainnya. Bantuan ini sangat lazim diberikan dalam bentuk hibah.

Alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program sebagai berikut:

- 1) Proposal proyek/program disiapkan oleh Pemerintah Indonesia;
- 2) *Steering Committee* mengevaluasi usulan proyek/program dan memberikan persetujuan;
- 3) *Trustee* (lembaga donor/lembaga yang mengelolanya) melakukan penilaian (*appraisal*);
- 4) Setelah subtransi proposal telah disepakati, akan diajukan Izin Tinggal dan kebutuhan pembebasan pajak sekiranya diperlukan, kepada Sekretariat Negara;
- 5) Selanjutnya pihak Executing Agency akan melaporkan rencana program tersebut kepada Departemen Keuangan untuk dicatat dalam registrasi hibah.

Perjanjian hibah dilakukan antara *Trustee* dan Pemerintah Indonesia.

Pinjaman Luar Negeri.

Realokasi pinjaman on-going. skema realokasi memanfaatkan pinjaman yang sedang berjalan (*on-going*) untuk kemudian dialihkan atau disesuaikan ruang lingkup kegiatannya agar dapat mengakomodasi kebutuhan di Kepulauan Nias. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan asalkan masih berada didalam lingkup sektor yang menjadi fokus pinjaman tersebut.

Pinjaman Baru. Pinjaman Baru mempunyai fleksibilitas dari segi subtransi sektor, sehingga dapat langsung merespon kebutuhan di Kepulauan Nias. Meskipun demikian proses penyiapan pinjaman baru meliputi tahapan identifikasi, persiapan, *appraisal*, negosiasi hingga persetujuan proyek. Dalam setiap tahapan tersebut pihak donor/kreditor turut menurunkan tim *fact finding* untuk melakukan *assesment*, *appraisal* maupun kajian lainnya yang diperlukan. Tahapan tersebut sudah menjadi prosedur standar yang harus dilalui, meskipun demikian jika subtransi proyek yang akan direncanakan sudah terfokus, proses tersebut dapat dilaksanakan secara lebih cepat.

Lembaga-lembaga pembiayaan multilateral tersebut pada umumnya sudah mempunyai susunan pipeline pinjaman yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga proses pinjaman baru dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif-alternatif berikut ini :

- 1) Melakukan *cancellation* (pembatalan) *potential surplus* pada pinjaman yang sedang berjalan (*on-going*) untuk kemudian diteruskan dengan prosedur pinjaman baru.
- 2) Memperluas cakupan lokasi proyek-proyek dalam pipeline ke Kepulauan Nias sesuai subtransi sektor yang dibutuhkan.

Pemanfaatan pinjaman luar negeri mempunyai sejumlah konsekuensi yang harus diperhatikan antara lain:

- 1) Mengikuti aturan penerusan pinjaman/hibah yang berlaku.
- 2) Pemenuhan kriteria kesiapan proyek.
- 3) Proses procurement yang mengacu kepada guideline pihak *Lender*.
- 4) Diperlukannya *No Objection Letter* dari pihak *Lender* untuk melaksanakan setiap tahapan implementasi, dan ketentuan administrasi lainnya.

Tabel V. 4
Dana On-Budget berdasarkan Kebutuhan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias tahun 2007-2009

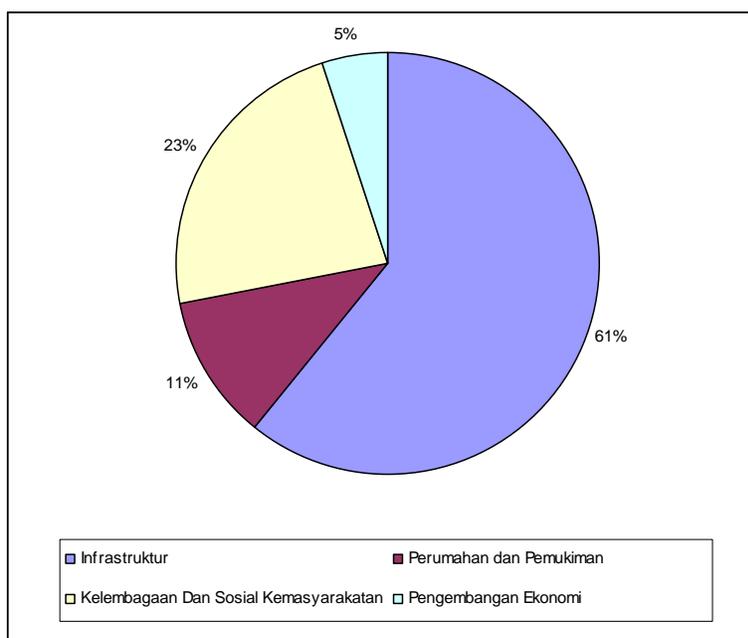
Pilar	Program Utama	2007 - 2009
		Nilai (Ribu Rp)
Infrastruktur	• Jalan dan Transportasi	2,180,845,741
	• Energi dan Telekomunikasi	62,044,208
	• Infrastruktur Sumber Daya Air	183,537,944
Perumahan dan Permukiman	• Perumahan dan Permukiman	364,441,300
	• Air minum dan Sanitasi	77,493,400
Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan	• Kepemerintahan	145,358,560
	• Pendidikan	419,707,772
	• Kesehatan	189,264,385
	• Kebudayaan	161,458,527
Pengembangan Ekonomi	• Pengembangan Ekonomi	197,706,447
TOTAL		3,981,858,284

Sumber : diolah dari Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 28 Maret 2005 Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Pendanaan, Koordinasi dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dana *on-budget* ini kita kenal dengan dana APBN yang mendanai sektor-sektor utama yaitu infrastruktur (jalan & transportasi, energi & telekomunikasi, infrastruktur sumber daya air), perumahan & pemukiman (perumahan, air minum & sanitasi), kelembagaan dan pengembangan manusia (keperintahan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan) dan pengembangan ekonomi. Total alokasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Bapel BRR Nias dengan sumber pembiayaan dari On-budget pada tahun 2007 - 2009 adalah sebesar Rp. 3,981 trilyun atau sebesar 37,92 % dari total kebutuhan dana untuk membangun kembali Kepulauan Nias menjadi lebih baik dengan rincian seperti pada Tabel V.2 diatas.

Bagan V.1
Dana On-Budget berdasarkan kebutuhan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias tahun 2007-2009



Sumber : diolah dari Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 28 Maret 2005 Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

Dari seluruh dana on-budget yang dialokasikan, terbesar digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur sebesar 61 % dan terkecil dialokasikan untuk pengembangan ekonomi kepulauan Nias pasca gempa sebesar 5 % dari keseluruhan dana off-budget 2007 – 2009 sebesar Rp. 3.981.858.284.000,-.

V.2.2. Dana Non Pemerintah

Dari berbagai sumber pendanaan terdapat sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat kepulauan Nias dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN (*off-budget*). Meskipun pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menerapkan prinsip *on-budget*, namun sumbangan secara langsung dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha perlu difasilitasi.

Dana off-budget mendanai beberapa sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias pasca gempa yaitu infrastruktur (jalan dan transportasi, energi dan telekomunikasi, infrastruktur sumber daya air), perumahan dan pemukiman (perumahan, air minum dan sanitasi), kelembagaan & pengembangan manusia (keperintahan, pendidikan,

Pendanaan, Koordinasi dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

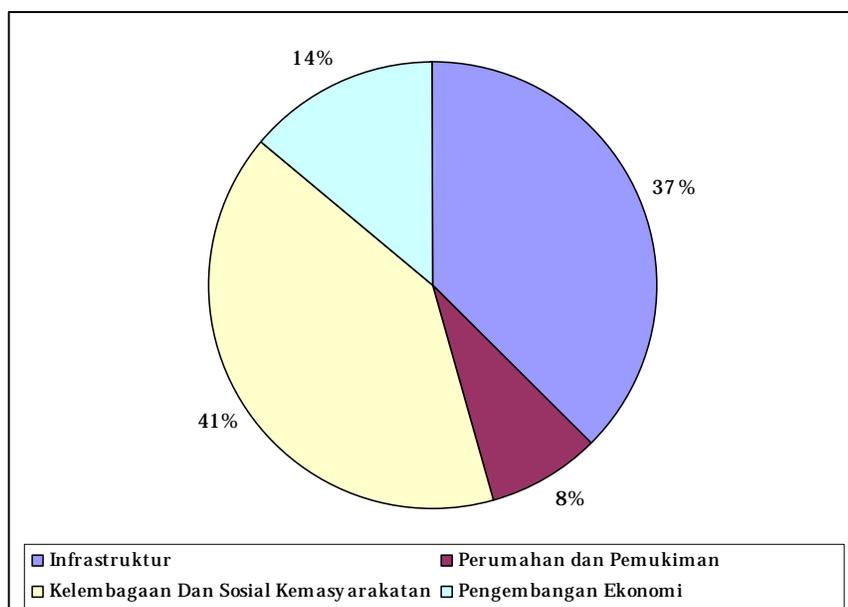
kesehatan, kebudayaan), pengembangan ekonomi dan administrasi. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh BRR Kepulauan Nias untuk tahun 2007 dengan sumber pembiayaan dari Off-Budget adalah sebesar Rp. 4,585 trilyun atau sebesar 43,67 % dari total kebutuhan dana untuk membangun kembali Kepulauan Nias menjadi lebih baik. Rincian dana off-budget tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V. 5
Dana Off-Budget berdasarkan Kebutuhan Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias tahun 2007-2009

Pilar	Program Utama	2007-2009
		Nilai (Ribu Rp)
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan dan Transportasi • Energi dan Telekomunikasi • Infrastruktur Sumber Daya Air 	1,713,398,368
Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Permukiman • Air minum dan Sanitasi 	381,139,357
Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan • Pendidikan • Kesehatan • Kebudayaan 	1,859,108,794
Pengembangan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi	632,068,509
TOTAL		4,585,715,028

Sumber : diolah dari Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 28 Maret 2005 Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

Bagan V.2
Dana Off-Budget berdasarkan kebutuhan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kepulauan Nias tahun 2007



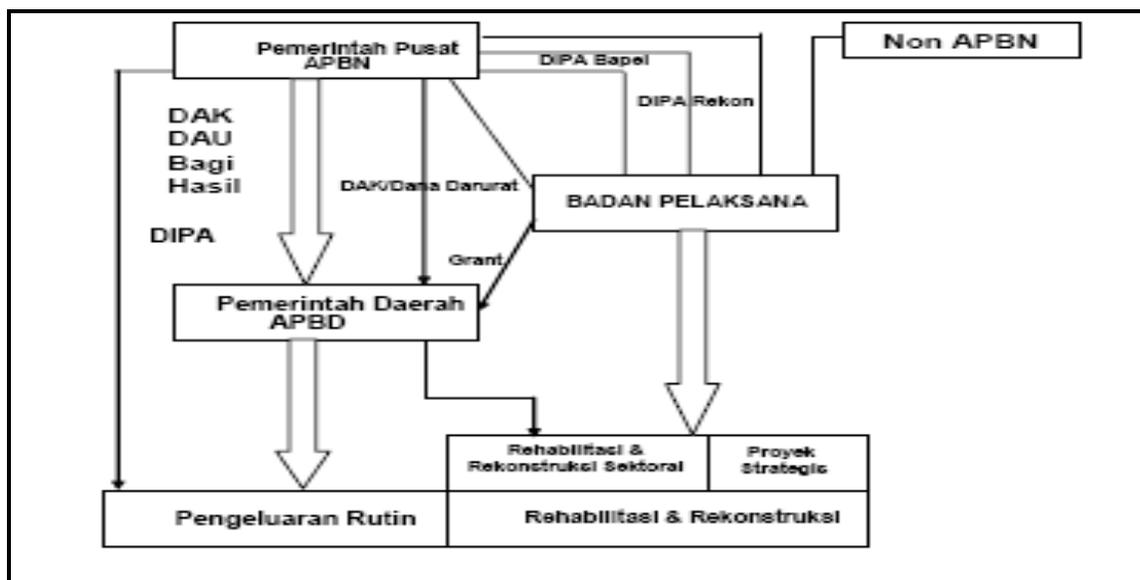
Sumber : diolah dari Rekapitulasi Pemetaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 28 Maret 2005 Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

Dari seluruh dana off-budget yang dialokasikan, terbesar digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelembagaan dan sosial kemasyarakatan sebesar 41 % dan terkecil dialokasikan untuk sektor perumahan dan pemukiman sebesar 8 % dari total off-budget 2007 sebesar Rp. 4.585.715.028.000,-.

V.3. Mekanisme Pengelolaan Pendanaan

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias mengikuti prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang dimaksud. Mekanisme pendanaan yang akan menggunakan APBN, baik rupiah murni maupun pinjaman dilakukan dengan mekanisme yang baku sesuai aturan yang telah ditetapkan Departemen Keuangan. Namun demikian untuk memperlancar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan langkah-langkah percepatan antara lain: percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus untuk melayani pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias. KPPN tersebut juga akan melakukan fungsi pembayaran valuta asing.

Bagan V. 3
Alur Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara



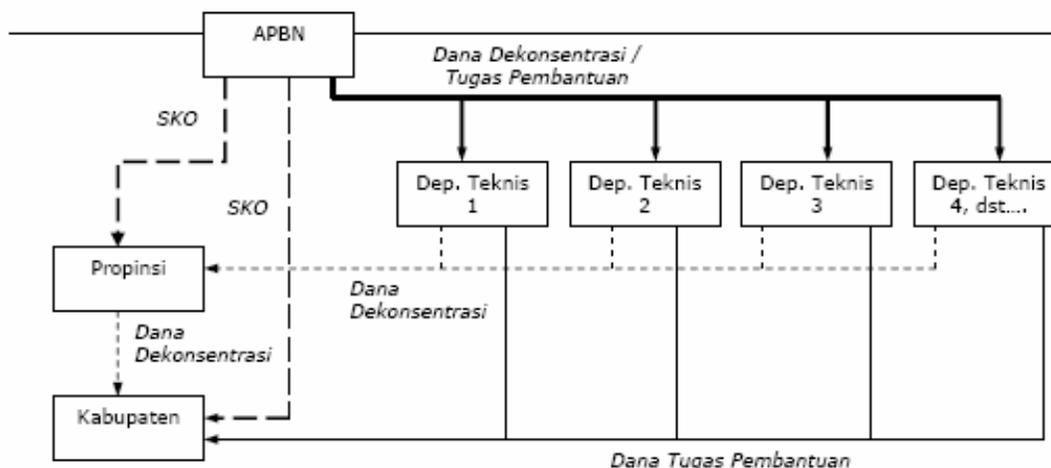
Sumber: Perpres RI No.30 Tahun 2005, Buku Utama tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Badan Pelaksana (Bapel) BRR yang dibentuk merupakan satuan kerja (satker), dan menjadi pengguna anggaran yang mempunyai dokumen anggaran (DIPA) tersendiri. Mengingat DIPA dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi ada pada Bapel BRR, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penandatanganan kontrak dilakukan oleh Bapel BRR. Bapel BRR berwenang untuk melaksanakan proyek –proyek pada berbagai sektor yang utama dan strategis (*flagship*) serta seluruh proyek yang lintas sektor.

Pendanaan, Koordinasi dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

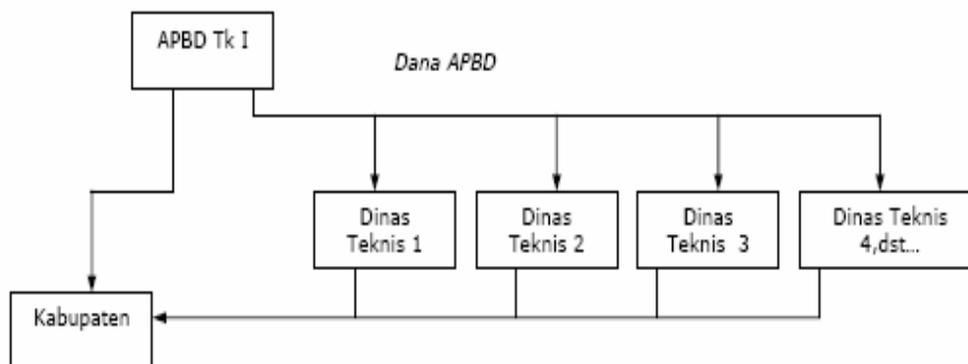
Kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil yang ada di APBD akan langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Setelah melakukan perkiraan kebutuhan bila tidak cukup diakomodasi oleh rupiah murni maka kebutuhan dana pembangunan akan ditawarkan kepada para donor.

Bagan V.4
Alur Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber :Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nabire, Papua

Bagan V.5
Mekanisme Penyaluran Dana APBD



Sumber :Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nabire, Papua

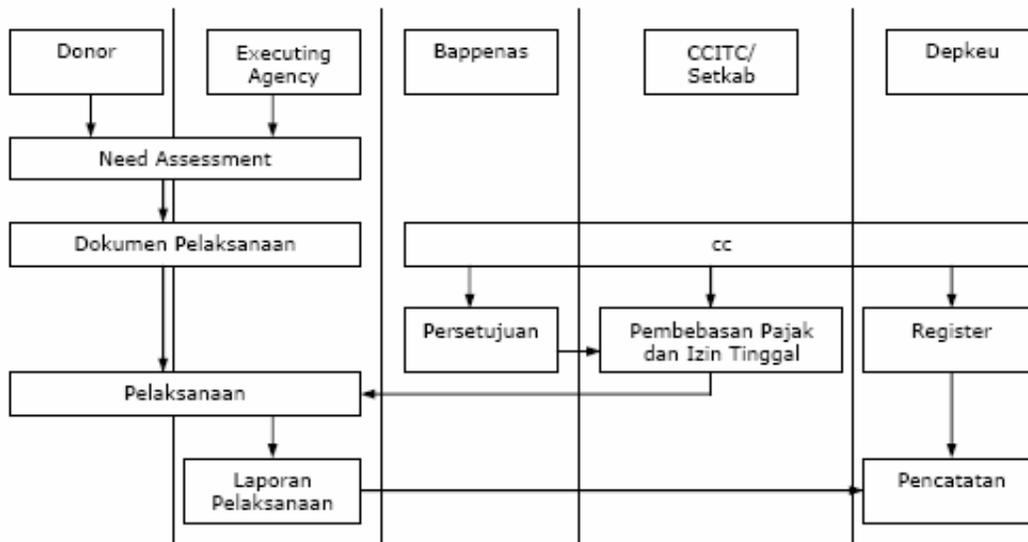
Mekanisme Hibah Luar Negeri, selama ini aturan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam tata laksana penarikan hibah terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas No.185/KMK.03/1995-No. 031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan dan pemantauan pinjaman/hibah luar negeri dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam SKB tersebut disebutkan bahwa :

“Ketentuan dalam keputusan bersama ini berlaku untuk pelaksanaan / penatausahaan hibah luar negeri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian hibahnya”.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai hibah dapat dilaksanakan langsung oleh pihak donor maupun dikelola Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Instansi terkait). Meskipun demikian dokumen kesepakatan yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya juga tercatat (*registered*) di Departemen Keuangan dan ditembuskan kepada Bappenas dan Sekretariat Kabinet. Hal ini menjaga ketertiban administrasi dan keselarasan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Setiap instansi akan mengeluarkan persetujuan kerjasama dengan pihak donor sesuai dengan kewenangannya dan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan. Khusus jika ada kebutuhan untuk pengadaan barang impor, proses pembebasan pajak harus memperoleh ijin dari Departemen Keuangan dengan rekomendasi dari Sekretariat Negara.

Bagan V.6
Bagan Alir Mekanisme Hibah Luar Negeri



Sumber : *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nabire, Papua*

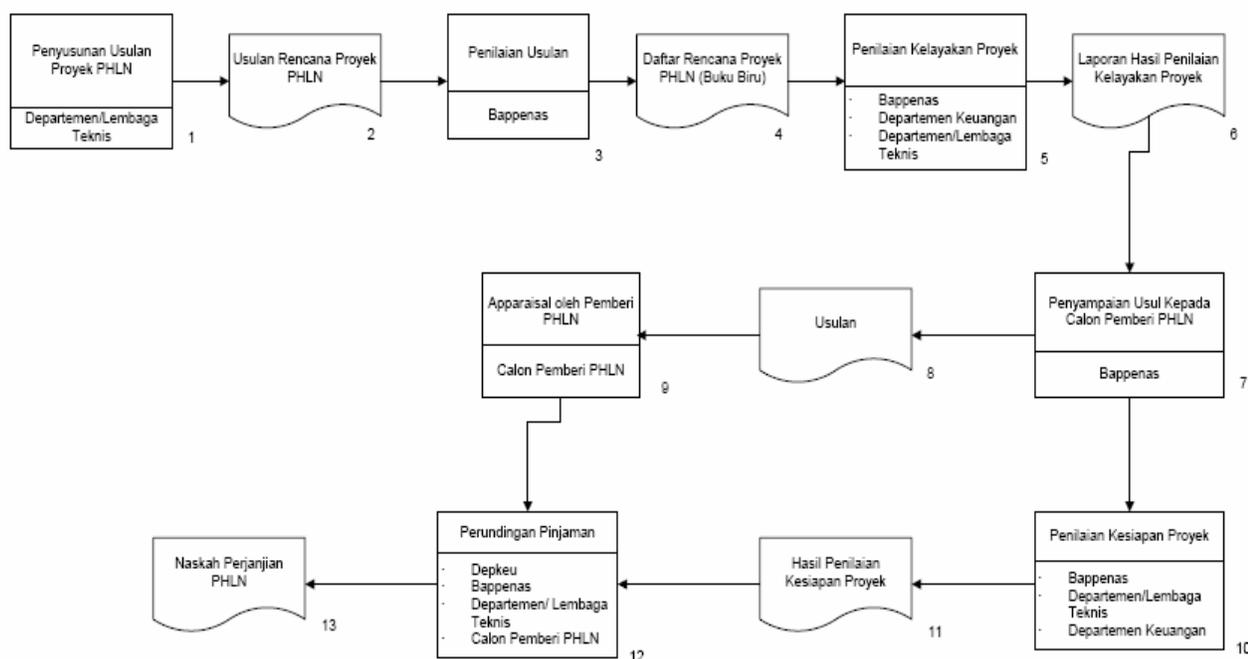
Mekanisme Pinjaman Luar Negeri, aturan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam tata cara pinjaman luar negeri juga terdapat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas No.185/KMK.03/1995-No. 031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Perencanaan suatu usulan proyek yang akan menggunakan pinjaman luar negeri dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya adalah : (i) keselarasan dengan prioritas sektoral sesuai dengan program nasional, (ii) kelayakan lokasi proyek dengan perencanaan regional, (iii) sinkronisasi dengan proyek/program lain, (iv) pemenuhan ketentuan yang disyaratkan oleh lembaga donor, (v) kelayakan nilai proyek serta alokasi pembiayaan untuk setiap kategori, (vi) ketersediaan dana pendamping, (vii) kesiapan instansi/daerah pelaksana proyek, (viii) menghindari overlapping proyek, (ix) sustainability project (O&M), (x) evaluasi kinerja pinjaman yang ada di setiap instansi/daerah pengusul, dan (xi) persyaratan pinjaman jika pinjaman diteruskan kepada BUMN/ BUMD/ Daerah. Penerusan pinjaman ke daerah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No: 35/07/ Tahun 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri ke Pemerintah Daerah serta mengacu pada UU 32 -2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33-2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Prosedur mengenai tata cara perencanaan pinjaman luar negeri disajikan dalam bentuk bagan alir pada **Gambar V.5**. Penjelasan mengenai tahapan mekanisme pinjaman luar negeri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usulan proyek yang dinilai layak untuk mendapatkan Pinjaman Luar Negeri oleh Direktorat PLNM dan Direktorat Sektoral/Regional serta disetujui oleh Deputi sektor terkait dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, diteruskan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, Deputi Pendanaan atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan menyampaikan usulan kepada negara donor dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. (*Langkah 6 dan 7*).

Bagan V.7
Bagan Alir Mekanisme Pinjaman Luar Negeri
Berdasarkan SKB No. 185/KMK.03/1995



Sumber : *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nabire, Papua*

2. Lembaga donor melakukan *appraisal* terhadap usulan proyek yang diajukan oleh Deputi Pendanaan dengan melibatkan instansi pelaksana/daerah, instansi pengusul dan instansi terkait lainnya. (*Langkah 8 dan 9*).
3. Lembaga donor melakukan *appraisal* terhadap usulan proyek yang diajukan oleh Deputi Pendanaan dengan melibatkan instansi pelaksana/daerah, instansi pengusul dan instansi terkait lainnya. (*Langkah 8 dan 9*).
4. Terhadap usulan proyek tersebut, Direktorat PLNM melakukan *kick off meeting* sebagai pertemuan awal dalam rangka koordinasi persiapan pelaksanaan proyek. *Kick off meeting* ini melibatkan Bappenas, Departemen Keuangan, instansi pengusul dan instansi terkait lainnya. (*Langkah 10*)
5. Setelah *appraisal* selesai dilakukan, Direktorat PLNM/instansi pengusul mengadakan pertemuan *wrap-up* dengan melibatkan semua pihak-pihak yang terkait. (*Langkah 10*)

6. Hasil dari pertemuan *wrap-up* tersebut menjadi bahan untuk proses negosiasi, yang dihadiri oleh Lembaga Donor, Bappenas, Depkeu, Departemen/LNPD pelaksana proyek dan instansi terkait lainnya. (Langkah 11 dan 12)
7. Draft NPPHLN yang dihasilkan dari negosiasi tersebut dibahas oleh Direktorat PLNM, Direktorat Sektor, Departemen Keuangan dan instansi pengusul. NPPHLN sebagai hasil pembahasan kemudian ditandatangani oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan dengan lembaga donor. (Langkah 13)

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Ke Daerah

Sesuai Undang-Undang yang baru No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemanfaatan pinjaman baru oleh daerah tidak dapat dilakukan secara langsung dengan pihak lembaga pembiayaan luar negeri (Pasal 50 dan Pasal 56). Untuk itu diperlukan mekanisme penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dan masih berlaku. Penentuan apakah suatu pinjaman akan diteruskan ke daerah sebagai pinjaman atau hibah akan diputuskan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan masukan dari Tim Penilai yang beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Bappenas dan Departemen Keuangan.

Khusus untuk ***penerusan pinjaman luar negeri sebagai pinjaman*** ke daerah, UU No. 33/2004 telah mengklasifikasikan jenis pinjaman menurut jangka waktunya yang terdiri atas:

1. Pinjaman Jangka Pendek, dipergunakan untuk menutup arus kas. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam satu tahun anggaran.
2. Pinjaman Jangka Menengah, dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah.
3. Pinjaman Jangka Panjang, dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang menghasilkan penerimaan. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah.

Dalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan:

1. Bahwa jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh pemerintah;
3. Daerah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah.

Khusus untuk ***penerusan pinjaman luar negeri sebagai hibah*** ke daerah, hingga saat ini peraturan yang digunakan masih mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KMK/07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah. Proyek yang akan dibiayai dalam bentuk hibah adalah proyek jenis *non-cost recovery* atau tidak menghasilkan penerimaan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah;
2. Dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat Daerah setempat;
3. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di Daerah yang bersangkutan, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional;
Telah mendapat persetujuan dari DPRD yang bersangkutan.

Penampungan hibah dari Swasta (*private*)/masyarakat, sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-24/MK.06/2005 tanggal 18 Januari 2005. Menteri Keuangan telah membuka 4 (empat) rekening di bank Indonesia untuk menampung hibah dari luar negeri dan masyarakat dalam negeri dalam mata uang Rupiah (No. Rek 510.000.272), Dollar Amerika Serikat (No. Rek 602.074.411), Japanese Yen (No. Rek. 602.075.111) dan Euro (No. Rek. 602.076.991). Apabila swasta dalam dan luar negeri yang bermaksud memberikan bantuan hibah dapat disetorkan langsung ke rekening tersebut diatas. Namun demikian, apabila tidak bersedia untuk menyetorkan dananya, maka swasta/masyarakat dapat melaksanakan sendiri, dengan ketentuan bahwa kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan harus sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Bapel untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

V.4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa (*procurement*) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias, pada prinsipnya mengikuti Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Meskipun demikian, jika penyelenggaraan suatu kegiatan memperoleh pendanaan dari lembaga donor atau kreditor maka aturan yang digunakan akan mengacu kepada *guidelines* yang ditentukan oleh lembaga donor atau kreditor tersebut.

Pengendalian anggaran dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain dilakukan melalui pengaturan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan baik dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung dan pengadaan langsung oleh aparat pemerintah (departemen/lembaga) yang membawahi proyek tersebut. Agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas yang optimal, proses pengadaan tersebut harus memenuhi dan mengikuti persyaratan dan prosedur tertentu serta dikelola menurut sistem manajemen proyek yang baik. Cara pengadaan barang dan jasa tersebut membuka secara luas peran serta dunia usaha. Satuan harga untuk setiap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek pada dasarnya berpedoman pada satuan harga yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Agar sesuai dengan perkembangan harga yang berlaku, pedoman satuan harga tersebut ditinjau ulang setiap tahun.

Pengadaan barang/jasa untuk setiap paket kegiatan pada prinsipnya harus dilaksanakan oleh pengguna anggaran atau di instansi yang memegang dokumen anggaran. Penentuan instansi sebagai pengguna anggaran (pemegang dokumen anggaran) akan segera ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang telah digariskan oleh aturan perundangan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kewenangan, maka penyedia barang/jasa setempat mempunyai kesempatan yang terbuka untuk berpartisipasi dalam berkompetisi melaksanakan pekerjaan. Keterlibatan penyedia barang/jasa setempat dianggap mempunyai keunggulan komparatif yang diantaranya pengenalan medan, penggunaan tenaga dan sumber daya lokal, dan budaya setempat lainnya. Meskipun demikian apabila dianggap pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mungkin dapat dilakukan di daerah bencana, maka Menteri/Ketua Lembaga Pengguna Anggaran dapat menetapkan lokasi pengadaan barang/jasa di tempat lain.

Beberapa perubahan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003, khusus untuk pelaksanaan kegiatan di Kepulauan Nias, perlu dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran mempercepat pelaksanaan kegiatannya, serta memberikan beberapa kemudahan dan fleksibilitas, dengan tidak mengabaikan prinsip efisien, transparan, persaingan yang adil, serta akuntabel.

Dengan pertimbangan skala konstruksi dan kebutuhan bahan bangunan yang cukup besar, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemerintah menginventarisir sumber-sumber bahan bangunan pokok yaitu semen, besi dan kayu.

2. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pengadaan bahan bangunan lokal untuk menjamin ketersediaan material bangunan.
3. Prosedur percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, dalam waktu yang lebih singkat dengan tetap berpegang pada prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel.
4. Panitia pengadaan berasal dari instansi teknis pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 jo. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Prosedur penunjukan langsung dapat diberlakukan bagi penyelenggaraan pengadaan komponen barang dan jasa bagi pembangunan perumahan.
6. Prosedur penunjukan langsung dapat diberlakukan bagi penyelenggaraan pengadaan komponen barang dan jasa bagi pembangunan prasarana publik untuk mempercepat pulihnya pelayanan.
7. Penyedia barang/jasa setempat mempunyai kesempatan yang terbuka dan kompetitif untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Pengendalian pengadaan barang dan jasa publik untuk rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Keringanan pajak bagi pengadaan barang dan jasa untuk rehabilitasi dan rekonstruksi terutama bagi komponen pembangunan perumahan dan prasarana publik.
10. Diperlukan perlakuan khusus melalui peraturan pemerintah untuk mendukung **pembangunan perumahan** dan pembangunan **prasarana publik** melalui percepatan-pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan pasca bencana gempa bumi di Kepulauan Nias.
11. Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, anggota panitia pengadaan berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana (berdasarkan Peraturan Presiden no.8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Beberapa perubahan dan penyesuaian yang diperlukan meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar untuk melakukan penyesuaian paket-paket kontrak kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan. Di samping itu, diberikan wewenang yang lebih besar untuk hal-hal yang batasannya telah ditentukan. Perubahan ketentuan juga diberikan untuk meningkatkan peran pemantauan dan pengawasan dalam rangka mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengadaan barang/jasa untuk setiap paket kegiatan pada prinsipnya harus dilaksanakan oleh pengguna anggaran atau di instansi yang memegang dokumen anggaran. Penentuan instansi sebagai pengguna anggaran (pemegang dokumen anggaran) akan segera ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang telah digariskan oleh aturan perundangan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kewenangan, maka penyedia barang/jasa setempat mempunyai kesempatan yang terbuka untuk berpartisipasi dalam berkompetisi melaksanakan pekerjaan. Keterlibatan penyedia barang/jasa setempat dianggap mempunyai keunggulan komparatif yang diantaranya pengenalan medan, penggunaan tenaga dan sumber daya lokal, dan budaya setempat lainnya. Meskipun demikian apabila dianggap, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mungkin dapat dilakukan di daerah bencana, maka Menteri/Ketua Lembaga atau Ketua Bapel sebagai Pengguna Anggaran dapat menetapkan lokasi pengadaan barang/jasa di tempat lain. Di samping penyederhanaan beberapa prosedural, dan penyingkatan waktu, saat ini sedang dipersiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang seragam untuk berbagai sumber pendanaan, baik pendanaan yang berasal dari luar negeri maupun pendanaan

yang berasal dari dalam negeri. Dalam mempersiapkan penyeragaman dokumen tersebut, telah dijalin koordinasi dengan beberapa lender/donor, diantaranya: Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan JBIC.

V.5. Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dikhawatirkan menimbulkan kompleksitas hubungan antar lembaga, mengingat cakupan kegiatannya dimobilisasi secara masif dan cepat. Untuk itu diperlukan pengaturan hubungan antar lembaga agar proses pelaksanaannya tetap dapat terkoordinasi secara baik sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang yang ada pada masing-masing lembaga/instansi terkait. Beberapa hal yang diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait salah satunya adalah donor/NGO.
2. Kegiatan dekonsentrasi oleh Departemen dan Kementerian Teknis yang terkait dengan kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana dikoordinasikan dengan badan pelaksana yang menangani pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak yang terkait diwajibkan memberikan dukungan secara penuh kepada badan pelaksana yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Kerjasama yang sinergis antara kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di pusat dan daerah baik secara vertikal dan horizontal perlu diperkuat dengan dibangun dan diperkuatnya suatu mekanisme kerjasama yang baik. Perlu pembagian kewenangan secara tegas antara pemerintah pusat terutama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Badan Pelaksana BRR, dan melibatkan masyarakat (LSM, Tokoh Masyarakat / Agama, Masyarakat Penerima Manfaat). Juga perlu dilakukan sistem dan manajemen peralihan aset kepada Pemerintah Daerah juga dibuat suatu konsep tentang *exit strategy* pasca keberadaan BRR dalam melakukan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

V.6. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Di dalam pemantauan dan pengendalian, menggunakan kerangka pemantauan dan indikator evaluasi yang menggunakan kerangka 5 indikator yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Adapun penjelasan detailnya sebagai berikut.

1. **Konsistensi** yaitu proses penelaahan kesesuaian : (a) antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias dengan Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh para pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (b) antara Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh pelaksana dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan; serta (c) antar kegiatan pelaksanaan dari semua pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, terkait dengan pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

2. **Koordinasi** yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* dalam mendorong tercapainya kesepakatan, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. **Konsultasi** yaitu keikutsertaan atau partisipasi publik pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. **Kapasitas** yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. **Keberlanjutan** yaitu proses kesinambungan dan saling keterkaitan antara pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Badan Pelaksana BRR kepada Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana pembangunan.

Tabel V. 6
Kerangka Pemantauan dan Indikator Evaluasi

NO.	RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI	INDIKATOR
1.	Konsistensi	1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 2. Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan 3. Konsistensi antara pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi
2.	Koordinasi	1. Mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan 2. Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan
3.	Konsultasi	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dalam koordinasi Bapel BRR, K/L, Pemda/SKPD, Donor/NGO/ Swasta 2. Media partisipasi masyarakat secara langsung
4.	Kapasitas	1. Kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 2. Sumber Daya Manusia
5.	Keberlanjutan	1. Sistem dan manajemen peralihan aset kepada Pemerintah Daerah 2. Konsep tentang <i>exit strategy</i> pasca keberadaan BRR

Sumber: Laporan monitoring dan evaluasi P3RIRRWANS, 2006, Bappenas

V.6.1. Kerangka Pemantauan dan Pengendalian

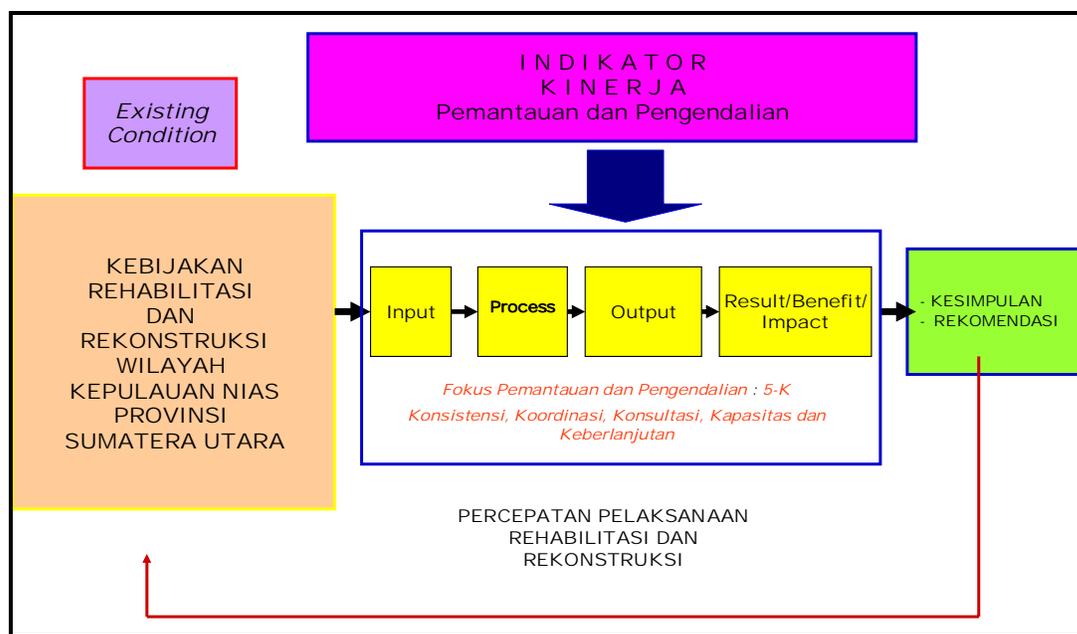
Berdasarkan hasil evaluasi pemantauan dan pengendalian tersebut, perlu dirumuskan dalam suatu analisis kebijakan yang dapat dipergunakan untuk penyusunan bahan arahan kebijakan Dewan Pengarah yang akan direkomendasikan kepada Badan Pelaksana BRR. Perumusan kebijakan ini sangat signifikan karena mengingat bahwa tugas Dewan Pengarah adalah memberikan arahan dan saran kepada Badan Pelaksana sebagai pelaksana teknis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Kepulauan Nias, Provinsi Sumatra Utara.

Di dalam mendukung operasionalisasi kegiatan pemantauan dan pengendalian maka dirumuskan suatu kerangka kerja logis (*logical framework*) sehingga secara makro dapat dilihat alur prosesnya. Secara visual kerangka kerja logis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dilihat dari 4 tahapan proses yang lengkap dan komprehensif yaitu meliputi:
 - a. *input* yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, baik *program dan kegiatan, sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan informasi*, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

- b. *process* yaitu upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan *keterlibatan stakeholders* termasuk penerima manfaat, serta dikaitkan dengan *mekanisme pelaksanaannya*, termasuk *koordinasi dan hubungan kerja* antar unit organisasi.
 - c. *output* yaitu *pencapaian sasaran* dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
 - d. *outcome* yaitu menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan *fungsi atau manfaat keluaran kegiatan*.
2. Menggunakan pendekatan sistem atau keterkaitan, di mana dalam setiap tahapan akan menekankan pada 5 fokus evaluasi (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan) yang tidak terpisah satu dengan lainnya.

Bagan V.8
Kerangka kerja logis kegiatan pemantauan dan pengendalian



Sumber: Diolah dari Laporan Monev P3RIRRWANS, 2006

V.6.2. Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian

1. Pengumpulan data dari informasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias, dari Kementerian/Lembaga, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh BRR.
3. Penyusunan instrumen dan indikator untuk dilakukannya pemantauan dan pengendalian.
4. Sosialisasi dan uji coba indikator pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui rapat koordinasi/diskusi terfokus di pusat dan daerah, serta wawancara dan kunjungan lapangan.
5. Penyusunan analisa, rekomendasi serta laporan pemantauan dan pengendalian.
6. Penyampaian hasil analisa, rekomendasi sementara kepada stakeholders pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias untuk mendapatkan masukan dan tanggapan serta perbaikan, melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi/diskusi terfokus dan lokakarya.

V.6.3. Kegiatan Pendukung Pemantauan dan Pengendalian

1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan rencana aksi tahunan, dan koordinasi atas data, informasi, dan penyusunan laboran pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan atas pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Pengkoordinasian atas data dan informasi perencanaan, pemantauan dan pengendalian pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Pemutakhiran data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta penyusunan basis data dan informasi, data dan informasi spasial, melalui Situs Web on line dan off line.
4. Penyusunan, penyiapan dan sosialisasi kerangka legal, kebijakan, perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada stakeholders terkait.

V.7 Mekanisme Penyaluran Dana

V.7.1 Mekanisme bantuan langsung masyarakat untuk pembangunan perumahan

Berdasarkan pertimbangan kebijakan khusus untuk pembangunan perumahan yaitu dengan pendekatan swadaya masyarakat dan gotong royong, maka prinsip-prinsip mekanisme pendanaan untuk pembangunan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Skema pembiayaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikembangkan untuk, oleh dan dari masyarakat sendiri.
2. Prinsip dasar bantuan ini bukan merupakan kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, melainkan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi rumah dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rumah.
3. Bantuan pembangunan rumah diprioritaskan untuk bangunan tempat tinggal, bukan bangunan yang disewakan oleh masyarakat.
4. Instrumen penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) termasuk prosedur dan mekanisme penyaluran ditetapkan oleh pemerintah.
5. Instrumen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) disalurkan kepada kelompok masyarakat yang akan membangun kembali rumah masing-masing.
6. Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah anggota kelompok sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah dan telah terdaftar, dan telah memperoleh sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan.
7. Mekanisme pencairan bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan kembali perumahan dengan menyediakan:

1. Pengorganisasian pelaksanaan program perumahan dan permukiman dengan prinsip *bottom-up* untuk memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan.
2. Fasilitator yang memberikan pendampingan dan supervisi teknis pembangunan rumah, memantau kemajuan pembangunan dan membantu masyarakat dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan.

Komponen bantuan teknis lainnya untuk sosialisasi, pelatihan, supervise lapangan, pengembangan kelembagaan dan bimbingan teknik kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka integrasi rencana masyarakat (mikro) dengan rencana pembangunan kabupaten/kota (makro).

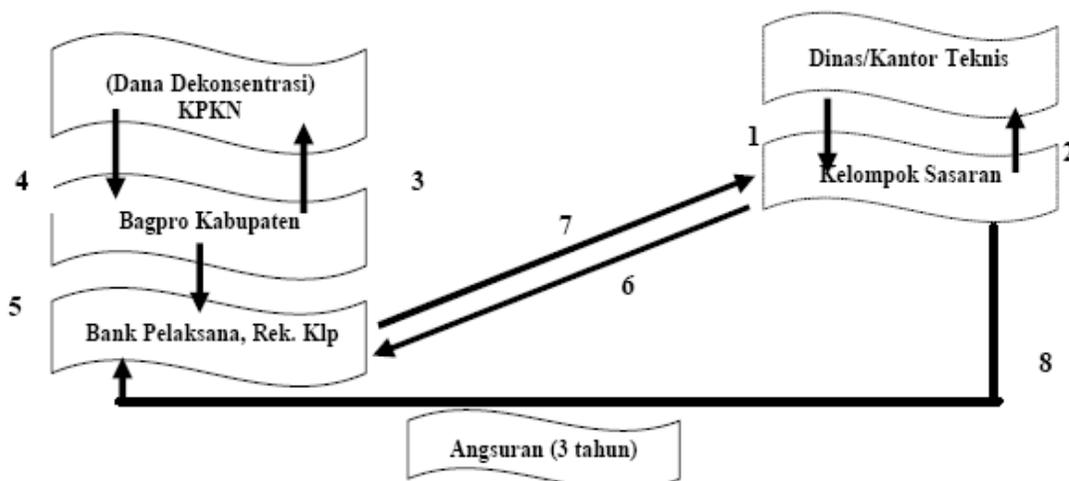
V.7.2 Mekanisme Pendanaan Pembangunan Prasarana Publik

1. Skema pembiayaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), misalnya: untuk pembangunan prasarana permukiman, prasarana pendidikan dan lain-lain atau dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Instrumen penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) termasuk prosedur dan mekanisme penyaluran ditetapkan oleh pemerintah.
3. Instrumen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) disalurkan kepada kelompok masyarakat.
4. Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah anggota kelompok sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah dan telah terdaftar, dan telah memperoleh sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan.

V.7.3 Mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi

1. Skema pembiayaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikembangkan untuk, oleh dan dari masyarakat sendiri.
2. Instrumen penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pemberdayaan ekonomi termasuk prosedur dan mekanisme penyaluran ditetapkan oleh pemerintah
3. Instrumen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) disalurkan kepada kelompok masyarakat UKM, diantaranya untuk bantuan pengadaan peralatan produksi dan modal kerja.
4. Untuk menyalurkan BLM, pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan.

Bagan V.9
Skema Penyaluran dan Pengembalian Dana BLM



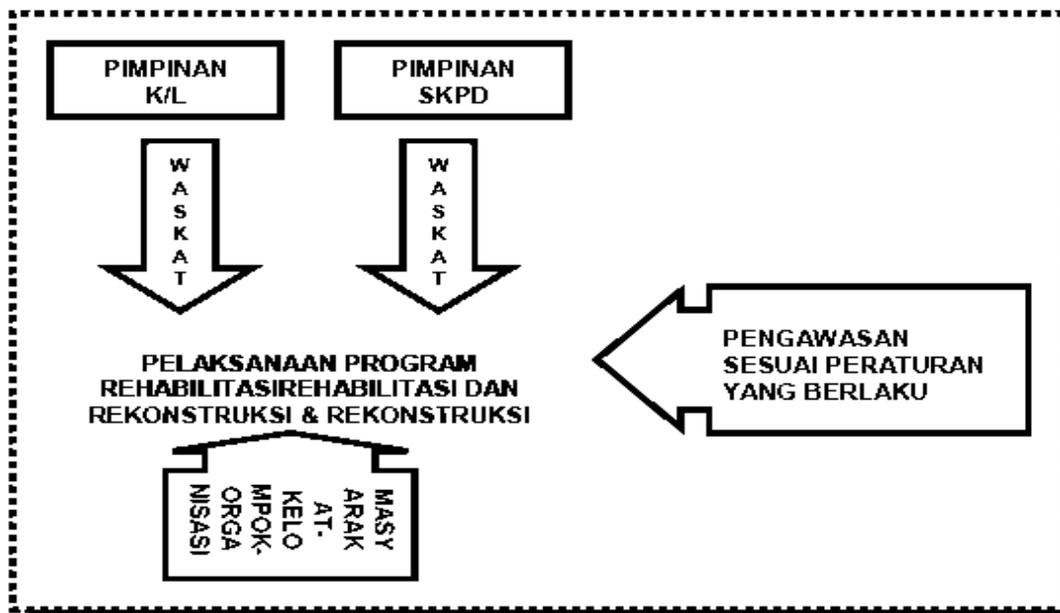
Sumber: Tabel II.a. Peta Pedoman Umum Kegiatan **Bantuan Langsung Masyarakat** (BLM) Ketahanan Pangan, www.deptan.go.id

V.8 Mekanisme Pengawasan

Prinsip-prinsip pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk :

1. Menjamin agar supaya pelaksanaan program/kegiatan telah sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan
2. Menjamin agar supaya pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi telah sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.
3. Pengawasan dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelompok masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi wajib diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana dan evaluasi perencanaan untuk memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya.

Bagan V. 10
Diagram Prinsip Pengawasan Pelaksanaan



Sumber: Buku Utama, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Badan Perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mendapatkan tembusan laporan kinerja dan pengawasan untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pengawasan dapat meliputi cakupan (Bersumber dari Inspektorat LIPI, Selasa, 12 Desember 2006) :

- Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan
Pengawasan sejak tahap perencanaan bukan dimaksudkan sebagai jenis audit, istilah ini lebih merupakan “Sistem Pengendalian Manajemen”(pengawasan melekat) yang diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan untuk meyakinkan keberadaan ukuran-ukuran pengendalian secara optimal.
Istilah Pengawasan Sejak Perencanaan merupakan suatu upaya penerapan prinsip pengendalian manajemen dalam tiap tahap proses perencanaan pembangunan untuk

meyakinkan bahwa perencanaan pembangunan terdokumentasi, dapat diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Pengawasan Melekat (Waskat)**
Waskat bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan dari organisasi dan manajemen, dalam hal ini waskat melekat pada sistem yang dikembangkan.

Pengawasan atasan langsung merupakan sub sistem pengawasan berupa supervisi dari atasan pada bawahan. Secara lebih luas waskat merupakan internal check antara orang dengan orang, bagian dengan bagian. Dengan demikian waskat hendaknya tidak dipahami sebagai Pengawasan Atasan Langsung. Waskat adalah segala upaya yang melekat dan terjalin (permeated) dalam proses manajemen, sebagai perwujudan kendali.

- **Pengawasan Fungsional**
Sering terjadi kontroversi antara Pengawasan Melekat dengan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat merupakan suatu sistem pengendalian manajemen, sedangkan Pengawasan Fungsional menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang ditugaskan khusus untuk fungsi pengawasan.
Pengawasan fungsional terkait dengan instansi yang ikut bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya, untuk melaksanakannya instansi-instansi tersebut dibagi tugas secara fungsional.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagai satu rangkaian manajemen pemerintahan dengan maksud untuk meyakinkan kebijakan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- **Pengawasan Masyarakat (Wasmas)**
Pengawasan masyarakat adalah merupakan usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, dan mengandung maksud mendorong akuntabilitas publik. Dalam wasmas ini masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, informasi tersebut dapat berupa umpan balik, sasaran dan gagasan, maupun keluhan.

Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasal 13 dan 14 yang menyatakan bahwa,

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bersifat independen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang :

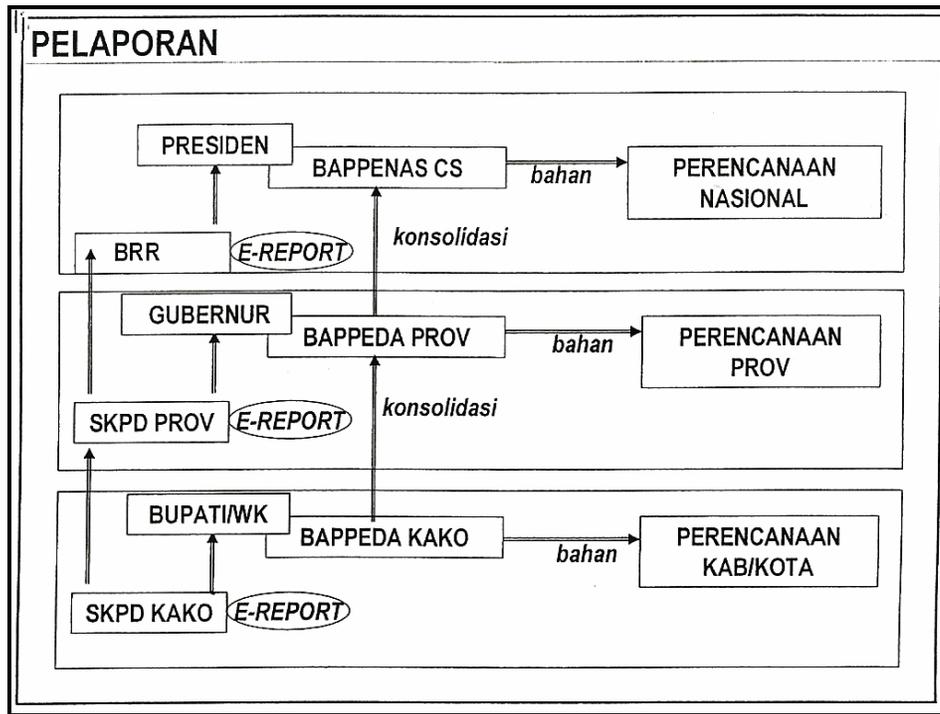
- a. Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya;

- b. Meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Presiden.

V.7 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan rehabilitasi dan rekonstruksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden dan dilaksanakan dengan cara menerbitkan berbagai laporan dalam bentuk laporan semesteran, tahunan dan laporan akhir, serta menyediakan informasi laporan pertanggungjawaban kepada publik. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat laporan pengelolaan kegiatan juga laporan pengelolaan keuangan dan anggaran. Laporan keuangan badan rehabilitasi dan rekonstruksi diaudit oleh auditor independen. Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan, beserta laporan auditnya dapat diakses oleh masyarakat luas.

Bagan V.11
Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber: diolah dari UU No. 25 Tahun 2004

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan. Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden.

V.8 Partisipasi Publik dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Guna menjaga keselarasan partisipasi oleh semua pihak swasta dibentuk suatu mekanisme yang mengatur administrasi dan koordinasi antar pihak-pihak terkait. Dalam kasus pembangunan kembali Kepulauan Nias pasca bencana gempa, diperlukan suatu organisasi yang memainkan peran strategis dalam mengelola partisipasi swasta. Badan Pelaksana (Bapel) BRR, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

Koordinasi partisipasi swasta dilaksanakan oleh Bapel BRR. Lembaga ini mengkoordinasikan semua elemen yang terlibat baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dan pihak swasta yang ingin terlibat dalam membangun Kepulauan Nias. Pihak swasta yang mempunyai inisiatif membangun sesuatu di Kepulauan Nias harus melihat dan mencocokkan dengan master plan yang ada di Bapel BRR dan juga keinginan masyarakat Kepulauan Nias sendiri, serta masukan dari Pemerintah Daerah. Hal ini mutlak dilakukan guna menghindari terjadinya tumpang tindih bentuk dan lokasi kegiatannya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak lain serta ketidakmanfaatan bantuan akibat tidak adanya rencana yang baik dan matang. Prosedur bantuan swasta ini disusun sesederhana mungkin tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola bantuan.

Mekanisme pelaksanaan partisipasi swasta yang dimulai dari inisiatif yang datang dari swasta. Inisiatif tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Bapel BRR dan Pemda untuk melihat keterkaitan antara inisiatif swasta tersebut dengan master plan (rencana induk) dan keinginan masyarakat. Setelah melakukan koordinasi, Bapel BRR melakukan konfirmasi dan menerbitkan persetujuan teknis atas inisiatif tersebut. Persetujuan teknis diteruskan untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Swasta dan Bapel BRR. Kesepakatan tersebut dapat dipakai sebagai acuan oleh pihak swasta untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga, dan Bapel BRR dapat melaporkan jumlah dana ke Departemen Keuangan untuk dicatat dalam register. Pada tahap implementasi, Bapel BRR, Pemda dan swasta bersama-sama terlibat melaksanakan kegiatan. Setelah implementasi selesai, Departemen Keuangan mencatat sebagai penerimaan negara. Untuk monitoring, dilakukan oleh semua pihak yang terkait, termasuk Departemen Keuangan.



Pembangunan Jangka Menengah Kepulauan Nias

VI.1. Rencana *Exit Strategy* BRR NAD-Nias

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya persiapan yang optimal dalam rangka *exit strategy* BRR.

Pertama, proses membangun Kepulauan Nias menjadi lebih baik membutuhkan lebih banyak upaya dari apa yang tercantum di rencana induk yang telah ada, karena membangun Kepulauan Nias tidak hanya sampai pada tingkat kerusakan dan kerugian tanpa menyelesaikan permasalahan keterbelakangan pembangunan di Nias.

Kedua, selama 4 tahun masa rekonstruksi di Kepulauan Nias, lembaga nasional dan internasional telah menginvestasikan proyek-proyek dalam jumlah besar, lebih besar dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharaannya. Dalam ketiadaan dukungan dari donor, pertanyaan kritis yang dihadapi adalah, tanggung jawab apa yang perlu diemban lembaga yang memfasilitasi dan mendukung Pemerintah Daerah dalam masa pasca rekonstruksi?

Ketiga, perubahan lembaga dan perilaku 'masyarakat agar lebih siap apabila bencana melanda di masa mendatang, tidak dapat dilakukan dalam satu generasi. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari 2 bencana besar yang menimpa Kepulauan Nias harus ditransfer kepada generasi masyarakat Kepulauan Nias berikutnya. Terdapat pula kebutuhan kritis untuk membangun mekanisme yang memandu pelembagaan manajemen resiko bencana ke dalam proses pembangunan dan kebudayaan dari Kepulauan Nias.

Dengan demikian, para *stakeholders* yang terlibat dalam proses rekonstruksi memiliki beberapa tugas untuk menyongsong pencapaian *exit strategy* BRR NAD-Nias, yaitu :¹

1. Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan.
2. Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan, dan
3. Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah

¹ Hasil rekomendasi NISM3 (Nias Island Stakeholder Meeting), pada 8 Maret 2007 di Jakarta

VI.1.1. Regionalisasi dan Sekretariat Bersama

a. Regionalisasi

Regionalisasi berarti perubahan dari kewenangan pengelolaan BRR yang terpusat, menuju kepada pengelolaan di daerah kabupaten. Dengan demikian, hingga berakhirnya mandat di tahun 2009, semua tanggung jawab BRR telah dilimpahkan dengan semestinya, dan Pemerintah Daerah mampu menjalankan semua tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Tujuan dari regionalisasi yakni:

- Keselarasan dengan misi dan komitmen BRR di setiap Kabupaten dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias
- Memastikan pemerintahan regional yang efektif setelah masa tugas BRR berakhir
- Memastikan tetap menggunakan pendekatan berbasis komunitas
- Menghadapi tantangan dan kebutuhan rekonstruksi dengan lebih baik
- Memastikan “*membangun kembali dengan lebih baik*”, khususnya mengenai pengurangan resiko bencana
- Melaksanakan koordinasi yang efektif sampai ke tingkat kabupaten dan kecamatan
- Memastikan bahwa pelaporan dan pemindahan aset ke daerah sesuai dengan hukum manajemen keuangan

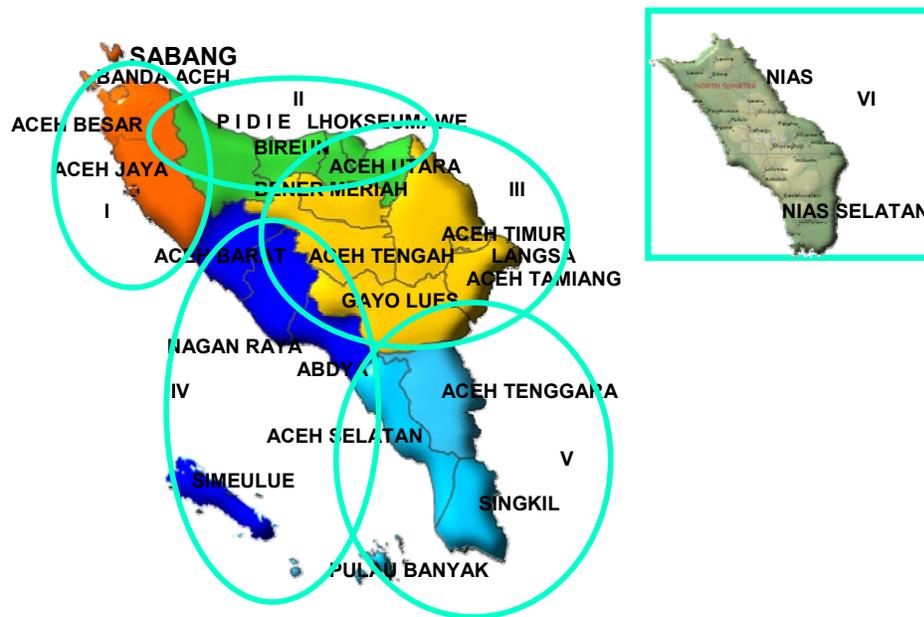
Dengan adanya regionalisasi, beberapa konsekuensi timbul bagi beberapa pihak terkait. Tabel berikut memperlihatkan dengan lebih sistematis.

Tabel VI.1
Konsekuensi Regionalisasi

Pihak	Konsekuensi
Kantor Pusat BRR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfokuskan diri pada kebijakan, pengawasan kebijakan, dan dukungan keseluruhan (<i>portfolio support</i>) ▪ Mitra pemerintah pusat dan provinsi dalam rekonstruksi ▪ Koordinasi donor dalam strategi dan kebijakan
Kantor Regional BRR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kewenangan dan kapasitas yang lebih besar untuk merencanakan dan mengatur dengan cara bekerja sama dengan donor dan pemerintah daerah
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitra BRR dalam proses rekonstruksi ▪ Memiliki SDM dan keuangan dalam proses rekonstruksi ▪ Memastikan peran yang harus dilakukan anggota DPRD dalam hal kebijakan dan pengawasan
Donor dan LSM	Kewenangan pengambilan keputusan di tingkat lokal

Sumber: Presentasi CFAN 2, 9 Mei 2006

Gambar VI.1.
Pembagian Wilayah/ Regionalisasi BRR



Sumber: Setwanrah BRR, 2007

Pembagian wilayah Kantor Perwakilan BRR berikut wilayah yang dicakup ditampilkan pada tabel berikut. Kabupaten Nias dan Nias Selatan termasuk ke dalam Kantor Perwakilan Regional VI.

Tabel VI.2
Kantor Perwakilan BRR

Kantor Perwakilan	Daerah Operasi Kabupaten/Kota
Regional I	Aceh Besar, Aceh Jaya, Sabang
Regional II	Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara
Regional III	Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur
Regional IV	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Simeulue
Regional V	Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara
Regional VI	Nias dan Nias Selatan

Sumber: Setwanrah BRR, 2007

b. Sekretariat Bersama

Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang lancar dari fase rekonstruksi adalah dari sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini akan memperkuat dan membangun keterlibatan Pemda dalam kegiatan rekonstruksi dan mendukung koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Sejak Mei 2006, BRR Nias telah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan BRR melalui pendirian Sekretariat Bersama (Sekber). Adapun mekanisme koordinasi Sekber dapat dilihat pada **Gambar VI.2** di halaman berikut. Sementara struktur organisasi Sekber dapat dilihat pada **Gambar VI.3**.

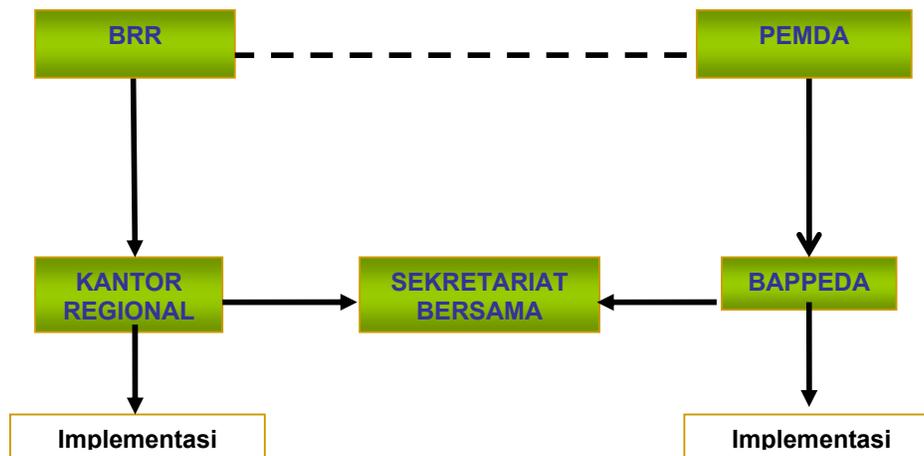
Sekber ini mengemban fungsi-fungsi berikut:

- a. Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemrograman, dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sekretariat Bersama akan mendukung perencanaan satu atap antara Pemda Kabupaten Nias dan BRR. Tugas-tugas khusus termasuk:

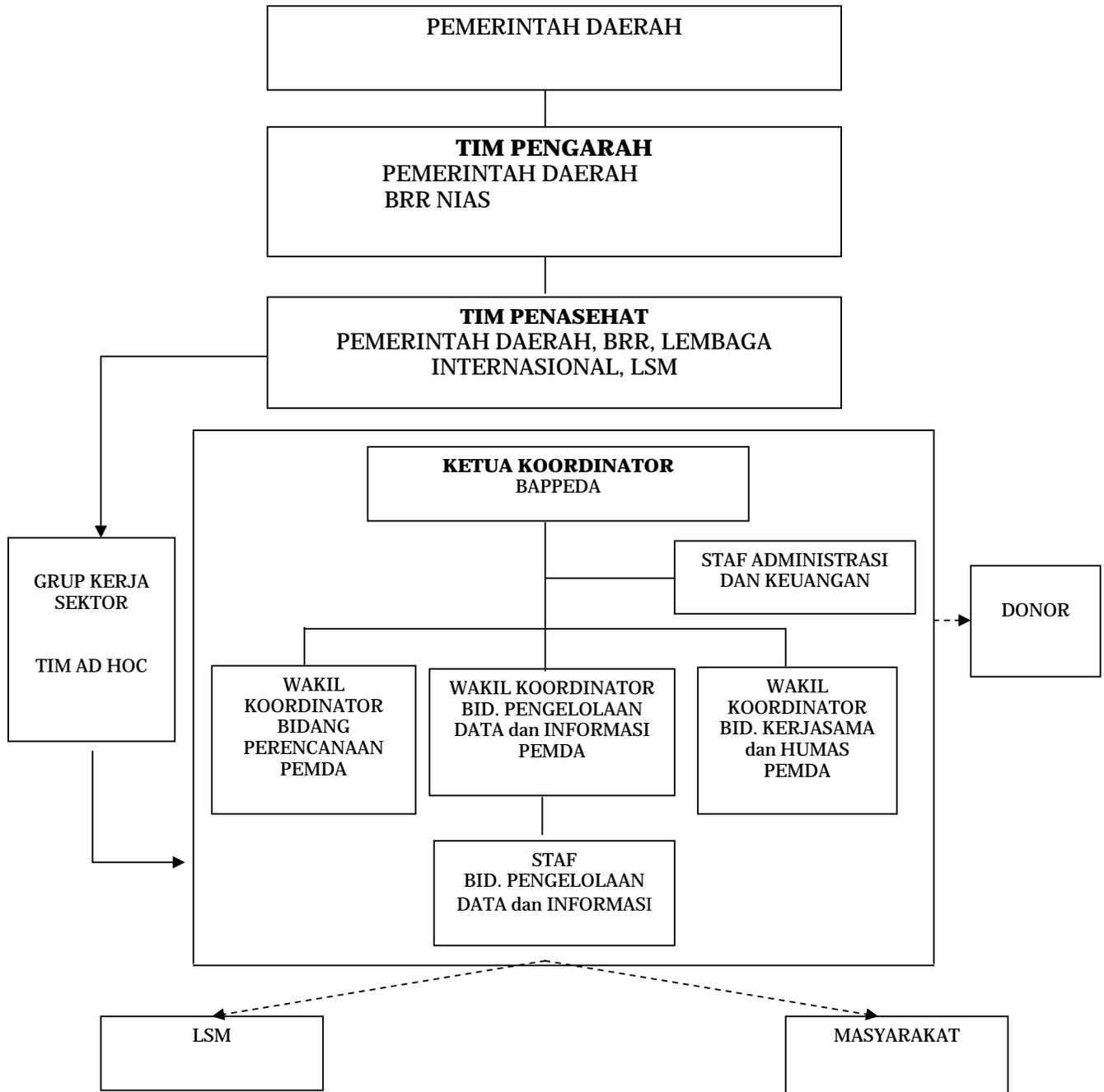
- Melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan (*needs-based*), dengan memperhitungkan kapasitas setiap lembaga secara terukur,
- Melakukan langkah-langkah khusus termasuk penetapan kriteria, evaluasi rencana program, pemrioritasan, penentuan program tahunan dan tahun jamak dan pembagian penanggungjawab program,
- Melakukan perencanaan terkait pemeliharaan aset rekonstruksi secara bersama,
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkoordinasi antara Pemda dan BRR yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik,
- Mendukung perencanaan kecamatan atau pembangunan kecamatan sebagai unit perencanaan rekonstruksi yang akan memperbaiki implementasi kegiatan di tingkat bawah, dan
- Mempromosikan peranan koordinasi dan integrasi antar tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

Gambar VI.2
Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama



Sumber: Setwanrah BRR, 2007

Gambar VI.3
Struktur Organisasi Sekretariat Bersama



Sumber : BRR Perwakilan Nias, 2007

- b. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sekretariat akan menjadi satu pintu untuk data/informasi yang tepat dan akurat tentang semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Mendukung Pemda melalui pengelolaan RAND, database sektor dan lain lain yang mencatat data/informasi tentang semua program rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh pemerintah, BRR dan LSM di Nias, dan
- Mengintegrasikan semua data/informasi dari instansi-instansi pemerintah, BRR dan LSM sehingga database Sekretariat Bersama dapat menjadi sumber utama informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

- c. Memperkuat hubungan antar *stakeholder* melalui strategi komunikasi yang jelas

Sekretariat akan mensosialisasikan data/informasi tersebut kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan dan masyarakat, dan juga untuk memperkuat hubungan antar stakeholder pada umumnya. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Membangun strategi komunikasi untuk menyampaikan data/informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemda dan masyarakat melalui seminar, pembuatan brosur dan penyiapan bahan press release (konferensi pers) dan lain lain, dan
- Bekerjasama dengan Humas, Pemda. Kab. Nias, Pusat Informasi Publik BRR dan UNORC untuk membuat pendekatan terpadu dalam penyampaian informasi kepada para stakeholder.

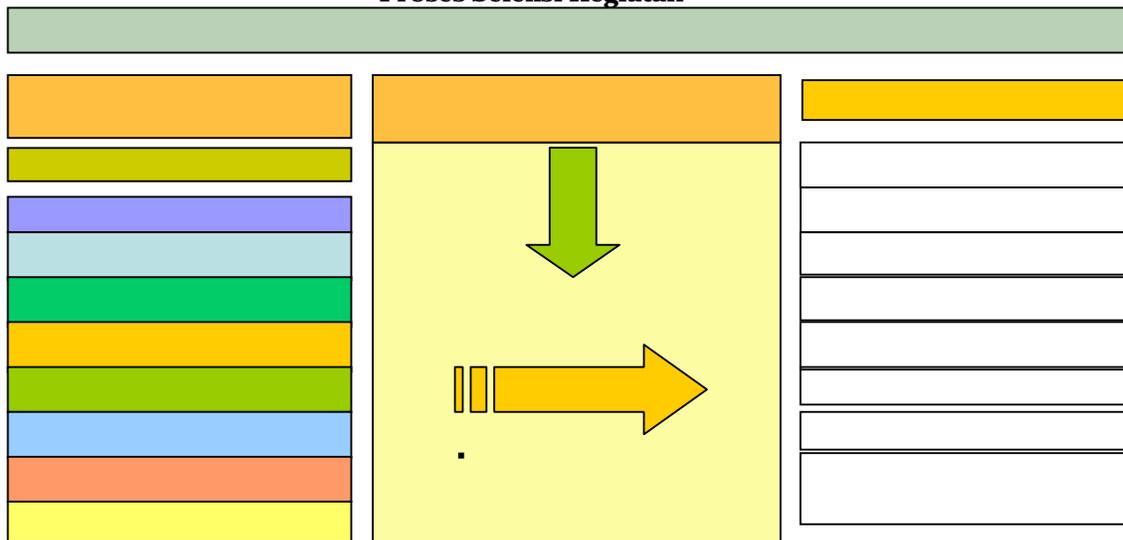
- d. Mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Pada masa pembentukan Sekretariat Bersama, staf pegawai di Sekretariat memerlukan bimbingan dan bantuan dari stakeholder yang lain untuk berbagai tugas misalnya:

- Mengintegrasikan perencanaan antara pemerintah daerah, BRR dan LSM, dan
- Mengerti dan menguasai database operasional dan cara cara pengumpulan data dan informasi untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagaimana yang terlihat dalam struktur organisasi Sekber di atas, setiap wakil koordinator bidang dipegang oleh staf Pemerintah Daerah. Wakil-wakil koordinator ini dalam tugasnya hingga tahun 2009, bekerja sama dengan staf BRR sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Diharapkan pasca tahun 2009, Pemda sudah dapat meneruskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai.

Gambar VI.4
Proses Seleksi Kegiatan



Sumber: Setwanrah BRR, 2007

Skema proses seleksi kegiatan di atas menjelaskan bagaimana alur proses dari usulan-usulan kegiatan yang berasal dari berbagai pihak seperti masyarakat, Pemda, BRR, NGO, dan lainnya, akan melalui rangkaian proses di Sekretariat Bersama. Proposal kegiatan yang diajukan merupakan kebutuhan rencana pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing *stakeholder*. Kegiatan yang diusulkan dikaji berdasarkan prioritasnya, hasil evaluasi, dampak lingkungan dan rekayasa. Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diintegrasikan dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Pada tahap selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang terpilih akan dikembalikan lagi kepada pihak terkait untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunannya.

VI.1.2. Pentahapan *Exit Strategy*

Tahun 2009 merupakan fase terakhir dari proses rekonstruksi di Kepulauan Nias. Oleh karenanya, dimulai pada tahun 2008, perlu diperhatikan aspek peralihan yang mendukung proses peralihan program dan kegiatan dari BRR dan *stakeholder* lain kepada Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias. Beberapa kriteria untuk *exit program* ini adalah:

1. Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan
2. Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah
3. Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009
4. Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi
5. Program yang bertujuan untuk melembagakan mekanisme pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah

Kelima kriteria kegiatan di atas dilakukan pada jangka waktu hingga 2009, dan pada fase selanjutnya Pemerintah Daerah maupun Kementerian/lembaga terkait akan melanjutkan kegiatan-kegiatan rekonstruksi yang perlu dilanjutkan ke dalam konteks pembangunan daerah, dalam hal ini Kepulauan Nias yang mencakup Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Implementasi untuk tiap kegiatan, dilakukan pada pentahapan kegiatan *exit strategy* seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel VI.3
Pentahapan Kegiatan Exit Strategy BRR

No.	Kegiatan	2006	2007	2008	2009
1.	Pembentukan Regionalisasi dan peningkatan efektivitas Sekretariat Bersama	√	√	√	
2.	Pelatihan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah	√	√		
3.	Perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan rekonstruksi yang dilakukan antar stakeholder	√	√	√	√
4.	Pembiayaan gabungan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan dan operasi fasilitas ▪ Pembangunan wilayah 			√	√
5.	Manajemen dan peralihan aset BRR			√	√
6.	Institusionalisasi skema pengurangan resiko bencana			√	√

Sumber: Action Plan BRR Nias dan Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

a. Peningkatan Kapasitas Pemda

Pengembangan kelembagaan dan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai aparat pemerintah termasuk badan-badan Pemerintah Daerah kabupaten dan provinsi, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia. Usaha ini dilakukan melalui penyediaan bangunan fisik, peralatan, dukungan dari perusahaan konsultan independen untuk membantu dalam pengalihan keahlian teknis dan manajemen, serta mendukung pengembangan kelembagaan secara umum dan penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan.

Selain itu, berdasarkan Laporan Kemajuan 2 Tahun BRR, BRR juga telah memberikan dukungan untuk membantu proses rekrutmen pegawai negeri. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan prosedur pendaftaran pegawai negeri dan, apabila diperlukan, menyelenggarakan lokakarya dan kursus pelatihan untuk memastikan dipenuhinya standar kompetensi. Serangkaian program yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dan sepanjang 2006 adalah melatih para pegawai Pemerintah Daerah, termasuk Program Aksi Pemerintahan Daerah Aceh EU/GTZ, Program Dukungan Pemerintah Daerah USAID, dan pelatihan lainnya melalui YIPD. Dukungan yang berasal dari JICA, AusAid, GTZ, dan Pemerintah Negara Perancis, BRR juga melakukan pelatihan untuk para bupati dan kepala desa. Dukungan untuk pemerintah provinsi juga sedang dilakukan kajian mengenai kebutuhan sumber daya manusianya untuk selanjutnya melakukan pelatihan dan pengembangan staf dalam waktu yang lebih panjang.

b. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan rekonstruksi yang dilakukan antar stakeholder

Berdasarkan Laporan Kemajuan 2 Tahun BRR, selama tahun 2006, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan pada tingkat kecamatan sudah berjalan. Hal ini semakin berjalan baik dengan dibentuknya Mekanisme Koordinasi Kecamatan (SDCM). UNORC (*UN Recovery Coordinator for Aceh and Nias*) telah memimpin dan penerapan dan memfasilitasi SDMC di beberapa daerah yang terkena dampak bencana. Struktur organisasi SDCCM ini dikepalai camat dan beranggotakan LSM, para mukim, dan para kepala desa. Hingga saat ini, SDCCM sedang diperluas sampai ke bagian lainnya dari daerah-daerah yang terkena bencana, termasuk kabupaten di pantai Timur Laut, Kota Banda Aceh, dan Kepulauan Nias.

Dalam rangka dukungan untuk para camat dalam pengambilan keputusan, telah dibuat Format Laporan Camat yang telah dibakukan dan telah diterapkan oleh Bagian Informasi dan Analisis UNORC (UNORC IAS). Di masa mendatang, data dan informasi yang dilakukan melalui SDCM juga dimasukkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pada tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini pada gilirannya akan membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan praktis.

c. Perencanaan dalam kontribusi penganggaran

Pasca berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009, pelaksanaan pembangunan di daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias akan dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, tentunya diperlukan mekanisme dalam hal pembiayaan gabungan terhadap pemeliharaan dan operasi fasilitas, serta untuk keperluan pembangunan wilayah. Pembiayaan ini dapat dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya.

d. Manajemen Aset

Dalam akuntansi pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan. Oleh karenanya, aset tersebut harus dikelola dengan baik agar terjaga keberadaannya dan optimal pemanfatannya.

Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias – Provinsi Sumatera Utara perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada tahun 2009. Penanganan khusus dan cepat bukan berarti meninggalkan sisi administrasi berupa pencatatan dan dokumentasi kepemilikannya.

Kerangka Manajemen Aset BRR

1. Tersedianya database tentang jumlah, keberadaan dan besaran nilai aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias yang *realible* dan mudah di *update*
 - Penyediaan aplikasi manajemen aset
 - Pelaksanaan proses inventarisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 3 kali dalam 1 tahun anggaran
 - Proses validasi dan rekonsiliasi dengan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) sehingga mendapatkan kepastian nilai perolehan aset sesuai dengan realisasi belanja barang yang telah di keluarkan dan memenuhi asersi manajemen tentang keberadaan aset
2. Adanya kepastian administrasi fisik dan kepastian hukum atas penguasaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias termasuk nilainya
 - Memfasilitasi pelaksanaan proses serah terima aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Percepatan proses penetapan status kepemilikan atas aset yang di hibahkan atau di alihkan status penggunaannya ke instansi vertikal pemerintah pusat
3. Pemanfaatan terhadap aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias sehingga secara ekonomis maupun sosial dapat ditetapkan mana yang perlu di optimalkan dan yang akan dihapuskan
 - Penelitian dan identifikasi terhadap seluruh aset yang berada di bawah tanggungjawab BRR NAD-Nias agar penggunaannya dapat di optimalkan sesuai dengan TUPOKSI

Prosedur Pengelolaan Aset di BRR

1. Penyerahan Aset dari Satker ke BRR

Pada setiap akhir tahun anggaran, Satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Deputy Sektor-nya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan Inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

- 1) Satker yang bersangkutan,
- 2) Deputy Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
- 3) Direktorat Manajemen Aset,
- 4) Instansi Pengguna Akhir.

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi. Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

2. Penyerahan aset dari NGO/ Negara Donor ke BRR

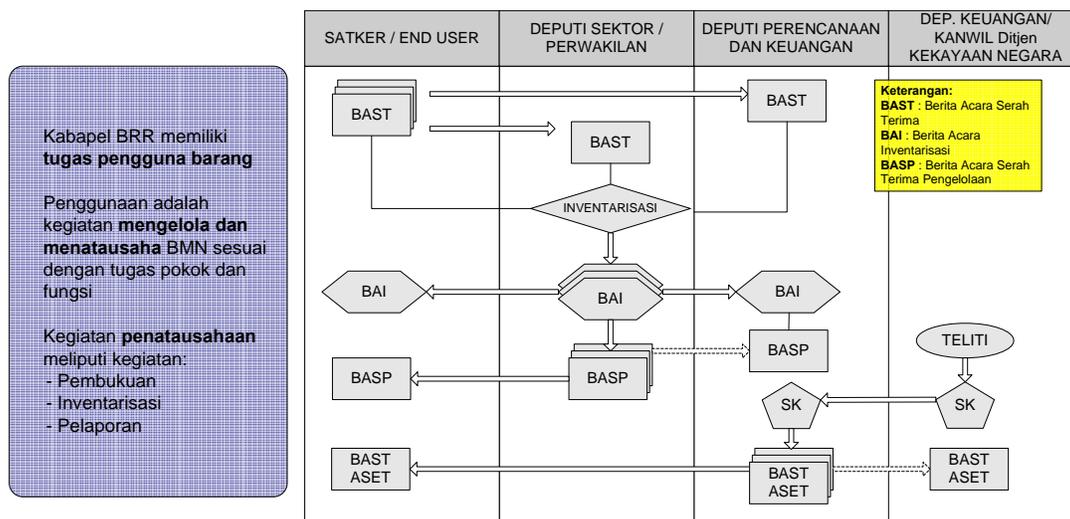
Tidak jauh berbeda dengan tata laksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana BRR, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.

3. Penyerahan aset dari BRR ke Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai pengguna akhir

Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (*end user*) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun pemindahtanganan.

Untuk mempercepat proses, penyerahan aset dari Satker kepada BRR (BAST) dan dari BRR ke Pengguna Akhir (BASP) dapat dilakukan dalam waktu bersamaan. Pada prinsipnya, karena pengendali program adalah Deputy sektor, maka BAST dan BASP merupakan wewenang dan tanggung jawab kedeputian terkait. Namun, dengan semangat regionalisasi dan kebutuhan mendesak serta kepraktisan, kedeputian sektor dapat diwakili Kepala Perwakilan BRR khususnya untuk Satker yang ada di daerah.

Gambar VI.5
Proses Transfer Aset BRR



Saat ini sedang dilakukan Finalisasi Draft Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Aset BRR NAD - Nias

S

umber: NISM 3, 8 Maret 2007

Pada akhir masa tugas BRR NAD-Nias, seluruh aset termasuk yang digunakan untuk operasional diserahkan kepada Pemda dan Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karenanya, dukungan administrasi yang baik sangat diperlukan demi menjaga dan menjamin akuntabilitas organisasi.

e. Melembagakan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana di Kepulauan Nias

Disaster Risk Reduction/DRR (Manajemen Pengurangan Resiko Bencana) yang diperkenalkan oleh BRR bermaksud untuk membangun kesadaran masyarakat akan potensi terjadinya bencana alam dan membangun kapasitas untuk perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan di tingkat masyarakat. Kerangka manajemen pengurangan resiko bencana dalam konteks ekonomi dan perencanaan wilayah di Kepulauan Nias juga diharapkan dapat mengurangi kerentanan bencana dari proyek-proyek investasi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia kepada para investor. Langkah-langkah utama yang segera dipersiapkan adalah:

1. Perencanaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten agar memasukkan perencanaan pengurangan resiko bencana dalam program dan anggaran. Program DRR ini selaras dengan Program Pengembangan Kecamatan (*Kecamatan Development Program*) dan program berbasis komunitas lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Membangun mekanisme koordinasi, khususnya di antara Pemerintah di wilayah Samudera Hindia, untuk mengurangi resiko terjadinya bencana besar selanjutnya seperti gempa bumi dan tsunami.²

Badan Koordinasi Gabungan yang dimaksud untuk mengantisipasi bencana alam di masa depan yakni, suatu badan koordinasi yang melingkupi seluruh kabupaten sepanjang pantai barat Sumatera mulai dari Pulau Weh di Provinsi NAD hingga Pulau Panaitan di Provinsi Banten. Sehingga pembelajaran dari Kepulauan Nias maupun Simeulue dapat dipelajari oleh yang lain juga. Kawasan tersebut juga perlu

² Pemikiran ini diungkapkan oleh Profesor Dorodjatun Kuntjorojakti pada NISM 3, yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2007 di Jakarta

dikembangkan potensi perekonomiannya, dengan demikian kawasan tersebut tidak tergantung lagi dengan daratan Sumatera.

Badan Koordinasi Pulau-Pulau Samudra Hindia Bagi Penanggulangan Bencana Alam selanjutnya akan memantapkan strategi-strategi pendahuluan untuk menanggulangi bencana. Tugas-tugas dari badan ini melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu komunitas yang rentan bencana di wilayah lain untuk belajar dari kasus Kepulauan Nias dan membangun komunitas berbasis manajemen pengurangan resiko bencana
 - b. Membuat rencana evakuasi, dan infrastruktur pendukungnya yang tergabung dalam rencana tata ruang setiap pulau
 - c. Membantu masyarakat dalam pembangunan bangunan dengan struktur tahan gempa
 - d. Membantu masyarakat dalam perencanaan spasial yang mengindikasikan wilayah dengan kemungkinan terjadinya bencana tsunami, gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya
 - e. Berkolaborasi dengan lembaga monitoring nasional dan internasional termasuk Pulau Sumatera dan Jawa, untuk membangun sistem peringatan dini
 - f. Menyiapkan rencana untuk penyediaan bantuan teknis dari negara-negara ASEAN dan pulau-pulau utama lainnya di Indonesia.
 - g. Menginisiasi pelatihan manajemen penanganan bencana di Kepulauan Nias, dengan melibatkan seluruh organisasi terkait, seperti skema bangunan dengan struktur tahan gempa
3. Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur unit penanganan darurat dan pelaksanaannya, termasuk proses evakuasi dan pendirian tenda darurat 3
 4. Dalam rangka exit strategy pasca 2009, perlu juga disusun Rencana Aksi Daerah [RAD]-Pengurangan Resiko Bencana [PRB] Kepulauan Nias oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. RAD-PRB ini sejalan dengan semangat pengarusutamaan manajemen mitigasi bencana yang telah dimulai dengan pembuatan Rencana Aksi Nasional [RAN] – PRB oleh Bappenas dan Bakornas PB pada tahun 2006 lalu.

RAD-PRB ini memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan penanganan bencana di Kepulauan Nias. Dokumen ini kelak mengakomodasikan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan terkait dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi. Beberapa prinsip yang menjadi landasan penyusunan RAD-PRB Kepulauan Nias adalah :

- a. Pergeseran paradigma penanganan bencana, dari tanggap-darurat menjadi manajemen penanganan bencana yang komprehensif;
- b. Pembagian kewajiban penanganan bencana yang merata antar semua *stakeholders* terkait : pemerintah, sektor privat dan masyarakat

³ Mengikuti contoh dari Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta yang telah memiliki Perda mengenai penanganan darurat akibat meletusnya Gunung Berapi

VI.2 Permasalahan Jangka Menengah Kepulauan Nias

VI.2.1 Potensi dan Tantangan

Kabupaten Nias

Kabupaten Nias adalah merupakan salah satu kabupaten terbesar ke enam jumlah penduduknya di Provinsi Sumatera Utara setelah Deli Serdang, Asahan, Langkat, Simalungun dan Tapanuli Selatan. Kabupaten Nias berada disebelah Barat Pantai Sumatera, yang berjarak sekitar 92 mil laut dari Kota Sibolga.

Sampai dengan tahun 2006 Kabupaten Nias telah melakukan beberapa kali pemekaran terhadap wilayah kecamatan. Pada tahun 2004 Kabupaten Nias terdiri dari 14 kecamatan dan 443 desa, dengan luas wilayah sekitar 379.980 Ha (3.799,80 km²). Setelah kejadian gempa pada 28 Maret tahun 2005 yang lalu serta dilandasi oleh semangat otonomi daerah, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, tanggal 14 Desember 2005 tentang pembentukan 18 (delapan belas) kecamatan baru di Kabupaten Nias, maka secara keseluruhan Kabupaten Nias mekar menjadi 32 Kecamatan dan satu kecamatan persiapan.

Beberapa potensi yang berhasil diidentifikasi di wilayah Kabupaten Nias dalam **Peraturan Bupati No. 5/2006** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten Nias 2006-2011 antara lain :

a. **Sumber daya alam**

Tingkat ketersediaan sumber daya alam yang cukup besar di Kabupaten Nias. Selain itu, Kabupaten Nias juga memiliki sungai-sungai besar dan kecil yang berfungsi sebagai sumber air bagi pertanian dan sarana air bersih bagi masyarakat.

b. **Perekonomian**

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan *trend* positif, kecuali pasca gempa bumi. Struktur ekonomi utama berdasar PDRB tahun 2001-2004: Pertanian [terutama tanaman pangan], Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Jasa

c. **Kebudayaan**

Agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika sangat berperan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pendorong. Perkembangan kehidupan keagamaan di kabupaten Nias cukup kondusif. Akar budaya yang sangat kuat juga turut mendukung pembangunan di Kabupaten Nias

Adapun tantangan utama yang ditemui pasca kejadian gempa bumi 28 Maret 2005 adalah morbiditas beberapa penyakit menular, yang kemungkinan di masa mendatang akan meningkat. Faktor lingkungan dan sanitasi lingkungan perumahan yang belum terpelihara adalah sebab utamanya. Selain itu, sektor infrastruktur juga perlu mendapat perhatian yang cukup, karena kondisi yang kurang memadai sudah terjadi sebelum gempa bumi. Pembangunan sektor infrastruktur erat kaitannya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias.

Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2003, adalah termasuk daerah yang termiskin di Indonesia. Disatu sisi, Kabupaten Nias Selatan sebagai

daerah kepulauan memiliki alam yang sangat kaya dan beragam terutama pada bidang pertanian dan kehutanan, perkebunan, perikanan kelautan, pariwisata, dan lain sebagainya. Akan tetapi potensi sumber daya alam tersebut yang tersebar pada seluruh wilayah kecamatan belum dikelola secara optimal karena keterbatasan dalam SDM pendanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pemasaran yang sangat terbatas.

Aneka ragam potensi Kabupaten Nias Selatan yang berhasil diidentifikasi berdasar **Perda No.2/2007 tentang RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2006-2011** di antaranya yakni:

a. Pertanian

Sawah seluas \pm 12.000 Ha, lahan kering seluas \pm 28.136,5 Ha, dan hutan seluas \pm 197.746,37 Ha (ketiganya tersebar di 8 kecamatan).

b. Perikanan

Potensi ikan laut sebanyak \pm 15.424 Ton (tersebar di 6 kecamatan) dan ikan air tawar seberat \pm 2.080 Ton (tersebar di 8 kecamatan).

c. Pariwisata

Wisata bahari yang terdapat di \pm 40 kawasan pengembangan (tersebar di 6 kecamatan), wisata alam di \pm 30 kawasan pengembangan, wisata budaya di \pm 29 kawasan pengembangan, dan wisata gua di \pm 7 kawasan pengembangan (ketiga jenis wisata ini tersebar di 8 kecamatan), wisata bakau di \pm 3 kawasan pengembangan (di 2 kecamatan), dan lokasi surfing di \pm 9 kawasan pengembangan (tersebar di 3 kecamatan).

Dengan potensi alam dan laut tersebut, maka ketiga sektor tersebut menjadi unggulan untuk dapat meningkatkan perekonomian sekaligus pendapatan masyarakat.

Meski demikian, wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan 104 pulau dan lautan yang luas juga memiliki beberapa tantangan. Wilayah Nias Selatan memiliki banyak kawasan terumbu karang, namun akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun sianida, dan pukut harimau mengakibatkan kerusakan terumbu karang pada wilayah ini. Padahal bila dikelola dengan baik, kawasan terumbu karang ini dapat menjadi objek wisata yang sangat menarik dan menguntungkan daerah di sisi lain.

Pada sektor pertanian, masih banyak lahan pertanian yang belum diusahakan dengan berbagai komoditi unggulan seperti padi sawah, padai ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, ubi jalar, ubi kayu, pisang, serta berbagai jenis sayuran (hortikultura). Sektor peternakan umumnya dibudidayakan oleh masyarakat di seluruh wilayah dengan jenis ternak antara lain sapi, kambing, babi, kuda, ayam, dan sejenis unggas lainnya.

Tantangan di bidang pariwisata yaitu, potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Nias belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Sebagai contoh, salah satu permasalahan yang terdapat di Pusat Kawasan Pembangunan Moale yaitu objek wisata dengan pantai indah pasir putih sepanjang 25 km pantai, ternyata belum memiliki akses jalan menuju tempat tersebut.

VI.2.2 Permasalahan Strategis

Kabupaten Nias

Permasalahan strategis yang dihadapi Kabupaten Nias ke depannya antara lain:

A. Infrastruktur

- Infrastruktur dasar yang mengalami kehancuran akibat gempa bumi. Ini juga memperparah kondisi awal infrastruktur yang memang sudah cukup minim.
- Aksesibilitas transportasi darat terbatas, oleh sebab itu dalam lima tahun terakhir pembangunan infrastruktur diutamakan. Penyebab terhambatnya pembangunan infrastruktur adalah : kondisi geologi yang sangat labil dan rawan bencana longsor, faktor konstruksi dan partisipasi masyarakat
- Perkembangan infrastruktur perlu diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sentra-sentra produksi dan membuka daerah yang tertinggal

B. Sumber daya alam dan lingkungan hidup

- Ragam potensi SDA yang dimiliki belum diolah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi SDA yang belum terkelola dengan optimal adalah padi. Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Nias belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan untuk daerahnya sendiri (swasembada).
- Letak geografis Kabupaten Nias yang relatif jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi [sebelah barat Sumatera, 92 mil laut dari Kota Sibolga]
- Struktur batuan dan susunan tanah labil, mengakibatkan sering terjadinya banjir bandang
- Beberapa kawasan lindung [sempadan pantai & sungai] beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan permukiman; beberapa belum tertata dan terpelihara dengan baik
- Struktur geologi berada pada daerah patahan sehingga sebagian besar wilayahnya berpotensi mengalami bencana alam gempa bumi, tsunami, abrasi
- Kondisi lingkungan hidup mengalami degradasi dan penurunan kualitas akibat perambahan hutan, kerusakan bakau, kerusakan DAS, menurunnya diversifikasi flora dan fauna, gangguan dan kerusakan ekosistem terumbu karang

C. Sumber daya manusia

- Laju pertumbuhan penduduk relatif cukup tinggi [1,23% dari 2000-2004] dan daya serap lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan potensi angkatan kerja yang tersedia, sehingga angka pengangguran sangat besar dari tahun ke tahun. Hal ini diperparah dengan minimnya keterampilan sebagian besar angkatan kerja. Minimnya kemampuan masyarakat ini juga berimbas pada rendahnya perkembangan ekonomi skala lokal.
- Masalah turunan lainnya adalah persebaran penduduk yang kurang merata dan Angka Beban Tanggungan Keluarga yang masih cukup besar [tahun 2000 mencapai 79% dan tahun 2004 mencapai 76%]
- Indeks Pembangunan Manusia [IPM] Kabupaten Nias tahun 2002 urutan terakhir di Sumatera Utara. Perkembangan APK dan APM di berbagai jenjang pendidikan lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun [2000-2004]. Namun tetap banyak potensi masyarakat yang masih belum memperoleh kesempatan pendidikan di pelosok-pelosok daerah

- Sumber daya manusia yang masih kurang memadai, baik kualitas maupun kuantitas dalam melakukan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat

D. Perekonomian

- Kabupaten Nias masih tergolong dalam salah satu Kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah di Propinsi Sumatra Utara. Pada tahun 2004, secara nominal, PDRB per kapita Kabupaten Nias dan hanya sebesar 4,83 juta rupiah dan nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara yang sebesar 7,73 juta rupiah (BPS, 2004). Kontribusi PDRB Kabupaten Nias terhadap total PDRB Propinsi Sumatra Utara juga sangat rendah. Di tahun 2004, misalnya, dari 114,65 triliun total PDRB Propinsi Sumatra Utara, Kabupaten Nias hanya menyumbang sekitar 1,96 persen⁴
- Adanya potensi unggulan yang tidak dapat dikembangkan [pertanian : kelapa sawit dan karet] karena permasalahan kekurangan SDM, tidak adanya pasar, dan akses terhadap modal yang rendah
- Akses permodalan yang sangat rendah juga menyebabkan perkembangan koperasi stagnan; SDM Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga kurang memiliki keterampilan yang memadai.

E. Kelembagaan pemerintahan dan pengawasan pembangunan

Sesuai dengan arahan prioritas pembangunan nasional dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Nias, maka kualitas lembaga pelaksana pembangunan harus ditingkatkan. Upaya penyempurnaan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan juga harus diteruskan, tentunya dengan memberikan landasan hukum yang memadai.

Kabupaten Nias Selatan

Tsunami pada 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005 menambah kemiskinan yang telah ada sebelumnya, rumah-rumah yang jauh dari kondisi memadai, dan infrastruktur yang sangat terbatas di Kepulauan Nias. Di tahun 2004, Kepulauan Nias tercatat sebagai wilayah dengan pendapatan terendah, tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk di Provinsi Sumatera Utara. Kemiskinan di Kepulauan Nias dapat ditelusuri melalui produktivitas yang rendah dan nilai tambah yang sangat kecil dari proses komoditas yang termasuk ke dalam sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan pendapatan seperti karet, coklat, kelapa, penangkapan ikan dan beras. Penurunan ini pada selanjutnya berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, masalah kesehatan (seperti malaria endemik), infrastruktur yang sangat terbatas dan tidak terawat, keterbatasan akses jalan ke banyak wilayah, komunikasi terbatas, dan ketiadaan di banyak tempat akan pengetahuan keterampilan dan jasa keuangan. Berikut beberapa permasalahan utama yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan.

A. Infrastruktur

Kabupaten Nias Selatan memiliki 212 Desa, dimana 60 % dari Desa tersebut belum dilalui kendaraan roda empat dan roda dua atau pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi belum terlaksana dengan baik. Hal ini berakibat pada kurang berkembangnya sentra-sentra produksi di wilayah ini. Selain itu, minimnya infrastruktur juga menyebabkan desa-desa tertinggal, terisolir, dan termiskin masih dominan didapati di 8 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan.

⁴ Hasil Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI dan BRR, Desember 2006

B. Sumber daya alam dan lingkungan hidup

Walaupun padi merupakan jenis tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, tingkat perkembangan tanaman ini masih rendah. Hal itu tercermin dari relatif rendahnya tingkat produktivitas pada sektor ini. Sebagaimana pengelolaan jenis tanaman lainnya, pengelolaan pertanian padi di kabupaten ini masih sangat tradisional. Akibatnya, tingkat produksi dan produktivitas yang dihasilkan masih relatif rendah dan belum bisa mencapai hasil yang maksimal. Akibatnya, Kabupaten Nias Selatan, sama halnya dengan Kabupaten Nias, belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan untuk daerahnya sendiri (swasembada).

C. Sumber daya manusia

Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004. Menurut data BPS tahun 2004, terdapat sekitar 90 ribu penduduk (atau lebih dari 32% dari total penduduk) yang hidup di bawah garis kemiskinan Rp 213.29 per kapita/bulan. Hal ini diperparah dengan kemampuan masyarakat yang rendah dalam mengembangkan ekonomi skala lokal.

Sementara itu, dalam bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat pada kenyataannya masih belum optimal karena kualitas sumber daya manusia aparatur dan ketersediaan sarana/prasarana pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan masih belum memadai. Keadaan ini dimungkinkan karena Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten pemekaran.

D. Perekonomian

Hingga tahun 2004, Kabupaten Nias Selatan masih tergolong dalam salah satu Kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah di Propinsi Sumatra Utara. Pada tahun tersebut, secara nominal, PDRB per kapita Kabupaten Selatan hanya sebesar 4,70 juta rupiah dan nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara yang sebesar 7,73 juta rupiah (BPS, 2004). Lebih lanjut, kontribusi PDRB Kabupaten Nias Selatan terhadap total PDRB Propinsi Sumatra Utara juga sangat rendah. Di tahun 2004, misalnya, dari 114,65 triliun total PDRB Propinsi Sumatra Utara, Kabupaten Nias Selatan hanya menyumbang sekitar 1,25 persen.⁵

Sama seperti halnya di Kabupaten Nias, permasalahan lain yang ada di wilayah Nias Selatan adalah potensi pertanian yang kurang optimal dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh akses pasar dan akses ke permodalan yang rendah, di samping kualitas SDM yang kurang memadai.

E. Kelembagaan pemerintahan dan pengawasan pembangunan

Kabupaten Nias Selatan sebagai Kabupaten Pemekaran baru belum memiliki perangkat peraturan daerah yang cukup memadai sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam semboyan *Lakhōmi Sebua Wahasaradōdō* serta nilai-nilai perjuangan pemekaran Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi dasar moral pembentukan produk-produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan. Peraturan Daerah yang lahir dari pemikiran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan bersama dengan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias Selatan, diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

⁵ Hasil Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI dan BRR, Desember 2006

Dalam perkembangan pembangunan, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas lembaga pelaksana pembangunan dan melanjutkan upaya penyempurnaan sistem pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan ini tentunya harus diperkuat dengan dasar-dasar hukum yang memadai untuk menjamin minimnya bias maupun penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan

VI.3 Kebijakan dan Strategi Prioritas

VI.3.1 Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kepulauan Nias

Berdasarkan prioritas Penanganan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana, telah diatur kebijakan dan strategi nasional yang menjadi sasaran pembangunan untuk Kepulauan Nias diarahkan kepada **dua sasaran utama** :

1. Meningkatnya kinerja pemerintah dan lembaga pendukung dalam penanganan pasca bencana, baik pada tahap tanggap darurat bencana maupun pemulihan pasca bencana, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Kepulauan Nias, meliputi :
 - a. Terelesaiakannya pembangunan perumahan, pemukiman dan prasarana dasar lingkungan (PSD) secara proporsional dengan target pembangunan dapat dicapai secara keseluruhan;
 - b. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi dan jalan kabupaten di Kepulauan Nias;
 - c. Tersedianya sarana kerja pemerintah, peralatan pendukung mitigasi bencana, sarana san prasarana sistem kehumasan untuk kantor pemda dan forum komunikasi serta terbangunnya kantor dan gedung pemerintahan;
 - d. Terelesaiakannya pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan;
 - e. Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan sarana perekonomian dan promosi pariwisata sehingga tercapai peningkatan persentase wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik.
 - f. Tersusunnya skema permodalan dan penguatan kembali badan koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro di daerah pasca bencana.
2. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, diantaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antar daerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan resiko bencana, dengan sasaran meliputi pada:
 - a. Berkurangnya resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang impleentasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat. Di tingkat nasional kapasitas Bakornas ditingkatkan sebagai badan koordinatif lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu serta melaksanakan penanganan bencana mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan;
 - b. Tercapainya pemantapan teknologi, informasi dan prosedur sistem peringatan dini pada institusi tingkat pusat;
 - c. Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pengembangan dan penguatan kelembagaan dalam prosedur dan operasional sistem deteksi dini baik di tingkat pusat maupun daerah;

- d. Terlaksananya sosialisasi, penyuluhan pencegahan dan pelatihan kesiapsiagaan risiko bencana serta penyelamatan korban bencana di lingkungan sekolah (SD/SMP/SMA) dan masyarakat di daerah pasca dan rawan bencana minimum 2 (dua) kali dalam setahun;
- e. Terlaksananya pelatihan peningkatan kesiapsiagaan Satlak dan Satkorlak daerah serta kader karang taruna dalam penanganan bencana di daerah, terutama daerah-daerah rawan bencana, dan penyediaan kelengkapan standar sarana dan prasarana kebencanaan seperti tenda, dapur umum, perahu karet, sarana medis dan obat-obatan;
- f. Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pedoman penyusunan RTRW berbasis pengurangan resiko bencana didukung informasi peta rawan bencana dengan skala yang sesuai serta penguatan kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di 16 daerah rawan bencana di Indonesia;
- g. Tersusunnya NSPM, pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis pengurangan resiko bencana, serta pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
- h. Tercapainya penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang di pusat dan daerah (BKTRN dan BKPRD), dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai RTR termasuk dalam mengawal penyusunan RTRW berbasis pengurangan resiko bencana, terutama di 16 daerah rawan bencana di Indonesia;

Berdasarkan sasaran-sasaran diatas maka kebijakan dan strategi penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana diarahkan pada:

1. Percepatan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana, yang difokuskan pada percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kepulauan Nias diprioritaskan pada upaya-upaya:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia, pemenuhan pelayanan dasar, dan pengarusutamaan gender;
 - b. Peningkatan, pengembangan, dan penguatan landasan perekonomian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur, perumahan dan permukiman, pengelolaan lingkungan, dan penataan ruang wilayah berbasis pengurangan resiko bencana;
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar pelaku pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - e. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah Kabupaten Nias dan Nias Selatan.
2. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dengan peningkatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi serta upaya pendayagunaan rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan program-program sektoral. Arah kebijakan dan strategi tersebut difokuskan pada kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana, dengan kegiatan prioritas meliputi:
 - Meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat dan bersifat koordinatif lintas sektoral;
 - Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta mengembangkan sistem (prosedur dan teknologi) peringatan dini (*early warning system*);
 - Memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan;
 - Mengurangi cakupan luasan dan dampak resiko bencana.

- b. Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana, dengan kegiatan prioritas meliputi:
 - Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan bencana di daerah-daerah yang rawan bencana;
 - Peningkatan kapasitas aparatur pemda dalam usaha mitigasi bencana;
 - Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mampu memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana;
 - Penerapan sistem deteksi dini (*early warning system*) dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat.
- c. Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana, dengan kegiatan prioritas meliputi:
 - Konsolidasi dan penyediaan informasi dan data spasial rawan bencana;
 - Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis pengurangan resiko bencana;
 - Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.

VI.3.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten Nias 2006-2011 adalah : **'Mewujudkan Nias Baru yang Maju, Beriman, Mandiri dan Sejahtera'**

Sedangkan visi dan misi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Kabupaten Nias adalah : **"Membangun Nias Lebih Baik"**

Berdasarkan visi misi tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan pokok [*Grand Policies*] Kabupaten Nias 2006-2011 yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber tertinggi dalam penataan kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama melalui jalur pendidikan formal dan non-formal
 - b. Peningkatan dukungan terhadap lembaga-lembaga keagamaan
 - c. Peningkatan dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana peribadatan
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mewujudkan kehidupan berpemerintahan yang baik [*good governance*] dan berpemerintahan yang bersih [*clean government*] melalui kebijakan, sikap, tindakan dan perilaku pemerintahan dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan tata laksana administrasi dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif

- b. Optimalisasi pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, jujur dan bertanggungjawab
 - c. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan melekat
3. Mendorong penegakan hukum secara konsisten, meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat serta pemberantasan KKN, dengan arah kebijakan :
 - a. Penegakkan supremasi hukum yang mampu memberi kepastian, ketertiban, perlindungan hukum pada masyarakat serta menghargai hak asasi manusia
 - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama fungsional antara instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif, memiliki etos kerja serta mampu berkompetensi dalam ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi melalui pendidikan formal dan informal dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan dan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Nias
 - d. Peningkatan kondisi yang kondusif, memungkinkan berbagai pihak berperan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan
5. Membangun fondasi perekonomian daerah melalui akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal melalui sarana dan prasarana/infrastruktur daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antar wilayah dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan infrastruktur khususnya transportasi darat, laut dan udara, baik dalam membuka keterisoliran wilayah maupun untuk menjangkau basis-basis sumber daya ekonomi yang potensial
 - b. Penyedia sarana dan prasarana produksi, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas
 - c. Pengembangan sistem pemasaran dan promosi perdagangan melalui penguatan kelembagaan dan sistem informasi pasar
 - d. Pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi serta peningkatan peran lembaga keuangan mikro
6. Mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penataan organisasi perangkat daerah, pembenahan manajemen kepegawaian dan pembinaan aparatur dengan mengoptimalkan keberadaan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani dengan arah kebijakan:
 - a. Reorganisasi, restrukturisasi dan revitalisasi struktur dan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan daerah dengan prinsip ramping struktur, kaya fungsi dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
 - b. Peningkatan fungsi dan peran kelembagaan daerah baik legislatif, maupun eksekutif yang efektif dan efisien
 - c. Peningkatan daya guna kelembagaan dan ketatalaksanaan aparatur pemerintah daerah
 - d. Pengembangan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah
7. Membina hubungan kerjasama dan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak termasuk lembaga legislatif, lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi

kemasyarakatan [lokal, regional, nasional] dan NGO-NGO, dunia usaha dan institusi lainnya guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan arah kebijakan :

- a. Penciptaan hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
 - b. Pemantapan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dari segenap lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - c. Pengembangan kerjasama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi
 - d. Peningkatan koordinasi dengan BRR NAD-Nias dan NGO baik pada masa maupun pasca rehabilitasi dan rekonstruksi
8. Mendorong percepatan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan berdemokrasi dengan arah kebijakan :
- a. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam sertanya terhadap kebijakan publik dan pembangunan
 - b. Peningkatan komunikasi yang cepat dan optimal sebagai akses responsif masyarakat terhadap kebijakan dan informasi pembangunan
 - c. Peningkatan peran Organisasi Sosial Politik, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] dan masyarakat dalam proses demokrasi
 - d. Peningkatan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga paham akan hak dan kewajibannya
9. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu pilar kemandirian daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD
 - b. Peningkatan prasarana dan sarana yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah
 - c. Peningkatan PAD melalui penyertaan modal dan pendirian perusahaan daerah
 - d. Peningkatan peran PNS sebagai warga yang taat membayar pajak dan retribusi daerah
10. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah
 - b. Peningkatan rasa kebangsaan sebagai "Ono Niha" yang memiliki nilai budaya heroik dan menjunjung tinggi kebersamaan
 - c. Pemantapan komunikasi dengan berbagai pihak dan jenjang pemerintahan guna memperkuat keberadaan Kabupaten Nias sebagai sub sistem dan sistem pembanguna nasional
 - d. Pemantapan peran serta berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, strategi pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi yang telah disebutkan di atas adalah:

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
3. Mengembangkan sikap, perilaku dan tindakan aparaturnya untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*

4. Meningkatkan pengawasan kepada aparaturnya Pemerintah Daerah guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
5. Mengembangkan sikap dan perilaku taat hukum
6. Meningkatkan upaya sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Meningkatkan pendidikan dan derajat kesehatan sumber daya manusia Nias
8. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan
9. Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian di berbagai sektor
10. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal
11. Melaksanakan reorganisasi, restrukturisasi dan revitalisasi organisasi perangkat daerah
12. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparaturnya dan kemampuan manajemen aparaturnya Pemerintah Daerah
13. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan
14. Memanfaatkan keberadaan BRR NAD-Nias dan NGO di berbagai sektor
15. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
16. Meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi politik dan kerjasama antar elemen dalam struktur atas dasar kebersamaan, saling menghargai, menghormati dan taat hukum untuk mewujudkan masyarakat madani [*civil society*] yang mendorong terjadinya penyadaran rasa kebangsaan dan peningkatan kualitas berdemokrasi
17. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan daerah lainnya
18. Menjadikan PNS sebagai teladan dalam membayar pajak dan retribusi
19. Melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor sesuai potensi dan nilai-nilai budaya Nias
20. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan

VI.3.3 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nias Selatan 2006-2011 adalah : **"Mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin dalam Kabupaten Nias Selatan yang terus berkembang, maju, mantap dan mandiri"**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, beberapa kebijakan pembangunan jangka menengah dirumuskan, sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nias Selatan 2006-2011 meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan moral, mental dan spiritual aparaturnya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan masyarakat Kabupaten Nias Selatan, sehingga memiliki iman dan takwa yang kokoh kepada Tuhan YME serta menghargai dan menghormati martabat sesama warga masyarakat
2. Mewujudkan aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang bersih dan bebas dari praktek KKN serta mengabdikan sebagai pelayan bagi masyarakat secara profesional, produktif, dan transparan serta manajerial
3. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan sektor yang prioritas seperti: pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain
4. Mengembangkan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi yang berbasis pada potensi sumber daya alam

5. Meningkatkan persatuan dan kesatuan berbasis Budaya Masyarakat Nias Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Meningkatkan kemampuan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab terutama usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan.

Sementara itu, strategi yang dikembangkan meliputi :

1. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya
2. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan
3. Meningkatkan pembangunan daerah
4. Mewujudkan supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik
5. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kehidupan demokrasi

VI.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

VI.4.1 Rencana Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan rekomendasi penataan ruang Rencana Induk Rehabilitasi-Rekonstruksi Nias, identifikasi potensi bencana yang dalam rencana tata ruang dan poin-poin mitigasi bencana dalam UU Penanggulangan Bencana, maka prinsip-prinsip pengembangan wilayah Kepulauan Nias harus mengakomodasi manajemen penanggulangan bencana secara komprehensif, termasuk di dalamnya : pemetaan, pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan, pemulihan dan rehabilitasi bencana.

Beberapa strategi penataan ruang wilayah Kepulauan Nias pasca bencana adalah : ⁶

1. Mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Nias sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias;
2. Membangun kembali⁶ wilayah, kota, kawasan dan lingkungan permukiman yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami sehingga masyarakat dapat segera melakukan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih baik dan aman dari sebelum bencana;
3. Penataan kembali wilayah Nias harus mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma perencanaan yang tepat dengan memasukkan aspek mitigasi terhadap bencana alam dalam rangka meminimalkan resiko dikemudian hari dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasinya;
4. Pengembangan Nias diarahkan untuk menjaga keseimbangan, mendorong perkembangan dan pemerataan antar wilayah serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan memperhatikan aspek lokal terutama keterkaitannya dengan rawan bencana dengan kawasan konservasi dan penyangga yang berfungsi lindung;
5. Rencana pemanfaatan ruang Nias ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan

Berikut dijabarkan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Nias dan Nias Selatan berdasarkan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias 2006-2016 dan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan 2004-2014.

Kabupaten Nias

⁶ Berdasarkan draft RTRW Kabupaten Nias 2006 - 2016

Pengembangan pusat-pusat permukiman atau pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Nias diarahkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antar wilayah seperti:

1. Kawasan Timur dengan pusat pengembangan di Kota Gunungsitoli;
2. Kawasan Utara dengan pusat pengembangan di Kota Lahewa;
3. Kawasan Barat dengan pusat pengembangan di Kota Tetesua;

Ketiga kawasan tersebut telah mewakili masing-masing dari karakteristik wilayah maupun kultur sosial budaya yang ada, seperti Nias Utama, Nias Utara, Nias Tengah dan Nias Barat. Dengan demikian maka Hirarki dan Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan di Kabupaten Nias dapat dibedakan menjadi empat orde, yaitu :

a. *Kota Jenjang I/Orde I (Pusat Pelayanan Utama) yaitu : **Kawasan Perkotaan Gunungsitoli (Dahana, Ononamolo I Lot, Gunungsitoli dan Afia)***

Kota ini merupakan Pusat Pelayanan Utama di Pulau Nias, yaitu : pusat yang bukan hanya melayani wilayah Kabupaten Nias akan tetapi juga melayani wilayah yang lebih luas (Pulau Nias, termasuk di dalamnya Kabupaten Nias Selatan).

Kawasan ini diarahkan sebagai pusat aktifitas utama di Pulau Nias, dengan ciri dan fungsinya adalah :

1. Kota Orde I terletak di jalan provinsi mempunyai fasilitas yang paling lengkap dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada Kota tersebut terdapat kegiatan industri, jasa dan perdagangan skala besar, perbankan, pendidikan setingkat perguruan tinggi, kesehatan setingkat rumah sakit umum dan kegiatan lainnya.
2. Hampir semua kebutuhan dari wilayah sekitarnya dapat dipenuhi misalnya : mengolah bahan baku hasil produksi daerah *Hinterland* menjadi bahan jadi atau setengah jadi dan selanjutnya memasarkannya/ mengeksportnya dan hal ini akan meningkatkan pendapatan unit-unit ekonomi dari wilayah tersebut.
3. Apabila unit-unit ekonomi dari wilayah tersebut memerlukan faktor-faktor produksi seperti modal, mesin dan lain-lain akan dapat disuplai oleh fasilitas di kota orde I tersebut. Kota yang berfungsi seperti ini menurut istilah *Franquis Perroux* disebut *Growth Centre* (pusat pengembangan) dari wilayah sekitarnya atau ada juga yang menyatakannya sebagai kota yang bersifat generatif.

Oleh sebab itu, fungsi dan peranan yang layak diemban oleh pusat pelayanan ini adalah :

- Pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan;
- Pusat Satuan Wilayah Pembangunan II;
- Pusat Perdagangan dan Jasa regional (CBD);
- Pusat Pelayanan Sosial (Pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi, Kesehatan sampai dengan rumah sakit Type B);
- Pusat pengembangan pariwisata;
- Pusat pengembangan transportasi laut dan udara;
- Industri pengolahan bahan baku hasil produksi daerah *Hinterland* menjadi bahan jadi atau setengah jadi.

b. *Kota Jenjang II/Orde II (Pusat Pelayanan Sekunder) yaitu : **Kota Lahewa dan Tetesua.***

Kota Orde II melayani satu atau lebih wilayah kecamatan di Kabupaten Nias, ciri dan fungsinya adalah :

1. Kota Orde Kedua berorientasi ke Kota Orde Pertama yang mempunyai fasilitas kurang lengkap dibanding dengan Orde Pertama. Kota Orde II terletak di jalan

Provinsi. Pada hakekatnya berfungsi untuk menghubungkan kota-kota kecamatan dengan kota kabupaten.

2. Beberapa fasilitas pelayanan yang terdapat di kota ini antara lain pasar, jasa dan perdagangan dan juga jasa pelayanan keuangan seperti perbankan. Jasa lain yang terdapat di kota ini antara lain : pendidikan sampai dengan pendidikan menengah (kadang-kadang suatu perguruan setingkat perguruan tinggi dan akademi), kesehatan (sampai dengan puskesmas plus atau rawat inap).

Fungsi dan peranan pusat pelayanan Lahewa dan Tetesua adalah :

- Pusat pemerintahan kecamatan;
- Pusat satuan wilayah pembangunan;
- Pusat perekonomian, jasa dan perdagangan lingkup pelayanan bagian wilayah;
- Pusat Pelayanan Sosial (Pendidikan sampai dengan pendidikan menengah dan kejuruan, Kesehatan sampai dengan Puskesmas Plus atau rawat inap);
- Pusat pengembangan pariwisata (terutama pengembangan wisata alam, budaya dan minat khusus);
- Pusat pengembangan perikanan dan kelautan;
- Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan (perkebunan kelapa, karet dan coklat)

c. *Kota Jenjang III/Orde III (Pusat Pelayanan Tersier) : **Tetehosi, Dahana Bawolato, Fadoro, Hiliweto Gido, Lolofitu, Fadoro Lauru, Ombolata, Esiwa, Afulu, Silimabanua dan Lolofaoso.***

Kota Orde III merupakan Ibukota Kecamatan induk (sebelum dimekarkan menjadi beberapa kecamatan) yang dikembangkan untuk melayani wilayah kecamatannya. Ciri dan fungsinya adalah :

1. Kota Orde Ketiga (semi kota) berorientasi ke Kota Orde Kedua, yang terletak di jalan propinsi dan jalan kabupaten yang berfungsi menghubungkan kota-kota kecamatan dengan kota kecamatan lainnya atau kota kecamatan dengan pedesaan.
2. Berfungsi sebagai pelayanan langsung jasa distribusi barang-barang kebutuhan pedesaan yang diperolehnya dari kota orde di atasnya. Kota Orde III menyediakan pelayanan dasar seperti faktor produksi untuk pertanian dan barang-barang rumah tangga pedesaan untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Fasilitas yang terdapat di kota ini antara lain adalah pasar kecil (pasar kecamatan) dan fasilitas penyimpanan sementara hasil-hasil pertanian. Disamping itu terdapat fasilitas pendidikan formal dan informal setingkat SLTA dan fasilitas kesehatan setingkat puskesmas.

Fungsi dan peranan kota-kota orde III ini adalah sebagai :

- Pusat pemerintahan kecamatan;
- Pusat perekonomian, jasa dan perdagangan lingkup kecamatan;
- Pusat Pelayanan Sosial (Pendidikan sampai dengan pendidikan menengah, kadang-kadang sampai dengan pendidikan kejuruan, Kesehatan sampai dengan Puskesmas kadang-kadang sampai dengan Puskesmas Plus);
- Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan (perkebunan kelapa, karet dan coklat)

d. *Kota Non Orde : **Holi, Lahagu, Lasara Faga, Hilifadolo, Lawelu, Somolomolo, Lasara Siwalubanua, Nazalou Alo'oa, Dahadano Botombawo,***

Hiliwaele I, Togala Oyo, Hilimbowo Kare, Lukhulase, Hilisalo'o, Sawo dan Sitolubanua.

Kota non orde merupakan Ibukota Kecamatan yang baru dimekarkan (Ibukota Kecamatan Pemekaran). Kota Non Orde dikembangkan untuk melayani wilayah kecamatannya dan desa-desa disekitarnya. Ciri dan fungsinya adalah :

1. Kota Non Orde berorientasi ke Kota Kecamatan Induk (Orde Kedua atau ketiga) yang berfungsi menghubungkan kota-kota kecamatan dengan kota kecamatan lainnya atau kota kecamatan dengan perdesaan.
2. Fasilitas yang terdapat di kota ini sangat minim. Apabila belum memiliki fasilitas umum, maka fasilitas yang perlu dikembangkan pada kota ini antara lain adalah : pendidikan sampai dengan tingkat SLTA dan kesehatan sampai dengan puskesmas.

Sementara itu, fungsi dan peranannya adalah :

- Pusat pemerintahan kecamatan;
- Pusat perekonomian, jasa dan perdagangan lingkup kecamatan;
- Pusat Pelayanan Sosial (Pendidikan sampai dengan pendidikan menengah, Kesehatan sampai dengan Puskesmas);
- Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan (perkebunan kelapa, karet dan coklat)

Sama halnya dengan pusat-pusat pertumbuhan, Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah. Satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias juga diharapkan dapat mewakili masing-masing dari karakteristik wilayah maupun kultur sosial budaya yang ada, seperti Nias Utama, Nias Utara, dan Nias Barat. Dengan demikian maka Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias dapat dibedakan menjadi tiga SWP, yaitu :

1. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Utara, yaitu meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Utara. Pusat SWP yang ditetapkan pada kawasan ini adalah pusat-pusat permukiman yang selama ini sudah menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah utara tersebut, yaitu : Lahewa.
2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Timur, yaitu meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Timur atau sering disebut dengan Nias Utama atau Nias Induk. Pusat SWP yang ditetapkan pada kawasan ini adalah pusat-pusat permukiman yang selama ini sudah menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah Timur tersebut, yaitu : Gunungsitoli.
3. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Barat, yaitu meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Barat. Pusat SWP yang ditetapkan pada kawasan ini adalah pusat-pusat permukiman yang selama ini sudah menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah Barat, yaitu : Sirombu (Tetesua).

Berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan, maka pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Nias, dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Satuan Wilayah Pembangunan I (SWP I) :

Dengan pusat pembangunan di **Lahewa**, meliputi : Kecamatan Lahewa, Lahewa Timur, Afulu, Alasa, Tuhemberua, Sawo, Sitolu Ori, Lotu dan Kecamatan Namohalu Esiwa.

Dalam pengembangan yang akan datang diharapkan peran dan fungsi wilayah ini sebagai:

- a. Kawasan kunjungan wisatawan, dimana kawasan ini mempunyai potensi wisata yang tergolong lengkap, wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus (menyelam, selancar dll);
- b. Penyedia bahan baku dalam pengembangan agroindustri dan industri kecil;
- c. Kawasan budidaya perikanan dan produksi hasil tangkap laut;

2. Satuan Wilayah Pembangunan II (SWP II)

Dengan pusat pengembangan di **Gunungsitoli**, meliputi : Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Kecamatan Boto Muzoi, Kecamatan Hili Serangkai, Kecamatan Gido, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Ulu Gawo dan Kecamatan Bawolato.

Dalam pengembangan dimasa yang akan datang, diharapkan dapat melakukan peran dan fungsi sebagai :

- a. Pusat Pelayanan Utama di Pulau Nias, yang meliputi pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pendidikan, kesehatan permukiman dan transportasi;
- b. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan;
- c. Kawasan pengumpul hasil pertanian dan perkebunan dari daerah belakangnya kemudian didistribusikan ke daerah lain dengan memanfaatkan potensi pelabuhan laut di Gunungsitoli.
- d. Kawasan penyalur kebutuhan primer, sekunder maupun penyediaan fasilitas bagi SWP lainnya.

3. Satuan Wilayah Pembangunan III (SWP III)

Dengan pusat pengembangan **Tetesua** (Kecamatan Sirombu), meliputi : Kecamatan Sirombu, Kecamatan Lahomi, Kecamatan Moi, Kecamatan Mandrehe, Mandrehe Utara, Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o.

Dalam pengembangannya dimasa yang akan datang dapat berperan sebagai:

- a. Pemasok bahan baku untuk kegiatan agroindustri, terutama bahan baku karet, coklat dan kelapa;
- b. Kawasan budidaya perikanan dan produksi hasil tangkap laut;
- c. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan;
- d. Penggerak pembangunan untuk wilayah Kabupaten Nias bagian barat;

Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan, maka diperlukan pengembangan sub-sub SWP yang akan diperankan oleh ibukota-ibukota kecamatan.

Sementara itu, program-program pemanfaatan ruang baik kawasan lindung maupun budidaya di Kabupaten Nias dapat dilihat dari **Tabel VI.4.** dan **Tabel VI.5.** di halaman berikutnya.

Dalam kaitannya dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami, arahan pengembangan wilayah di Kepulauan Nias [Kabupaten Nias dan Nias Selatan] juga selayaknya mengakomodir rekomendasi penataan ruang yang tertulis dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, sebagaimana diuraikan dalam bab IV Rencana Aksi ini. Secara umum, Rencana Induk berfokus kepada arah pengembangan wilayah untuk mengantisipasi terjadinya *tsunami*. Beberapa penyesuaian dalam *draft* RTRW Kabupaten Nias 2006-2016 yang harus dilakukan sesuai dengan masukan Rencana Induk adalah :

1. Pengembangan SWP utara dengan pusat Kecamatan Lahewa diarahkan ke tenggara pada ketinggian di atas 20 m dpl. Kawasan pantai dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas.
2. Pengembangan SWP barat dengan pusat Kecamatan Sirombu diarahkan ke dalam, di atas ketinggian 20 m dpl. Kawasan pantai diarahkan sebagai kawasan pariwisata pantai, pertanian lahan basah, dan perkebunan yang di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas (yang dipersyaratkan disertai ketentuan-ketentuan teknis, misalnya: bangunan tahan gempa atau rumah panggung disertai escape road dan escape hill). Dan apabila masih bisa dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata maka perlu dilakukan suatu tindakan khusus dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan *early warning system*.

Kabupaten Nias Selatan

Mengacu pada draft Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Nias Selatan 2004-2014, disebutkan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Nias Selatan adalah mewujudkan konsep pembangunan *Segitiga Emas Kanise* (bagian dari pengembangan pantai barat Sumatera), yang juga merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Pertimbangan di dalam menentukan struktur ruang yang dituju adalah:

1. Sejarah pengembangan Nias Selatan dan aksesibilitas menuju pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan dari wilayah pengaruhnya
2. Jumlah penduduk yang mendiami wilayah sekitar Pusat Pengembangan tersebut
3. Pemerataan pusat-pusat pelayanan secara berjenjang, mengingat bentuk Kabupaten Nias Selatan yang memiliki jumlah kepulauan sebanyak 104 buah pulau. Dari sebanyak pulau tersebut, 40 % di antaranya belum berpenghuni dan banyak pula di antaranya yang belum memiliki nama.
4. Pembagian Pusat Pengembangan tersebut harus ditunjang dengan pola jaringan jalan yang baik

Struktur tata ruang Kabupaten Nias Selatan direncanakan dibagi menjadi 3 (tiga) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu:

1. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Telukdalam**)
Berpusat di Telukdalam dengan wilayah Kecamatan Telukdalam.
2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Boronadu**)
Berpusat di Boronadu yang meliputi Kecamatan Gomo, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Hibala.
3. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Moale**)
Berpusat di Moale dengan wilayah Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Amandaraya.

Penyesuaian dalam *draft* RTRW Kabupaten Nias Selatan 2004-2014 yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias adalah :

1. SWP-Telukdalam dengan pusat Kecamatan Telukdalam dikembangkan ke arah utara pada ketinggian 20 m dpl. Kawasan pantai dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas.
2. Sementara itu, mengikuti perkembangan wilayah pantai barat Kepulauan Nias, perlu juga diperhatikan arah pengembangan SWP-Moale yang terletak di sebelah barat. Pengembangan ke arah timur ditambah dengan pertimbangan aspek mitigasi bencana dan *early warning system* dalam pengembangan kawasan wisata.

Penentuan fungsi pusat pelayanan didasarkan pada pusat perkembangan serta keadaan dan potensi wilayah pengaruhnya. Fungsi setiap pusat perkembangan di Kabupaten Nias Selatan secara ringkas dapat diuraikan pada **Tabel VI.6.** berikut:

Tabel VI.4
Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Di Kabupaten Nias

No	Kawasan Lindung	Garis Besar Program			Pelaksana
		Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Kawasan Lindung diluar kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan penghutan dan reboisasi, konservasi dan rehabilitasi untuk seluruh kawasan lindung di luar hutan; Penegasan fungsi dan delinasi batas-batas kehutanan; Penetapan perda tentang pengelolaan kawasan huta 	<ul style="list-style-type: none"> Penertiban aktivitas pertanian dan permukiman di kawasan hutan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Program penghijauan Program pengendalian erosi dan konservasi air Program pengolaan hutan bersama masyarakat 	Seluruh kawasan lindung berbentuk hutan Pengembangan SDM dibidang kehutanan; Peninjauan kembali mengenai fungsi dan batas-batas kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Dinas Kehutanan Propinsi Departemen Kehutanan
2.	Kawasan Resapan Air	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan penyuluhan kegiatan yang dapat dikembangkan pada kawasan resapan air Penghutan dan reboisasi kawasan hutan pada kawasan resapan air 	<ul style="list-style-type: none"> Penertiban aktivitas pertanian dan permukiman kawasan resapan air Reboisasi dan penghutan kembali kawasan resapan air yang rusak 	Seluruhnya berbentuk hutan	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Dinas Kehutanan Propinsi Departemen Kehutanan
3.	Kawasan Perlindungan setempat : Sempadan Sungai Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penghijauan dan reboisasi sempadan sungai dan pantai Normalisasi sungai Pembuatan perda tentang pemanfaatan ruang disempadan sungai dan pantai 	<ul style="list-style-type: none"> Penertiban aktivitas pertanian dan permukiman disempadan sungai dan pantai Penghijauan dengan tanaman keras/ tahunan yang memiliki nilai ekonomi; Pembuatan jalur hijau (buffer zone) disempadan sungai dan pantai 	<ul style="list-style-type: none"> Penghijauan seluruh kawasan yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan pantai; Relokasi permukiman yang ada disempadan sungai dan pantai 	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Dinas Kimpraswil
4.	Kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang tindakan yang perlu dilakukan apabila terjadi bencana; Penerapan teknologi bangunan tahan Gempa 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) Membangun bukit-bukit penyelamatan (<i>escape hill</i>) Membangun jalur-jalur penyelamatan (<i>escape road</i>) Membuat sabuk Pohon (<i>buffer zone</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Penghijauan seluruh kawasan berfungsi lindung Relokasi kawasan permukiman yang ada disempadan sungai dan pantai 	Bappeda Kimpraswil Dinas Kehutanan dan Pertanian

Sumber : draft Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW] Kabupaten Nias 2006-2016

Tabel VI.5
Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Di Kabupaten Nias

No.	Kawasan Budidaya	Garis Besar Program			Pelaksana
		Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Kawasan Hutan produksi terbatas	Sosialisasi dan penyuluhan kegiatan penghutan dan reboisasi, konservasi dan rehabilitasi seluruh kawasan hutan produksi terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan pada seluruh kawasan hutan produksi terbatas yang rusak ▪ Program penghijauan ▪ Program pengendalian erosi dan konservasi air ▪ Program pengelolaan hutan bersama rakyat 	Rehabilitasi hutan dan lahan pada seluruh kawasan hutan yang rusak	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias
2.	Kawasan hutan produksi tetap	Pemetaan tata batas hutan Sosialisasi batas hutan	Peremajaan hutan produksi tetap	Peremajaan hutan produksi tetap	Dinas Pertanian dan Kehutanan
3.	Kawasan hutan lain (hutan kota dan hutan rakyat)	Sosialisasi hutan kota	Penghijauan hutan kota Intensifikasi hutan rakyat	Pengendalian hutan kota dan hutan rakyat	Dinas Pertanian dan Kehutanan
4.	Kawasan pertanian				
	Pertanian lahan basah	Intensifikasi	Ekstensifikasi	Pembangunan prasarana pengairan	Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kimpraswil
	Pertanian lahan kering	Intensifikasi Penelitian diversifikasi komoditi	Pengembangan produksi pasca panen	Pengembangan industri yang bertumpu pada pertanian Pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	Budidaya ternak	Intensifikasi Penelitian diversifikasi komoditi Peternakan babi dan unggas	Pengembangan produksi pasca panen Pengembangan pakan ternak	Pengembangan industri yang bertumpu pada pertanian Pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Perikanan	Intensifikasi Penelitian diversifikasi komoditi Perikanan	Pembangunan sarana dan prasarana perikanan Pengembangan pemasaran	Pengolahan produk pasca panen Pembangunan industri pengalengan ikan	Dinas Perikanan dan kelautan
5.	Kawasan permukiman	Sosialisasi rencana tata ruang Sosialisasi perizinan membangun	Penyusunan zoning regulation kawasan permukiman	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan permukiman	Dinas Kimpraswil

Sumber : draft Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW] Kabupaten Nias 2006-2016

Tabel VI.6
Fungsi Pusat-Pusat Perkembangan Kabupaten Nias Selatan

Sudut Kawasan Pengembangan Pembangunan	Fungsi
Telukdalam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pemerintahan kabupaten ▪ Perekonomian, jasa, perdagangan ▪ Pusat kegiatan Pariwisata Budaya dan Bahari ▪ Pendidikan dan Kesehatan dengan tingkat pelayanan Rumah Sakit Umum ▪ Pertanian, berupa tanaman pangan ▪ Perhubungan laut yakni Pelabuhan Telukdalam ▪ Perhubungan udara yakni Bandar Udara Internasional Botohilitano ▪ Pusat pelayanan sosial lainnya
Boronadu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Sejarah Masyarakat Nias ▪ Pemerintahan Kecamatan ▪ Pendidikan teknologi informasi ▪ Kesehatan, sampai dengan tingkat pelayanan puskesmas ▪ Pertanian, berupa tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, dan perkebunan karet ▪ Industri kecil ▪ Pariwisata peninggalan sejarah ▪ Pusat pelayanan sosial lainnya
Moale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pariwisata Pemandangan Alam ▪ Pemerintahan Kecamatan ▪ Pendidikan teknologi bangunan ▪ Kesehatan, sampai dengan tingkat pelayanan puskesmas ▪ Pertanian, berupa tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan karet ▪ Industri kecil ▪ Pusat pelayanan sosial lainnya

Sumber: draft RTRW Kabupaten Nias Selatan 2004-2014

VI.4.2 Rencana Pengembangan Potensi Daerah

Kabupaten Nias

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Nias hingga tahun 2011 diproyeksikan sebesar 1,8% per tahun dengan jumlah hampir mencapai 500.000 jiwa pada tahun 2011. Perlu perbaikan pola pemberdayaan masyarakat dengan ditunjang pengalokasian dana yang cukup besar untuk mencapai target disparitas kemiskinan di angka 10% pada akhir tahun 2011 dan angka beban tanggungan keluarga yang menurun menjadi 50%.

Rata-rata pertumbuhan sektor PDRB atas dasar harga berlaku untuk sektor-sektor unggulan hingga tahun 2011 antara lain : Pertanian [5,62%], Perdagangan, hotel dan restoran [25%], dan Jasa-jasa [20%].

Sumber pendapatan daerah dalam kurun waktu 2003-2004 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum [DAU]. Sementara itu, beberapa komponen penerimaan daerah pada periode anggaran 2001-2004 yang dapat diidentifikasi adalah : sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu, Pendapatan Asli Daerah [PAD], Dana Perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Bentuk-bentuk pendapatan baru yang potensial dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan daerah hanya berasal dari PAD, semisal : pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak pemanfaatan air bawah tanah [ABT] dan air permukaan, pajak pengambilan dan pengolahan BBG "C", kompensasi perbaikan lingkungan bagi pemilik usaha perbengkelan dan industri pengolahan, pelelangan ikan

dan izin usaha penangkapan di perairan Nias. Diperkirakan bila terjadi optimalisasi sumber-sumber pendapatan baru, amaka penerimaan dari PAD akan mampu ditingkatkan hingga 20% per tahun. Hal ini perlu juga didukung regulasi.

Krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan akan pentingnya kekuatan ekonomi lokal yang bertumpu pada sumber daya lokal yang dimiliki. Beberapa sektor ekonomi lokal yang dapat dikembangkan antara lain : perkoperasian, pariwisata dengan perbaikan akses transportasi dan informasi, dan penyediaan jaringan energi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan umum anggaran Kabupaten Nias secara lengkap dapat dilihat pada tabel **VI.9**, di halaman berikutnya.

Program pembangunan daerah Kabupaten Nias untuk jangka waktu 2006-2011 terbagi atas tiga bagian :

1. Program sektoral/program SKPD

Program sektoral terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diamanatkan dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun urusan wajib meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga bencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah [KUKM], penanaman modal daerah, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan komunikasi dan informatika.

Sementara urusan pilihan meliputi : pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Dalam rangka pembangunan pasca gempa, fokus diberikan pada urusan wajib:

- a. Kesehatan, antara lain dengan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- b. Pekerjaan umum, antara lain dengan program pembangunan jalan dan jembatan, tanggap darurat jalan dan jembatan, dan pengendalian banjir
- c. Perumahan, antara lain dengan program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
- d. Penataan ruang, dengan program perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- e. Perhubungan, antara lain dengan program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- f. Lingkungan hidup, antara lain dengan program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pada perekonomian daerah Kabupaten Nias, sebagaimana diuraikan dalam komposisi PDRB di atas, terdapat dua sektor lapangan usaha yang cukup potensial dan memberi andil besar dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Nias. Kedua sektor tersebut adalah sektor Pertanian/ perikanan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Berdasarkan kenyataan tersebut maka tidaklah berlebihan jika kedua sektor tersebut diprioritaskan dan diberi perhatian yang lebih, namun tentunya tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya.

Prioritas terhadap kedua sektor ini penting bukan hanya karena peranan yang signifikan yang diberikan oleh kedua sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Nias, tapi juga pentingnya peranan sektor tersebut dalam penyediaan lapangan kerja (atau besarnya jumlah penduduk Nias yang bekerja pada kedua sektor tersebut). Dengan pertimbangan tersebut maka kita dapat mengharapkan akan terjadi peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk Nias seiring pertumbuhan kedua sektor tersebut.

Adapun prioritas strategi pembangunan ekonomi sektoral untuk pertanian, peternakan dan perkebunan dibagi per wilayah di Kabupaten Nias⁷ dapat dilihat pada tabel VI.7. berikut ini.

Tabel VI.7.
Prioritas Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral
(Komoditas dan Sentra Unggulan) di Kabupaten Nias

Sektor	Komoditas	Sentra Daerah Potensial
Pertanian	Beras	Tuhemberua, Gido, Idano Gawo, Alasa, Mandrehe, Sirombu
	Karet	Alasa, Mandrehe, Tuhemberua, Lolofitu Moi, Gunungsitoli
	Kelapa/Kopra	Namohalu Esiwa, Lahewa, Gunungsitoli, Lotu, Idano, Gawo
	Kakao	Alasa, Lahewa
Peternakan	Babi	Gunungsitoli, Idano Gawo, Gido, Tuhemberua;
	Ayam	Gunungsitoli, Gido, Tuhemberua, Mandrehe, Lotu;
	Telur	Gunungsitoli, Mandrehe, Gido
Perikanan	Ikan	Tuhemberua, Lahewa, Gunungsitoli;
	Garam	Gunungsitoli

Sumber : Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI-BRR 2006

Sementara itu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat dirangkum dalam sektor pariwisata, yang memang cukup menonjol di Kepulauan Nias. Pengembangan pariwisata bukan hanya penting untuk meningkatkan pendapatan asli dan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor yang berkaitan lainnya, seperti hotel, restoran dan perdagangan yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat Nias sendiri, tapi juga penting untuk melestarikan budaya dan keindahan alam Nias jika dikelola dengan baik.

Secara umum potensi pariwisata Nias dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: pariwisata alam dan pariwisata budaya atau peninggalan sejarah. Di pariwisata alam, Kabupaten Nias memiliki banyak potensi objek wisata seperti Air Terjun Lahandoi di Kecamatan Alasa yang merupakan obyek wisata yang masih alami. Dari sisi pariwisata budaya, di Kabupaten Nias, Wisata budaya dan peninggalan sejarah seperti *Batu Megalit* di desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi dan rumahrumah adat tradisional serta kesenian tradisional seperti atraksi tari perang dan tarian *maena* juga merupakan kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang dapat di tawarkan untuk wisata budaya.

2. **Program lintas sektoral**, yang meliputi :
 - a. Program pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan
 - b. Program pembukaan daerah terisolir
 - c. Program peningkatan dan pengawasan kinerja aparatur
 - d. Program pengendalian penduduk

⁷ Hasil Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI dan BRR, Desember 2006

3. **Program kewilayahan**, merupakan program yang harus dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi atau dengan instansi vertikal di daerah meliputi :
- Program pencegahan penyebaran flu burung dan penyakit menular yang sangat berbahaya
 - Program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif
 - Program pengembangan agrobisnis wilayah pesisir dan kepulauan
 - Program pengawasan dan pengamanan perairan dan pulau-pulau terluar
 - Program pertukaran pemuda dan pelajar antar kabupaten/kota

Kabupaten Nias Selatan

Program-program pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 terbagi ke dalam delapan bidang : pembangunan wilayah, infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, hukum dan politik, sumber daya manusia, kemasyarakatan dan kebudayaan, agama, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pada Tabel VI.8. disajikan secara terperinci mengenai sektor/komoditas unggulan di Kabupaten Nias Selatan dan sentra-sentra daerah unggulan yang potensial menjadi target prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi sektoral. Dengan didasarkan pada tingkat produksi dan besarnya jumlah rumah tangga yang aktif dalam kegiatan produksi komoditas-komoditas tersebut, maka sentra daerah potensial yang disajikan menunjukkan daerah-daerah (kecamatan) mana di masing-masing kabupaten di Kabupaten Nias Selatan, yang patut mendapat perhatian dan dijadikan pusat pengembangan ekonomi sektoral. ⁸⁾

Tabel VI.8
Prioritas Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral
(Komoditas dan Sentra Unggulan) di Kabupaten Nias Selatan

Sektor	Komoditas	Sentra Daerah Potensial
Pertanian	Beras	Amandraya, Lolowa'u, Gomo, Lahusa
	Karet	Lolowa'u, Amandraya
	Kelapa/kopra	Pulau-pulau Batu, Hibala, Teluk Dalam
	Kakao	Gomo, Lolomatua, Lahusa, Teluk Dalam
Perikanan	Ikan	Pulau-Pulau Batu, Hibala, Lahusa, Lolowa'u
	Garam	Lolowa'u

Sumber: Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI-BRR 2006

Secara umum potensi pariwisata di Kabupaten Nias Selatan dikelompokkan menjadi dua yaitu pariwisata alam dan pariwisata budaya atau peninggalan sejarah. Pariwisata alam di Kabupaten Nias Selatan salah satunya pantai Lagundri dan Sorake di kecamatan Teluk Dalam yang memiliki ombak yang tinggi sehingga cocok untuk olah raga selancar yang merupakan salah satu objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Lebih lanjut, tidak ketinggalan panorama bukit Hilidauru di kecamatan Lolowa'u, serta objek wisata taman laut (*wisata bahari*) di kecamatan Pulau-pulau Batu.

Sementara itu, untuk pariwisata budaya di Kabupaten Nias Selatan, wisata budaya dan peninggalan sejarah seperti *Batu Megalit* di desa Tundrumbaho kecamatan Gomo dan desa Olayama di kecamatan Lolowa'u, rumah adat tradisional di desa Bawomataluo dan

⁸ Hasil Studi Pengembangan Ekonomi Nias, LDFEUI dan BRR, Desember 2006

desa Hiliamaetaniha di kecamatan Teluk Dalam, serta kesenian tradisional seperti atraksi lompat batu (*hombo batu*), atraksi tari perang dan *tari maena*.

Perhatian terhadap sektor pariwisata sangat diperlukan melalui kajian-kajian yang lebih mendalam dan usaha-usaha pengembangan atau pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Nias Selatan. Salah satunya adalah kajian yang menginventarisasi potensi-potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Nias dan usaha-usaha melestarikan kekayaan budaya dan alam Nias.

Dalam rangka pengembangan potensi daerah baik di Kabupaten Nias dan Nias Selatan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan diharapkan menjadi pondasi awal bagi pengembangan potensi daerah selanjutnya. Program pembangunan jangka menengah [2006-2011] Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan kemudian diklasifikasikan berdasarkan 4 pilar rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias untuk melihat kesesuaiannya dengan bidang pembangunan RPJMD. Secara paralel, program-program tersebut juga dibandingkan dengan Rencana Aksi [*Action Plan*] BRR Nias yang sudah terealisasi pada tahun 2005 dan 2006. Hal ini bertujuan untuk memilah, program-program jangka menengah mana yang sudah pernah dilakukan oleh BRR Nias dan mana yang belum, agar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah selanjutnya. Hasil perbandingan ini secara lengkap disertai program-program RPJMD kedua kabupaten dapat dilihat pada tabel **VI.10.** dan **VI.11.**

Tabel VI.9
Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Nias 2006-2011

No.	Uraian Kebijakan	Program	Indikasi	Tahun Pelaksanaan									
				2006	2007	2008	2009	2010	2011				
I	ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN												
I.1.	Mendorong tumbuhkembangnya perekonomian daerah sehingga potensi-potensi sumber penerimaan daerah akan terbuka	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan prasarana dasar perekonomian yang menunjang PAD b. Peningkatan jaminan keamanan berusaha c. Penerapan pemberian izin usaha yang mudah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya pasar, TPI, dan jalan yang memadai b. Terhapusnya pungli c. Tertingkatkannya ketertiban d. Terciptanya pemberian izin satu atap, biaya rendah dan informasi yang pasti 	√	√	√	√	√					
I.2.	Mengoptimalkan realisasi pemungutan PAD melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi serta peningkatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan aparaturnya b. Peningkatan sistem informasi c. Perluasan jangkauan pelayanan d. Penataan birokrasi pemungutan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbinanya aparaturnya pemungut PAD dan pajak lainnya b. Tersedianya informasi yang lengkap dan benar serta cepat c. Bertambahnya jumlah personil pemungut 	√	√	√	√	√					
I.3.	Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial dengan tetap menjaga kelangsungan usaha masyarakat dan kondisi untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian potensi dan peluang sumber PAD baru 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersajinya data potensi serta peluang sumber-sumber PAD yang baru yang potensial dan layak dilakukan 	√	√	√	√						
I.4.	Mempercepat terbitnya regulasi yang baru sehingga sumber-sumber penerimaan yang baru dapat dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan naskah akademis Perda b. Penetapan Perda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersusunnya naskah akademis Perda tentang pemungutan retribusi sumber PAD yang baru b. Ditetapkannya perda tentang pemungutan retribusi sumber PAD yang baru 	√	√								
I.5.	Menerbitkan regulasi yang baru untuk membentuk BUMD khususnya bidang usaha yang potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian potensi dan peluang pendirian BUMD dan atau kemitraan dengan pihak swasta b. Studi kelayakan teknis, ekonomis dan finansial BUMD yang akan didirikan c. Penyusunan Naskah Akademis 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya badan hukum BUMD yang mampu meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 	√	√								

No.	Uraian Kebijakan	Program	Indikasi	Tahun Pelaksanaan					
				2006	2007	2008	2009	2010	2011
		d. Perda pendirian BUMD Penetapan Perda pendirian BUMD							
I.6.	Tidak melakukan pinjaman kepada pihak lain baik melalui penerbitan obligasi maupun pinjaman lainnya	a. Peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah b. Analisis kemampuan pinjaman daerah c. Mengoptimalkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	a. Terciptanya kondisi pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga layak melakukan pinjaman pada jangka menengah berikutnya			√	√	√	
II	KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH								
II.1.	Peningkatan alokasi anggaran belanja publik secara perlahan	a. Pengalokasian anggaran belanja yang minimal terhadap belanja operasional aparatur di setiap instansi b. Menghindari pengalokasian anggaran yang terlalu besar pada pos-pos bantuan kepada instansi vertikal	a. Pada tahun 2010 proporsi belanja publik mencapai 50%		√	√	√	√	√
II.2.	Pengalokasian anggaran yang proporsional pada satuan perangkat kerja daerah sehingga sisa perhitungan anggaran akibat tidak terlaksananya kegiatan dapat diperkecil	a. Reorganisasi satuan kerja perangkat daerah termasuk fungsi, tanggung jawab dan penempatan sumber daya b. Menghindari penumpukan belanja pada salah satu sektor c. Mengupayakan waktu penetapan APBD sesuai ketentuan	a. Menurunnya pendapatan dari pos sisa perhitungan		√	√	√	√	√
II.3.	Pengalokasian anggaran baik dalam bentuk penyertaan modal maupun dana cadangan untuk membentuk BUMD pada bidang usaha yang dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat	a. Pembentukan dana cadangan dan atau dana penyertaan modal	a. Tersedianya dana yang mencukupi untuk mengoperasikan BUMD	√	√	√	√	√	
II.4.	Menghindari penyertaan modal pada usaha yang tidak memberikan keuntungan kepada daerah	a. Meninjau kembali penyertaan modal yang selama ini dilakukan namun tidak pernah memberikan tambahan pendapatan b. Menghentikan penyertaan	a. Adanya PAD dari upaya penyertaan modal yang dilakukan minimal sebesar tingkat suku bunga yang terjadi	√	√	√	√	√	

No.	Uraian Kebijakan	Program	Indikasi	Tahun Pelaksanaan					
				2006	2007	2008	2009	2010	2011
		<p>modal pada bidang usaha yang tidak sehat</p> <p>c. Menarik kembali penyertaan modal yang selama ini telah dilakukan</p>							
II.5.	Memperbesar pengalokasian anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui pola pendampingan sehingga disparitas wilayah dapat diperkecil	<p>a. Menetapkan persentase minimal belanja publik untuk kegiatan pemberdayaan dan pendampingan di wilayah termiskin sebelum penyusunan APBD</p>	<p>a. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui sistem pendampingan di wilayah termiskin</p>		√	√	√	√	

Sumber : RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011

Tabel VI.10
Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi - Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
INFRASTRUKTUR YANG EFEKTIF	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat peningkatan jalan dan jembatan dari ibukota Kabupaten ke ibukota Kecamatan dan antar ibukota Kecamatan 	√						
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun jaringan listrik ▪ Membangun irigasi, sungai dan pengendalian banjir 	√						
	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan sarana perhubungan ke pulau-pulau kecil yang potensial ▪ Mendorong peningkatan pelayanan perhubungan laut dan udara ke dan dari Kabupaten Nias 	√						
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi bandara dan pelabuhan 	√						
	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengeluarkan sertifikat hak milik pada kawasan konservasi seperti sempadan sungai, pantai dan daerah perlindungan lainnya 							
	Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pengembangan jaringan pelayanan dan kualitas layanan para penyedia jasa layanan telekomunikasi ▪ Memastikan adanya sarana telekomunikasi dari pemerintah kabupaten ke kecamatan dan dari setiap kecamatan ke desa-desa di wilayahnya. 	√						
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kerjasama dengan pihak PT Perum Perumahan untuk penyediaan rumah keluarga miskin yang belum tertangani oleh BRR 	√						
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan sarana air minum dan drainase 	√						
	Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat penyusunan RUTR-IKK Kecamatan yang baru ▪ Monitoring dan pengendalian tata ruang yang lebih ketat 							

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
KELEMBAGAAN DAN SOSIAL MASYARAKAT YANG KOKOH	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendekatkan pelayanan pendidikan khususnya pembangunan gedung baru SLTP dan SLTA dengan memperlonggar persyaratan teknis ▪ Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah ▪ Membebaskan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar 	√						
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan khususnya di pusat-pusat wilayah pengembangan ▪ Mempercepat revitalisasi posyandu ▪ Membebaskan keluarga miskin dari biaya pengobatan di Puskesmas, RSUD milik pemerintah daerah 	√						
	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan mulai tahap perencanaan dan pelaksanaan ▪ Mengupayakan pencegahan kepunahan biota langka 							
	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat pengembangan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi 							
	Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong GOW untuk mampu merealisasikan program kerjanya 	√						
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membebaskan segala biaya penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang bagi pasangan usia subur di Puskesmas, RSUD milik Pemerintah Daerah ▪ Memberikan penghargaan kepada laki-laki yang melakukan operasi vasektomi 							
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjamin ketersediaan panti bagi anak yatim piatu akibat bencana ▪ Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembinaan sosial 							

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD II menggunakan tenaga lokal Melindungi tenaga kerja dari Kabupaten Nias sehingga tidak menjadi korban <i>trafficking</i> 						
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan tenaga kerja Bantuan Modal kerja 	√					
	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong lembaga / organisasi sanggar budaya untuk mampu mewujudkan program kerjanya Memberikan penghargaan bagi budayawan yang berdedikasi tinggi dan yang telah berbuat nyata bagi kelestarian budaya Nias 	√					
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelaayan kehidupan beragama 	√					
	Pemuda dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan pertukaran pemuda dan pelajar dengan kabupaten/kota yang memiliki prestasi tinggi di bidang pembinaan pemuda dan olahraga 						
	Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong partai politik untuk senantiasa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Mengupayakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD melalui keterbukaan dan pertemuan yang intensif dan berkala 						
	Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penghematan anggaran aparatur negara tanpa mengabaikan perbaikan tingkat kesejahteraan PNS Mempercepat reformasi birokrasi dan reorganisasi pemerintah daerah Kabupaten Nias. Sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan internal dan eksternal lembaga pelaksana pembangunan. 						
		<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Rehabilitasi bangunan khusus 	√					

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan penerapan <i>the right man, the right place and the right movement</i> ▪ Memastikan pejabat eselon II adalah yang berdisiplin dan berdedikasi selama menjadi PNS ▪ Memberhentikan sementara dari jabatannya bagi PNS yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TIPIKOR ▪ Menyediakan bantuan hukum bagi PNS yang didakwa melakukan TIPIKOR 						
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuka kerjasama program dan kerjasama pembiayaan seluas-luasnya dengan LSM/organisasi untuk melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat di lokasi terisolir 						
	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun kearsipan daerah yang memadai 						
EKONOMI YANG BERSAING	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi kerjasama pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar dari luar daerah 	√					
	Penanaman Modal Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat pelayanan pemberian izin usaha satu atap ▪ Mendorong investor untuk menanamkan modalnya dengan melakukan penyertaan modal daerah 	√					
	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantapkan kerjasama dengan BPS Kabupaten Nias 						
	Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun pusat data dan informasi pembangunan daerah yang berbasis teknologi ▪ Memantapkan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja 						

Sumber : RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 & Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006

Keterangan :

- Cetak biru adalah kegiatan yang telah terealisasi dalam Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006 namun tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011
- Checklist [√] menandakan program yang sudah dilaksanakan oleh BRR Nias

Tabel VI.11
Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi - Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan dalam RPJMD	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
Infrastruktur yang efektif	Infrastruktur	<i>Prasarana Jalan</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan terutama pada kawasan andalan, sentra-sentra hasil produksi dan objek pariwisata Kabupaten Nias Selatan ▪ Meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan, wilayah perbatasan maupun kepulauan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan prasarana jalan ▪ Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana alat-alat berat 						
		<i>Lalu lintas Angkutan Jalan</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan keterpaduan antar kota ▪ Meningkatkan keterjangkauan pelayanan transportasi umum ▪ Meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan darat ▪ Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan darat 	√					
		<i>Transportasi Laut</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pelayanan angkutan laut ▪ Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan transportasi laut ▪ Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana transportasi laut 	√					
		<i>Transportasi Udara (bandara)</i>	√					

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan dalam RPJMD	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kerjasama dengan kecamatan/desa untuk menyusun rencana kesepakatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tata ruang, dan evaluasi ▪ Meningkatkan koordinasi antara kecamatan/desa dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam lembaga penataan ruang ▪ Penyusunan dan sosialisasi norma, standard, pedoman, manual (NSPM) ▪ Penyusunan arahan pengembangan kawasan perbatasan antar kecamatan dan desa-desa di kawasan tertentu ▪ Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ▪ Jaringan pipa air bersih ▪ Pembangunan tempat penampungan air ▪ Normalisasi air bersih ▪ Rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih 	√					
Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan yang kokoh	Pemerintahan, Hukum, dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien, dan berwibawa ▪ Terciptanya Perda yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah 		√				

- Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah Provinsi untuk dapat diimplementasikan dalam Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan
- Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana dalam

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan dalam RPJMD	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
		<p>pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya pemekaran Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan ▪ Terwujudnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ▪ Terciptanya koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ▪ Terwujudnya tapal batas wilayah pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, Wilayah Kecamatan dan Wilayah Desa dan Kelurahan yang permanen ▪ Terwujudnya pemetaan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan 						
	Sumber Daya Manusia	<p>Peningkatan wajib belajar dan pembinaan pendidikan dasar 9 tahun dan pra sekolah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI dan SMP/MTs ▪ Terwujudnya organisasi sekolah di Kabupaten Nias yang lebih demokrasi, efisien, terpercaya, dan mendorong partisipasi masyarakat ▪ Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah, masyarakat, dengan pembentukan komite di seluruh SD, MI, dan SMP serta MTs ▪ Meningkatkan mutu pendidikan 						
	Kemasyarakatan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat harmonisasi dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat ▪ Peningkatan kerukunan antar kelompok dan golongan masyarakat ▪ Mencegah terjadinya konflik antar kelompok dan golongan masyarakat 						

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan dalam RPJMD	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kelembagaan (Bantuan Gedung Kursus Wanita) ▪ Pengelolaan keragaman situs budaya dan rumah adat ▪ Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak ▪ Pembangunan panti asuhan 	√ √ √ √						
	Agama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama melalui pembinaan, pengajaran, penyuluhan oleh pimpinan agama ▪ Peningkatan upaya pelaksanaan toleransi antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah ▪ Penerbitan buku-buku pendukung pembelajaran agama ▪ Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidikan bidang agama ▪ Perwujudan Daerah Nias Selatan menjadi daerah yang agamis ▪ Membantu pembangunan sarana ibadah ▪ Membantu kegiatan pembinaan keagamaan ▪ Menciptakan kerjasama dengan pihak-pihak dalam pembangunan sarana dan prasarana keagamaan 	√ √						
	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terinventarisirnya potensi SDA dan lingkungan hidup ▪ Terkendalinya kawasan ekosistem yang rawan kerusakan ▪ Meningkatnya akses informasi SDA dan lingkungan hidup kepada masyarakat ▪ Tersusunnya rencana pengelolaan SDA secara berkelanjutan ▪ Meningkatnya kegiatan pengelolaan dan perlindungan SDA ▪ Peningkatan penghijauan melalui kegiatan reboisasi ▪ Tersedianya fasilitas pengolahan limbah 	√						

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan dalam RPJMD	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
		<p>seperti teknologi produksi bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup ▪ Meningkatnya kemampuan daerah dalam pengelolaan SDA ▪ Menurunnya aktivitas pelanggaran hukum terhadap SDA dan lingkungan hidup ▪ Terkendalinya pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) ▪ Terkendalinya kerusakan ekosistem hutan, terumbu karang, mangrove, pantai, pesisir, dan laut ▪ Meningkatnya konservasi dan pemanfaatan lahan kritis ▪ Meningkatkan pengendalian sampah kota ▪ Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup ▪ Tersedianya Perda Kabupaten Nias Selatan tentang pengelolaan lingkungan hidup ▪ Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan ▪ Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kuantitas aparatur pengelola lingkungan hidup 						
Ekonomi yang bersaing	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan struktur ekonomi Nias Selatan yang berbasis pertanian masyarakat melalui diversifikasi produk, peningkatan mutu dan produktivitas ▪ Pengembangan hasil-hasil pertanian yang berorientasi pasar ▪ Pengembangan produk olahan (agro industri) untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi daerah ▪ Pengembangan balai penyuluhan (BPP) untuk menjamin produk lokal regional maupun pasar ekspor dengan sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan ▪ Meningkatkan pengawasan mutu pupuk 	√					

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan dalam RPJMD	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
		pestisida dan bahan-bahan pertanian lainnya ▪ Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian lapangan dalam jumlah dan mutu serta memnuhi standar kualifikasi dan kompetensi ▪ Meningkatkan publikasi metode-metode maupun paket-paket usaha pertanian yang dikeluarkan oleh balai penyuluhan ▪ Bantuan modal kerja industri rumah tangga ▪ Pengadaan peralatan tangkap ikan ▪ Pembentukan kelompok nelayan ▪ Pengadaan peternakan	√						

Sumber : RPJMD Nias Selatan 2006-2011 & Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006

Keterangan:

- Cetak biru adalah kegiatan yang telah terealisasi dalam Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006, namun tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan
- Checklist [√] menandakan program yang sudah dilaksanakan oleh BRR Nias



Republik Indonesia

LAMPIRAN

**Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias,
Provinsi Sumatera Utara, Pasca Gempa 28 Maret 2005,
Tahun 2007-2009**

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Mei 2007

**REKAPITULASI PEMETAAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 28 MARET 2005
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 - 2009**

PILAR	Program Utama	ON BUDGET				OFF BUDGET			Keterangan
		2005/2006 (Realisasi)	2007 (Sedang Berjalan)	Total s/d 2007	2008/2009 (rencana)	2005/2006 (Realisasi)	Total s.d 2007	2008/2009 (rencana)	
		(Ribu Rp)	(Ribu Rp)	(Ribu Rp)	(Ribu Rp)	(Ribu Rp)	(Ribu Rp)	(Ribu Rp)	
KABUPATEN NIAS									
Infrastruktur		460.122.851	415.658.643	875.781.494	1.520.031.332	87.139.791	32.935.716	825.188.672	Sumber Dana APBD Provinsi Tahun 2008 Rp 83.7 miliar
	Jalan dan Infrastruktur	298.520.201	336.669.439		1.441.711.500	84.013.785	6.421.797		
	Energi & Telekomunikasi	27.309.020	28.299.766	55.608.786		32.309.894	390.006	1.726.758	
	Infrastruktur & SDA	134.293.630	50.689.438	184.983.068	46.009.938	2.736.000	11.047.887		
Perumahan dan Pemukiman		279.788.842	103.103.925	382.892.767	101.250.000	248.722.254	207.341.406	27.050.384	Sumber Dana APBD Kab/Kota Tahun 2008 Nias : Rp 1.5 triliun NiSel: Rp 363 miliar
	Perumahan	254.904.560	92.722.325	347.626.885	73.000.000	113.358.015	157.887.693		
	Air dan Sanitasi	24.884.282	10.381.600	35.265.882	28.250.000	135.364.239	49.453.713		
Kelembagaan Dan Sosial Kemasyarakatan		150.009.253	153.825.418	303.834.670	260.099.875	154.267.063	259.672.806	596.555.617	Nias : Rp 1.5 triliun NiSel: Rp 363 miliar
	Pemerintahan	25.791.359	47.978.194	73.769.553	50.085.000	1.521.567	73.354.158		
	Pendidikan	55.541.227	61.097.229	116.638.456	126.905.000	86.808.569	73.065.200		
	Kesehatan	40.515.094	37.101.000	77.616.094	58.577.800	42.705.209	90.206.663		
	Kebudayaan	28.161.573	7.648.995	35.810.568	22.510.000	23.231.718	540.000		
				0	0				
Pengembangan Ekonomi		41.429.028	37.723.557	79.152.585	55.195.125	55.877.472	102.289.203	240.906.300	Total Rp.2.1 triliun
				0	0		0		
TOTAL NIAS		931.349.974	710.311.542	1.641.661.516	1.936.576.332	546.006.580	626.873.769	1.689.700.973	
KABUPATEN NIAS SELATAN									
Infrastruktur		65.205.237	151.693.040	216.898.278	339.044.879	22.576.833	5.450.670	825.188.672	
	Jalan dan Infrastruktur	51.644.344	125.129.802	176.774.147	277.335.000	22.576.833	5.172.894		
	Energi & Telekomunikasi	5.817.029	1.434.548	7.251.577		0	277.776		
	Infrastruktur & SDA	7.743.864	25.128.690	32.872.534	61.709.879	0	0		
Perumahan dan Pemukiman		157.140.295	140.064.125	297.204.420	97.516.650	94.098.276	119.697.183	27.050.384	
	Perumahan	151.375.026	125.452.325	276.827.351	73.266.650	66.801.006	95.401.404		
	Air dan Sanitasi	5.765.269	14.611.800	20.377.069	24.250.000	27.297.270	24.295.779		
Kelembagaan Dan Sosial Kemasyarakatan		42.978.985	182.522.026	225.501.011	323.386.075	49.720.369	408.346.830	596.555.617	
	Pemerintahan	4.923.398	10.125.366	15.048.764	37.170.000	3.817.278	305.757.027		
	Pendidikan	23.469.682	139.763.543	163.233.225	91.942.000	25.352.587	58.037.897		
	Kesehatan	3.665.626	29.501.585	33.167.211	64.084.000	8.202.873	36.625.743		
	Kebudayaan	10.920.278	3.131.532	14.051.810	128.168.000	12.347.631	5.904.088		
Pengembangan Ekonomi		821.479	26.130.440	26.951.919	78.657.325	18.484.515	47.966.706	240.906.300	
TOTAL NIAS SELATAN		265.324.518	500.409.631	765.734.149	838.604.929	184.879.993	579.439.314	1.689.700.973	
TOTAL NIAS + NIAS SELATAN		1.196.674.492	1.210.721.174	2.407.395.665	2.775.181.261	730.886.573	1.206.313.083	3.379.401.945	
Total Kebutuhan 2007 - 2009					8.571.617.462				

**Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Nias dan
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Pasca
Gempa 28 Maret 2005, Tahun 2007-2009**

(Bersumber dari Dana BRR ON-Budget)

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009		
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
INFRASTRUKTUR	Jalan dan Transportasi	A. Transportasi Laut dan ASDP	336.669.438.808		1.520.031.332.316		
		A.1. Transportasi Laut			1.441.711.500.000		
		1 Rehabilitasi Pelabuhan Gunungsitoli	25.550.000.000	1	unit		
		2 Rehabilitasi Pelabuhan Lahewa	8.510.000.000	1	unit		
		3 Rehabilitasi Pelabuhan Sirombu	12.850.000.000	1	unit		
		4 Pembangunan Apron Bandara Binaka				7.000.000.000	1 pkt
		5 Pembangunan Terminal Penumpang Bandara Binaka				5.000.000.000	1 pkt
		6 Perbaikan Elevasi dan Overlay Runway Bandara Binaka				14.000.000.000	1 pkt
		7 Perbaikan Shoulder Bandara Binaka				3.000.000.000	1 pkt
		8 Pembangunan Gedung Operasi & Bengkel Bandara Binaka				1.666.000.000	1 pkt
		9 Pembangunan Gedung Genset dan kantin Bandara Binaka				1.330.000.000	1 pkt
		10 Pembangunan Lapangan Parkir Kendaraan Bandara Binaka				5.000.000.000	3 unit
		11 Pembangunan Rumah Dinas Type 70 M2 Bandara Binaka				750.000.000	1 unit
		12 Pemb. Gedung PK - PPK Bandara Binaka				2.000.000.000	1 pkt
		13 Perpanjangan runway Bandara Binaka				25.000.000.000	1 pkt
		14 Pembangunan Landas Pacu / Air Strip di Teluk Dalam				20.000.000.000	
		15 Pengawasan Pembangunan Apron Bandara Binaka				350.000.000	1 pkt
		16 Pengawasan Pembangunan Terminal Penumpang Bandara Binaka				250.000.000	1 pkt
		17 Supervisi Perbaikan Elevasi dan Overlay Runway Bandara Binaka				700.000.000	1 pkt
		18 Supervisi Perbaikan Shoulder Bandara Binaka				150.000.000	1 pkt
		19 Pengawasan Pemb. Gedung Operasi & Bengkel Bandara Binaka				90.000.000	1 pkt
		20 Pengawasan Ruang Genset dan Kantin Bandara Binaka				75.000.000	1 pkt
		21 Pengawasan Pemb. Lapangan Parkir Kendaraan Bandara Binaka				250.000.000	1 pkt
		22 Pengawasan Pemb. Rumah Dinas Type 70 M2 Bandara Binaka				45.000.000	1 unit
		23 Pengawasan Pemb. Gedung PK - PPK Bandara Binaka				99.000.000	1 pkt
		24 Pengawasan Perpanjangan runway Bandara Binaka				750.000.000	1 pkt
		25 Pengawasan Pemb. Air Strip Teluk Dalam				750.000.000	
		26 Rehab Rekonstruksi Pelabuhan Laut Nias				10.000.000.000	1 pkt
		27 Pembangunan Pelabuhan Teluk Dalam (lanjutan TA 2007)				25.000.000.000	1 pkt
		28 Pembangunan Pelabuhan Gunungsitoli (lanjutan TA 2007)				7.000.000.000	1 pkt
		29 Pembangunan Pelabuhan Lahewa (lanjutan TA 2007)				5.000.000.000	1 pkt
		30 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Tello (lanjutan TA 2007)				7.000.000.000	1 pkt
		31 Pembangunan Pelabuhan Sirombu (lanjutan TA 2007)				7.000.000.000	1 pkt
		32 Pengawasan Pelabuhan Teluk Dalam				450.000.000	1 pkt
		33 Pengawasan Pelabuhan Gunungsitoli				1.250.000.000	1 pkt
		34 Pengawasan Pelabuhan Lahewa				350.000.000	1 pkt
35 Pengawasan Pelabuhan Laut P. Tello				250.000.000	2 pkt		
36 Pengawasan Pelabuhan Sirombu				700.000.000			
		A.2. ASDP					
		1 Pengadaan Kapal Ferry Jenis Roro					
		B. Transportasi Udara					
		1 Bandar Udara Binaka	24.465.700.000	1	unit		
		C. Transportasi Darat, Jalan dan Kereta Api					
		C.1. Jalan Nasional dan Propinsi					
		1 Pembangunan Jalan Gunungsitoli - Lahewa - Afulu	18.900.000.000	13	km		
		2 Pembangunan Jalan Miqa - Moi	22.350.000.000	15	km		
		3 Rehabilitasi-Rekonstruksi Jalan Moi-Mandrehe-Sirombu	17.078.139.800	11	km		
		4 Rehab Rekons Jln G. Sitoli-Tuherberua-Lahewa	15.149.456.000	10	km		
		5 Rehab Rekons Jln. Moi-Lolowau-Sirombu	15.922.937.008	11	km		
		6 Rehab Rekons Binaka - Lahusa	13.770.000.000	9	km		
		7 Rehab Rekons Gunungsitoli - Binaka 1	14.917.500.000	10	km		
		8 Rehab Rekons Tuherberua (Sp. Lotu) - Lahewa	14.850.000.000	10	km		
		9 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sp. Awa'ai - Sp. Lotu	10.000.000.000	7	km		
		10 Rehab. Rekonstruksi Jl. Idanogawo - Lahusa	10.000.000.000	7	km		

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		11 Konstruksi jalan gravel (Bakti TNI Pemb. Bid. Sarana dan Prasarana Kep. Nias)	8.187.735.000	12 km		
		12 Pemasangan jembatan Bailey & konstruksi jembatan beton bertulang (Bakti TNI)	16.312.265.000	411 m		
		13 Rehab. Rekons. Jembatan Muzoi Km. 67+690	5.523.000	70 m		
		14 Rehab. Rekons. Jembatan Lafao, Fofola, Mo'awo, Taliwa'a	13.795.000	77 m		
		15 Rehab. Rekons. Jembatan Box Culvert Km. 12 + 800 dan Km. 15 + 170 Desa Humene	2.600.000	19 m		
		16 Rehab. Rekons. Jembatan Km. 39 Kec. Idonogawo	4.000.000.000	30 m		
		17 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sp.Awa'ai km 12- Sp. Lotu Km17 (Mullyears)			15.000.000.000	1 pkt
		18 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lotu km 4 - Lahewa km 21 (Mullyears)			33.000.000.000	1 pkt
		19 Rehab. Rekonstruksi Jl. Idonogawo - Lahusa (Mullyears)			10.000.000.000	1 pkt
		20 Rehab. Rekonstruksi Jl. T. Dalam - Amandraya (Mullyears)			10.000.000.000	1 pkt
		21 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lahewa - Afulu			45.000.000.000	22 km
		22 Rehab. Rekonstruksi Jl. Tuhemberua-Lahewa			27.750.000.000	17 km
		23 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lahusa - Teluk Dalam - Lolowa'u			49.500.000.000	30 km
		24 Rehab. Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Amandraya			15.000.000.000	10 km
		25 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sp. Awa'ai - Sp. Lotu			21.750.000.000	13 km
		26 Rehab. Rekonstruksi Jl. Binaka - Idonogawo - Lahusa			20.000.000.000	10 km
		27 Rehab. Rekonstruksi Jl. Tuhemberua - Sawo (Hotmix)			30.000.000.000	19 km
		28 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sawo - Simp. Lotu			24.000.000.000	15 km
		29 Rehab. Rekonstruksi Jl. Tetelesi (Idano Gawo)-Lahusa (widening dan Overlay Hotmix)			50.500.000.000	25 km
		30 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lolowa'u-Sirombu (overlay hotmix)			48.750.000.000	30 km
		31 Rehab. Rekonstruksi Jl. Miga - Lolowa'u (Rusak berat/pembangunan baru)			62.250.000.000	39 km
		32 Rehab. Rekonstruksi Jl. Miga - Moi			30.000.000.000	16 km
		33 Rehab. Rekonstruksi Jl. Alasa - Tumula (pembangunan jalan kabupaten)			33.000.000.000	15 km
		34 Rehab. Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Lolowau			50.000.000.000	30 km
		35 Rehab. Rekonstruksi Jl. Sisarahilloyo - Tuhemberua			24.000.000.000	12 km
		C.2. Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan				
		1 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Sp.Awa'ai - Sp. Lotu (Mullyears)			675.000.000	1 pkt
		2 Rehab. Rekonstruksi Jl. Lotu km 4 - Lahewa km 21 (Mullyears)			1.485.000.000	1 pkt
		3 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Idonogawo - Lahusa (Mullyears)			450.000.000	1 pkt
		4 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. T. Dalam - Amandraya (Mullyears)			450.000.000	1 pkt
		5 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Lahewa - Afulu			2.025.000.000	1 pkt
		6 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Tuhemberua-Lahewa			1.248.750.000	1 pkt
		7 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Lahusa - Teluk Dalam - Lolowa'u			2.227.500.000	1 pkt
		8 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Amandraya			675.000.000	1 pkt
		9 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Sp. Awa'ai - Sp. Lotu			978.750.000	1 pkt
		10 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Binaka - Idonogawo - Lahusa			900.000.000	1 pkt
		11 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Tuhemberua - Sawo (Hotmix)			1.350.000.000	1 pkt
		12 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Sawo - Simp. Lotu			1.080.000.000	1 pkt
		13 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Tetelesi (Idano Gawo)-Lahusa (widening dan Overlay Hotmix)			2.272.500.000	1 pkt
		14 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Lolowa'u-Sirombu (overlay hotmix)			2.193.750.000	1 pkt
		15 Paket Pengawasan Rekonstruksi Jl. Miga - Lolowa'u (Rusak berat/pembangunan baru)			2.801.250.000	1 pkt
		16 Paket Pengawasan Teknik Jalan & Jembatan Kab. Nias Selatan			3.000.000.000	1 pkt
		17 Paket Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Kab. Nias			4.000.000.000	1 pkt
		18 Pengawasan Rehab. Rekonstruksi Jl. Alasa - Tumula (pembangunan jalan kabupaten)			1.485.000.000	1 pkt
		19 Pengawasan Rehab. Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Lolowau			2.250.000.000	1 pkt
		20 Pengawasan Rehab. Rekonstruksi Jl. Sisarahilloyo - Tuhemberua			1.080.000.000	1 pkt
		C.3. Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan				
		1 Perencanaan Jalan Full Design Jalan Propinsi			750.000.000	1 pkt
		2 Perencanaan Jalan Simplified Design			300.000.000	1 pkt
		3 Perencanaan Jalan Kabupaten Kep. Nias			900.000.000	1 pkt
		4 Perencanaan Teknik Jembatan			800.000.000	1 pkt
		5 Perencanaan Teknik Jalan			200.000.000	1 pkt

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		C.4. Pembangunan Jembatan				
		1 Box Culvert Idano Lakha			1.650.000.000	1 pkt
		2 Box Culvert Idano Helera			1.350.000.000	1 pkt
		3 Box Culvert Idano Mau'so			1.425.000.000	1 pkt
		4 Box Culvert Idano Hill'uso			1.350.000.000	1 pkt
		5 Box Culvert Idano Bogarawi			1.350.000.000	1 pkt
		6 Box Culvert Idano Moi			1.500.000.000	1 pkt
		7 Jemb. S. Gido si'ite			7.000.000.000	1 pkt
		8 Jemb. S. Gido Sebu			10.000.000.000	1 pkt
		9 Jemb. S. Gawo			34.000.000.000	1 pkt
		10 Jemb. Batu Buaya			8.000.000.000	1 pkt
		11 Jemb. O'ou			37.000.000.000	1 pkt
		12 Jemb. Eho			10.000.000.000	1 pkt
		13 Jemb. Otua			7.000.000.000	1 pkt
		14 Jemb. S Saruru			6.000.000.000	1 pkt
		15 Jemb. S Nalua			6.000.000.000	1 pkt
		16 Jemb. S Lahomi			12.000.000.000	1 pkt
		17 Jemb. S Sie			5.000.000.000	1 pkt
		18 Jemb. S Muzol			7.000.000.000	1 pkt
		19 Jemb. S Alasa			6.000.000.000	1 pkt
		20 Jemb. S Sa'ual			12.000.000.000	1 pkt
		21 Jemb. S Tumula			10.000.000.000	1 pkt
		C.5. Jalan Kabupaten Nias				
		1 Pemeliharaan periodik jalan ruas Tetehösi - Bozhöna, Kecamatan Idanogawo, Rehabilitasi jalan dalam Kota Gidö, Rehabilitasi Jalan ruas Sogae'adu - Sifaoro'asi Kecamatan Gidö	3.000.000.000	4 km		
		2 Rehabilitasi jalan ruas Hilindruria - Namöhalu Kecamatan Namöhalu, Pemeliharaan Periodik Jalan Ruas Awa'ai - Bogali - Lotu Kecamatan Tuhemberua/ Lotu, Pemeliharaan jalan ruas Sawö - Botombawö Kecamatan Tuhemberua	4.500.000.000	5 km		
		3 Rehabilitasi jalan ruas Pasar Baru Lolömooyo dhi, dimulai dari Bawadasi Kec. Sirombu, Rehabilitasi Peningkatan Jalan Ruas Onolimbu - Lolöwa'u Kecamatan Sirombu				
		4 Pembangunan Jalan Ruas Lolöhia - Lasarafaga Kecamatan Mandrehe	2.250.000.000	3 km		
		5 Peningkatan Jalan Dalam Kota Gunungsitoli				
		6 Peningkatan Jalan Ruas Hilina'a - Alasa Kecamatan Gunungsitoli/Alasa	3.000.000.000	3 km		
		7 Lanjutan Pembangunan Ruas DAO - AFIA Kecamatan Lahewa	2.250.000.000	3 km		
		8 Pembangunan Badan Jalan yang longsor ruas Ono Zalukhu	1.351.170.000	1 km		
		9 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Ruas Dahana - Tumöri Balöhilli + Faekhu + Hiliwöria - Onozikhö Kecamatan Gunungsitoli (Ex Pemutusan Kontrak)	632.500.000	800 m		
		10 Lanjutan Pemb. Jl. Ruas Alo'oa -Nazalou-Namöhalu Esiwa	3.000.000.000	3 km		
		11 Lanjutan Pemb. Jl. Ruas Jalan Kota Gunungsitoli	8.000.000.000	8 km		
		12 Rehab & Rekon. Jalan Lingkar Luar Selatan (SMA plus kantor Bupati Baru)	3.000.000.000	3 km		
		13 Rehab. & Rekonst. Jalan Afia - Simpang Lima-Nazalou	1.054.689.000	1 km		
		14 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lahewa - Afulu via Ono Zalukhu	5.000.000.000	5 km		
		15 Rehab. & Rekonst. Jalan Sawo - Botombawo - Bogali	1.125.000.000	2 km		
		16 Rehab. & Rekonst. Jalan Bogali - Lotu	3.000.000.000	3 km		
		17 Rehab. & Rekonst. Jalan Lafau - Dao - Afia	2.250.000.000	3 km		
		18 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilina'a - Alasa - Tumula	3.000.000.000	3 km		
		19 Rehab. & Rekonst. Jalan Namöhalu - Alasa	1.500.000.000	2 km		
		20 Rehab. & Rekonst. Jalan Muzoi - Banuasibohou II	1.500.000.000	2 km		
		21 Rehab. & Rekonst. Jalan Lolohia - Lasarafaga	2.250.000.000	3 km		
		22 Rehab. & Rekonst. Jalan Gunung Baru - Hillvaele - Gunungtua	1.875.000.000	3 km		
		23 Rehab. & Rekonst. Jalan Tetehösi - Holi - Soliga	1.500.000.000	2 km		
		24 Rehab. & Rekonst. Jalan Hiliweto - Lahemo - Mau	2.250.000.000	3 km		

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		25 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilina'atafu - Siofawall - Tagaule	1.500.000.000	2 km		
		26 Rehab. & Rekonst. Jalan Duria - Sisarahili Ma'u-Lasara Siwalubanua	1.500.000.000	2 km		
		27 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilliiso - Lahagu	1.500.000.000	2 km		
		28 Rehab. & Rekonst. Jalan Botombawo - Boto Muzoi - Ono Nazara	1.875.000.000	3 km		
		29 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Umbu - Bawadesolo-Iraonolase-Hilina'a+Tumori Balohili-Dahana-Faekhu+SMU Sukma Plus-Pertapakan Kantor Bupati.				
		30 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Hilliweto - Lewa-lewa - Hillimbuasi				
		31 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Huno - Gomo				
		32 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Simaeasi - Onolimbu - Sisobandrao				
		33 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Botomuzoi - Lahagu - Doll-doll				
		34 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Alasa - G.Tua-Zuzundrao - Mandrehe				
		35 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Tetehosi - G. Baru-Lasarafaga				
		36 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Zuzundrao - Tetehosi - Tumori - Fadoro Sifulubanua				
		37 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Nazalou - Namohalu				
		38 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Lewa-lewa -Lasara Siwalu Banua-Sifaoro'asi				
		39 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Lauri - Somolo-molo-Holi - Tuhemberua				
		40 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Faekhu - Lalai				
		41 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Hilina'atafu-Siofaewali-Tagaule				
		42 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Duria-Sisarahili Ma'u - Siwalubanua				
		43 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Lologolu-Lawelu.				
		44 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Afia - Iraonolase				
		45 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Tetehosi - Bazihona.				
		46 Penggantian Jembatan Boyo Cs.	3.500.000.000	15 m		
		47 Penggantian Jembatan Teolo Oyo Cs.	3.500.000.000	46 m		
		48 Penggantian Jembatan Idano Mola Cs.	3.000.000.000	36 m		
		49 Penggantian Jembatan Wango Cs.	2.056.451.000	26 m		
		50 Penggantian Jembatan Wango Cs. Jembatan Sawo Kec. Sawo Cs.	913.978.000	5 m		
		51 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Umbu - Bawadesolo-Iraonolase-Hilina'a+Tumori Balohili-Dahana-Faekhu+SMU Sukma Plus-Pertapakan Kantor Bupati.			22.000.000.000	22 km
		52 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Huno - Gomo			23.000.000.000	23 km
		53 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Simaeasi - Onolimbu - Sisobandrao			10.000.000.000	10 km
		54 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Botomuzoi - Lahagu - Doll-doll			20.000.000.000	20 km
		55 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Alasa - G.Tua-Zuzundrao - Mandrehe			22.000.000.000	22 km
		56 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Tetehosi - G. Baru-Lasarafaga			12.000.000.000	12 km
		57 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Zuzundrao - Tetehosi - Tumori - Fadoro Sifulubanua			5.000.000.000	5 km
		58 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Nazalou - Namohalu			15.000.000.000	15 km
		59 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Lewa-lewa -Lasara Siwalu Banua-Sifaoro'asi			12.000.000.000	12 km
		60 Rehab. & rekonst. Jalan Ruas Lauri - Somolo-molo-Holi - Tuhemberua			15.000.000.000	15 km
		61 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Faekhu - Lalai			21.000.000.000	21 km
		62 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Lologolu-Lawelu.			6.000.000.000	6 km
		63 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Afia - Iraonolase			6.000.000.000	6 km
		64 Rehab & rekonst. Jalan Ruas Tetehosi - Bazihona.			6.000.000.000	6 km
		C.6. Jalan dan Jembatan Kab.Nias (Wilayah Utara)				
		1 Rehab. & Rekonst. Jalan Sawo - Botombawo - Bogali			16.000.000.000	16 km
		2 Rehab. & Rekonst. Jalan Bogali - Lotu			3.000.000.000	3 km
		3 Rehab. & Rekonst. Jalan Lafau - Dao - Afia			4.000.000.000	4 km
		4 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilina'a - Alasa - Tumula			22.000.000.000	22 km
		5 Rehab. & Rekonst. Jalan Namohalu - Alasa			20.000.000.000	20 km
		6 Rehab. & Rekonst. Jalan Muzoi - Banuasibohou II			30.000.000.000	30 km
		7 Rehab. & Rekonst. Jalan Lahewa - Afulu via Ono Zalukhu			30.000.000.000	30 km
		C.7. Jalan dan Jembatan Kab. Nias (Wilayah Tengah-Barat)				
		1 Rehab. & Rekonst. Jalan Lolohia - Lasarafaga, Kec. Mandrehe			5.000.000.000	5 km
		2 Rehab. & Rekonst. Jalan Gunung Baru - Hilliwaele - Gunungtua			15.000.000.000	15 km
		C.8. Jalan dan Jembatan Kab. Nias (Wilayah Selatan)				

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKOSNTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		1 Rehab. & Rekonst. Jalan Tetehosi - Holi - Soliga			15.000.000.000	15 km
		2 Rehab. & Rekonst. Jalan Ruas Hilliweto - Lewa-lewa - Hillimbuasi			27.000.000.000	27 km
		3 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilliweto - Lahemo - Mau			2.250.000.000	3 km
		4 Rehab. & Rekonst. Jalan Hillina'atafuo - Siofawall - Tagaule			16.000.000.000	16 km
		5 Rehab. & Rekonst. Jalan Duna - Sisarahili Ma'u-Lasara Siwalubanua			15.000.000.000	15 km
		6 Rehab. & Rekonst. Jalan Hilliuso - Lahagu			1.500.000.000	2 km
		7 Rehab. & Rekonst. Jalan Botombawo - Boto Muzoi - Ono Nazara			15.000.000.000	15 km
		C.9. Jembatan Kab. Nias				
		1 Penggantian Jembatan Boyo Cs.			1.500.000.000	7 m
		2 Penggantian Jembatan Teolo Oyo Cs.			6.500.000.000	84 m
		3 Penggantian Jembatan Idano Mola Cs.			2.000.000.000	24 m
		4 Penggantian Jembatan Wango Cs.			5.030.000.000	64 m
		5 Penggantian Jembatan Sawo Kec. Sawo Cs.			6.000.000.000	35 m
		C.10. Terminal Bus				
		1 Rehabilitasi Terminal Bus Gunungsitoli	2.950.000.000	1 unit		
		2 Pembangunan Terminal Bus Lahewa				
		3 Pembangunan Terminal Bus Sirombu	4.250.000.000	1 unit		
		4 Pengadaan Bus Penumpang (DAMRI)				
		5 Pembangunan Terminal Bus Gunungsitoli (lanjutan TA 2007)			2.000.000.000	1 pkt
		6 Pembangunan Terminal Bus Lahewa			5.000.000.000	1 pkt
		7 Pembangunan Terminal Bus Sirombu (lanjutan TA 2007)			1.000.000.000	1 pkt
		8 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail			2.000.000.000	1 pkt
		9 Pengadaan rambu-rambu dan lampu lalu lintas			3.000.000.000	1 pkt
		10 Pengadaan Bus Penumpang (DAMRI)			2.000.000.000	5 unit
		C.11. Konsultan				
		1 Pengawasan Terminal Bus Gunungsitoli (lanjutan TA 2007)			99.000.000	1 pkt
		2 Pengawasan Terminal Bus Lahewa			250.000.000	1 pkt
		3 Pengawasan Terminal Bus Sirombu (lanjutan TA 2007)			75.000.000	1 pkt
		4 Pengawasan Pemasangan Guard Rail			400.000.000	1 pkt
		5 Pengawasan Pemasangan Rambu lalu lintas			150.000.000	1 pkt
		D. Energi dan Kelistrikan	28.299.766.000		32.309.894.316	
		D.1. Provinsi				
		1 Pembangunan Gardu Induk / Distribusi Ranting Gunungsitoli			14.245.604.846	1 pkt
		2 Pembangunan Gardu Induk / Distribusi Ranting Teluk Dalam			12.194.289.470	1 pkt
		3 Pengadaan MDU Ranting Gunungsitoli	668.772.000	26 km		
		4 Pemasangan HUTM 20 kV 70 mm ²	4.851.024.000	20 km		
		5 Pemasangan Trafo Distribusi 25 kVA	1.350.908.000	20 set		
		6 Pemasangan HUTR numpang 3 x 35 + 1 x 25 mm ²	605.590.000	14 km		
		7 Pemasangan HUTR khusus 3 x 35 + 1 x 25 mm ²	8.384.472.000	40 km		
		8 Rehabilitasi HUTM 20 kV Feeder GS 04	8.300.000.000	50 km		
		9 Pembangunan Gardu Induk / Distribusi Ranting Gunungsitoli				
		E. Telekomunikasi				
		1 Pembangunan Kantor Pos Hilliweto	560.000.000	1 unit		
		2 Pembangunan Kantor Pos Tetehosi	560.000.000	1 unit		
		3 Pembangunan Kantor Pos Tuhemberua	560.000.000	1 unit		
		4 Pembangunan Gedung Meteorologi dan Geofisika	1.899.000.000	1 unit		
		5 Pembangunan Gedung Kantor Pos Tetehosi/Idanogawo	560.000.000	1 unit		
		6 Pembangunan Gedung Kantor Pos Alasa			500.000.000	1 pkt
		7 Pembangunan Gedung Kantor Pos Lotu			500.000.000	1 pkt
		8 Pembangunan Gedung Kantor Pos Mandrehe			500.000.000	1 pkt
		9 Pembangunan Gedung Kantor Pos Gunungsitoli Selatan			500.000.000	1 pkt
		10 Pembangunan Gedung Kantor Pos Namohalu Esiwa			500.000.000	1 pkt
		11 Pembangunan Gedung Kantor Pos Hilliduhu			500.000.000	1 pkt
		E.1. Konsultan				

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007			2008/2009				
			Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume			
		1					15.000.000	1	pkt	
		2					15.000.000	1	pkt	
		3					15.000.000	1	pkt	
		4					15.000.000	1	pkt	
		5					15.000.000	1	pkt	
		6					15.000.000	1	pkt	
		7					35.000.000	1	pkt	
		8					35.000.000	1	pkt	
		9					35.000.000	1	pkt	
		10					35.000.000	1	pkt	
		11					35.000.000	1	pkt	
		12					35.000.000	1	pkt	
		E.2. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi								
		1								
		2					120.000.000	1	pkt	
		3					275.000.000	1	pkt	
		4					350.000.000	1	pkt	
		5					400.000.000	1	pkt	
		6					1.000.000.000	1	pkt	
		E.3. Konsultan								
		1					350.000.000	1	pkt	
							75.000.000	1	pkt	
		F. Sumberdaya Air			50.689.437.920			46.009.938.000		
		F.1. Irigasi								
		1			5.613.714.100	1.258	ha			
		2			3.944.094.000	276	ha			
		3			2.138.332.620	185	ha			
		4			2.631.617.000	250	ha			
		5			4.414.180.000	300	ha			
		6			1.556.793.000	70	ha			
		7			1.034.804.000	60	ha			
		8			399.000.000	150	ha			
		9			956.400.000	75	ha			
		10			2.127.770.000	1	pkt			
		11			1.179.953.000	262	ha			
		12			836.949.000	259	ha			
		13			1.188.063.000	370	ha			
		14			433.663.000	420	ha			
		15			1.439.900.000	250	ha			
		16			713.400.000	40	ha			
		17			1.390.120.000	200	ha			
		18						1.481.480.000	100	Ha
		19						8.000.000.000	400	Ha
		20						4.208.808.000	70	Ha
		21						4.530.036.000	150	Ha
		22						1.842.354.000	130	Ha
		23						3.442.079.000	153	Ha
		24						2.092.870.000	70	Ha
		25						2.074.820.000	78	Ha
		26						2.733.273.000	150	Ha
		27						1.604.218.000	100	Ha
		F.2. Sungai dan Pengendalian Banjir								
		1			1.625.328.000	1	pkt			
		2			1.407.423.000	1	pkt			
		3			974.585.000	1	pkt			

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009		
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		4 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Gido Zebua	1.088.954.000	1	pkt		
		5 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Solagasi	1.286.647.400	1	pkt		
		6 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Moi	860.354.000	1	pkt		
		7 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Sui	880.931.000	1	pkt		
		8 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Muzoi Hulu	975.348.000	1	pkt		
		9 Normalisasi sungai dan Perkuatan Tebing sungai Bobatalu	986.579.800	1	pkt		
		10 Normalisasi Sungai Kabupaten Nias					
		F.3. Pengamanan Pantai					
		1 Pengamanan Pantai Gunungsitoli	7.584.000.000	1	pkt		
		2 Pengamanan Pantai Moawo	1.020.535.000	1	pkt		
		3 Normalisasi Sungai Nou				5.000.000.000	1 pkt
		4 Normalisasi Sungai di kab. Nias				1.500.000.000	1 pkt
		5 Pengamanan pantai di Gunungsitoli/Moawo				7.500.000.000	1 pkt
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perumahan & Permukiman	A. Perumahan dan Permukiman	92.722.325.000			73.000.000.000	
		A.1. Perumahan dan Permukiman Nias					
		1 Rekonstruksi	79.450.000.000	1.215	Unit		
		2 Rehabilitasi	800.000.000	100	Unit		
		3 Merancang Masa Depan Desa (KRRP)	430.000.000	1	pkt		
		4 Pembangunan Rumah				52.000.000.000	1.000 unit
		5 Rehabilitasi Rumah				12.000.000.000	1.500 unit
		6 Pembangunan Prasarana				5.000.000.000	1.000 unit
		7 Konsultan Pengawasan (pembangunan rumah)				2.000.000.000	1 pkt
		8 Konsultan pendamping/Fasilitator				2.000.000.000	1 pkt
KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA	Kepemerintahan	A.2. Pembuatan Sertifikat Tanah Kab. Nias					
		1 Pengadaan tanah	5.250.000.000	3	pkt		
		2 Peralatan & gedung kantor pertanahan	1.400.000.000	2	pkt		
		3 Sertifikasi tanah permukiman	2.652.325.000	5.000	bidang		
		4 Peralatan pengukuran dan pemetaan	2.740.000.000	6	unit		
		D. Air Minum dan Sanitasi	10.381.600.000			28.250.000.000	
		D.1. Air Minum					
		1 Jembatan Pipa Idanoi CS(GTZ)	1.329.000.000	1	sist		
		2 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Kec. Mandrehe	1.400.000.000	1	sist		
		3 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Desa Fadoro Hunogoa, Kec. Hilli Serangkai	1.000.000.000	1	sist		
		4 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Dusun I Tetehosi Desa Ombolata Kec. Alasa	1.500.000.000	1	sist		
		5 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Desa Hilhiao dan Sisarahlili, Kec. Gunungsitoli	500.000.000	1	sist		
		6 Pengadaan rumah pompa dan genset Desa Holi	145.600.000	1	sist		
		7 Pemb. Sistem Air Minum Kota Gunungsitoli				8.000.000.000	1 pkt
		8 Pemb. Sistem Jaringan Air Minum 9 Kecamatan Kab. Nias				15.000.000.000	6 pkt
		D.2. Persampahan					
		1 Pengadaan Amrol & Dump Truk Sampah berikut landasannya Kota Gunungsitoli	1.507.000.000	7	unit		
		2 Pengadaan Dump Truk, Armroll, container & landasan untuk Kota Gunungsitoli, Kec. Lahewa, Gido, Idanoqawc				1.500.000.000	1 pkt
		D.3. Drainase					
		1 Normalisasi/Rehab Saluran Drainase Gsitoli					
		2 Pembangunan Sist. Drainase Lotu	1.500.000.000	945	m		
		3 Pembangunan Sist. Drainase Gido	750.000.000	650	m		
		4 Pembangunan Sistim Drainse Lolowa'u	750.000.000	945	m		
		5 Pembangunan Sistem Drainase Kota Gunungsitoli				3.000.000.000	1 pkt
		6 Pembangunan Sistim Drainse Gido				750.000.000	1 pkt
		A. Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan	47.978.194.000			52.087.000.000	
		A.1. Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah					
		1 Pembangunan Kantor Dinas & kecamatan kab. Nias, Kelurahan	3.124.423.000	4	unit		
2 Pemb. Kantor Bupati Nias	12.433.405.000	1	unit				
3 Pemb. Komplek Gedung Kantor DPRD Nias	1.343.347.000	1	unit				
4 Pembangunan Kantor Desa (KRRP)	18.000.000.000	72	unit				

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKOSNTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		5 Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Nias (lanjutan)			18.000.000.000	1 unit
		6 Pembangunan Kantor DPRD Nias (lanjutan TA. 2006)			10.000.000.000	1 unit
		7 Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias			15.000.000.000	15 unit
		A.2. Konsultan				
		1 Pengawasan Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Nias (lanjutan)			810.000.000	1 pkt
		2 Pengawasan Pembangunan Kantor DPRD Nias (lanjutan TA. 2006)			450.000.000	1 pkt
		3 Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias			450.000.000	1 pkt
		4 Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias			675.000.000	1 pkt
		A.3. Rehabilitasi Gedung Negara				
		1 Pembangunan /Renovasi Kantor KORAMIL	2.655.518.000	1 unit		
		2 Rehabilitasi/Pembangunan Gedung KPPN Gunungsitoli	491.466.000	1 unit		
		3 Rehabilitasi/Pembangunan Stasiun RRI, rumah dinas & prasarana lainnya Gunungsitoli	1.032.595.000	4 unit		
		4 Pengadaan peralatan pemancar siaran luar Stasiun RRI Gunungsitoli	1.565.000.000	1 unit		
		5 Pembangunan Kantor BPS Gunungsitoli	1.330.000.000	1 unit		
		6 Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	1.209.000.000	1 unit		
		7 Pembuatan peta digital pasca tsunami			2.002.000.000	1 pkt
		A.4. Rehabilitasi Bangunan / Gedung Khusus				
		1 Pembangunan Gedung & Sarana Operasional LAPAS Gunungsitoli	4.793.440.000	1 unit		
		2 Pembangunan /Renovasi Kantor Koramil			2.400.000.000	1 unit
		3 Pembangunan /Renovasi Kantor Polres			2.000.000.000	1 unit
		A.5. Konsultan				
		1 Pengawasan Pembangunan /Renovasi Kantor Koramil			100.000.000	1 unit
		2 Pengawasan Pembangunan /Renovasi Kantor Polres			200.000.000	2 unit
	Pendidikan**	D. Pembangunan Fasilitas Pendidikan	61.097.228.600		126.905.000.000	
		D.1. Pembangunan dan Rehabilitasi**				
		1 Pembangunan Unit RKB TK	231.481.000	1 sekolah		
		2 Pembangunan Unit RKB SD Kab. Nias	36.824.597.000	81 sekolah		
		3 Pembangunan Unit RKB SMP Kab. Nias	1.771.738.000	3 sekolah		
		4 Pembangunan Unit RKB SMU Kab. Nias	1.421.484.000	3 sekolah		
		5 Pembangunan Unit RKB STT Sunderman	1.820.440.000	1 universitas		
		6 Rehab. & Rekonst. IKIP Gunungsitoli Kec. G.Sitoli	1.600.000	1 unit		
		7 Pembangunan Perpustakaan terpusat	453.600	1 unit		
		8 Pembangunan Laboratorium	4.330.055.000	12 sekolah		
		9 Pembangunan RKB SD			60.000.000.000	120 unit
		10 Pembangunan RKB SMP			7.500.000.000	15 unit
		11 Pembangunan RKB SMU			5.000.000.000	10 unit
		D.2. Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium				
		1 Pembangunan pilot project Laboratorium dan Perpustakaan Terpadu			5.000.000.000	1 unit
		2 Pembangunan UGB perpustakaan			4.000.000.000	10 unit
		3 Pembangunan laboratorium SMA			1.500.000.000	3 unit
		4 Pengadaan peralatan laboratorium			500.000.000	1 unit
		D.3. Konsultan				
		1 DED Gedung SD/MI, SMP/MTS & SMU/SMK, Perpustakaan Laboratorium			2.300.000.000	1 pkt
		2 DED Gedung IKIP Gunung Sitoli, STT Sunderman			300.000.000	1 pkt
		3 Pengawasan Pembangunan RKB SD			2.100.000.000	1 unit
		4 Pengawasan Pembangunan RKB SMP			262.500.000	1 unit
		5 Pengawasan Pembangunan RKB SMU			175.000.000	1 unit
		6 Pengawasan Pembangunan UGB perpustakaan			140.000.000	1 unit
		7 Pengawasan Pembangunan laboratorium SMA			52.500.000	1 unit
		8 Pembangunan RKB IKIP Gunungsitoli			5.000.000.000	1 unit
		9 Pembangunan RKB STT Sunderman			3.000.000.000	1 unit
		D.4. Penyediaan Fasilitas Sekolah (Pengadaan Meubalair)				
		1 Pengadaan Meubelair TK, SD, SMP, SMA/SMK, IKIP, STT Kab. Nias	11.715.380.000	1 pkt	16.500.000.000	500 pkt
		D.5. Pengadaan Peralatan Laboratorium				

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		1 Pengadaan Alat Laboratorium SMP & SMA				
		D.6. Pengadaan Buku Referensi Sekolah				
		1 Pengadaan Buku Referensi Pelajaran SD Nias			75.000.000	1 pkt
		2 Pengadaan Buku Referensi Pelajaran SMP Nias	100.000.000	1 pkt	75.000.000	1 pkt
		3 Pengadaan Buku Referensi Pelajaran SMU Nias	100.000.000	1 pkt	100.000.000	1 pkt
		4 Pengadaan Buku Referensi Pelajaran SMK Nias	50.000.000	1 pkt	75.000.000	1 pkt
		5 Pengadaan Buku Referensi / Perpustakaan IKIP Gunungsitoli Nias	100.000.000	1 pkt	150.000.000	1 pkt
		6 Pengadaan Buku Referensi / Perpustakaan STIE Pembangunan G.Sitoli Nias	80.000.000	1 pkt	100.000.000	1 pkt
		E. Pembangunan Kapasitas Pendidikan				
		E.1. Beasiswa				
		1 Beasiswa anak sekolah				
		2 Beasiswa Studi S2 Dosen IKIP Gunungsitoli & STIE Pemb. Gunungsitoli	1.000.000.000	1 pkt	5.000.000.000	1 pkt
		3 Beasiswa Studi Lanjut S2 untuk 6 Dosen STIE Pembangunan G.Sitoli			2.000.000.000	1 pkt
		E.2. Pelatihan**				
		1 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK	300.000.000	2 Keg		
		2 Pelatihan / Peningkatan Kualitas Guru	600.000.000	2 Pkt		
		3 Pelatihan Manaj. Pengemb. Institusi dan Kurikulum untuk Pimpinan dan Dosen IKIP Gunungsitoli	150.000.000	1 Keg		
		4 Pelatihan Guru Sains dan Matematika	500.000.000	1 Pkt		
		5 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK			1.500.000.000	3 KEG
		6 Pelatihan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Berdasarkan Satuan Pendidikan			2.000.000.000	4 pkt
		7 Pelatihan Manaj. Pengemb. Institusi dan Kurikulum untuk Pimpinan -dan Dosen IKIP Gunungsitoli			1.000.000.000	2 KEG
		8 Pelatihan Guru Sains dan Matematika			1.500.000.000	3 pkt
		F. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	37.101.000.000		58.577.800.000	
		F.1. Pembangunan Rumah Sakit				
		1 Penyambungan PLN RSUD G.Sitoli	1.500.000.000	1 pkt		
		F.2. Pembangunan Puskesmas dan Pustu**				
		1 Puskesmas perawatan Inap Plus Alasa + Fasilitas Gedung Kab. Nias	4.000.000.000	1 PKT		
		2 Puskesmas perawatan Inap Plus Gunung Sitoli + Fasilitas Gedung Kab. Nias	4.000.000.000	1 PKT		
		3 Puskesmas perawatan Inap Plus Awa'i + Fasilitas Gedung Kab. Nias	2.000.000.000	1 PKT		
		4 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus Kec. Mandrehe Kab. Nias	2.260.000.000	1 PKT		
		5 Pembangunan Puskesmas Perawatan Jalan Bawolato	1.581.000.000	1 PKT		
		6 Pembangunan Puskesmas Perawatan Jalan Lotu	1.580.000.000	1 PKT		
		7 Pembangunan Puskesmas Lahewa (Lanjutan)	420.000.000	1 PKT		
		8 Pembangunan Puskesmas Afulu (Lanjutan)	350.000.000	1 PKT		
		9 Pembangunan Paket Puskesmas Mandrehe Barat + Fasilitas Lingkungan Gedung	2.500.000.000	1 PKT		
		10 Pembangunan Paket Puskesmas Alasa Talumuzoi+ Fasilitas Lingkungan Gedung	3.000.000.000	1 PKT		
		11 Pembangunan Paket Puskesmas Lahewa Timur + Fasilitas Lingkungan Gedung	3.000.000.000	1 PKT		
		12 Pembangunan Gedung Sekolah Perawat Kesehatan dan Asrama	2.700.000.000	1 PKT		
		13 Pembangunan Gudang Farmasi	1.210.000.000	1 PKT		
		14 Pembangunan Gedung Sekolah Perawat Kesehatan dan Asrama (lanjutan 2007)			2.700.000.000	1 pkt
		15 Jasa Konsultan Perencana Puskesmas dan Akper			147.500.000	1 pkt
		16 Pengawas Pembangunan Puskesmas dan Akper			206.500.000	1 pkt
		17 Pembangunan SPK/Akper Gunungsitoli: Gedung Kuliah: Lab komplit: Asrama: Aula: Perpustakaan komplit: Dapur & Ruang makan: Rumah Dosen: Air bersih & Listrik (LANJUTAN)			3.200.000.000	1 unit
		18 Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan			17.850.000.000	3 pkt
		19 Pembangunan Rumah Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Jalan AFULU + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			1.100.000.000	1 pkt
		20 Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Inap Plus Lahewa + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			1.368.800.000	1 pkt
		21 Puskesmas Rawat Inap BOTOMBAWO+ Fasilitas Lingkungan Gedung			2.989.000.000	1 pkt
		22 Puskesmas Rawat Inap NAMOHALU ESIWA + Fasilitas Lingkungan Gedung			3.209.000.000	1 pkt
		23 Puskesmas Perawatan Inap HILIDUHO + Fasilitas Lingkungan Gedung			2.947.000.000	1 pkt
		24 Pembangunan Puskesmas MANDREHE UTARA + Fasilitas Lingkungan Gedung			2.674.000.000	1 pkt

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009			
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume		
		25	Pembangunan Rumah Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Jalan Ulu Gawo + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			1.888.000.000	1	pkt
		26	Pembangunan Rumah Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Jalan Lahomi + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			2.212.000.000	1	pkt
		27	Pembangunan Rumah Dokter dan Rumah Paramedis Puskesmas Rawat Jalan Tugla Oyo + Fasilitas Lingkungan Gedung (LANJUTAN)			2.016.000.000	1	pkt
		28	Rehabilitasi Puskesmas Sirombu.			1.000.000.000	1	pkt
		F.3. Pengawasan						
		1	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Puskesmas (I)			1.200.000.000	1	pkt
		2	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Puskesmas (II)			1.200.000.000	1	pkt
		3	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan SPK + KANTOR DINAS KESEHATAN			350.000.000	1	pkt
		F.4. Perencanaan						
		1	Lanjutan Biaya Perencanaan Puskesmas (20%) dari Kontrak TA. 2006			150.000.000	1	pkt
		2	Lanjutan Biaya Perencanaan Kantor Dinas Kesehatan/Gudang Farmasi Kabupaten/SPK/Akper (20%) dari Kontrak TA. 2006			100.000.000	1	pkt
		3	Lanjutan Kontrak Perencanaan Fisik Tahap Pertama TA. 2006 (CV.BIRAMOS)			100.000.000	1	pkt
		F.5. Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan**						
		1	Bantuan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit					
		2	Pengadaan Peralatan Medis / Kedokteran					
		3	Revitalisasi Posyandu					
		4	Peralatan puskesmas plus & ambulans					
			Pengadaan Alat Medik dan pendukung pelayanan di Puskesmas: Mandrehe, Lahewa & Gido			2.700.000.000	1	pkt
		1	Pengadaan Meubelair di Puskesmas: Mandrehe, Lahewa, Gido dll			2.100.000.000	1	pkt
		F.6. Pelayanan Kesehatan/ Perbaikan Gizi Ibu/ Anak & KB						
		1	Penanganan Kasus Gizi Buruk			300.000.000	1	pkt
		2	Identifikasi dan Evaluasi penanganan gizi buruk tingkat kabupaten dan kecamatan.			150.000.000	1	pkt
		F.7. Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan						
		1	Pengembangan Sistem Manajemen RSUD			400.000.000	1	pkt
		2	Training dan sosialisasi pengurus dan kader Posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan Kep. Nias			300.000.000	1	pkt
		3	Capacity Building untuk Dinkes & Puskesmas, Lanjutan			1.500.000.000	1	pkt
		4	Pengelolaan Limbah Medis RSUD Gunungsitoli			500.000.000	1	pkt
		5	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Wanita Usia Subur melalui YKI & Dinkes			500.000.000	1	pkt
		6	Penanganan Gizi Buruk			500.000.000	1	pkt
		7	Monitoring & Evaluasi Kegiatan Kesehatan			300.000.000	1	pkt
		8	UKL & UPL			720.000.000	1	pkt

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		H. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan				
		H.1. Program Beasiswa				
		1 Program Beasiswa Berkelanjutan untuk Dokter Umum, Ahli Gizi, Rekam Medis, Rehabilitasi Medis Kep. Nias (lanjutan)	5.000.000.000	1 pkt		
		H.2. Pelatihan				
		1 Program Paket Capacity Building untuk RSU Gusit Melalui Residency Training Kab. Nias	1.000.000.000	1 pkt		
		2 Program Paket Capacity Building untuk Dinas Kesehatan Kab. Nias	1.000.000.000	1 pkt		
	Kebudayaan	I. Agama	7.648.995.000		22.510.000.000	
		I.1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama**				
		1 Bantuan Pembangunan Gereja Kab. Nias	2.812.500.000	75 Unit	11.250.000.000	300 unit
		2 Bantuan Pembangunan Mesjid Kab. Nias	300.000.000	8 Unit	375.000.000	10 unit
		3 Bantuan Pembangunan Vihara	37.125.000	1 Unit		
		J. Sosial				
		J.1. Pemberdayaan Perempuan				
		1 Penguatan Kelembagaan (Bantuan Gedung Kursus Wanita)				
		a. Bantuan gedung kursus wanita di Gedung Sitoli & Sirombu	70.068.000	2 Unit		
		b. Pemb. Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Kab. Nias	562.000.000	1 Unit		
		J.2. Rehabilitasi Sosial				
		1 Rehabilitasi Sosial				
		a. Biaya Makan Anak Panti				
		b. Bantuan Biaya Pendidikan Anak Panti Asuhan				
		2 Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial				
		a. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif				
		3 Pembangunan Panti Asuhan				
		4 Pembangunan Panti Asuhan Kudus 03 Tohia Gunung Sitoli (Lanjutan)	441.127.000	1 unit		
		J.3. Pemuda dan Olahraga				
		1 Pembangunan Stadion Pelita, Gunungsitoli	1.530.000.000	1 unit		

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009			
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume		
PENGEMBA NGAN EKONOMI		K. Budaya						
		K.1. Pengelolaan Keragaman Budaya						
		1 Rehabilitasi Rumah Adat Nias	22.344.000					
		2 Pembangunan Gedung Nasional Gunungsitoli	1.480.214.000	1	unit			
		3 Pengawasan Pembangunan Stadion Pelita Gunungsitoli (lanjutan)			15.000.000	1	pkt	
		4 Pembangunan Stadion Pelita Gunungsitoli (lanjutan)			1.500.000.000	1	pkt	
		5 Pembangunan Gedung Budaya Nias (Community Centre)			1.000.000.000	1	pkt	
		6 Pengawasan Pembangunan Gedung Budaya Nias (Community Centre)			35.000.000	1	pkt	
		7 Pembangunan Gedung Nasional Gunungsitoli (Lanjutan)			1.000.000.000	1	pkt	
		8 Pengawasan Pembangunan Gedung Nasional Gunungsitoli (Lanjutan)			35.000.000	1	pkt	
		9 Pembangunan Balai Pelatihan Sanggar Seni Budaya di 16 Kecamatan			2.400.000.000	1	pkt	
		10 Pembangunan Lapangan Sepak Bola di 16 Kec. Kab. Nias			3.200.000.000	1	pkt	
		11 Tersedianya fasilitas kerja pada Gedung P2TP2 (lanjutan)			300.000.000	1	pkt	
		12 Bantuan pembentukan Pusat Studi Seni, Budaya dan Bahasa Nias IKIP Gunungsitoli			400.000.000	1	pkt	
		13 Bantuan Pengembangan penataan kawasan wisata laut (fisik dan non fisik)			1.000.000.000	1	pkt	
		K.2. Pengelolaan Kekayaan Budaya						
		1 Pemberdayaan Pengrajin Tradisional Nias						
		2 Penyelenggaraan Festival dan Pameran Seni Budaya	365.859.000	1	keg			
		3 Bantuan Pembentukan Pusat Studi Seni, Budaya dan Bahasa Nias di IKIP Gunungsitoli						
		K.3. Pengembangan Pariwisata						
		1 Penataan Lokasi Pariwisata Nias						
		a. Muara Indah Kec. Gunungsitoli Utara	27.758.000	1	lokasi			
		b. Kawasan wisata Gunung Somomo (termasuk jalan masuk 500m) di Desa Lotogotu, kec. Mandrebo						
		A. Perdagangan	37.723.557.000			55.195.125.000		
		1 Pembangunan Pasar Tradisional	666.000.000	2	unit			
		2 Pembangunan Pasar Penunjang						
		3 Bantuan Modal Bergilir Pedagang						
		4 Pembangunan Pasar Yaahowu Blok I & II (1986 x 2 m2) Kab. Nias	23.000.000.000	1	pkt			
		5 UKM Trading House & Bantuan Modal						
		B. Pertanian						
		1 Pengadaan Power Thresher						
		2 Pengadaan Alat Pertanian Kecil						
		3 Pengadaan Hand Tractor Type Bajak Singkal						
		4 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di Kab. Nias	90.000.000	18	KLP			
		5 Pelatihan dan Pendampingan bagi Peternak, Petani Palawija dan Hortikultura	125.000.000	1	pkt			
		6 Bantuan Agro Input Palawija & Hortikultura untuk Pemberdayaan Perempuan dan Pensiunan	200.000.000	1	pkt			
		7 Sekolah lapangan Pengendalian Hama Terpadu				90.000.000	18	KLP
		8 Pengawasan Pembangunan Balai Benih Tanaman				122.500.000	1	pkt
		9 Pembangunan Balai Benih Tanaman lengkap				3.500.000.000	1	pkt
		10 Penyuluhan bimbingan & pelatihan pembenihan Tanaman				700.000.000	1	pkt
		11 Mis Blower (Mesin semprot hama)				625.000.000	50	unit
		12 Mesin Panen Padi				375.000.000	15	unit
		13 Power Trasher + accessories				260.000.000	20	unit
		14 Handtractor				1.250.000.000	50	unit
		15 Hand Sprayer				150.000.000	500	unit
		C. Perkebunan						
		1 BLM Pembangunan Rumah Pompa dan Bak Penampung Air	30.000.000	3	unit			
	2 BLM Pembuatan Unit Pengolah Hasil (UPH) kakao	100.000.000	4	keg				
	3 Bantuan Perluasan Tanaman Karet	950.000.000	100	ha				
	4 Bantuan Perluasan Tanaman Karet Pola Demplot	525.000.000	30	ha				
	5 Bantuan Intensifikasi Tanaman Kakao	250.000.000	100	ha				
	6 Bantuan Ekstensifikasi Tanaman Kakao Pola Demplot	625.000.000	25	ha				
	7 Pembuatan Kebun Entres Karet	390.000.000	3	ha				

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		8 Pelatihan Budidaya dan Pendampingan Kelompok Tani Kakao	175.000.000	1 keg		
		9 Pelatihan Budidaya dan Pendampingan Kelompok Tani Karet	125.000.000	1 keg		
		10 Pelatihan Budidaya dan pendampingan Kelompok tani Kakao			350.000.000	2 pkt
		11 Pelatihan dan Pendampingan Bagi Peternak, Petani Palawija dan Hortikultura			250.000.000	1 pkt
		12 Pembuatan Kebun Entres Karet			3.900.000.000	30 HA
		13 Pelatihan Budidaya dan pendampingan Kelompok tani Karet			250.000.000	2 pkt
		14 Bantuan Perluasan Tanaman Karet			2.850.000.000	300 HA
		15 BLM Pembuatan Unit Pengolah Hasil (UPH) Kakao			100.000.000	4 pkt
		16 Bantuan Perluasan Tanaman Karet Pola Demplot			3.500.000.000	200 HA
		17 Bantuan Intensifikasi Tanaman kakao			500.000.000	200 HA
		18 Bantuan Ekstensifikasi Tanaman kakao Pola Demplot			3.750.000.000	150 HA
		C.1. Terbangunnya Sentra Produksi Kakao Berstandar 7 Kec.				
		1 Gedung Kantor dan Gudang Produksi (325 m2)			5.687.500.000	7 unit
		2 Jasa Perencanaan Pembangunan Sentra Produksi Kakao.			297.500.000	7 unit
		3 Jasa Pengawasan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao.			223.125.000	7 unit
		4 Pengadaan Alat Pengolahan Kakao (Alat Pengering, Fermentasi, dan Sortir)			365.000.000	3 pkt
		5 Bangunan Peralatan Pengolahan Kakao			75.000.000	3 unit
		C.2. Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao				
		1 Gedung Kantor dan Gudang Produksi (350 m2)			875.000.000	1 unit
		2 Jasa Perencanaan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao			35.000.000	1 unit
		3 Jasa Pengawasan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao			26.250.000	1 unit
		4 Fasilitas Penunjang Kegiatan			93.750.000	1 pkt
		C.3. Pengawal Program 7 Sentra Produksi Kakao				
		1 Petugas Pendamping (7 org selama 8 bln, gaji 4,5 jt/orang)			252.000.000	56 Orang
		2 Motivator Desa (14 org Selama 8 bln, gaji 2,5 jt/org)			280.000.000	112 Orang
		3 Bantuan Agro Input Palawija & Hortikultura untuk Pemberdayaan Perempuan dan Pensiunan			200.000.000	1 pkt
		D. Pelatihan dan Tenaga Kerja				
		1 Pelatihan Ketrampilan dan Ketenaga Kerjaan	50.000.000	1 keg		
		2 BLM Peralatan Penunjang Usaha Keterampilan	180.000.000	1 keg		
		3 BLM Peralatan Penunjang Industri Rumah Tangga	300.000.000	1 keg		
		E. Koperasi dan UKM				
		1 Pendirian Nias Micro Finance	175.000.000	1 keg		
		2 Pendirian Nias UKM Centre	715.000.000	1 keg		
		3 Promosi Potensi Wilayah dan Stimulan Investasi Kab. Nias	200.000.000	1 keg		
		4 BLM UKM Melalui NMF/LKM	750.000.000	3 pkt		
		5 Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor, Identifikasi dan Seleksi, Pelatihan Pengelola LKM Kab. Nias	132.500.000	3 unit		
		6 BLM Peralatan Penunjang Industri rumah Tangga			600.000.000	2 pkt
		E.1. Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil				
		E.1.1. Penyelenggaraan Pusat Pengembangan				
		1 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Produksi UKM (Toko/Ruko)			800.000.000	1 pkt
		2 Bantuan Modal sarana & peralatan Pendukung bagi usahawan (UKM)			2.000.000.000	1 pkt
		3 Pendirian Nias Mikro Finance			300.000.000	1 pkt
		4 Pendirian Nias UKM Centre			500.000.000	1 pkt
		5 Identifikasi dan Seleksi LKM Oleh Tim terpadu (Dinas Staff PPK & Tim Ekonomi-Usaha Distrik Nias)			25.000.000	1 pkt
		6 Pelatihan Pengelola LKM (15 LKM x 3 Org)			60.000.000	2 pkt
		7 Identifikasi dan Konsolidasi UKM			80.000.000	2 pkt
		8 Pelatihan dan Pendampingan UKM			465.000.000	1 pkt
		9 Penyelenggaraan Nias UKM Centre (produksi, packaging, labelling pemasaran, promosi)			120.000.000	1 pkt
		10 BLM UKM Melalui Nias Micro Finance / LKM			750.000.000	3 pkt

1. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 25 MARET 2005 KABUPATEN NIAS

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008/2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		11 Bantuan sarana dan prasarana kantor LKM Kab. Nias			67.500.000	3 pkt
		E.1.2. Pembangunan Pasar/ Waserda				
		1 Pembangunan Pasar Yaahowu Blok I & II (1986 x 2 m2) Kab. Nias (lanjutan)			5.000.000.000	1 pkt
		2 Pembangunan pasar Tradisional Kab.Nias di 15 kecamatan			4.500.000.000	15 pkt
		3 Pengembangan Manajemen & SDM Pengelolaan Pasar Yahowuu			2.000.000.000	1 pkt
		4 Pengawasan Pembangunan Pasar ya'ahowu			175.000.000	1 pkt
		5 Perenc. & Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional Kab. Nias			225.000.000	1 unit
		F. Perikanan				
		1 Bantuan Modal Usaha Pengolahan Ikan				
		2 Pengadaan Peralatan Tangkap Ikan	600.000.000	2 pkt		
		3 Unit Pengembangan Pelayanan (UPP)	45.000.000	1 pkt		
		4 Pembangunan Komplek Dermaga PPI,Pembangunan Rumah Dinas Type 36 (2 unit), Kantor Adm, Pos Satpam (3 Unit), Gudang, Toilet Umum, Rumah Genset dan Jaringan listrik, Balai pertemuan	5.580.957.000	1 pkt		
		5 BLM Pengadaan Perahu Motor 0,5 GT - 5,5 PK dan Alat Tangkap Lengkap untuk nelayan Kab. Nias	600.000.000	40 unit		
		6 BLM Pengadaan Kapal Motor 5 GT dan Alat Tangkap Lengkap untuk Nelayan Kab. Nias	450.000.000	3 unit		
		7 Unit Pengembangan Pelayanan (UPP)			45.000.000	1 pkt
		8 BLM Modal Usaha pengolahan ikan			300.000.000	2 pkt
		9 BLM Pengadaan Perahu Motor 0,5 GT - 5,5 PK dan Alat Tangkap lengkap			1.200.000.000	40 unit
		10 BLM Pengadaan Kapal Motor 5 GT dan Alat Tangkap Lengkap			900.000.000	6 unit
		11 Pengadaan Alat Tangkap Pancing Berikut Kelengkapannya			450.000.000	30 pkt
		G. Peternakan				
		1 Pemberantasan Penyakit Menular Hewan dan Unggas				
		2 Pemb. Gedung Utama Rumah Potong Hewan Pasar Beringin	694.100.000	1 unit	200.000.000	1 pkt
		3 Pelatihan Teknik Budidaya dan Pemberantasan Penyakit Ternak			2.500.000.000	1 pkt
		4 Bantuan Modal dan Peralatan- Pendukung Usaha Peternakan (Bibit, obat-obatan/vaksin, pengolahan pakan)			1.000.000.000	1 pkt
		5 Bantuan Penyuluhan bimbingan dan pendampingan sentra peternakan (ayam)				
		TOTAL	710.311.542.328		1.934.554.257.000	

2. RENCANA KEGIATAN RINCI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TANGGAL 28 MARET 2005 KABUPATEN NIAS SELATAN

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008 DAN 2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
INFRASTRUKTUR	Jalan dan Tranpostasi	A. Transportasi Laut dan ASDP	125.129.802.250		277.335.000.000	
		A.1. Transportasi Laut				
		1 Rehabilitasi Pelabuhan Teluk Dalam	20.250.000.000	1 unit		
		2 Rehabilitasi Pelabuhan Laut P. Tello	8.625.000.000	1 unit		
		B. Transportasi Udara				
		1 Landas Pacu Teluk Dalam	4.450.000.000	1 unit		
		C. Transportasi Darat, Jalan dan Kereta Api				
		C.1. Jalan Nasional dan Propinsi				
		1 Pembangunan Jalan Miga - Moi	22.350.000.000	15 km		
		2 Rehap / Rekon Jembatan Oyo	1.966.262.250	55 m		
		3 Rehab. Rekonstruksi Jl. Teluk Dalam - Amandraya	10.000.000.000	7 km		
		4 Rehab. Rekons. Jembatan Idano Waji Km. 77+790	5.393.000	12 m		
		5 Rehab. Rekons. Jembatan Box Culvert Km. 71 + 200 Desa Siwalawabanua	900.000	6 m		
		6 Rehab. Rekons. Jembatan Box Culvert Km. 41 + 150 Kec. Idonogawo dan Km. 103 + 150 Desa Hillisimaetana	325.000	2 unit		
		7 Jalan Tetehosi (Idano Gawo)-Lahusa (widening dan Overlay Hotmix)				
		8 Jalan Lolowa'u-Sirombu (overlay hotmix)				
		C.2. Jalan Kabupaten Nias Selatan				
		1 Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gomo-Sifalago-Susua-Amorosa	352.000.000	1 km		
		2 Peningkatan Ruas Jalan BAWODABARA-HILIFALAGO-SIWALAWA-HILINAWALO FAU	814.922.000	1 km		
		3 Rehabilitasi dan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Teluk Dalam-Hillimondrege	200.000.000	1 km		
		4 Rehabilitasi dan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Simpang AUGÉ-BAWOLAHUSA-MAZINGO	565.000.000	1 km		
		5 Rehabilitasi Berat dan Peleb Jalan Kelling Pulau Tello	500.000.000	1 km		
		6 Peningkatan Jalan Ruas Eho - Tebolo	500.000.000	1 km		
		7 Rehab dan Peningk. Simp Jalan KM 19 Prov. Orahili - Bawonahono	600.000.000	1 km		
		8 Rehabilitasi Berat Jalan Ruas Helezalulu - Gomo	6.000.000.000	6 km		
		11 Rehab & Peningk Jl. Ruas Tuhemberua - Orahili - Sambulu Kecamatan Lolomatua	1.875.000.000	3 km		
		12 Rehab & Peningk Jl. Ruas Bawomataluo - Siwalawa - Onohondro - Hillinawalo Fau Kec Teluk Dalam	2.625.000.000	4 km		
		13 Rehab & Peningk Ruas Simpang Jalan Propinsi Km 28 - Hillizhono -Orahili - RS Lukas	4.500.000.000	5 km		
		14 Rehab & Peningk Jl. Ruas Soledua - Togizita - Bawosalo'o - Sambulu Kecamatan Lolowau	2.625.000.000	4 km		
		15 Rehab & Peningk Jl. Ruas Teluk Dalam - Hillimondrege Raya	2.200.000.000	2 km		
		16 Rehab & Peningk Jalan dalam Kota Teluk Dalam	6.000.000.000	6 km		
		17 Rehab & Peningk Jl. Propinsi menuju Ibukota Kec Lolomatua	4.000.000.000	4 km		
		18 Rehab & Peningk Jl. Ruas Hillifarono-Hilifalago-Hilimozaua-Hilimondrege Raya	3.000.000.000	3 km		
		19 Rehab & Peningk Jl. Ruas Orahili-Gomo-Hiliina'a (2,5KM) Gomo-Sambulu Kec Gomo / Lolomatua (lanjutan)	1.875.000.000	3 km		
		23 Rehab & Peningk Jl. Ruas Gomo - Boronadu (3,5KM) (lanjutan)	3.500.000.000	4 km		
26 Rehab & Peningk Jl. Keliling Pulau Tello (2,5 KM) Kec Pulau-pulau Batu (lanjutan)	2.500.000.000	3 km				
27 Rehab & Peningk Jl. Ruas Eho - Tebolo (2KM) Kec Hibala	2.000.000.000	2 km				
28 Rehab & Peningk Jl. Ruas SMAN 1 Gomo Desa Tetegawa'ai (4KM) Kec Gomo	3.000.000.000	4 km				
29 Pembangunan Jembatan Sungai Batu Buaya Cs (40M)	4.000.000.000	40 km				
30 Peningkatan Jalan Propinsi Km. 6 - Bawonahono-Bawomataluo-Hilisematanao-Bandara (Rencana), Sorake-Lagundri (35 Km)						
31 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Lahusa - Gomo (17 Km)						
32 Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lahusa - Teluk Dalam - Lolowau (18 buah)						
33 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Ruas Huno - Gomo (10 Km)						
34 Peningkatan Ruas Jalan Desa Silimabanua - Desa Silimabanua - Baruzo - Gomo (8 Km)						
35 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Ruas Simpang PDAM - Lazafahuwo - Hillifalago - Hillinamozaua (8 Km)						

2. RENCANA KEGIATAN RINCI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TANGGAL 28 MARET 2005 KABUPATEN NIAS SELATAN

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008 DAN 2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		36 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Telukdalam - Godu - Sifalago Susua - Hoya - Lahusa (22 Km)				
		37 Pembangunan Jembatan Bawodobara - Hilifarono (50 m)				
		38 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Togizita -Daodao - Oladano - Harefa (22 Km)				
		39 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Bawomataluo (2,250 Km)				
		40 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Hillisimaetano (2,210 Km)				
		41 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Siwalawa (3 Km)				
		42 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Gomo - Boronalu - Hillidanayao - Oladano - Sambulu - Lolomatua (35 Km)				
		43 Peningkatan Jalan Propinsi Km. 6 - Bawonahono-Bawomataluo-Hilisematanao-Bandara (Rencana), Sorake-Lagundri (35 Km)			35.000.000.000	35 km
		44 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Lahusa - Gomo (18 Km)			42.500.000.000	17 km
		45 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Ruas Huno - Gomo (10 Km)			10.000.000.000	10 km
		46 Peningkatan Ruas Jalan Desa Silimabanua - Desa Silimabanua - Baruzo - Gomo (8 Km)			8.000.000.000	8 km
		47 Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Ruas Simpang PDAM - Lazafahuwo - Hillifalago - Hillinamozausa (8 Km)			8.000.000.000	8 km
		48 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Telukdalam - Godu - Sifalago Susua - Hoya - Lahusa (22 Km)			22.000.000.000	8 km
		49 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Togizita -Daodao - Oladano - Harefa (22 Km)			22.000.000.000	22 km
		50 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Bawomataluo (2,250 Km)			2.250.000.000	22 km
		51 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Hillisimaetano (2,210 Km)			2.210.000.000	2 km
		52 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Desa Lahusa Fau - Siwalawa (3 Km)			3.000.000.000	2 km
		53 Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan Gomo - Boronalu - Hillidanayao - Oladano - Sambulu - Lolomatua (35 Km)			30.000.000.000	30 km
		54 Peningk Jl. Ruas Helezalulu-Gomo			6.000.000.000	6 km
		55 Rehab & Peningk Jl. Propinsi menuju Ibukota Kec Lolomatua			4.000.000.000	4 km
		56 Rehab & Peningk Jl. Ruas Hillifarono-Hillifalago-Hillinomozaua- Hillimondrege Raya			3.000.000.000	3 km
		57 Rehab & Peningk Jl. Ruas Orahili-Gomo-Hilina'a Gomo-Sambulu Kec Gomo / Lolomatua (lanjutan)			1.875.000.000	3 km
		58 2. Rehab & Peningk Jl. Ruas Gomo - Boronadu			3.500.000.000	4 km
		59 3. Rehab & Peningk Jl. Ruas Gomo - Sifalago Susua - Amorosa Kec Gomo (lanjutan)			2.500.000.000	3 km
		60 4. Rehab & Peningk Jl. Keliling Pulau Tello Kec Pulau-pulau Batu (lanjutan)			2.500.000.000	3 km
		61 5. Rehab & Peningk Jl. Ruas Eho - Tebolo Kec Hibala			2.000.000.000	2 km
		62 6. Rehab & Peningk Jl. Ruas SMAN 1 Gomo Desa Telegawa'al Kec Gomo			3.000.000.000	4 km
		63 Pembangunan Jembatan Bawodobara - Hillifarono (50 m)			6.000.000.000	50 m
		64 7. Pembangunan Jembatan Sungai Batu Buaya Cs			4.000.000.000	40 m
		65 Peningkatan Jembatan Ruas Jalan Lahusa - Teluk Dalam - Lolowa'u (18 buah)			54.000.000.000	18 unit
		C.3. Terminal Bus				
		1 Pembangunan Terminal Bus Teluk Dalam	4.250.000.000	1 unit		
Energi dan Telekomunikasi	D. Energi dan Kelistrikan		1.434.548.000		0	
		1 Pengadaan MDU Ranting Telukdalam	874.548.000	34 km		
		2 Pembangunan Gardu Induk / Distribusi Ranting Teluk Dalam				
	E. Telekomunikasi					
		1 Pembangunan Kantor Pos Teluk Dalam	560.000.000	1 unit		
		2 Pembangunan Gedung Kantor Pos Alasa				
Infrastruktur Sumberdaya Air	F. Sumberdaya Air		25.128.690.000		61.709.878.501	
	F.1. Irigasi					
		1 Rehabilitasi DI Lagundri				
		2 Rehab DI Siwalawa	4.414.180.000	300 ha		
		4 DI. Lobu Faulo (100 Ha) Kec. Teluk Dalam	1.626.014.000	100 ha		
		5 DI. Lakunda (75 Ha) Kec. Amandraya	889.963.000	75 ha		

2. RENCANA KEGIATAN RINCI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TANGGAL 28 MARET 2005 KABUPATEN NIAS SELATAN

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007			2008 DAN 2009		
			Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume	
		6 DI. Sisombowo (50 Ha) Kec. Amandraya	860.210.000	50	ha			
		7 DI. Lahesa (70 Ha) Kec. Amandraya	2.095.273.000	70	ha			
		8 DI. Otua (130 Ha) Kec. Teluk Dalam (ETESP)	1.591.210.000	120	ha			
		9 DI. Mbomboharu (16 Ha) Kec. Teluk Dalam (ETESP)	1.141.210.000	100	ha			
		10 DI. Tegoyo (34 Ha) Kec. Amandraya (ETESP)	906.210.000	50	ha			
		11 DI. Mbombonaajui (350 Ha) Kec. Amandraya (ETESP)	1.791.210.000	150	ha			
		12 DI. Mowao Kec. Teluk Dalam (ETESP)	1.591.210.000	50	ha			
		13 DI. Idano Mola, Kec. Bawotalo				7.000.000.000	500	Ha
		14 DI. Zumuzu, Kec. Bawotalo				2.551.265.000	110	Ha
		15 D.I. Lahusa / Nukito				4.010.545.000	250	Ha
		16 D.I. Soenuo, Teluk Dalam				1.122.952.600	70	Ha
		17 D.I. Tar'olala, Teluk Dalam				962.530.800	60	Ha
		18 D.I. Borlwi, Teluk Dalam				2.406.327.000	150	Ha
		19 D.I. Lao'a, Teluk Dalam				2.406.327.000	150	Ha
		20 D.I. Batunitaruo, Teluk Dalam				1.604.218.000	100	Ha
		21 D.I. Khelo Amandraya				802.109.000	50	Ha
		22 D.I. Baikoro, Lolowau				1.203.163.500	75	Ha
		23 D.I. Lato Slide-ide, Lolowau				802.109.000	50	Ha
		24 D.I. Lato Sebua, Lolowau				1.604.218.000	100	Ha
		25 D.I. Bombolaehua, Lolowau				1.203.163.500	75	Ha
		26 D.I. Fausi Laza, Teluk Dalam				1.604.218.000	100	Ha
		27 D.I. Losu II, Teluk Dalam				802.109.000	50	Ha
		28 D.I. Hilli Sondrekha, Teluk Dalam				1.283.374.400	80	Ha
		29 D.I. Siboleang, Teluk Dalam				1.203.163.500	75	Ha
		30 D.I. Bouneng, Teluk Dalam				802.109.000	50	Ha
		31 D.I. Marembe, Teluk Dalam				802.109.000	50	Ha
		32 D.I. Togi Guro, Lolowau				481.265.400	30	Ha
		33 D.I. Bohalu, Amandraya				802.109.000	50	Ha
		34 D.I. Sefa, Amandraya				1.604.218.000	100	Ha
		35 D.I. Tanamo, Amandraya				802.109.000	50	Ha
		36 D.I. Tetemawe, Lahusa				2.406.327.000	150	Ha
		37 D.I. Lamori, Teluk Dalam				1.764.639.800	110	Ha
		38 D.I. Losu, Teluk Dalam				2.406.327.000	150	Ha
		39 D.I. Hillfalawu, Teluk Dalam				4.010.545.000	250	Ha
		40 D.I. Bou, Teluk Dalam				2.406.327.000	150	Ha
		F.2. Sungai dan Pengendalian Banjir						
		1 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Manawa Dano, Idanomi	782.000.000	1	pkt			
		2 Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing sungai Siwalawa	1.000.000.000	1	pkt			
		3 Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing sungai Susua dan Saua	1.000.000.000	1	pkt			
		4 Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing sungai Masio	1.000.000.000	1	pkt			
		5 Normalisasi Sungai Kabupaten Nisel						
		6 Normalisasi Sungai di Nias Selatan				3.000.000.000	3	pkt
		7 Pengamanan pantai di Nias Selatan				7.850.000.001	3	pkt
		F.3. Pengamanan Pantai						
		1 Pengamanan Pantai Pasir Putih Kec. Teluk Dalam	4.440.000.000	1	pkt			
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perumahan & Permukiman	A. Perumahan dan Permukiman	125.452.325.000			73.266.650.000		
		A.1. Perumahan dan Permukiman Nias Selatan						
		1 Rekonstruksi	87.220.000.000	1.703	Unit			

2. RENCANA KEGIATAN RINCI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TANGGAL 28 MARET 2005 KABUPATEN NIAS SELATAN

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008 DAN 2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		2 Rehabilitasi	12.850.000.000	857	Unit	
		3 PSD	10.428.000.000	1.042	Unit	
		4 Pembangunan Rumah				39.000.000.000 750 unit
		5 Rehabilitasi Rumah				3.750.000.000 750 unit
		6 Pembangunan Prasarana				6.000.000.000 750 unit
		7 Konsultan Pengawasan (pembangunan rumah)				1.500.000.000 1 pkt
		8 Konsultan pendamping/Fasilitator				2.000.000.000 1 pkt
		A.2. Pembuatan Sertifikat Tanah				
		1. Pengadaan tanah	5.250.000.000	3	pkt	10.000.000.000 5 pkt
		2. Peralatan & gedung kantor pertanahan	1.400.000.000	2	pkt	2.800.000.000 4 pkt
		3. Sertifikasi tanah permukiman	2.652.325.000	5.000	bidang	5.304.650.000 10.000 bidang
		4. Ajudikasi tanah	2.912.000.000	1	pkt	2.912.000.000 1 pkt
		5. Peralatan pengukuran dan pemetaan	2.740.000.000	6	unit	
		B Air Minum dan Sanitasi	14.611.800.000			24.250.000.000
		B.1. Air Minum				
		1 Pemb. Sist. Air Minum Kec. Teluk Dalam	2.650.000.000	1	sist	
		2 Pemb. Sist. Air Minum Kec. Lolowau	1.650.000.000	1	sist	
		3 Pemb. Sist. Air Minum Kec. Amandraya	1.650.000.000	1	sist	
		4 Pemb. Sist. Air Minum Kec. Lahusa	1.650.000.000	1	sist	
		5 Pemb. Sist. Jaringan Air Minum Kecamatan Kab. Nisel				
		6 Pemb. Sistem Air Minum Kec. Teluk Dalam				2.500.000.000 1 pkt
		7 Pemb. Sistem Jaringan Air Minum Kecamatan Kab. Nisel				15.000.000.000 6 pkt
		B.2. Persampahan				
		1 Pengadaan Amrol & Dump Truk Sampah berikut landasannya Kota Teluk Dalam	1.122.000.000	6	unit	
		1 Pengadaan Dump Truk, Amroll,container & landasan untuk Kota. Teluk Dalam, Amandraya, Lahusa, Lolowau				1.500.000.000 1 pkt
		B.3. Drainase				
		1 Normalisasi/Rehab Saluran Drainase Teluk Dalam	3.110.000.000	6.575	m	
		2 Pembangunan Sistem Jaringan Drainase di Kota Lahusa	750.000.000	1.500	m	
		3 Pembangunan Sistim Drainase Pekan Togzita Kec. Lolowau	529.800.000	945	m	
		4 Pembangunan Sistim Drainase Lolowa'u	750.000.000	945	m	
		5 Pembangunan Sistim Drainase Amandraya	750.000.000	945	m	
		6 Pembangunan Sistem Drainase Teluk dalam				2.500.000.000 1 pkt
		7 Pembangunan Sistim Drainase Pekan Togzita Kec. Lolowau				750.000.000 1 pkt
		8 Pembangunan Sistim Drainase Lolowa'u				1.250.000.000 1 pkt
		9 Pembangunan Sistim Drainase Amandraya				750.000.000 1 pkt
		A. Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan	10.125.366.000			37.170.000.000
		A.1. Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah				
		1 Pembangunan Kantor Dinas & Kecamatan Kab. Nias Selatan	5.250.000.000	4	unit	
		2 Pemb. Komplek Gedung Kantor Bupati Nias Selatan	4.127.366.000	1	unit	
		1 Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Nias Selatan (lanjutan)				10.000.000.000 1 unit
		2 Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias Selatan				12.000.000.000 12 unit
		3 Pembangunan Kantor Desa (KRRP)				7.000.000.000 28 unit
		4 Pengawasan Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Nias (lanjutan)				450.000.000 1 pkt
		5 Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias Selatan				360.000.000 1 pkt
		6 Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas & kantor kecamatan kab. Nias Selatan				480.000.000 1 pkt
		A.2. Rehabilitasi Bangunan / Gedung Khusus				
		1 Pengadaan Kendaraan Operasional untuk LAPAS Gunungsitoli dan Pulau Tello	248.000.000	2	unit	
KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA	Kepemerintahan					

2. RENCANA KEGIATAN RINCI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TANGGAL 28 MARET 2005 KABUPATEN NIAS SELATAN

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008 DAN 2009		
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume	
		2	Pembangunan Kantor Sekretariat Bersama di Kab. Nias Selatan	500.000.000	1 unit		
		3	Pembangunan Gedung Kantor Polres Kab. Nisel			4.000.000.000	1 unit
		4	Pembangunan / Renovasi Kantor Koramil			2.400.000.000	1 unit
		5	Perencanaan Gedung Kantor Polres Kab. Nisel			120.000.000	1 unit
		6	Pengawasan Gedung Kantor Polres Kab. Nisel			360.000.000	2 unit

2. RENCANA KEGIATAN RINCI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TANGGAL 28 MARET 2005 KABUPATEN NIAS SELATAN

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008 DAN 2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
Pendidikan	B	Pembangunan Fasilitas Pendidikan	139.763.543.000		91.942.000.000	
		B.1. Pembangunan dan Rehabilitasi				
		1 Pembangunan Unit RKB SD Kab. Nias Selatan	78.855.677.787	94 sekolah		
		2 Pembangunan Unit RKB SMP Kab. Nias Selatan	12.071.426.089	11 sekolah		
		3 Pembangunan Unit RKB SMU Kab. Nias Selatan	5.923.384.123	8 sekolah		
		4 Pembangunan Laboratorium	4.330.055.000	12 sekolah		
		5 Pembangunan RKB SD/MI, SMP/MTS dan SMU/SMK/MA Kab. Nisel (185 Lk X 56 M2)	29.145.000.000	29 sekolah		
		6 Pembangunan RKB SD			30.000.000.000	60 unit
		7 Pembangunan RKB SMP			3.500.000.000	7 unit
		8 Pembangunan RKB SMU			2.500.000.000	5 unit
		9 Pembangunan UGB perpustakaan			1.600.000.000	4 unit
		10 Pembangunan laboratorium SMA			3.600.000.000	10 unit
		11 Pengadaan peralatan laboratorium			1.000.000.000	2 pkt
		12 Pengadaan Buku Referensi SD, SMP, SMA, & IKIP			1.000.000.000	3 pkt
		13 DED Gedung, SD/MI, SMP/MTS & SMU/SMK, Perpustakaan, Laboratorium			2.300.000.000	1 pkt
		14 DED Gedung IKIP Teluk Dalam			150.000.000	1 pkt
		15 Pengawasan Pembangunan RKB SD			1.050.000.000	1 unit
		16 Pengawasan Pembangunan RKB SMP			122.500.000	1 unit
		17 Pengawasan Pembangunan RKB SMU			87.500.000	1 unit
		18 Pengawasan Pembangunan UGB perpustakaan			56.000.000	1 unit
		19 Pengawasan Pembangunan laboratorium SMA			126.000.000	1 unit
		20 Pembangunan RKB IKIP Teluk Dalam			4.000.000.000	1 unit
		B.2. Penyediaan Fasilitas Sekolah				
		1 Pengadaan Meubelair TK, SD, SMP, SMA/SMK, IKIP Kab. Nias Selatan	7.021.720.000	1 pkt	20.000.000.000	571 pkt
		B3. Pengadaan Buku referensi Sekolah				
		1 Pengadaan buku referensi pelajaran SD Nisel			75.000.000	1 pkt
		2 Pengadaan buku referensi pelajaran SMP Nisel	86.280.000	1 pkt	50.000.000	1 pkt
		3 Pengadaan buku referensi pelajaran SMU Nisel	100.000.000	1 pkt	75.000.000	1 pkt
		4 Pengadaan buku referensi/perpustakaan IKIP Teluk Dalam Nisel	180.000.000	1 pkt	150.000.000	1 pkt
		5 Pengadaan Buku Referensi SD, SMP, SMA, & IKIP			1.000.000.000	3 pkt
		C. Pembangunan Kapasitas Pendidikan				
		C.1. Beasiswa				
		1 Beasiswa Studi Lanjut S2 untuk Dosen IKIP Teluk Dalam	1.000.000.000	1 paket	5.000.000.000	1 pkt
		Beasiswa Anak Sekolah			2.000.000.000	1 pkt
		C.2. Pelatihan				
		1 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK	300.000.000	2 Keg		
		2 Pelatihan/Peningkatan Kualitas Guru	600.000.000	2 Pkt		
		3 Pelatihan Manaj. Pengemb. Institusi dan kurikulum untuk pimpinan & dosen IKIP Teluk Dalam	150.000.000	1 Keg		
		4 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK			1.000.000.000	2 KEG
		5 Pelatihan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Berdasarkan Satuan Pendidikan			1.500.000.000	3 pkt
	6 Pelatihan Manaj. Pengemb. Institusi dan Kurikulum untuk Pimpinan dan Dosen IKIP Teluk Dalam			4.000.000.000	2 KEG	
	7 Pelatihan Guru Sains dan Matematika			6.000.000.000	2 pkt	
Kesehatan	D	Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	29.501.585.000		64.084.000.000	
		D.1. Pembangunan Rumah Sakit				
		1 Rehab Gedung RSUD St. Lukas	2.910.000.000	1 paket		
		D.2. Pembangunan Puskesmas dan Pustu				
		1 Puskesmas Rawat Inap Type 250 M2 dan rumah Dinas Paramedis (Kec. Lolomatua) Kab. Nisel	1.000.000.000	1 PKT		
		2 Puskesmas Rawat Inap Plus Teluk Dalam Kab. Nisel	349.512.000	1 PKT		
		3 Puskesmas perawatan Inap Plus T. Dalam + Fasilitas Gedung Kab. Nisel	4.000.000.000	1 PKT		
	4 Puskesmas perawatan Inap Plus Lahusa + Fasilitas Gedung Kab. Nisel	2.000.000.000	1 PKT			
	5 Puskesmas perawatan Inap Plus Lolowau + Fasilitas Gedung Kab. Nisel	4.000.000.000	1 PKT			

2. RENCANA KEGIATAN RINCI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TANGGAL 28 MARET 2005 KABUPATEN NIAS SELATAN

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007			2008 DAN 2009			
			Nilai (Rupiah)	Volume		Nilai (Rupiah)	Volume		
		16 Pemberdayaan Pengrajin Tradisionil Nias				800.000.000		2 Keg	
		K. Budaya							
PENGEMBANGAN EKONOMI		A. Perdagangan	26.130.440.000			78.657.325.000			
		1 Bantuan Modal Bergilir Usaha ekonomi produktif	4101440000	1	unit				
		2 Pembangunan Pasar Teluk Dalam (Kab. Nias Selatan)	664.000.000	2	unit				
		B. Pertanian							
		1 Pengadaan Power Thresher							
		2 Pengadaan Alat Pertanian Kecil							
		3 Pengadaan Hand Tractor Type Bajak Singkal							
		4 Pengadaan Pompa Air 6" dan Kelengkapannya							
		5 Pengembangan Usaha Tani							
		6 Pelatihan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Kab. Nias)	60.000.000	1	pkt				
		7 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	60.000.000	1	pkt				
		8 Bantuan Agro Input Palawija & Hortikultura untuk Pemberdayaan Perempuan dan Pensiunan				100.000.000	1	pkt	
		9 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di Kab.Nias Selatan				100.000.000	1	pkt	
		10 Mis Blower (Mesin semprot hama)				625.000.000	50	unit	
		11 Mesin Panen Padi				375.000.000	15	unit	
		12 Power Trasher + accessories				400.000.000	30	unit	
		13 Handtractor				400.000.000	20	unit	
		14 Hand Sprayer				150.000.000	500	unit	
		15 Pengadaan Alat Pertanian Kecil				200.000.000	600	unit	
		16 Pelatihan dan Pendampingan bagi Peternak, Petani Palawija dan Holtikultural				125.000.000	1	pkt	
		17 Pengadaan Pompa Air 6" dan Kelengkapannya				100.000.000	4	unit	
		18 Pengembangan Usaha Tani				750.000.000	250	Ha	
		19 Pelatihan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Kab.Nias)				100.000.000	1	pkt	
		20 Bantuan Agro Input Palawija & Holtikultura untuk Pemberdayaan Perempuan dan Pensiunan				200.000.000	1	pkt	
		21 Obat-obatan Pengendalian Hama				400.000.000	2	pkt	
		14 Ekstensifikasi Sawah Baru				1.500.000.000	300	Ha	
		C. Perkebunan							
			Pembuatan Kebun Entres Karet	260.000.000	2	ha			
		1 Peremajaan dan Perluasan Tanaman Karet		570.000.000	60	ha			
		2 Perluasan Tanaman Karet Pola Demplot		525.000.000	30	ha			
		3 Intensifikasi Tanaman Kakao		200.000.000	80	ha			
		4 Ekstensifikasi tanaman Kakao Pola Demplot		750.000.000	30	ha			
		5 Pelatihan Budidaya kakao & pendampingan		300.000.000	1	keg			
		6 Pelatihan dan Pendampingan Teknis Bagi Petani Karet		120.000.000	1	keg			
		7 Pembangunan Rumah Pompa dan bak tampung air		10.000.000	1	keg			
		8 Pembuatan Kebun Entres Karet					520.000.000	4	HA
		9 Peremajaan dan Perluasan Tanaman Karet					1.140.000.000	120	HA
		10 Perluasan Tanaman Karet Pola Demplot					1.050.000.000	60	HA
		23 Pelatihan dan Pendampingan Teknis Bagi Petani Karet					240.000.000	2	pkt
		11 Intensifikasi Tanaman Kakao					400.000.000	160	HA
		12 Ekstensifikasi tanaman Kakao Pola Demplot					750.000.000	30	HA
		13 Pelatihan Budidaya kakao & pendampingan					300.000.000	1	pkt
		14 Pembangunan Rumah Pompa dan Bak Tampung Air					20.000.000	2	Keg
		Terbangunnya Sentra Produksi Kakao Berstandar 7 Kec.							
		15 Gedung Kantor dan Gudang Produksi (325 m2)					5.687.500.000	7	unit
	16 Jasa Perencanaan Pembangunan Sentra Produksi Kakao.					297.500.000	7	unit	

2. RENCANA KEGIATAN RINCI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TANGGAL 28 MARET 2005 KABUPATEN NIAS SELATAN

PILAR	PROG UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008 DAN 2009	
			Nilai (Rupiah)	Volume	Nilai (Rupiah)	Volume
		17 Jasa Pengawasan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao.			223.125.000	7 unit
		18 Pengadaan Alat Pengolahan Kakao (Alat Pengering, Fermentasi, dan Sortir)			365.000.000	3 pkt
		19 Bangunan Peralatan Pengolahan Kakao			75.000.000	3 unit
		Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao				
		20 Gedung Kantor dan Gudang Produksi (350 m2)			875.000.000	1 unit
		21 Jasa Perencanaan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao			35.000.000	1 unit
		22 Jasa Pengawasan Pembangunan Pusat Sentra Produksi Kakao			26.250.000	1 unit
		23 Fasilitas Penunjang Kegiatan			93.750.000	1 pkt
		Pengawal Program 7 Sentra Produksi Kakao				
		21 Petugas Pendamping (7 org selama 8 bln, gaji 4,5 jt/orang)			252.000.000	56 Orang
		22 Motivator Desa (14 org Selama 8 bln, gaji 2,5 jt/org)			280.000.000	112 Orang
		Optimalisasi Pemanfaatan Lahan				
		23 Pelatihan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kab. Nias)			60.000.000	1 pkt
		24 Transplantasi Terumbu Karang			1.500.000.000	1 pkt
		25 Pendidikan dan Pelatihan Amdal			100.000.000	1 pkt
		D. Pelatihan dan Tenaga Kerja				
		1 BLM Peralatan Penunjang Industri Rumah Tangga	200.000.000	1		pkt
		2 Bantuan Modal Kerja / Peralatan Penunjang Usaha Ketrampilan Kab. Nisel	120.000.000	1		pkt
		3 Pembangunan Gedung Pusat Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kab. Nisel				
		4 Pelatihan Tenaga Kerja Kab. Nisel				
		5 BLM Peralatan Penunjang Usaha Keterampilan				
		6 Bantuan Modal Kerja / Peralatan Penunjang Usaha Ketrampilan			700.000.000	1 pkt
		7 Pendirian Balai Latihan Kerja, lengkap dgn Sarana Penunjang			2.000.000.000	1 pkt
		8 Pengembangan pusat pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja terampil/tenaga kerja			1.500.000.000	1 pkt
		9 Bantuan Sarana dan Prasarana Alat/Mesin/Bahan Pelatihan			500.000.000	1 pkt
		10 BLM Peralatan Penunjang Industri Rumah Tangga			500.000.000	1 pkt
		11 Peralatan Tenaga Kerja Kab. Nisel			700.000.000	1 keg
		12 BLM Peralatan Penunjang Usaha Pertanian			1.000.000.000	1 pkt
		E. Koperasi dan UKM				
		1 Bantuan Modal Usaha Industri Rumah Tangga				
		2 Identifikasi, Seleksi dan Konsolidasi, Movev, Pelatihan Pengurus LKM	170.000.000	1		keg
		3 Identifikasi, Seleksi dan Konsolidasi, Movev, Pelatihan Pengurus, Pelatihan dan Pendampingan UKM	590.000.000	1		pkt
		4 BLM untuk UKM melalui LKM/KSP/USP Koperasi	750.000.000	3		pkt
		5 Pengembangan Usaha Spesifik Kab. Nias Selatan	100.000.000	1		pkt
		6 Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor LKM Nisel	60.000.000	5		pkt
		7 Biaya jasa promosi potensi wilayah dan stimulan investasi	100.000.000	1		pkt
		8 Pendirian Nisel Micro Finance dan Pemb. Gedung LKM dan prasarananya				
		9 Pendirian UKM Center dan Pemb. Gedung UKM Center Kab. Nisel dan prasarananya				
		10 Bantuan Modal Kerja / Peralatan Penunjang Industri UKM			300.000.000	1 pkt
		11 Bantuan Modal Kerja / Peralatan Penunjang Industri Rumah Tangga			300.000.000	1 pkt
		12 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Produksi UKM (Toko/Ruko)			15.000.000.000	50 Klp
		13 Bantuan Modal sarana & peralatan Pendukung bagi usahawan (UKM)			600.000.000	1 pkt
		14 Identifikasi, Seleksi dan Konsolidasi, Movev, Pelatihan Pengurus, Pelatihan dan Pendampingan LKM			100.000.000	1 pkt
		15 Monitoring, Evaluasi dan Konsolidasi LKM			250.000.000	1 pkt
		16 Identifikasi, Seleksi dan Konsolidasi, Movev, Pelatihan Pengurus, Pelatihan dan Pendampingan UKM			20.000.000	1 pkt
		17 Monitoring dan Evaluasi UKM			260.000.000	1 keg
		18 Pelatihan Pengurus dan pengelola LKM			40.000.000	1 pkt
		19 Transport / BBM Petugas Penyuluh dan Pendamping Lapangan			100.000.000	1 pkt
		20 BLM untuk UKM melalui LKM/KSP/USP Koperasi			7.200.000	72 OH
		21 Pengembangan Usaha Spesifik Kab. Nias Selatan			900.000.000	3 pkt
		22 Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor LKM Nisel			100.000.000	1 pkt
		23 Pelatihan dan Pendampingan UKM			100.000.000	5 pkt
		24 Biaya jasa promosi potensi wilayah dan stimulan investasi			500.000.000	1 pkt

**Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Nias dan
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Pasca
Gempa 28 Maret 2005, Tahun 2007-2009**

(Bersumber dari Dana BRR OFF-Budget)

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KEPULAUAN NIAS 2007-2009 (DANA OFF BUDGET)
KABUPATEN NIAS**

PILAR	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007 (Sedang Berjalan)		2008/2009 (Perencanaan)
			Dalam (Rp)	Volume	Dalam (Rp)
INFRASTRUKTUR	Jalan dan Transportasi	A. Transportasi Laut dan ASDP	32.935.716.000		825.188.672.000
		A.1. ASDP 1. Pengadaan Kapal Ferry	13.739.274.000	1 unit	
	A.2. Jalan Kabupaten Nias 1. Rehab Jalan Lokal 2. Pembangunan Jembatan 3. Rehab Jembatan	6.421.797.000 1.726.758.000 11.047.887.000	27 Km 1 unit 23 unit		
	A. Energi dan Kelistrikan	24.634.638.000			
	Energi dan Telekomunikasi	A1 Energi 1. Rehabilitasi Jsringnsn distribusi listrik	1.199.241.000	2 pkt	
		A2. Telekomunikasi 1. Rehabilitasi Jaringsn distribusi listrik	71.397.000	1 unit	
	Infrastruktur dan SDA	A3 Irigasi 1. Rehab Daerah Irigasi	23.364.000.000	4.439	
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perumahan	A. Perumahan dan Permukiman	207.341.406.000		27.050.384.000
		A.1. Perumahan dan Permukiman Nias	157.887.693.000		
		1. Rekonstruksi	134.588.394.000	5.543 unit	
		2. Rehabilitasi	4.138.758.000	149 unit	
		3. Penyediaan Bahan Bangunan (kayu)	19.160.541.000	2.500 m3	
	Air Minum dan Sanitasi	B. Air Minum dan Sanitasi	49.453.713.000		
		B.1. Air Minum			
		1. Penyediaan fasilitas air bersih(utk rumah)	10.622.052.000	13.725 unit	
		2. Rehab sarana dan prasarana air bersih	10.909.089.000	6 pkt	
		B2. Sanitasi			
		1. Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK)	9.070.542.000	33 Kec	
		2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	18.852.030.000	24.830 Unit	
KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA	Kepemerintahan	A. Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan	259.672.806.000		596.555.616.500
		A.1. Pembangunan Gedung Negara	73.354.158.000		
		1. Pembangunan Gedung Pemerintahan	907.299.000	4 Unit	
		2. Rehabilitasi Gedung Publik	71.397.000	4 unit	
		B. Pembinaan Sarana dan Prasarana			
		1. Rehabilitasi Gedung Publik		1 Unit	
		C. Pembangunan Kapasitas Pemerintahan			
		1. Pelatihan	72.375.462.000	1417 org	
	Pendidikan	A. Pembangunan Fasilitas Pendidikan	95.571.985.500		
		A.1. Pembangunan dan Rehabilitasi			
		1. Pembangunan dan Rehabilitasi SMP	2.414.520.000	1 sekolah	
		2. Pembangunan dan Rehabilitasi SMU	28.366.807.500	2 sekolah	
		B. Pengadaan Meubalair			
		1. Pengadaan Meubalair	22.500.000.000	1 kab	
		D. Pengadaan Buku	18.900.000.000		
		B. Pembangunan Kapasitas Pendidikan			
		1. Beasiswa	883.872.000	212 orang	

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KEPULAUAN NIAS 2007-2009 (DANA OFF BUDGET)
KABUPATEN NIAS**

PILAR	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007 (Sedang Berjalan)		2008/2009 (Perencanaan)
			Dalam (Rp)	Volume	Dalam (Rp)
		C Pelatihan Peningkatan Kapasitas	22.506.786.000		
	Kesehatan	A Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	90.206.662.500		
		A.1. Pembangunan Rumah Sakit Kab. Nias			
		1. Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Gunungsitoli	19.800.000.000	1 unit	
		A.2. Pembangunan Puskesmas dan Pustu			
		1. Pembangunan Klinik	22.500.000.000	7 unit	
		A.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Kab. Nias			
		1. Pengadaan Alat Kedokteran	11.308.743.000	1 kab	
		2. Perbaikan Gizi Ibu, Anak dan KB	947.191.500	1 kab	
		B Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan			
		B.1. Pelatihan Kab. Nias			
		1. Program Peningkatan Kebersihan	21.874.257.000	1 kab	
		2. Program Pelatihan Kesehatan	13.776.471.000	20.325 orang	
	Kebudayaan	A Agama	540.000.000		
		A.1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama			
		1. Rehabilitasi Rumah Ibadah - Gereja	225.000.000	2 Unit	
		2. Rehabilitasi Rumah Ibadah - Mesjid	270.000.000	1 Unit	
		3. Rehabilitasi Rumah Ibadah - Vihara	45.000.000	1 Unit	
PENGEMBANGAN EKONOMI			102.289.203.000		240.906.300.000
		A Perdagangan			
		1. Pembangunan Pasar Tradisional	6.863.400.000		
		B Pertanian			
		1. Pengadaan bibit dan pupuk	12.213.873.000	1.666.740 kg	
		2. Optimalisasi pemanfaatan lahan	3.435.129.000	247 ha	
		3. Pengadaan alat pertanian	2.472.732.000	6 unit	
		C Tenaga Kerja			
		1. Pelatihan tenaga kerja	38.839.626.000	10.967 org	
		D Perikanan			
		F.1. Prasarana			
		1. Pengadaan peralatan perikanan	38.464.443.000	243 unit	
TOTAL			626.873.769.000		1.689.700.972.500

**RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KEPULAUAN NIAS 2007-2009 (DANA OFF BUDGET)
KABUPATEN NIAS SELATAN**

PILAR	PROGRAM UTAMA	SUB BIDANG/KEGIATAN	2007		2008
			Dalam (Rupiah)	Volume	Dalam (Rupiah)
INFRASTRUKTUR	Jalan dan Transportasi	A. Transportasi Laut dan ASDP	5.450.670.000		825.188.672.000
		A.1. Jalan Kabupaten Nias Selatan			
		1 Rehab Jalan Lokal	5.172.894.000	22 km	
		2 Pembangunan Jembatan	277.776.000	1 unit	
PERUMAHAN DAN	Perumahan	A. Perumahan dan Permukiman	119.697.183.000		27.050.384.000
		A.1. Perumahan dan Permukiman Nias Selatan			
		1. Rekonstruksi	76.240.863.000	789 unit	
		2. Penyediaan Bahan Bangunan (kayu)	19.160.541.000	2.500 m3	
	Air Minum dan Sanitasi	A Air Minum dan Sanitasi			
		A.1. Air Minum			
		1 Penyediaan fasilitas air bersih(utk rumah)	3.114.477.000	31 unit	
		2 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK)	21.181.302.000	6 Kec	
KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA	Kepemerintahan	A. Peningkatan Sarana-Prasarana Pemerintahan	406.324.755.246		596.555.616.500
		1. Rehabilitasi Gedung Pemerintahan	305.757.027.000	1 Unit	
		B. Pembinaan Sarana dan Prasarana			
		1. Pelatihan	72.673.470.000	1200 org	
		2. Penguatan Pemerintahan Kecamatan	231.674.598.000	2 kecamatan	
	Pendidikan	A Pembangunan Fasilitas Pendidikan	58.037.897.046		
		A.1. Pembangunan dan Rehabilitasi			
		1 Pembangunan dan Rehabilitasi SD	350.894.046	13 sekolah	
		A.2. Pengadaan Meublair			
		1 Pengadaan Meublair	22.500.000.000	1 kab	
		A.3 Pengadaan Buku	18.900.000.000		
		B Pembangunan Kapasitas Pendidikan			
		1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas	16.287.003.000	1 kab	
	Kesehatan	F. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	36.625.743.000		
		Kab. Nisel			
		1. Pengadaan Alat Kedokteran	11.308.743.000	1 kab	
		2. Program Peningkatan Kebersihan	25.317.000.000	1 kab	
	Kebudayaan	A Agama	5.904.088.200		
		I.1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama			
		1. Rehabilitasi Rumah Ibadah - Gereja	67.500.000	20 Unit	
		a. Bantuan Hibah Pasca Bencana	36.000.000	400 pakaian	
		2. Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial			
		a. Pelatihan	5.800.588.200	2.000 org	
PENGEMBANGAN EKONOMI		D. Tenaga Kerja	47.966.706.000		240.906.300.000
		1. Pelatihan tenaga kerja	11.088.063.000	94.115 org	
		2. Penyuluhan	214.200.000	1 paket	
		F. Perikanan			
		1. Pengadaan peralatan perikanan	36.664.443.000	210 unit	
TOTAL			579.439.314.246		1.689.700.972.500